



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Buku XVI
RPIW Provinsi Banten



Rencana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Banten



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.
- KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
 2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN



M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



YUDHA MEDIAWAN

Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatannya infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Yudha Mediawan



Tim Pengarah:

Yudha Mediawan
Rachman Arief Dienaputra
Melva Eryani Marpaung
Kuswardono

Tim Penyusun:

Entatarina Simanjuntak
Raymond Tirtoadi
Veranita Hadyanti Utami
Maulida Fitri
Andika Era Yulianto
Putra Galuh Firmansyah

Tim Peninjau:

Anggar Lugastama



Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung G BPIW – Penyediaan Perumahan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12110
www.bpiw.pu.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR PETA.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan dalam Kebijakan.....	2
1.3. Urgensi Penyusunan	4
1.4. Muatan RPIW	5
1.5. Manfaat RPIW.....	6
1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	6
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN.....	9
2.1. Kebijakan Penataan Ruang	9
2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.....	9
2.1.2. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali	10
2.1.3. RTRWP Banten	12
2.1.4. Perpres No. 60 Tahun 2020	14
2.2. Kebijakan Sektor	14
2.2.1. Visi Indonesia 2045.....	15
2.2.2. RPJMN Tahun 2020-2024.....	16
2.2.3. Proyek Strategis Nasional (PSN)	17
2.2.4. RIPIN Tahun 2015 - 2035.....	18
2.2.5. RIPPARNAS Tahun 2010-2025	19
2.2.6. Perpres No. 26 Tahun 2012.....	20
2.2.7. RPJMD Provinsi Banten.....	20
2.2.8. Visium PUPR 2030	22
2.2.9. Rencana Strategis Kementerian PUPR	23
2.3. Agenda Global.....	24
2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur	25
2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	25
2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur Prioritas	30
BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH	33
3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan.....	33
3.1.1. Profil Administrasi	33
3.1.2. Profil Topografi.....	35
3.1.3. Profil Geologi	35
3.1.4. Profil Klimatologi.....	38
3.1.5. Profil Hidrologi	38
3.1.6. Jasa Ekosistem.....	41
3.1.7. Tutupan Lahan	43
3.1.8. Kerawanan Bencana	43
3.2. Profil Demografi	49
3.2.1. Profil Kependudukan.....	49
3.2.2. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	52
3.2.3. Pengangguran.....	53
3.2.4. Kemiskinan.....	54
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	54
3.3. Profil Ekonomi	55
3.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	55
3.3.2. Pendapatan Per Kapita.....	57
3.3.3. Sektor Ekonomi Unggulan	58

3.3.4. Perkembangan Investasi	65
3.3.5. Kapasitas Fiskal Daerah	67
3.4. Profil Sosial Budaya	68
3.5. Profil Interaksi Kawasan	70
BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR.....	73
4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	73
4.1.1. Infrastruktur Penyediaan Air Baku	73
4.1.2. Infrastruktur Penyediaan Irigasi.....	76
4.1.3. Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	77
4.1.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas	81
4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan	82
4.2.1. Infrastruktur Jaringan Jalan	82
4.2.2. Infrastruktur Jembatan.....	83
4.2.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas	85
4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman	88
4.3.1. Infrastruktur Air Minum	88
4.3.2. Infrastruktur Sanitasi	91
4.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan	97
4.4.1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	97
4.4.2. <i>Backlog</i> Perumahan.....	97
4.4.3. Rumah Khusus.....	97
4.4.4. Rumah Susun	98
4.5. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR.....	101
4.5.1. Infrastruktur Perhubungan.....	101
4.5.2. Infrastruktur Jaringan Energi.....	101
4.5.3. Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi	101
BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	105
BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH.....	117
6.1. Proyeksi Pertumbuhan	117
6.1.1. Proyeksi Demografi	117
6.1.2. Proyeksi Ekonomi	119
6.1.3. Keberlanjutan Lingkungan	120
6.2. Visi dan Strategi	122
6.2.1. Perumusan Visi Wilayah.....	122
6.2.2. Penyusunan Strategi Fokus Industri	123
6.2.3. Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata	128
6.2.4. Penyusunan Strategi Fokus Perdesaan Tertinggal	134
6.3. Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)	139
6.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas.....	139
6.3.2. Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas	143
BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	147
7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah	147
7.1.1. Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Banten	147
7.1.2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri	157
7.1.3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata.....	164
7.1.4. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Desa Tertinggal Pandeglang - Lebak	182
7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur.....	190
7.2.1. Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas.....	191
BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.....	199
8.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Bidang PUPR.....	199
8.1.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	199
8.1.2. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	206
8.1.3. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman	213

8.1.4. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan.....	225
8.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur	226
8.2.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Fokus Industri	228
8.2.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Fokus Pariwisata	232
8.2.3. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kawasan Perdesaan Tertinggal	241
BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW.....	245
9.1. Latar Belakang	245
9.2. Tujuan	246
9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi.....	246

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Banten.....	20
Tabel 2.2 Target Renstra Kementerian PUPR.....	23
Tabel 2.3 Agenda Global.....	24
Tabel 2.4 Rumusan Arah Kebijakan di Provinsi Banten.....	27
Tabel 2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur PUPR Prioritas.....	32
Tabel 3.1 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Banten.....	43
Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Banten 2022.....	51
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Provinsi Banten.....	57
Tabel 3.4 Produksi Padi Provinsi Banten 2021.....	60
Tabel 3.5 Jarak DTW Provinsi Banten Dari Jakarta.....	65
Tabel 3.6 Cagar Budaya di Provinsi Banten.....	69
Tabel 3.7 Matriks <i>Origin-Destination</i> (OD) Provinsi Banten.....	71
Tabel 4.1 Profil Wilayah Sungai di Provinsi Banten.....	74
Tabel 4.2 Profil Bendungan di Provinsi Banten.....	75
Tabel 4.3 Profil Embung di Provinsi Banten.....	75
Tabel 4.4 Daerah Irigasi di Provinsi Banten.....	76
Tabel 4.5 Luasan LSD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	77
Tabel 4.6 Luasan LP2B per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	77
Tabel 4.7 Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Banten.....	78
Tabel 4.8 Kegiatan Penanganan Sungai di Provinsi Banten.....	78
Tabel 4.9 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air.....	81
Tabel 4.10 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	85
Tabel 4.11 Infrastruktur SPAM di Banten.....	88
Tabel 4.12 Akses Air Minum Layak dan Perpipaan di Banten.....	90
Tabel 4.13 Kinerja PDAM Provinsi Banten.....	90
Tabel 4.14 Profil TPA Provinsi Banten.....	92
Tabel 4.15 Timbulan Sampah Provinsi Banten.....	92
Tabel 4.16 Sanitasi Layak & Aman Provinsi Banten.....	93
Tabel 4.17 Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Banten.....	94
Tabel 4.18 RTLH Provinsi Banten Tahun 2021.....	97
Tabel 4.19 <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Banten.....	97
Tabel 4.20 Rumah Khusus Provinsi Banten.....	98
Tabel 4.21 Rumah Susun Provinsi Banten.....	99
Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Industri.....	107
Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Pariwisata.....	111
Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Keteringgalan Pansela.....	114
Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Banten.....	117
Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Banten.....	118
Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Provinsi Banten.....	119
Tabel 6.4 Proyeksi Tenaga Kerja Provinsi Banten.....	119
Tabel 6.5 Proyeksi PDRB Provinsi Banten.....	119
Tabel 6.6 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahun 2029.....	120
Tabel 6.7 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri.....	123
Tabel 6.8 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri.....	124
Tabel 6.9 Analisis SWOT Fokus Industri.....	125
Tabel 6.10 Skoring <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i> Fokus industri.....	126
Tabel 6.11 Skoring <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Fokus industri.....	127
Tabel 6.12 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata.....	129
Tabel 6.13 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata.....	130
Tabel 6.14 Analisis SWOT Fokus Pariwisata.....	131
Tabel 6.15 Skoring <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i> Fokus Pariwisata.....	131
Tabel 6.16 Skoring <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Fokus Pariwisata.....	132
Tabel 6.17 Analisis Pestle (Makro) Fokus Perdesaan Tertinggal.....	134
Tabel 6.18 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Perdesaan Tertinggal.....	135
Tabel 6.19 Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perdesaan.....	136
Tabel 6.20 Skoring <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i> Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perdesaan.....	137
Tabel 6.21 Skoring <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perdesaan.....	137
Tabel 6.22 Parameter Penilaian Fokus Industri.....	140
Tabel 6.23 Penilaian Kawasan Fokus Industri.....	140
Tabel 6.24 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata.....	141
Tabel 6.25 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata.....	141

Tabel 6.26 Parameter Penilaian Fokus Perdesaan Tertinggal.....	141
Tabel 6.27 Penilaian Kawasan Fokus Perdesaan Tertinggal.....	142
Tabel 6.28 Lokasi Perdesaan Tertinggal.....	142
Tabel 6.29 Daftar Kawasan Prioritas di Banten.....	143
Tabel 6.30 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Banten.....	144
Tabel 7.1 Bendungan Eksisting dan Kontruksi.....	147
Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama Banten.....	148
Tabel 7.3 Waktu Tempuh Perkotaan Banten.....	149
Tabel 7.4 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten.....	151
Tabel 7.5 Proyeksi Penyediaan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten.....	151
Tabel 7.6 Proyeksi Timbunan Air Limbah di Provinsi Banten.....	152
Tabel 7.7 Proyeksi Penyediaan Air Limbah di Provinsi Banten.....	153
Tabel 7.8 Proyeksi Timbunan Persampahan.....	154
Tabel 7.9 Proyeksi Timbunan Sampah di Provinsi Banten.....	154
Tabel 7.10 Proyeksi Jumlah KK di Provinsi Banten.....	155
Tabel 7.11 Proyeksi Kepemilikan Rumah Pribadi di Provinsi Banten.....	156
Tabel 7.12 Proyeksi Rumah Layak di Provinsi Banten.....	156
Tabel 7.13 Luas Kawasan Industri di Serang – Cilegon.....	157
Tabel 7.14 Proyeksi Okupansi KI Prioritas.....	158
Tabel 7.15 Proyeksi Kebutuhan Air Baku di KI Prioritas.....	159
Tabel 7.16 Proyeksi Bangkitan Lalu Lintas.....	159
Tabel 7.17 Proyeksi Jumlah Pekerja di KI Prioritas.....	161
Tabel 7.18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik.....	162
Tabel 7.19 Timbunan Sampah di Kecamatan KI Prioritas Provinsi Banten.....	163
Tabel 7.20 Timbunan Air Limbah di Kecamatan KI Prioritas Provinsi Banten.....	164
Tabel 7.21 Proyeksi Jumlah Penduduk KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung.....	166
Tabel 7.22 Proyeksi Jumlah Penduduk di KPPN Serang-Banten Lama.....	167
Tabel 7.23 Proyeksi Jumlah Penduduk di KPPN Lebak-Baduy.....	168
Tabel 7.24 Potensi Air Baku di KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung.....	168
Tabel 7.25 Proyeksi Bangkitan Pergerakan KSPN Ujung Kulon – Tj. Lesung.....	171
Tabel 7.26 Proyeksi Bangkitan Pergerakan di Jalan Nasional.....	172
Tabel 7.27 Proyeksi LHR dan VCR di Jalan Nasional.....	172
Tabel 7.28 Proyeksi Bangkitan Pergerakan KPPN Serang-Banten Lama.....	172
Tabel 7.29 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung.....	173
Tabel 7.30 GAP Kebutuhan Air Minum (SPAM Tj Lesung).....	174
Tabel 7.31 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama.....	175
Tabel 7.32 GAP Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama.....	176
Tabel 7.33 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Penduduk di KPPN Lebak-Baduy.....	176
Tabel 7.34 GAP Kebutuhan Air Minum KPPN Lebak-Baduy.....	177
Tabel 7.35 Proyeksi Timbunan Sampah KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung.....	177
Tabel 7.36 Kapasitas TPA di wilayah Kab. Pandeglang.....	178
Tabel 7.37 Timbunan Sampah di KPPN Serang-Banten Lama.....	178
Tabel 7.38 Timbunan Sampah di KPPN Lebak-Baduy.....	179
Tabel 7.39 Timbunan Air Limbah Domestik KSPN Ujung Kulon – Tj. Lesung.....	179
Tabel 7.40 Timbunan Air Limbah Pariwisata KSPN Ujung Kulon – Tj. Lesung.....	180
Tabel 7.41 Proyeksi Timbunan Air Limbah KPPN Serang-Banten Lama.....	181
Tabel 7.42 Proyeksi Timbunan Air Limbah Domestik KPPN Lebak-Baduy.....	181
Tabel 7.43 Jumlah Penduduk Kasawan Perdesaan Tertinggal.....	182
Tabel 7.44 Data Pertanian Kawasan Prioritas di Provinsi Banten.....	184
Tabel 7.45 Proyeksi Volume Kebutuhan Air Irigasi.....	184
Tabel 7.46 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Desa Tertinggal.....	185
Tabel 7.47 Proyeksi Air Minum Perpipaan Desa Tertinggal Pandeglang.....	186
Tabel 7.48 Proyeksi Air Minum Perpipaan Desa Tertinggal Lebak.....	186
Tabel 7.49 Proyeksi Timbunan Sampah Kawasan Perdesaan Tertinggal.....	187
Tabel 7.50 Proyeksi Air Limbah.....	188
Tabel 7.51 RTLH dan <i>Backlog</i> Kabupaten Lebak dan Pandeglang.....	189
Tabel 7.52 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kawasan Perdesaan Tertinggal.....	189
Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Banten.....	200
Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten.....	206
Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten.....	213
Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan Provinsi Banten.....	225
Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Industri.....	228
Tabel 8.6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Pariwisata.....	232
Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Perdesaan Tertinggal.....	241

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	3
Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	7
Gambar 3.1 Jasa Ekosistem Provinsi Banten.....	41
Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2012-2022	49
Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2022	50
Gambar 3.4 Piramida Penduduk Povinsi Banten	51
Gambar 3.5 Kepadatan Penduduk <i>Bruto</i> dan <i>Netto</i>	52
Gambar 3.6 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Banten 2022	53
Gambar 3.7 TPT Banten Tahun 2018-2022.....	54
Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Banten 2022	54
Gambar 3.9 Pertumbuhan PDRB per Kabupaten 10 tahun terakhir	56
Gambar 3.10 PDRB ADHK Lapangan Usaha Provinsi Banten.....	56
Gambar 3.11 Persebaran PDRB per Kapita dan Sektor Unggulan	57
Gambar 3.12 Distribusi PDRB Sektor Industri Provinsi Banten	59
Gambar 3.13 Pergerakan Komoditas Unggulan Pertanian.....	61
Gambar 3.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Provinsi Banten.....	64
Gambar 3.15 Persebaran DTW Provinsi Banten.....	65
Gambar 3.16 Perkembangan Penanaman Modal Banten 2016-2022.....	66
Gambar 3.17 Realisasi Penanaman Modal di Banten 2022.....	66
Gambar 3.18 Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Tahun 2022.....	67
Gambar 3.19 Kapasitas Fiskal Banten Tahun 2022.....	68
Gambar 3.20 Desa Adat, Peninggalan Bersejarah dan Warisan Budaya	70
Gambar 3.21 Peta Origin-Destination (OD) Provinsi Banten.....	71
Gambar 4.1 WS dan Indeks Penggunaan Air Provinsi Banten.....	75
Gambar 4.2 Infrastruktur Ketahanan Bencana Provinsi Banten.....	79
Gambar 4.3 Akses Air Minum Aman Provinsi Banten.....	91
Gambar 4.4 Timbunan Sampah Provinsi Banten.....	93
Gambar 4.5 Akses Sanitasi Aman Provinsi Banten.....	94
Gambar 6.1 Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Banten.....	118
Gambar 6.2 Kemampuan Lahan Provinsi Banten	122
Gambar 6.3 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Industri	128
Gambar 6.4 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata.....	133
Gambar 6.5 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perdesaan.....	139
Gambar 6.6 Skenario Pengembangan Wilayah Provinsi Banten	145
Gambar 7.1 Sebaran Kawasan Industri Prioritas Banten	158
Gambar 7.2 Kondisi Layanan Jalan di Kawasan Serang – Cilegon	160
Gambar 7.3 Proyeksi Penduduk dan Pekerja Industri.....	162
Gambar 7.4 Peta Sebaran DTW di KSPN Uj. Kulon Tj. Lesung	165
Gambar 7.5 Peta Sebaran DTW di KPPN Serang-Banten Lama	165
Gambar 7.6 Lokasi KPPN Lebak-Baduy	166
Gambar 7.7 Proyeksi Jumlah Wisatawan KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung.....	167
Gambar 7.8 Proyeksi Jumlah Wisatawan KPPN Serang-Banten Lama.....	168
Gambar 7.9 Akses Menuju KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung.....	169
Gambar 7.10 Akses Menuju KPPN Serang-Banten Lama.....	170
Gambar 7.11 Relevant Road Menuju KPPN Lebak-Baduy	171
Gambar 7.12 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung	174
Gambar 7.13 Proyeksi Timbunan Sampah KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung.....	178
Gambar 7.14 Proyeksi Timbunan Air Limbah KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung.....	180
Gambar 7.15 Deliniasi Wilayah Kawasan Desa Tertinggal.....	182
Gambar 7.16 Wilayah Sungai di Kawasan Desa Tertinggal.....	183
Gambar 7.17 Timbunan Sampah di Kawasan Desa Tertinggal.....	187
Gambar 7.18 Proyeksi Timbunan Air Limbah di Kawasan Desa Tertinggal.....	188

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Banten.....	29
Peta 3.1 Profil Wilayah Administrasi Provinsi Banten.....	34
Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Banten.....	37
Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Banten	40
Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Banten	42
Peta 3.5 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2011.....	46
Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2019	47
Peta 3.7 Kerawanan Bencana Provinsi Banten	48
Peta 3.8 Profil LP2B Provinsi Banten	62
Peta 4.1 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Banten.....	80
Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten.....	84
Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten	96
Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi Banten	100
Peta 4.5 Profil Infrastruktur Perhubungan Provinsi Banten	102
Peta 4.6 Profil Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi Banten	103

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah (RPIW) pada setiap wilayah perencanaan. Bab ini memuat sekurangnya penjelasan tentang latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, serta kerangka pikir penyusunan RPIW.

1.1. Latar Belakang

Provinsi Banten memiliki keunggulan geostrategis karena berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1) dan penyeberangan laut Jawa – Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, Bojonegara, dan Cigading. Hal ini berarti bahwa Provinsi Banten memiliki kekuatan dalam hal lalu lintas transportasi dan logistik laut. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kedekatan dengan WM Jabodetabek menjadikan Provinsi Banten salah satu satelit bagi pergerakan penumpang dan barang yang tentunya berdampak pada *multiplier effect* ekonomi.

Selain keunggulan komparatif konteks regional, Provinsi Banten juga memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang cukup berpengaruh secara Nasional. Provinsi Banten menyumbang 4,12% PDRB Nasional, dengan sektor unggulan industri, pertanian, dan pariwisata. Sektor industri Provinsi Banten memberikan kontribusi 7% terhadap industri nasional dan 33% terhadap PDRB Provinsi Banten. Sub sektor industri yang menjadi unggulan adalah industri pengolahan petrokimia dan smelter baja, dengan kontribusi masing-masing 78% dan 39% nasional. Terkait sektor pertanian, Provinsi Banten menempati posisi ke-9 penghasil beras dengan luas panen sebesar 318.248,46 ha. Selain itu, jumlah pengunjung wisata Provinsi Banten pada tahun 2019 mencapai 30 juta wisatawan per tahun atau sebesar 5% dari total pergerakan wisatawan nasional.

Di samping peran penting secara ekonomi, Provinsi Banten juga memiliki kekuatan dalam hal sosial budaya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak 11.904.562 jiwa (4,41% Nasional) dan diperkirakan menjadi 13.150.271 jiwa pada 2029, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata (CAGR 2010-2020) sebesar 1,1%. Tingkat migrasi masuk Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 17% dan menempati posisi ke 7 terbesar secara nasional.

Secara sosial budaya, Provinsi Banten memiliki keunikan Budaya Baduy yang sampai saat ini masih lestari dan menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda Banten yang masih

menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 ha di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Dengan keunikan ini menjadikan Provinsi Banten memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Pengembangan wilayah Provinsi Banten dihadapkan pada berbagai kendala yaitu ketergantungan ekonomi terhadap wilayah Jabodetabek yang dapat menyebabkan tarikan ekonomi lebih mengarah ke Jabodetabek daripada di dalam Provinsi Banten, disparitas wilayah yang masih tinggi di wilayah utara-selatan dikarenakan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah utara sebesar 97%. Selain itu, lokasi Provinsi Banten juga berada pada kawasan rawan letusan gunung berapi (Anak Gunung Krakatau) yang menyebabkan Provinsi Banten rentan pada bencana gempa bumi dan tsunami, serta wilayah selatan yang masih sulit untuk didorong pertumbuhan ekonomi karena keterbatasan geografis.

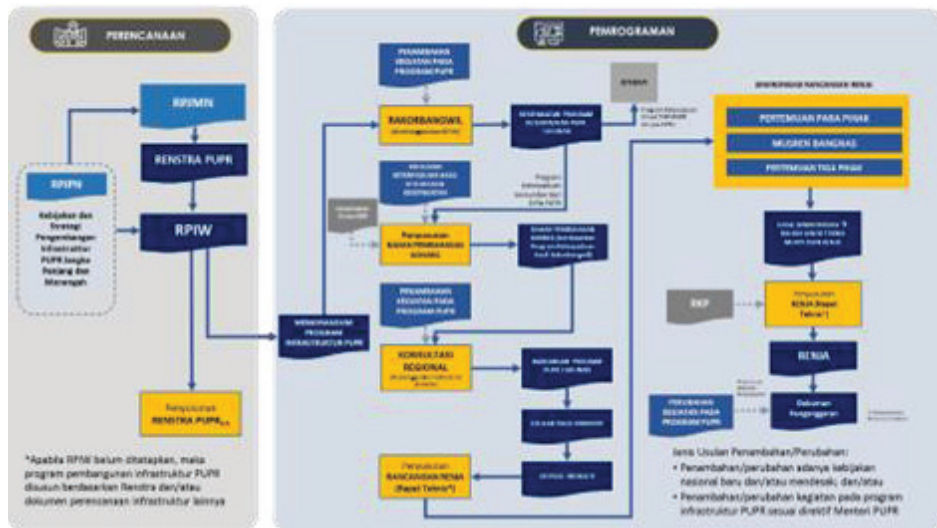
Dengan memahami kapasitas ekonomi dan sosial Provinsi Banten yang kuat, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pengembangan wilayah, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan terintegrasi yang menjadi acuan bagi *multi-stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wilayah Provinsi Banten. Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) ini dapat menjadi dokumen acuan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu di Provinsi Banten.

1.2. Kedudukan dalam Kebijakan

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dalam Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPIW diberikan tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Muatan dokumen RPIW Provinsi Banten terdiri atas Arah Kebijakan, Profil Wilayah dan Potensi Daerah, Profil dan Kinerja Infrastruktur, Permasalahan dan Isu Strategis, Skenario Pengembangan Wilayah, Analisis Kebutuhan Infrastruktur, dan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur. Dokumen RPIW telah disusun dengan melibatkan unsur dari kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Unit Organisasi di Kementerian PUPR, sehingga diharapkan dokumen RPIW akan menjadi masukan Rencana Strategis PUPR periode mendatang dan memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rakorbangwil. Dokumen ini akan dilakukan peninjauan dengan memperhatikan dinamika kebijakan dan lingkungan strategis.

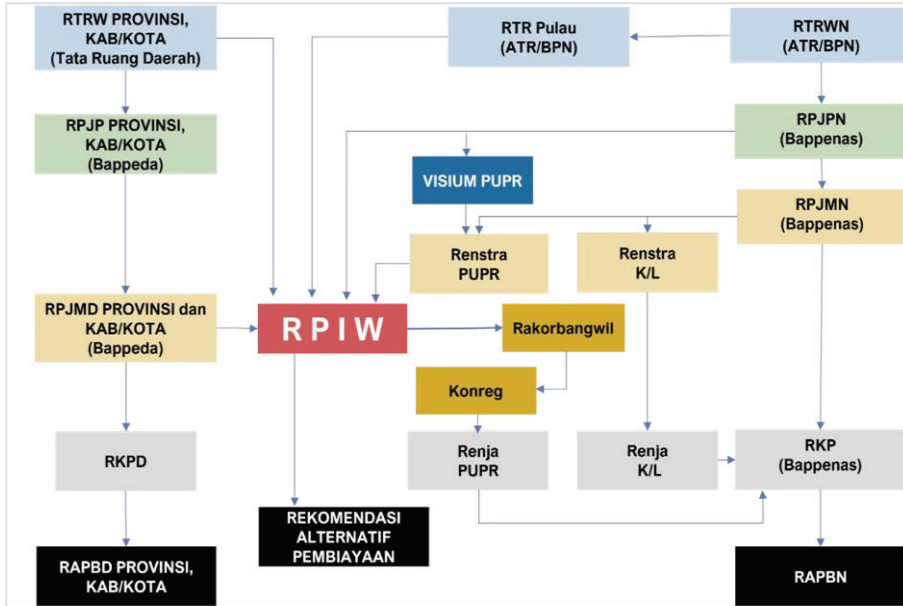
Dokumen RPIW Provinsi Banten merupakan input bagi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan acuan dalam perumusan Memorandum Program Infrastruktur PUPR yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) setiap tahunnya. Memorandum Program Rakorbangwil kemudian dibahas dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang menghasilkan rancangan program tahunan Kementerian PUPR.



Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Kerangka Rapermen PUPR

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

Dalam penyusunan RPIW Provinsi Banten Tahun 2025-2034, kebijakan dan strategi pada dokumen perencanaan nasional dan daerah menjadi acuan dasar dalam menentukan arah pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut mencakup arahan terkait aspek spasial dan sektoral baik jangka panjang maupun jangka menengah.



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

1.3. Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PUPR harus dapat mendorong dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan **pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PUPR dan lintas sektor**. Dokumen RPIW Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW Provinsi Banten juga dapat menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur di Provinsi Banten. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4. Muatan RPIW

Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah memuat 9 Bab dengan rincian sebagai berikut.

1. **Pendahuluan**, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
5. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritas);
7. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW**, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5. Manfaat RPIW

RPIW Provinsi Banten disusun dengan manfaat sebagai berikut:

1. Memadukan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien;
2. Memadukan proses perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR; dan
3. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Tahapan utama dalam penyusunan RPIW terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi.

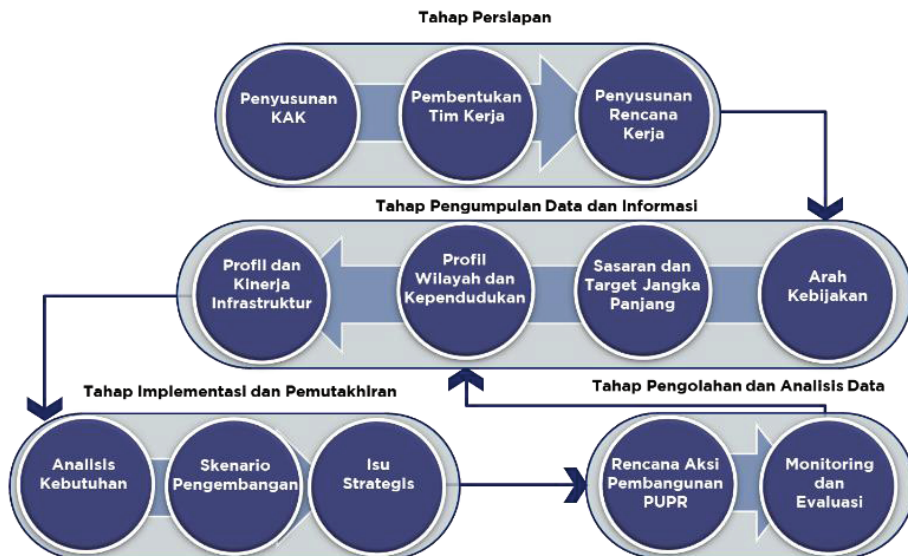
Pada tahap persiapan, dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pembentukan tim kerja, dan penyusunan rencana kerja. Tahap pengumpulan data dan informasi dimulai dengan perumusan arah kebijakan berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen kebijakan baik secara spasial dan sektoral. Perumusan arah kebijakan akan menghasilkan fokus perencanaan dan sasaran jangka panjang pengembangan wilayah Provinsi Banten. Setelah perumusan arah kebijakan, akan disusun profil wilayah dan profil infrastruktur yang sesuai dengan fokus perencanaan.

Tahapan selanjutnya, yaitu proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan arah kebijakan, kondisi eksisting wilayah, dan potensi pengembangan di masa mendatang. Berikutnya adalah penyusunan skenario pengembangan wilayah yang menghasilkan *grand strategy* masing-masing fokus perencanaan untuk menjawab isu permasalahan dan mewujudkan sasaran jangka panjang. Analisa penyusunan *grand strategy* yang digunakan adalah analisa PESTLE & 5 FORCES dan IFAS EFAS. Dalam penyusunan skenario juga dilakukan penentuan kawasan prioritas dengan metode *multi criteria analysis* (MCA) sesuai dengan fokus perencanaan yang akan diprioritaskan sampai dengan tahun 2034. Pada kawasan prioritas terpilih kemudian dilakukan perhitungan terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan strategi yang telah dihasilkan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur dan monitoring-evaluasi pelaksanaan. *Grand strategy* yang dihasilkan dari skenario pengembangan wilayah

akan diturunkan ke dalam program-program yang memuat rencana aksi yang terpadu antar sektor. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dan mendapatkan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya.

Secara sistematis, kerangka pikir penyusunan RPIW dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan diperlukan sebagai panduan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam bab ini dijelaskan arah kebijakan yang memuat sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Selain itu, arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global. Kebijakan spasial dan sektoral baik tingkat nasional maupun tingkat daerah juga menjadi acuan perumusan sintesis kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Banten. Arah kebijakan inilah yang menjadi landasan dalam perumusan skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

2.1. Kebijakan Penataan Ruang

Subbab ini berisi poin penting Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017), Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023).

2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Banten, yaitu sistem perkotaan, penguatan konektivitas dan logistik, wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional.

Terkait sistem perkotaan, dalam RTRWN ini terdapat 2 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 2 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Banten. Kedua PKN tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Wilayah yang ditetapkan sebagai PKN di Provinsi Banten, yaitu PKN Serang dan PKN Cilegon. Sementara itu, kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW adalah PKW Pandeglang dan PKW Rangkasbitung. Kedua PKW tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota.

Untuk penguatan konektivitas dan logistik, RTRWN menetapkan rencana pengembangan jaringan Jalan Bebas Hambatan (JBH) dan simpul transportasi. Terdapat 4 ruas JBH di Banten, yaitu Ruas Tangerang-Merak, Cilegon-Bojonegara, Serpong-Balaraja,

dan Ruas Tol Jabodetabek. Simpul transportasi terdiri dari pelabuhan dan bandar udara. Pelabuhan utama adalah Pelabuhan Ciwandan, dengan 3 pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Cigading, Pelabuhan Bojonegara, dan Pelabuhan Karangantu. Terkait angkutan penyeberangan, terdapat pelabuhan yaitu Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Margarigi. Simpul transportasi udara terdiri dari Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bandar udara pengumpul primer.

Terkait pengelolaan sumber daya air, terdapat 2 wilayah sungai (WS) yang ditetapkan RTRWN dimana 1 diantaranya merupakan WS Lintas Provinsi (WS Ciliwung-Cisadane) dan 1 merupakan WS Strategis Nasional (WS Cidanau-Ciujung-Cidurian). Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, RTRWN menetapkan kawasan lindung sebagai wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kawasan lindung nasional di Provinsi Banten termasuk dalam kawasan konservasi yang terdiri atas kawasan suaka alam (3 kawasan cagar alam) dan kawasan pelestarian alam (2 taman nasional, 1 taman hutan rakyat, 2 taman wisata alam). Dari 8 kawasan lindung nasional di Provinsi Banten, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Wisata Alam Laut dan Pulau Sangiang, serta Taman Nasional Gunung Halimun - Salak merupakan kawasan lindung yang paling dikenal.

RTRWN juga menetapkan 2 kawasan andalan yang memiliki nilai strategis nasional di Provinsi Banten, yaitu Kawasan Laut Krakatau dsk dan Kawasan Bojonegara-Merak-Cilegon. Selain itu, terdapat 3 Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mempunyai sudut kepentingan ekonomi (Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur) dan sudut kepentingan lingkungan hidup (Kawasan Selat Sunda dan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **arahan kebijakan RTRWN terhadap pengembangan wilayah Provinsi Banten** mencakup peningkatan akses pelayanan perkotaan dan **pengembangan kawasan strategis** berbasis **industri dan pariwisata** yang didukung oleh penguatan **konektivitas** dan **simpul transportasi** dengan tetap mempertahankan **fungsi kawasan lindung**.

2.1.2. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Banten, yaitu tujuan tata ruang Pulau Jawa-Bali yang berkaitan dengan Provinsi Banten, konektivitas dan sistem transportasi, jaringan sumber daya air, serta jaringan energi.

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Pulau Jawa-Bali menjadi: lumbung pangan utama nasional;

kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan; pemanfaatan potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara berkelanjutan; pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan; pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional; pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE); kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan; Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; dan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing.

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali juga diatur mengenai pengembangan jalur lintas Pulau Jawa, yang mana di Provinsi Banten terdapat lintas utara dan lintas selatan. Lintas utara menghubungkan **Merak** - Jakarta - Karawang - Cirebon - Brebes - Batang - Semarang - Pati - Tuban - Lamongan - Gresik - Surabaya - Probolinggo - Banyuwangi. Lintas selatan menghubungkan **Labuan-Bayah**-Pelabuhanratu - Pangandaran - Cilacap - Kebumen - Purworejo - Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Tulungagung - Blitar - Lumajang - Jember - Banyuwangi. Selain itu, ditetapkan juga jalur *feeder* utara - selatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Hal lain yang ditekankan dalam RTR Pulau Jawa-Bali adalah terkait keterpaduan antar moda darat, laut, dan udara. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api antarkota, jalur kereta api perkotaan, dan pelabuhan penyeberangan, serta menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara.

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Banten, ditetapkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai - Bojonegara - Cilegon - Anyer - Cikande (melayani PKN Cilegon dan PKN Serang) serta jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang - Cilegon - Cikampek - Bandung (melayani PKN Serang dan PKN Cilegon).

Terkait sistem jaringan sumber daya air, di Provinsi Banten diatur mengenai pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya, yaitu 2 WS dan 5 daerah irigasi (DI). Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, di Provinsi Banten ditetapkan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana di 8 kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RTR Pulau Jawa-Bali dapat disimpulkan bahwa arahan pengembangan wilayah Jawa-Bali untuk Provinsi Banten adalah sebagai pusat **pengembangan industri** berteknologi tinggi, padat modal, dan ramah lingkungan serta **kawasan pariwisata** cagar budaya dan bahari yang didukung dengan **konektivitas** ke kawasan perkotaan nasional, pelabuhan, dan bandara dengan memperhatikan **mitigasi dan adaptasi** terhadap bencana.

2.1.3. RTRWP Banten

RTRW Provinsi Banten menekankan pembangunan berbasis 3 wilayah kerja pembangunan (WKP), yaitu WKP I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan), WKP II (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon), dan WKP III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

Berdasarkan 3 WKP tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengatur pengembangan sektor unggulan, sistem transportasi darat, dan infrastruktur dasar. Terkait pengembangan sektor unggulan masing-masing WKP dapat dirinci sebagai berikut:

1. WKP I dengan sektor unggulan: industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan, permukiman atau perumahan, dan pendidikan.
2. WKP II dengan sektor unggulan: pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, kelautan, perikanan, jasa, perdagangan, dan pertambangan.
3. WKP III dengan sektor unggulan: kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri, dan perkebunan.

Terkait penyediaan transportasi dan infrastruktur dasar berbasis WKP, pemerintah provinsi mengatur jalur lalu lintas angkutan bus perkotaan, jaringan kereta api perkotaan, dan *dryport*. Sistem transportasi perkotaan tersebut kemudian dihubungkan dengan sistem transportasi regional antar moda, sehingga terdapat penguatan konektivitas yang utuh untuk Provinsi Banten. Sementara itu, penyediaan infrastruktur dasar terdiri dari tempat pemrosesan akhir (TPA) regional dan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional beserta prasarana pendukungnya.

RTRW Provinsi juga mengatur terkait kawasan lindung, yang terdiri dari badan air seluas 5.187 ha (tersebar diseluruh daerah); kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) berupa hutan lindung seluas 8.775 ha (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon); kawasan perlindungan setempat (PS) yang terdiri sempadan

pantai, sempadan sungai, dan sempadan situ, danau, embung, dan waduk seluas 17.820 ha; kawasan konservasi (KS) yang terdiri dari kawasan cagar alam, kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, kawasan taman wisata alam, dan kawasan konservasi maritim seluas 150.948 ha; kawasan pencadangan konservasi laut (KPL) seluas 16.653 ha di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang; kawasan cagar budaya (CB) seluas 5.310 ha yang berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang; dan kawasan ekosistem mangrove (EM) seluas 479 ha yang berada di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

RTRW Provinsi Banten mengarahkan pengembangan strategis Provinsi, yaitu (1) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) yang diarahkan di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan. (2) Kawasan Serang Utara Terpadu yang diarahkan di Kabupaten Serang dan Kota Serang dengan mewujudkan kawasan strategis Serang Utara sebagai pusat kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antar bagian kawasan yang berkelanjutan. (3) Kawasan Pantai Selatan Terpadu yang diarahkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan. (4) Kawasan Koridor Pantai Barat Banten yang meliputi wilayah barat di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang dengan mewujudkan optimasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir barat Banten berbasis mitigasi bencana.

Selain itu terdapat pengembangan kawasan strategis yang berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, yaitu (1) Kawasan Banten Lama yang diarahkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan bertujuan mewujudkan kawasan strategis Provinsi Kawasan Banten Lama dan penyangga adat Baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan (2) Kawasan Peyangga Adat Baduy yang diarahkan di Kabupaten Lebak yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan peyangga adat baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa RTRW Provinsi Banten mengarahkan **pembangunan ekonomi berbasis 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP)** dengan sektor unggulan **industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan perikanan.**

2.1.4. Perpres No. 60 Tahun 2020

Wilayah dalam Provinsi Banten yang masuk ke dalam Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur adalah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan. Arahkan terkait Provinsi Banten dalam RTR KSN WM Jabodetabekpunjur yaitu:

1. Aerocity Tangerang, radius 30 km dari bandara, peruntukan *mixed use*, dan didukung dengan CBD, simpul transportasi terintegrasi dengan moda transportasi umum dengan bandara sebagai *growth center aerotropolis* (112 juta/tahun);
2. Pusat Industri, kawasan peruntukan industri diarahkan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang;
3. Pengendalian Banjir, pengendalian banjir Sungai Ciliwung – Cisadane beserta anak sungainya yang melewati wilayah kabupaten/ kota di Jabodetabekpunjur;
4. Pengembangan Pengaman Pantai, pengendalian banjir dan rob di pesisir utara Kabupaten Tangerang melalui Pembangunan Terintegrasi Pengaman Pantai Ibu Kota Negara (PTPIN); dan
5. *Central Business District* (CBD):
 - a. CBD Bintaro, Tangsel;
 - b. CBD Serpong;
 - c. CBD Depok;
 - d. CBD Citra Raya, Kabupaten Tangerang; dan CBD Ciledug, Tangerang

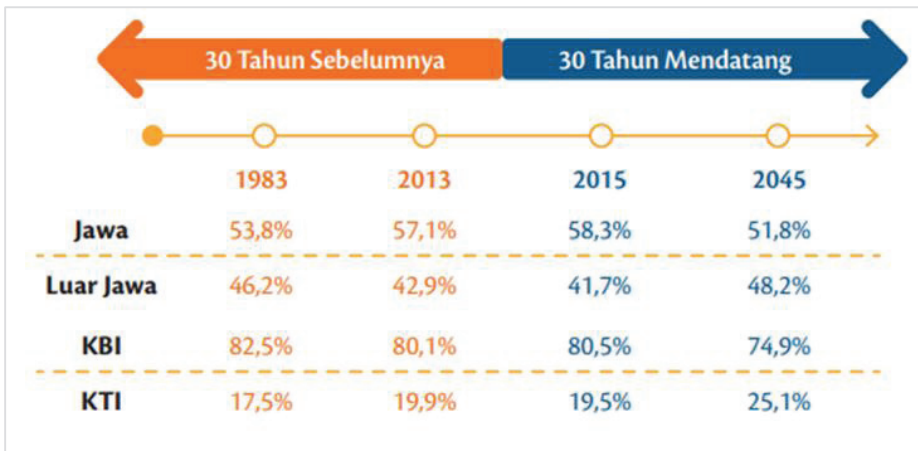
2.2. Kebijakan Sektor

Kebijakan sektor yang dibahas dalam paragraf di bawah ini adalah terkait Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Proyek Strategis Nasional, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023 – 2026, Visium PUPR 2030 dan Rencana Strategis Kementerian PUPR.

2.2.1. Visi Indonesia 2045

Terdapat 4 pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Infrastruktur menjadi salah satu *prime mover* pencapaian 4 pilar tersebut. Dukungan infrastruktur untuk Pilar 1 berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; untuk Pilar 2 berupa penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan *ease of doing business/investment*; untuk Pilar 3 berupa penyediaan infrastruktur dalam upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), serta Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa; dan untuk Pilar 4 berupa reformasi birokrasi pada seluruh instansi (kementerian/lembaga pemerintah).

Terkait Pilar 3, disparitas Wilayah Jawa dan Luar Jawa menurun dari 7,6% pada tahun 1983 menjadi 3,6% pada tahun 2045. Demikian juga dengan disparitas antara KBI dan KTI akan menurun dari 65% pada tahun 1983 menjadi 49,8% pada tahun 2045, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 *Timeline* Pemerataan Pembangunan Daerah

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Arahan Visi Indonesia 2045 adalah **pengembangan infrastruktur** mendukung **pendidikan, pertumbuhan ekonomi** berkelanjutan dan **kemudahan investasi**, serta **pengurangan disparitas** Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.

2.2.2. RPJMN Tahun 2020-2024

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Banten, yaitu koridor pertumbuhan dan pemerataan, target pembangunan, arahan pengembangan wilayah, serta *major project*.

Dalam RPJMN 2020-2024 pembangunan wilayah Jawa-Bali termasuk Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Target pembangunan Provinsi Banten pada 2024 adalah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,60%, pengurangan tingkat kemiskinan rata-rata 4,00% dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,70%.

Dalam pembangunan wilayah di Pulau Jawa-Bali diperlukan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. RPJMN 2020-2024 menetapkan koridor pertumbuhan Banten di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, sedangkan koridor pemerataan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah selatan di Kabupaten Pandeglang.

Selain menentukan lokasi prioritas, pembangunan wilayah Jawa-Bali termasuk Provinsi Banten juga mencakup kegiatan-kegiatan prioritas yaitu pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal.

Proyek prioritas pengembangan sektor unggulan di Provinsi Banten, yaitu pengembangan komoditas unggulan berupa kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya. Selain sektor unggulan, juga terdapat proyek prioritas yang diperuntukan untuk mengembangkan kawasan strategis di Provinsi Banten, yaitu pengembangan industri kreatif dan jasa di KEK Tanjung Lesung, serta pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda darat yang terintegrasi yaitu pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, jalan lintas Pansela, jalur ganda KA Rangkasbitung-Merak, dan reaktivasi KA Rangkasbitung-Labuan/Bayah. Proyek prioritas pengembangan kawasan perkotaan melalui pembangunan Kota Baru Maja, serta pengembangan Kota Cilegon dan Kota Serang. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Jakarta (Jabodetabekpunjur). Proyek prioritas pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal di Provinsi Banten (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang), yaitu pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang berintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama di KPPN Pandeglang, penanganan *stunting* 4 Kabupaten di Provinsi Banten, pemberian bantuan sosial dan subsidi

tepat sasaran melalui program keluarga harapan, kartu sembako murah, dan kartu Indonesai sehat dengan target kemiskinan tahun 2024 mencapai 3,6% di Provinsi Banten, dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

Major project disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Terdapat 7 *Major Project* di Provinsi Banten, yaitu: pemenuhan infrastruktur dasar permukiman berupa akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90% rumah tangga) di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Baru Maja, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, pemenuhan akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah) di Kota Baru Maja (Kabupaten Lebak), Kota Tangerang, Jabodetabekpunjur, dan KEK Tanjung Lesung, pemulihan pasca bencana kawasan pesisir Selat Sunda, pemulihan 4 (empat) daerah aliran sungai kritis di DAS Cisadane, penanganan pesisir 5 (lima) perkotaan Pantura Jawa di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, serta pembangunan Kota Baru Maja.

Selain proyek prioritas strategis (*Major Project*), terdapat juga program prioritas (PP)/ kegiatan prioritas (KP)/ proyek prioritas (PROP)/ proyek yang mendukung proyek prioritas strategis di Provinsi Banten yaitu penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat, rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat, jalan akses KEK Tanjung Lesung, dan peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara (kebencanaan).

Pembangunan wilayah di Jawa berdasarkan **RPJMN** memiliki prioritas pembangunan berdasar koridor, yaitu pengembangan **koridor pertumbuhan di utara Jawa** dan **koridor pemerataan di tengah-selatan Jawa**. Selain wilayah prioritas, juga ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas, berupa pengembangan sektor unggulan **pertanian**, pengembangan kawasan strategis ekonomi (**industri dan pariwisata**), serta pengembangan **kawasan perkotaan dan perdesaan**, dengan memperhatikan **mitigasi bencana** terutama di wilayah Pantura. Selain itu, RPJMN juga mengamanatkan penanganan **kawasan perdesaan tertinggal**.

2.2.3. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang

memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Sejak tahun 2016 daftar PSN mengalami beberapa perubahan berdasarkan penetapan berbagai Perpres. Berdasarkan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang PSN, terdapat 7 PSN yang direncanakan dibangun di Provinsi Banten dengan 5 proyek sudah/sedang dibangun yaitu Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Serpong-Cinere, Kawasan Industri Wilmar Serang, dan Bendungan Karian.

Berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, terdapat 3 PSN yang masih berjalan di Provinsi Banten, yaitu (1) Jalan Tol Serang-Panimbang, (2) Jalan Tol Serpong-Cinere, dan (3) Jalan Tol Serpong-Balaraja.

Berdasarkan uraian **PSN**, pembangunan di Provinsi Banten berfokus pada **percepatan pertumbuhan dan pemerataan** pembangunan di Provinsi Banten melalui **pembangunan infrastruktur** jalan bebas hambatan, transportasi massal perkotaan, kawasan industri, air minum perkotaan, dan pengaman pantai untuk mendukung **aktivitas ekonomi dan perkotaan**.

2.2.4. RIPIN Tahun 2015 – 2035

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 disusun dengan tujuan untuk mendorong industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI) salah satunya adalah WPI Jawa termasuk di dalamnya Provinsi Banten. WPI sendiri terdiri atas beberapa Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI di Banten adalah Cilegon – Serang – Tangerang. WPPI Provinsi Banten dikembangkan dengan target pertumbuhan sektor industri hingga 2 (dua) digit guna mencapai kontribusi industri hingga 30% pada tahun 2035. Industri di Provinsi Banten diarahkan melalui pengembangan Industri Petrokimia, Industri Smelter dan Baja, Industri Alas Kaki, Industri Elektronik dan Telematika, serta Industri Tekstil.

Di dalam WPPI tersebut, terdapat 13 kawasan industri yang tersebar yaitu Modern Cikande Industrial Estate, Kawasan Pergudangan dan

Industri Kosambi Permai, Kawasan Industri Nikomas Gemilang, Kawasan Industri SBS, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Millenium Industrial Estate, Kawasan Industri Pasar Kemis, Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas, Griya Idola Industrial Park, Kawasan Industri Sumber Rezeki, Krakatau Industrial Estate Cilegon, Kawasan Industri Pancapuri, dan Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD.

Program pengembangan untuk mendukung WPPI Periode 2020-2035 adalah (1) pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara), (2) pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI, (3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, (4) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi, (5) penguatan kerjasama antar WPPI, (6) promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI, (7) pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa, dan (8) penguatan konektivitas antar WPPI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri di Provinsi Banten terkonsentrasi di wilayah utara dan berfokus pada **industri logam, kimia, hulu agro, tekstil dan sepatu, serta industri makanan berbasis teknologi** dengan dukungan **infrastruktur yang ramah lingkungan** dan manajemen industri yang handal.

2.2.5. RIPPARNAS Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010-2025 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2025.

Prinsip dalam pembangunan kepariwisataan nasional adalah (1) pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, (2) orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, (3) tata kelola yang baik, (4) secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, serta (5) mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Sementara itu, fokus pengembangan manajemen kepariwisataan adalah pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat satu atau lebih Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Beberapa KPPN ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Terdapat 1 DPN, 4 KPPN, dan 2 KSPN di Provinsi Banten sebagaimana dituliskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Banten

DPN	KSPN/KPPN
Krakatau-Ujungkulon dsk	KPPN Carita dsk.
	KPPN Ujung Kulon dsk.
	KPPN Serang-Banten Lama dsk.
	KPPN Lebak-Badui dsk.
	KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung dsk.
	KSPN Krakatau dsk.

Sumber: RIPPARNAS, 2010

Berdasarkan uraian RIPPARNAS di atas, pemantapan sektor pariwisata Provinsi Banten ditekankan pada aspek **kepariwisataan berkelanjutan** serta **peningkatan ekonomi masyarakat** melalui penguatan aspek **manajemen industri kepariwisataan**.

2.2.6. Perpres No. 26 Tahun 2012

KEK Tanjung Lesung telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diajukan oleh P.T. Banten West Java Tourism Development Corporation sebagai badan usaha pengusul dan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung seluas 1.500 ha terletak dalam wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. KEK Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata pertama dan telah diresmikan beroperasi pada Februari 2015. KEK Tanjung Lesung memiliki potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna serta kekayaan budaya yang eksotis.

2.2.7. RPJMD Provinsi Banten

Visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2017 - 2022 adalah **"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: (1) mewujudkan masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat, dan cerdas (2) mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan (3) mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan (4) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, berdasarkan kebijakan

2 (dua) kebijakan tersebut tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Banten adalah ***Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.***

Terdapat beberapa prioritas unggulan dalam RPJMD Provinsi Banten, yaitu membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Tujuan dari program prioritas unggulan membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur adalah guna meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang, dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah yang memiliki beberapa strategi, diantaranya:

- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan;
- Meningkatkan kualitas infrastruktur jembatan;
- Meningkatkan kualitas perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman;
- Meningkatkan sistem tata air terpadu;
- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;
- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengendali banjir;
- Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan tampungan dan penyediaan air baku;
- Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan irigasi; dan
- Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

Selain itu tujuan dari program prioritas unggulan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah guna meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan yang memiliki beberapa strategi, diantaranya:

- Meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan promosi potensi investasi;
- Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan sektor industri;
- Memperluas pangsa ekspor dan luar daerah;

- Meningkatkan daya saing produk berbasis keunggulan lokal;
- Meningkatkan produksi, nilai tambah daya saing produk kelautan dan perikanan;
- Meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan ketersediaan pangan, mengoptimalkan sumberdaya pangan, cadangan pangan dan distribusi pangan serta kestabilan harga pangan;
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, air tanah, mineral, dan batubara;
- Mengurangi jumlah desa tertinggal;
- Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup;
- Meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindung; dan
- Meningkatkan konservasi daerah aliran sungai.

Berdasarkan uraian di atas, RPJMD Tahun 2017-2022 menekankan pada **penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**, peningkatan **ketahanan pangan**, **pengembangan industri**, **pengembangan pariwisata**, peningkatan **daya saing daerah**, dan **pemerataan kawasan tertinggal**.

2.2.8. Visium PUPR 2030

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu: bendungan multifungsi dengan kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun; kemantapan jalan mencapai 99% dengan integrasi antar moda, memanfaatkan sebanyak banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*; serta 100% *smart living* (hunian cerdas) yang didukung infrastruktur dasar yang memadai. Secara detail sasaran visium tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENYEDIAAN PERUMAHAN
RENSTRA PUPR 2015 - 2019	Kapasitas Tampung 50 m³/c/th (baseline 2014) Anggaran Rp.316 T	Jalan Mantap 98% Jalan Tol 1000 Km Jalan Baru 2650 Km Jembatan Baru/ FO 29.859 M Anggaran Rp.278 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 4,47 juta unit Anggaran Rp.186 T
GAP 2017 - 2019	Kapasitas Tampung 57,75 m³/c/th Anggaran Rp.306 T	Jalan Mantap 94% Jalan Tol 824 Km Jalan Baru 1.320 Km Jembatan Baru/FO 39.000 M Anggaran Rp.183 T Investasi Rp.202 T	78% Air Minum 27.000 ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp.45 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 2,75 juta unit Anggaran Rp.414 T 10% APBN/APBD 90% Masyarakat
VISIUM 2020 - 2024	Kapasitas Tampung 68,11 m³/c/th Anggaran Rp.577 T	Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 M Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T	88% Air Minum 17.000 ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5 jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat
VISIUM 2030	Kapasitas Tampung 120 m³/c/th Anggaran Rp.1.423 T	Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 M Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.390 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T	3 jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat

Gambar 2.2 Visium PUPR 2030

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **Visium PUPR 2030** memfokuskan pada penyediaan **infrastruktur tampungan air**, peningkatan **kemantapan jalan**, pembangunan **jalan dan jembatan** baru, penyediaan **air minum**, pengurangan **kawasan kumuh**, penyediaan **infrastruktur sanitasi**, dan **penyediaan perumahan**.

2.2.9. Rencana Strategis Kementerian PUPR

Target pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Target infrastruktur SDA meliputi penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan mencakup pembangunan jalan tol, jalan baru (termasuk FO/UD) dan jembatan. Sedangkan infrastruktur cipta karya mencakup penyediaan air minum, sanitasi, penanganan kumuh dan pengolahan sampah, serta sarana pendidikan dan olahraga. Untuk perumahan mencakup pembangunan rusus, rusun, rumah swadaya dan PSU.

Tabel 2.2 Target Renstra Kementerian PUPR

No.	Sektor	Target Capaian
1.	Sumber Daya Air	- Peningkatan Kapasitas tampung infrastruktur SDA 58,5 m³/kapita/tahun; - Pembangunan 61 bendungan; - Pembangunan 500 embung; - Pembangunan 500.000 ha Daerah Irigasi; - Rehabilitasi 2 juta Daerah Irigasi; - Penyediaan 50 m³/dt air baku; dan - Pembangunan 2.100 km pengendali banjir dan pengaman pantai

No.	Sektor	Target Capaian
2.	Bina Marga	- Pembangunan 2.500 km jalan tol; - Pembangunan 3.000 km jalan baru; - Pembangunan 38.328 m jembatan; dan - Pembangunan 31.053 m <i>fly over/underpass</i>
3.	Cipta Karya	- Penyediaan 100% air minum layak; - Penyediaan 30% air minum perpipaan; - Penyediaan 90 % sanitasi layak; - Penyediaan 15 % sanitasi aman; - Penanganan 10.000 ha permukiman kumuh; - Penyediaan 100% hunian dengan akses pengelolaan sampah; dan - Pembangunan 5.555 unit Sarana Pendidikan dan Olahraga.
4.	Perumahan	- Pembangunan 51.340 rumah susun; - Pembangunan 10.000 rumah khusus; - Dukungan bantuan 813.660 rumah swadaya; dan - Pembangunan 262.345 prasarana dan sarana umum.

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 mengarahkan peningkatan **ketahanan air**, kelancaran dan pemerataan **konektivitas**, pemenuhan kebutuhan **perumahan** dan infrastruktur **permukiman**.

2.3. Agenda Global

Agenda global berisi tentang poin penting arahan kebijakan internasional yang mendukung pengembangan wilayah Provinsi Banten. Adapun agenda global yang diacu meliputi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *New Urban Agenda* (NUA), *Paris Agreement*, dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030.

Tabel 2.3 Agenda Global

No	Kebijakan Global	Arahan
1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dengan diterbitkannya Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
2	<i>New Urban Agenda</i> (NUA)	NUA menjawab Tujuan 11 SDGs dengan menyusun poin-poin tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan. NUA mengakui adanya keragaman budaya dan dampak negatif perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Indonesia New Urban Agenda dirumuskan sebagai respon dari NUA untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Agenda perkotaan yang dibahas adalah: Kependudukan, Pertanian dan Perencanaan Kota, Lingkungan dan Urbanisasi, Tata

No	Kebijakan Global	Arahan
		Kelola Pemerintah dan Legislatif, Ekonomi Perkotaan, Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar
3	<i>Paris Agreement</i>	Berisi kesepakatan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pasca Tahun 2020. Paris Agreement merupakan pengganti kesepakatan Protocol Kyoto. Poin penting kebijakan adalah menetapkan batas aman kenaikan suhu bumi dibawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5 °C di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia: menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario bisnis seperti biasa pada Tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4	<i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	Hasil yang diharapkan: Sampai dengan 15 tahun terdapat pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana. Tujuan: 1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko 2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan 3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan Target: 1. Mengurangi kematian rata-rata per-100K 2. Mengurangi orang terdampak rata-rata per-100K 3. Mengurangi kerugian ekonomi/ GDP 4. Mengurangi kerusakan infrastruktur kunci 5. Meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB 6. Meningkatkan kerjasama internasional 7. Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS Tindakan Prioritas: 1. Memahami risiko bencana 2. Penguatan tata Kelola risiko 3. Investasi PRB untuk resiliensi 4. Meningkatkan manajemen risiko

Sumber: BPS, diolah BPIW (2023)

Berdasarkan **arahan kebijakan secara global**, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah harus memperhatikan **kesejahteraan penduduk** dan **pembangunan berkelanjutan** dengan tetap memperhatikan **pelestarian lingkungan** dan aspek **kebencanaan**.

2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur memuat arah kebijakan pengembangan wilayah dan arah kebijakan pemanfaatan infrastruktur.

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arah kebijakan di atas, dirumuskan fokus dan lokus kebijakan penataan ruang, kebijakan sektor, dan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, serta agenda global.

Kebijakan penataan ruang berfokus pada pengembangan kawasan industri, pariwisata, kawasan perkotaan, pertanian, perdagangan dan jasa, dan ketahanan bencana. Kebijakan sektor berfokus pada

pengembangan industri, pariwisata dan ketahanan bencana. Agenda global berfokus pada pengembangan pariwisata dan konservasi.

Setelah dilakukan iterasi terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan **tiga konteks perencanaan dan kawasan prioritas. Ketiga konteks perencanaan tersebut, meliputi industri, pariwisata, dan layanan dasar untuk pemerataan kawasan selatan Banten.**

Masing-masing fokus utama tersebut mempunyai kawasan prioritas yang diperoleh melalui sintes kebijakan. Wilayah dengan fokus industri cenderung berada di Jalur Pantura. Fokus pariwisata terdapat di 2 kawasan wisata, yaitu KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung, KPPN Lebak-Baduy dsk, dan KPPN Serang-Banten Lama. Sedangkan fokus layanan dasar berada di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang memiliki total 15 desa sangat tertinggal yang terdiri dari 4 (empat) di Kabupaten Pandeglang dan 11 (sebelas) di Kabupaten Lebak. Secara spasial masing-masing arahan kebijakan dituangkan dalam Peta Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan konteks perencanaan masing-masing kawasan prioritas.

Rangkuman sintesis arah kebijakan secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

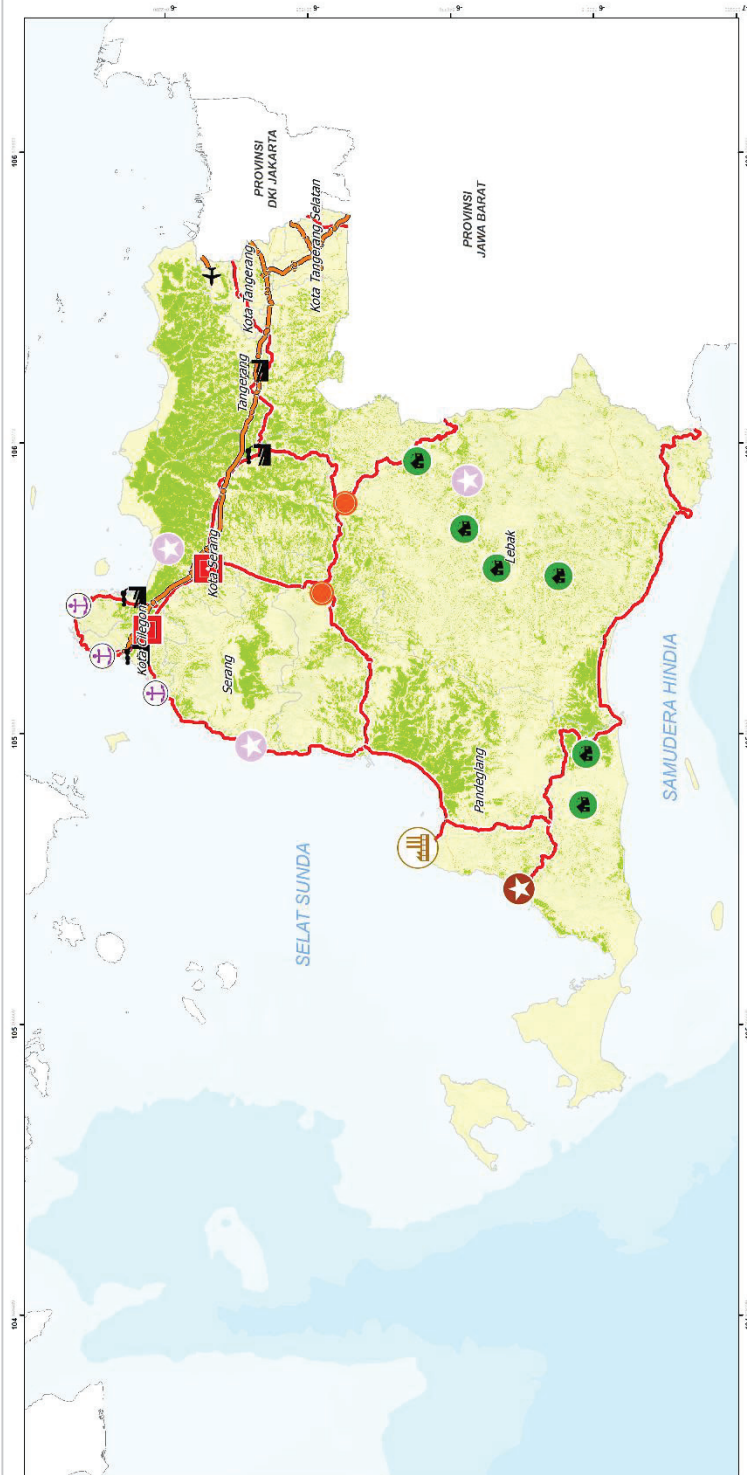
Tabel 2.4 Rumusan Arahan Kebijakan di Provinsi Banten

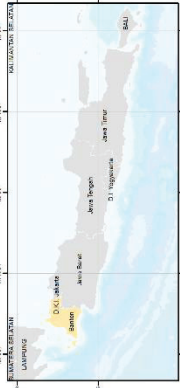
Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
Kebijakan Penataan Ruang	RTRW Nasional PP 13/2017	Banten: Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan strategis berbasis industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan konektivitas dan simpul transportasi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung	• Industri • Pariwisata • Jasa dan Perdagangan • Perkebunan • Pertanian • Ketahanan Bencana	Industri: - KI Cilegon - KI Wilmar - KI Cikande - KI Chandra Asri - KI Pancapuri - KI Nikomas Gemilang - KI Taman Tekno BSD - KI Sumber Rezeki - KI Griya Idola Park - KI Purat Kencana Alam - KI Cikupamas - KI Pasar Kemis - KI Sumber Bina Sukses - Millenium Industrial Estate
	RTR Jawa-Bali Perpres 28/2012	Jawa-Bali: Pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan sebagai lumbung pangan utama nasional, kawasan perkotaan, industri/ perdagangan, dan pariwisata yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh konektivitas lintas utara-tengah-selatan, sistem jaringan energi, dan sumber daya air dengan memperhatikan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.		
	RTRW Provinsi Banten Perda 5/2017	Banten: Pembangunan 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, jasa, perdagangan, pertanian, dan perkebunan.		
Kebijakan sektor	Visi Indonesia 2045	Indonesia: Pemerataan Pembangunan Indonesia (konektivitas, prasarana dasar, kebencanaan, dan sektor unggulan)	• Industri • Infrastruktur • Pelayanan Dasar	Pariwisata: - KEK Tanjung Lesung - KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung - KSPN Krakatau dsk - KPPN Carita dsk - KPPN Ujung Kulon dsk - KPPN Serang – Banten Lama - KPPN Lebak – Baduy
	RJMN 2020-2024 Perpres 18/2020	Banten: Pengembangan koridor pertumbuhan di wilayah utara Jawa dan koridor pemerataan di tengah-selatan Jawa; Penanganan kawasan perdesaan tertinggal; Pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian yang didukung dengan konektivitas yang memadai; Pemantapan layanan dasar di kawasan perkotaan, dengan memperhatikan mitigasi bencana terutama di wilayah Pantura	• Pariwisata • Ketahanan Bencana • Penanganan ketimpangan	
	Proyek Strategis Nasional Permenko Perencanaan 9/2022	Banten: Pembangunan jalan tol, bendungan, sarana & prasarana air baku, tanggul pantai utara, SPAM regional, MRT, dan KI Wilmar Serang	• Pensela	
	RIPIN 2015-2035 PP 14/2015	Banten: Pengembangan WPPI Cilegon-Serang-Tangerang		Kawasan Perdesaan Tertinggal Pensela: - Kab. Pandeglang * Desa Cikurih * Desa Sudimanik * Desa Curug
	RIPPARNAS 2010-2025 PP 50/2011	Banten: Pemantapan kawasan pariwisata (2 KSPN dan 4 KPPN) sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional.		

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas
Agenda Global	Visium PUPR 2030	Indonesia: Penyediaan infrastruktur tampungan air, peningkatan konektivitas, pemenuhan air minum, pengurangan kawasan kumuh, penanganan sanitasi, penurunan <i>backlog</i> dan penyediaan rumah swadaya	• Pariwisata • Konservasi Lingkungan • Ketahanan Bencana	* Desa Sukamulya - Kab. Lebak * Desa Cikaret * Desa Cikadongdong * Desa Margaluyu * Desa Pasirbitung * Desa Cikate * Desa Ciladaeun * Desa Parakanbeusi * Desa Mekar Rahayu * Desa Ciapus * Desa Keboncau * Desa Kanekes
	Renstra PUPR 2020-2024	Indonesia: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses air, kelancaran dan pemerataan konektivitas, pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman.		
	PP 26/2012	KEK TJ Lesung: Pengembangan KEK TJ Lesung sebagai pariwisata yang berdaya saing nasional maupun internasional dengan potensi pariwisata yang beragam.		
	RTR Jabodetabekpunjur Perpres60/2020	Jabodetabek: Mewujudkan Kawasan Perkotaan Tangerang, Kawasan Perkotaan Balaraja, Kawasan Perkotaan Tigaraksa, dan kawasan Perkotaan Ciputat sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan		
	SDGs	Indonesia: Peningkatan kesejahteraan penduduk		
	New Urban Agenda	Indonesia: Optimalisasi pembangunan berkelanjutan terkait <i>Climate Change</i>		
	Paris Agreement	Indonesia: Penurunan tingkat emisi gas buang		
	Sendai Framework	Banten: Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana		

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah RPIW, 2023

Dari hasil sintesa kebijakan, terdapat 3 fokus utama pengembangan wilayah di Banten, yaitu industri, pariwisata, dan kawasan tertinggal Pansela. Masing-masing fokus utama tersebut mempunyai kawasan prioritas yang juga merupakan hasil sintesa kebijakan, yaitu fokus industri berada di Pantura Banten, fokus pariwisata di KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung, KPPN Serang – Banten Lama, dan KPPN Lebak – Baduy, serta fokus penanganan kawasan tertinggal Pansela fokus pada kawasan perdesaan sangat tertinggal di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak. Secara spasial masing-masing arahan kebijakan dituangkan dalam Peta Arah Kebijakan Banten sesuai dengan konteks perencanaan masing-masing kawasan prioritas.



 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR WILAYAH II	PETA KERAWANAN BENCANA PROVINSI BANTEN	
	 Proyeksi : Transverse Mercator Zone 48 S Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Datum Horizontal : WGS 84	SKALA 1:500,000 
KETERANGAN		
 PKN	 PKW	Lokus Sektor Industri
 LP2B	 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	 Kawasan Industri (KI)
Jaringan Transportasi		
 Jalan Nasional	 Jalan Tol	Lokus Sektor Pariwisata
 Jalan Nasional	 Bandara	 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
 Pelabuhan	 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional	 Kawasan Desa Tertinggal
INSET PETA 		
Sumber Data: 1. IGT PUPR, 2021 2. Badan Informasi Geospasial		

Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Banten

2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (*Food Estate*), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- **Menurunnya kualitas infrastruktur.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- **Menyebabkan ketimpangan pembangunan.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- **Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan

tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- **Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- **Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- **Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan

dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur PUPR Prioritas

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Provinsi	Kab/ Kota	Dasar Hukum
1.	Sumber Daya Air	Bendungan Sindangheula	Banten	Kabupaten Serang	Major Project
2.	Jalan dan Jembatan	Jalan Pansela Provinsi Banten (Ruas Simpang Labuhan - Batas Provinsi Jawa Barat)	Banten	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	-
3.	Sumber Daya Air	Bendungan Karian	Banten	Kabupaten Lebak	Major Project & PSN
4.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Serang - Panimbang	Banten	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang	PSN
5.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Banten	Kabupaten Tangerang	PSN
6.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Serpong - Cinere	Banten, Jawa Barat	Kota Tangerang Selatan	PSN
7.	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Banten	Kota Tangerang Selatan	PSN

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah BPIW, 2023

BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab ini berisikan kondisi eksisting dan potensi wilayah yang akan digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis, yang terdiri dari profil fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan.

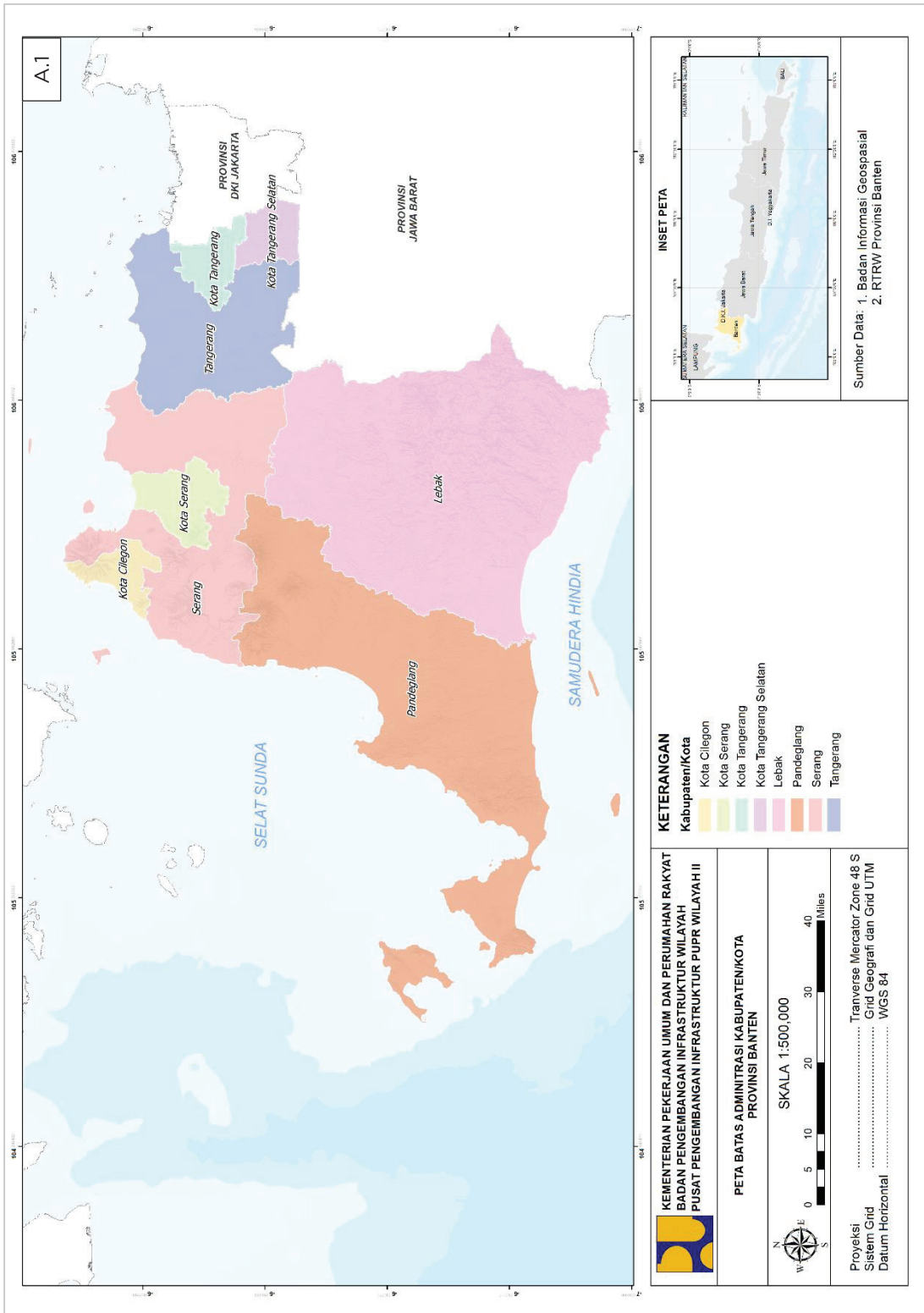
3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan

Kondisi alam Provinsi Banten terkenal dengan keindahannya terutama di wilayah barat dan selatan, namun di balik itu juga memiliki potensi bencana alam. Untuk itu, profil fisik dan kebencanaan di Provinsi Banten penting untuk diketahui sebagai pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur. Profil fisik dan kebencanaan menjelaskan tentang kondisi administrasi, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, jasa ekosistem, sebaran tutupan lahan, dan kerawanan bencana seperti: gunung berapi, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, banjir, longsor, dan kekeringan.

3.1.1. Profil Administrasi

Provinsi Banten merupakan salah satu dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Secara geografis Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 9.662,92 km² (7,14% luas P. Jawa). Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan; Selat Sunda di sebelah barat; Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur, dan; Laut Jawa di sebelah utara.

Provinsi Banten merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang terdiri dari 4 kabupaten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang) dan 4 kota (Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan), 155 kecamatan, 1.238 desa dan 313 kelurahan. Wilayah terluas adalah Kabupaten Lebak (3.426,56 km²) yang terdiri dari 28 kecamatan, sementara itu, Kota Tangerang Selatan menjadi wilayah dengan luas terkecil (164,8 km²) dengan 7 kecamatan. Secara lengkap profil administrasi Provinsi Banten dapat dilihat pada Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten di bawah ini.



Peta 3.1 Profil Wilayah Administrasi Provinsi Banten

3.1.2. Profil Topografi

Provinsi Banten memiliki tingkat ketinggian beraneka ragam, yaitu dataran rendah di wilayah utara serta dataran tinggi di wilayah tengah. Secara topografi wilayah daratan Banten dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu:

1. Ketinggian 0-200 mdpl terdapat di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang;
2. Ketinggian 200-500 mdpl terdapat di sebagian kecil Kabupaten Pandeglang dan daerah Lebak Tengah;
3. Ketinggian 500-2.000 mdpl terdapat di daerah Lebak Timur yang ditunjang oleh adanya puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Secara umum, morfologi wilayah Provinsi Banten dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ialah morfologi dataran rendah yang pada umumnya dapat ditemukan di daerah bagian utara dan bagian selatan. Wilayah dataran dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian kurang dari 50 mdpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang memiliki ketinggian 0-1 mdpl.

Selanjutnya kelompok kedua ialah morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang yang sebagian besar dapat ditemukan di daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian minimum 50 mdpl. Di Provinsi Banten bagian utara, tepatnya di Kota Cilegon, dapat ditemukan wilayah puncak Gunung Gede dengan ketinggian maksimum 553 mdpl, sedangkan pada wilayah di Kabupaten Serang daerah perbukitan dapat ditemukan di wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung. Wilayah perbukitan juga dapat ditemukan di Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Lebak lebih tepatnya di wilayah timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi.

Kelompok terakhir merupakan morfologi Perbukitan Terjal yang dapat ditemukan di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

3.1.3. Profil Geologi

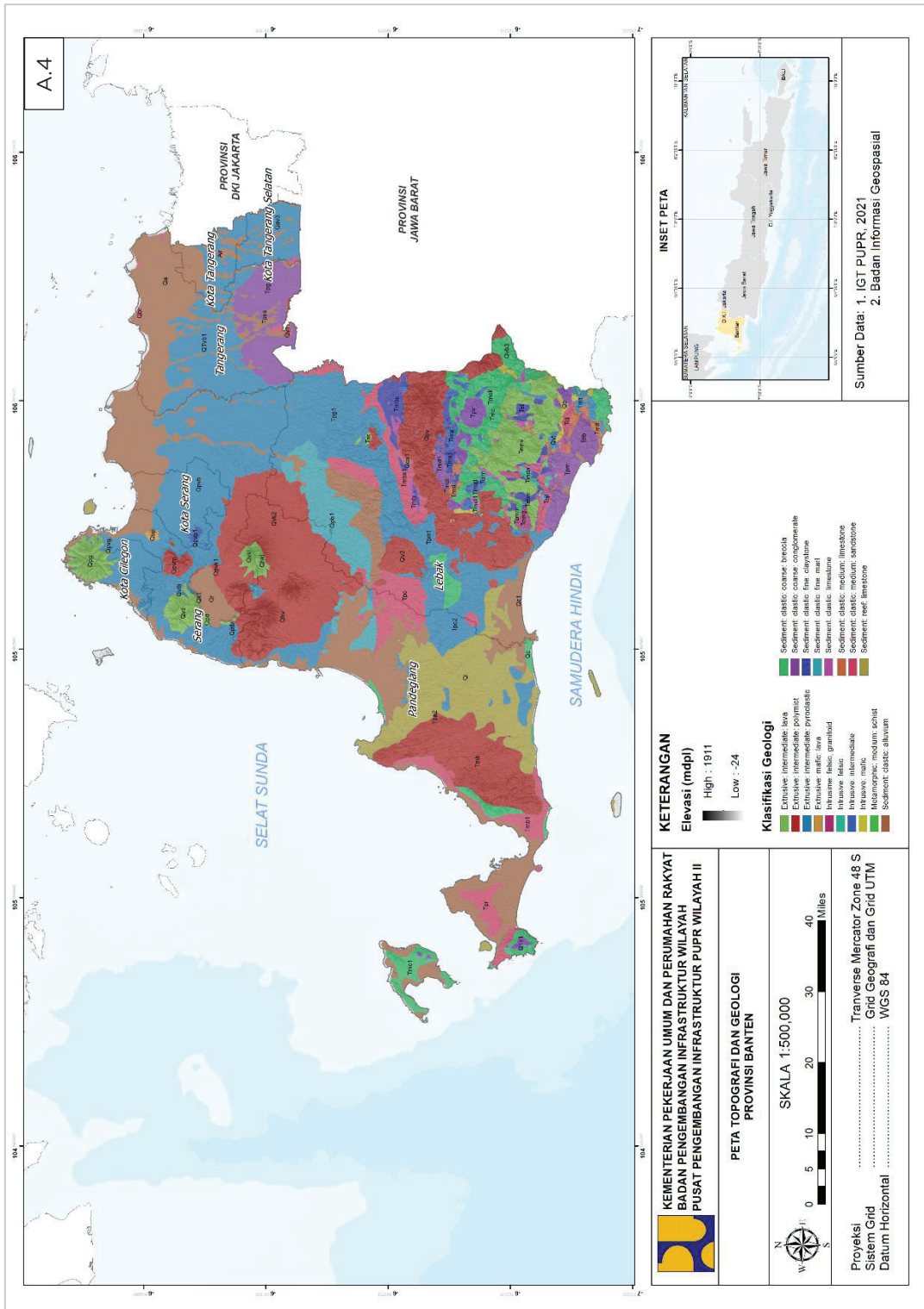
Struktur geologi Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan perkiraan tebal lebih dari 3.500 m, di mana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 m. Secara umum Provinsi Banten terbagi menjadi 12 (dua belas) formasi batuan, yaitu formasi

bojongmanik, cipacar, bojong, bayah, cicaruruep, cijengkol, citarate, cimapang, sareweh, badui, cimancuri, dan cikotok.

Jenis tanah yang ada di wilayah Banten meliputi aluvial pantai dan sungai, latosol, podsolik merah kuning, regosol, andosol, brown forest, dan glei yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Kondisi geologi regional Banten merupakan bagian dari jalur magmatik berumur Tersier-Kuarter yang membentang dari ujung utara P. Sumatera sampai Nusa Tenggara yang dikenal sebagai Busur Magmatik Sunda-Banda (Sunda-Banda Magmatic Arc – Hamilton, 1976). Di daerah Banten busur ini membentuk kubah, pematang dan kerucut gunungapi yang aktif. Terdapat 3 (tiga) gunung berapi di Banten, 1 gunung berstatus aktif yaitu Gunung Anak Krakatau (Selat Sunda), dan 2 gunung non-aktif yaitu Gunung Karang (Kab. Pandeglang) dan Gunung Pulosari (Kab. Pandeglang). Gunung berapi di Banten rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus, terutama Gunung Anak Krakatau.

Kondisi geologi seperti tersebut menghasilkan potensi sumber daya mineral dan geowisata yang cukup melimpah. Daerah berbatuan gunung api tua yang diterobos oleh batuan intrusif yang lebih muda, merupakan tempat kedudukan mineralisasi logam mulia dan logam dasar emas dan timbal. Sedangkan daerah berbatuan gunung api lebih muda merupakan daerah prospek untuk bahan galian industri seperti batu pasir kuarsa, batu gunung, bentonit, zeolit, lempung, toseki dan tras juga bahan galian lain.



Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Banten

3.1.4. Profil Klimatologi

Dari sisi iklim, wilayah Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh Gelombang La Nina atau El Nino serta Angin Monson (Monson Trade). Seperti sebagian besar wilayah Indonesia, Banten memiliki iklim tropis dengan dua musim (musim hujan dan kemarau). Pada saat musim penghujan (November - Maret) cuaca di Banten umumnya didominasi oleh angin Barat (berhembus dari Sumatera, Samudera Hindia sebelah selatan India) yang juga bergabung dengan angin dari Asia yakni melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan pada Bulan Agustus, umumnya cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan kekeringan yang keras (terlebih lagi apabila sedang berlangsung El Nino) terutama di wilayah bagian pantai utara Banten.

Dari segi temperatur, di daerah pantai dan perbukitan memiliki suhu antara 22° C-32° C, sedangkan suhu di daerah pegunungan (ketinggian antara 400-1.350 mdpl) mencapai antara 18° C-29° C.

Rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 2.483,22 mm dengan hari hujan sebanyak 160 hari. Pada musim penghujan (Bulan September-Mei), curah hujan tertinggi sebesar 2.712-3.670 mm yang mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat. Sedangkan pada bulan yang sama tercatat bahwa curah 335- 453 mm mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Sedangkan pada musim kemarau (Bulan April-Desember), curah hujan tertinggi sebesar 615-833 mm mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Sementara curah hujan terendah pada musim kemarau tercatat sebesar 360-486 mm pada Bulan Juni-September dengan luas cakupan sebesar 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

3.1.5. Profil Hidrologi

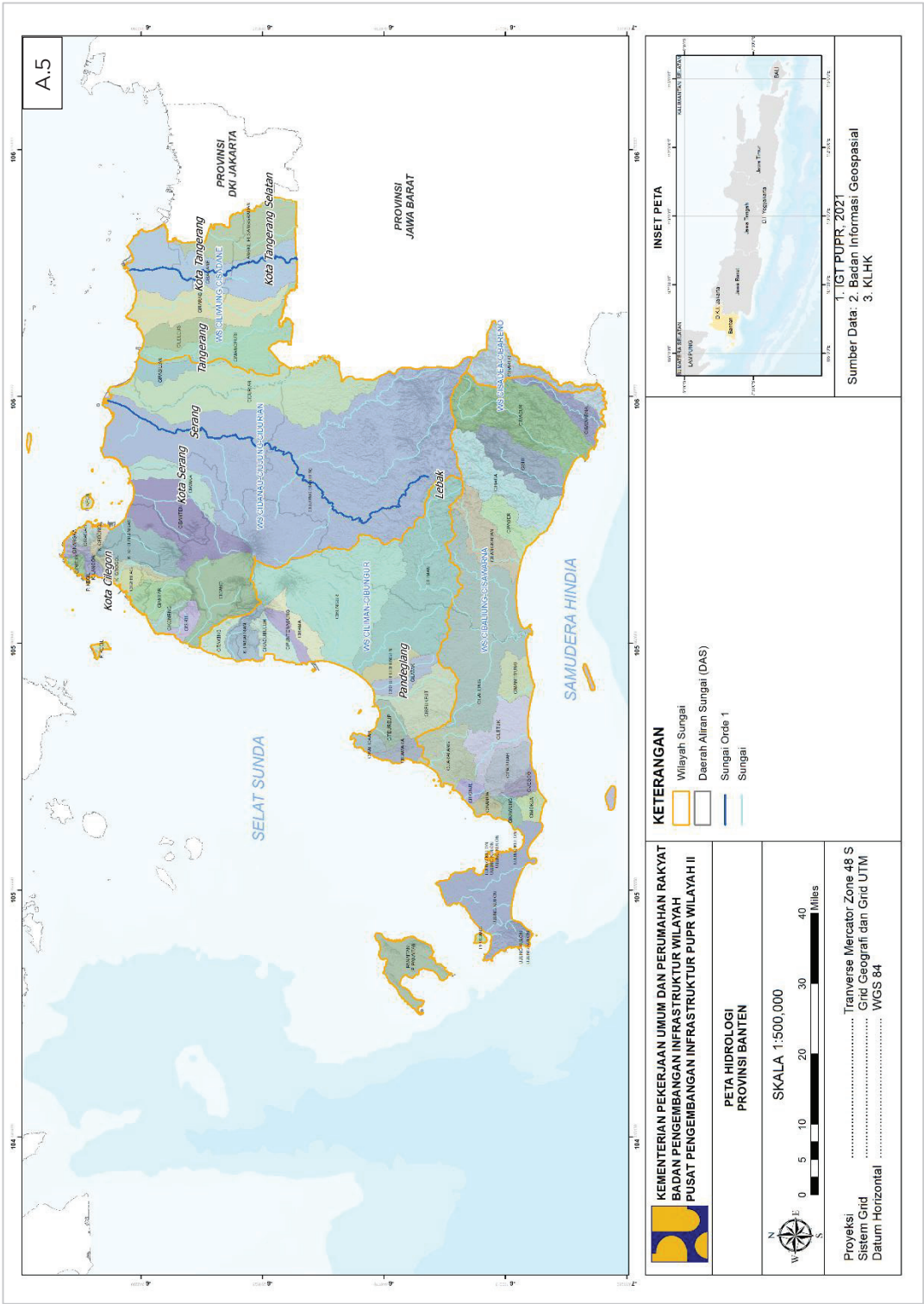
Terdapat 5 wilayah sungai (WS) di Provinsi Banten (2 WS kewenangan nasional dan 3 WS kewenangan daerah) yang menjadi sumber air baku untuk kegiatan pertanian, permukiman, dan industri. Keberadaan sungai besar dan anak-anak sungai pada WS yang tersebar di wilayah utara dan selatan dapat memberikan sumber air baku yang memadai untuk kegiatan pertanian, industri dan permukiman, dimana diperlukan pengelolaan secara lebih optimal untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. Selain WS, Provinsi Banten juga memiliki 6 DAS yaitu: DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya); DAS Cibaliung-Cibareno,

meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak; DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang; DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang; DAS Teluklada, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, dan; DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Provinsi Banten memiliki potensi air permukaan sebesar 10,3 miliar m³/tahun dengan penggunaan air sudah mencapai 8,1 miliar m³/tahun. Sebesar 301 ribu ha wilayah Banten atau 31,81% wilayah sudah terlampaui penggunaan airnya. Sumber air permukaan di Banten diperoleh dari 154 sungai, 27 danau, 47 mata air, 28 situ, 6 embung, dan 4 bendungan. Selain itu, Banten juga memiliki panjang pantai sebesar 499,62 km yang berhadapan dengan Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia.

Wilayah sungai tersebut memberikan sumber air baku untuk mendukung Banten sebagai lumbung pangan nasional dan perkembangan kawasan permukiman dan industri. Meskipun memiliki banyak potensi air baku dari wilayah sungai, belum terkelolanya air baku dengan baik mengakibatkan wilayah utara masih mengalami defisit air baku.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air, khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas propinsi, meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta. Secara keseluruhan profil hidrologi Provinsi Banten dapat dilihat pada peta di bawah ini.

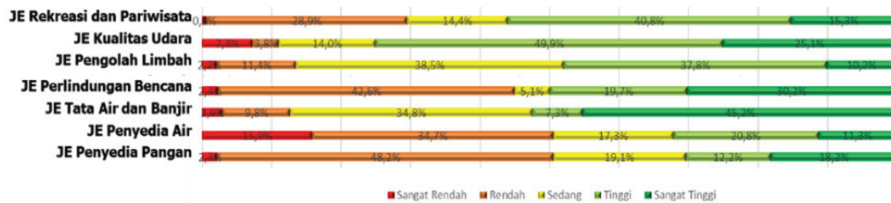


Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Banten

3.1.6. Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem (JE) menjadi dasar dalam menentukan batasan pengembangan, terutama untuk mendukung penyediaan sumber daya secara berkelanjutan, yang terdiri atas:

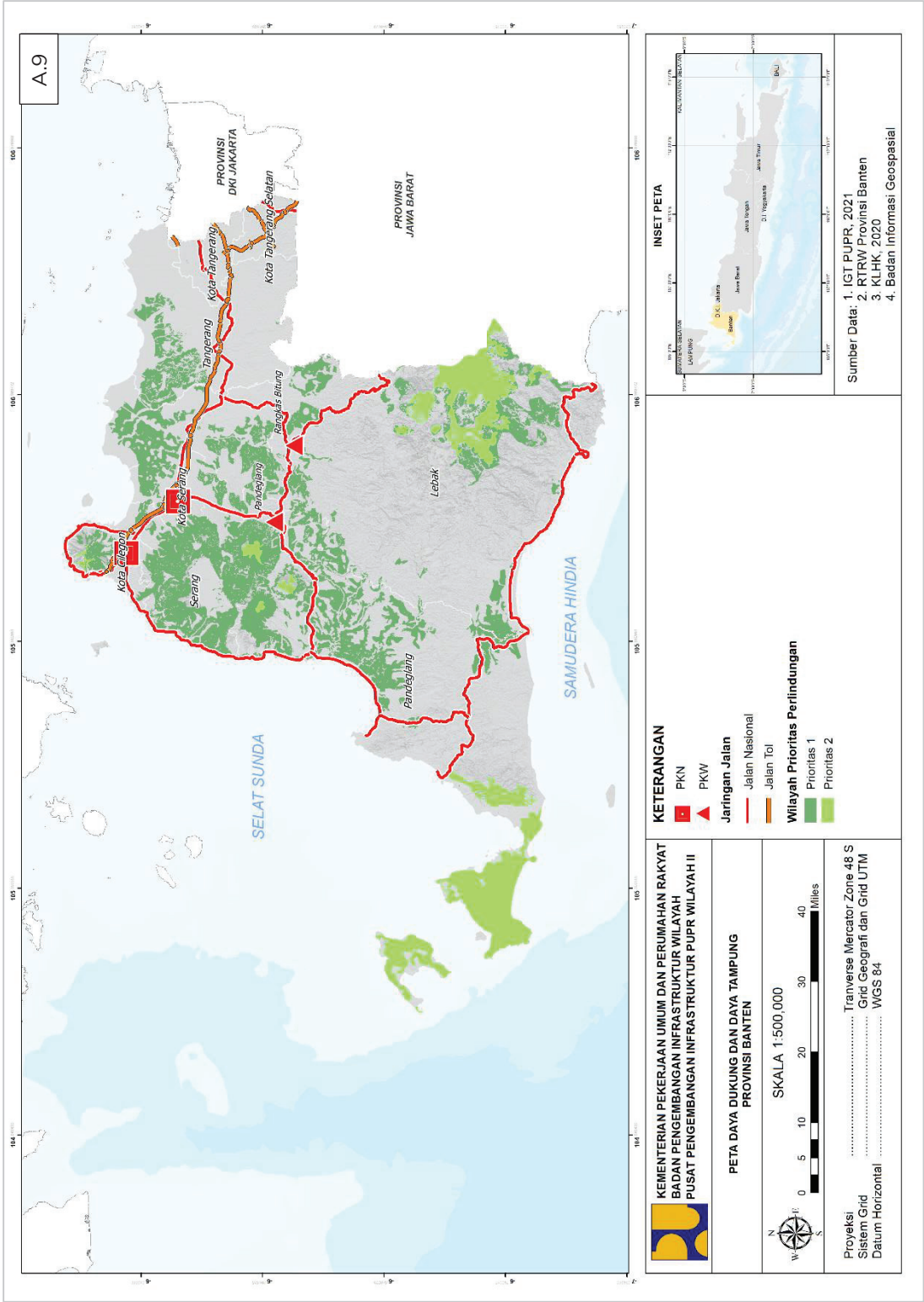
1. JE Penyedia, terdiri dari penyediaan pangan, air, energi, serat, dan genetik;
2. JE Pengaturan, terdiri dari pengaturan iklim, tata air dan banjir, bencana alam, pemurnian air, penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan, dan pengendalian hama;
3. JE Budaya, terdiri dari tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekowisata, serta estetika; dan
4. JE Pendukung, terdiri dari pembentuk lapisan tanah dan kesuburan, siklus hara, produksi primer, serta perlindungan plasma nutfah.



Gambar 3.1 Jasa Ekosistem Provinsi Banten

Sumber: KLHK diolah BPIW, 2023

Kondisi lingkungan Banten masih memungkinkan untuk memberikan dukungan sumber daya bagi pengembangan kegiatan industri dan pariwisata. Hal itu ditunjukkan dengan wilayah dengan JE penyedia air tinggi sebesar 32% dari luas wilayah, JE pengolah limbah tinggi sebesar 48%, JE kualitas udara tinggi sebesar 75%, JE rekreasi dan pariwisata tinggi sebesar 56,1%, serta JE penyedia pangan tinggi sebesar 30,4%. Salah satu kendala dalam pengembangan Banten adalah bencana. Kondisi lingkungan sendiri masih memungkinkan untuk mengurangi resiko bencana secara alami dengan keberadaan wilayah dengan JE perlindungan bencana yang cukup tinggi sebesar 50% dan JE tata air dan banjir sebesar 52%. Luasan wilayah dengan JE tinggi dalam mengendalikan bencana harus dipertahankan terutama di wilayah dengan kepadatan dan mobilitas tinggi. Wilayah dengan daya dukung sangat tinggi dan tinggi ditetapkan menjadi Wilayah Prioritas Perlindungan (WPP) untuk mempertahankan daya dukung lahan dalam menampung segala aktivitas ekonomi dan sosial yang terus berkembang, serta menjaga keseimbangan ekosistem baik untuk ketahanan bencana, penyedia pangan, maupun kawasan budi daya.



Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Banten

Daya dukung lahan untuk kawasan permukiman dihitung berdasarkan kemampuan lahan menampung kehidupan menggunakan metode MCA. Lahan yang memiliki daya tampung tinggi sebagai kawasan perkotaan adalah 11% dari total wilayah atau sebesar 4.205 km².

Luas WPP 1 dengan JE sangat tinggi sebesar 724 km² dan WPP 2 dengan JE tinggi 1.458 km² atau 22% dari total luasan yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Banten. WPP tersebar di seluruh Banten, dengan wilayah terbesar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang.

3.1.7. Tutupan Lahan

Tutupan lahan Banten didominasi oleh lahan pertanian (46,4% atau 448.974 ha) yang sebagian besar berupa pertanian lahan kering campur seluas 225.527 ha dan sawah seluas 223.447 ha. Sebaran lahan pertanian mayoritas di utara dan tengah Banten (Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak).

Tutupan lahan pada tahun 2019 hampir sama dengan tahun 2011, namun terjadi peningkatan luasan yang signifikan pada perkebunan (peningkatan 313%) dan permukiman (peningkatan 32% dari 69.636 ha menjadi 91.968 ha).

Tabel 3.1 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Banten

Penggunaan Lahan	2011	2019
Hutan Lahan Kering Primer	7.493	7.358
Hutan Lahan Kering Sekunder	64.066	96.632
Hutan Mangrove Sekunder	2.517	2.492
Hutan Tanaman	81.083	70.781
Perkebunan	38.166	157.760
Permukiman	69.636	91.968
Pertanian Lahan Kering	90.256	56.860
Pertanian Lahan Kering Campur	282.923	225.527
Sawah	255.429	223.447
Belukar	21.527	16.370
Tambak	14.957	14.292
Tanah Terbuka	13.356	3.313
Total	941.409	966.800

Sumber: KLHK diolah BPIW, 2023

3.1.8. Kerawanan Bencana

Provinsi Banten merupakan provinsi dengan kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hal ini berkaitan dengan posisinya yang berada di dekat patahan Indo-Australia dan sesar aktif, serta memiliki gunung berapi aktif. Selain itu, terdapat 8 sungai besar yang berpotensi mengakibatkan tingginya intensitas banjir di wilayah dataran rendah.

Selain tingkat kerawanan tinggi, Banten juga menjadi wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Banten pada tahun 2022 sebesar 144,51 (tertinggi di Pulau Jawa).

Kabupaten/ kota dengan IRBI tertinggi adalah Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, dan Kota Serang.

a. Rawan Bencana Gunung Berapi

Di Banten terdapat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda merupakan gunung yang sangat aktif yang terakhir erupsi pada tahun 2022. Sedangkan Gunung Karang dan Gunung Pulosari di Kab. Pandeglang berstatus istirahat dan terakhir erupsi 600 tahun yang lalu.

Keberadaan gunung berapi aktif membuat kawasan di sekitarnya menjadi rawan terhadap bencana, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung yang rawan terhadap bahaya primer (lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun) dan bahaya sekunder (aliran lahar hujan, banjir bandang, dan longsoran material vulkanik). Pada Gunung Anak Krakatau, kawasan rawan bencana berada di pesisir barat Banten yang berhadapan langsung, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon.

b. Rawan Gempa Bumi dan Tsunami

Kawasan rawan gempa bumi tinggi di Banten meliputi wilayah barat dan selatan yang relatif lebih dekat dengan Patahan Indo-Australia. Patahan tersebut termasuk aktif dan sering menimbulkan gempa yang merusak. Luasan bahaya gempa bumi di Provinsi Banten sebesar 767.356 ha yang dapat timbul tingkat kerentanan bahaya gempa bumi dengan kategori sedang-tinggi di Provinsi Banten. Dua Kabupaten yang memiliki tingkat gempa bumi tinggi berada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan rata-rata luasan gempa bumi di dua Kabupaten tersebut sebesar 261.234 ha dan 269.447 ha. Selain itu, terdapat sebaran sesar aktif yang berada di sekitar Banten, yaitu sesar Cimandiri di perbatasan Provinsi Jawa Barat serta sesar Sumatera yang berada di Samudra Hindia dekat dengan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Adanya patahan dan sesar di Samudra Hindia juga menyebabkan rawan terjadinya tsunami terutama di kawasan pesisir barat dan selatan Provinsi Banten yang memiliki tingkat kerawanan bencana tsunami dengan tingkat sedang - tinggi. Pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Bencana alam tsunami tersebut menyebabkan sekitar 400 rumah di Kabupaten Pandeglang yang terletak di pesisir pantai roboh atau rusak berat akibat tsunami. Selain itu, 9 hotel di Kabupaten Pandeglang juga mengalami rusak berat serta jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang terputus.

c. Rawan Gerakan Tanah dan Longsor

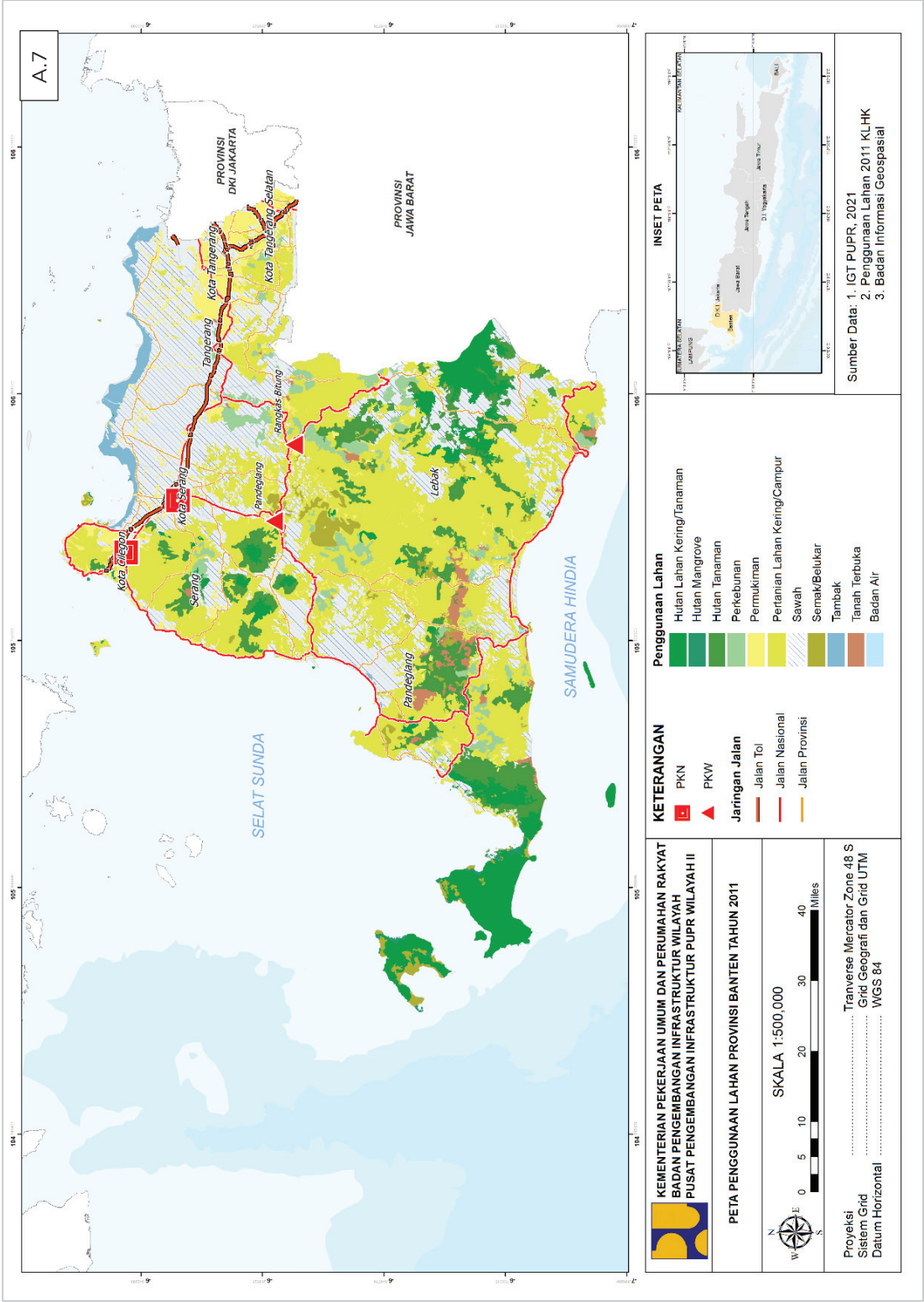
Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan bencana longsor yang diakibatkan oleh gerakan tanah. Wilayah utara Provinsi Banten memiliki kontur landai, sehingga tingkat risiko gerakan tanah sangat rendah. Sedangkan, pada wilayah barat dan selatan memiliki kontur berbukit dan kelerengan yang curam, sehingga menyebabkan tingginya risiko gerakan tanah dan dapat memicu terjadinya longsor. Selain itu, wilayah timur dan barat Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan longsor mulai menengah hingga tinggi.

d. Rawan Bencana Banjir

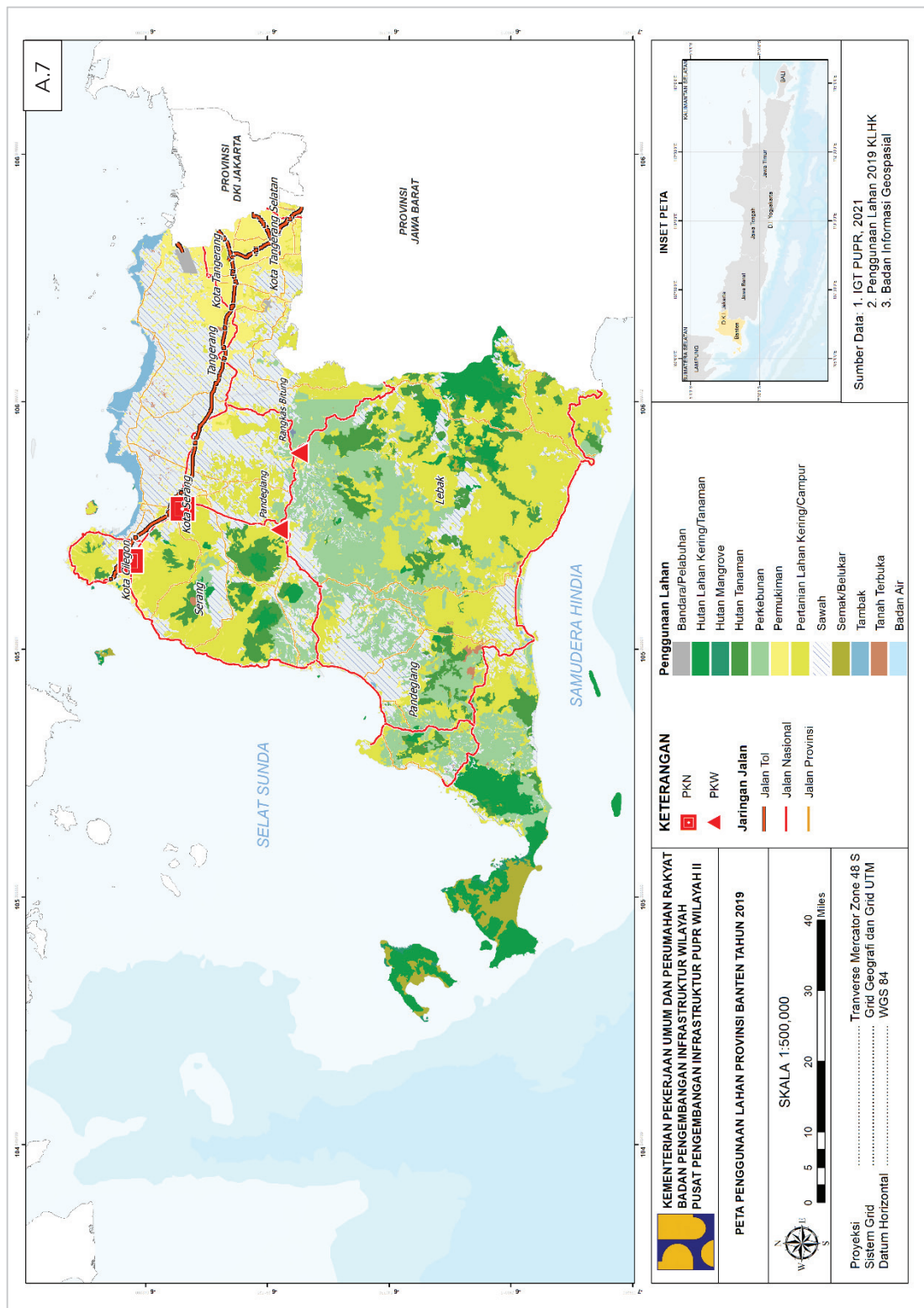
Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi khususnya di wilayah utara terutama di hulu Sungai Cisadane, Sungai Ciujung, Sungai Cidanau, dan Sungai Cidurian. Terdapat 249 ribu hektar wilayah Provinsi Banten yang memiliki risiko banjir yaitu di wilayah utara Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan wilayah Barat Kabupaten Pandeglang. Tingginya kepadatan penduduk pada sepanjang DAS sungai mengakibatkan tinggi penduduk terdampak risiko banjir sebesar 5,7 juta orang.

e. Rawan Kekeringan

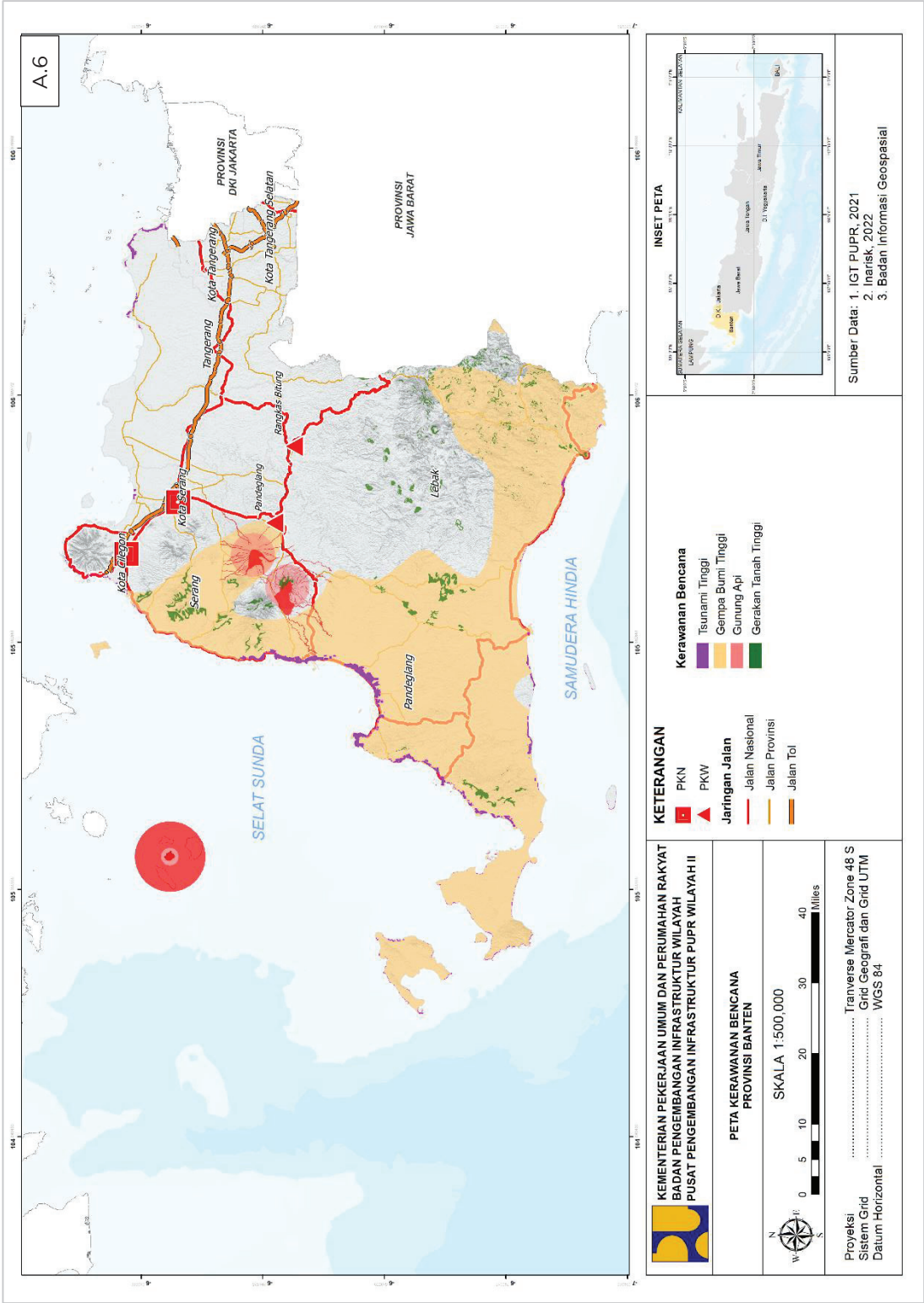
Kawasan rawan kekeringan diindikasikan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau. Di Banten kawasan rawan kekeringan meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Pada tahun 2018 terjadi kekeringan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Terdapat 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang memiliki potensi terdampak adanya rawan bencana alam kekeringan yang berada di Kecamatan Angsana satu desa, Kecamatan Sindangresmi satu desa, Kecamatan Picung satu desa, Kecamatan Bojong satu desa, Kecamatan Patia empat desa, Kecamatan Sukaresmi satu desa, dan Kecamatan Panimbang dua desa.



Peta 3.5 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2011



Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi Banten Tahun 2019



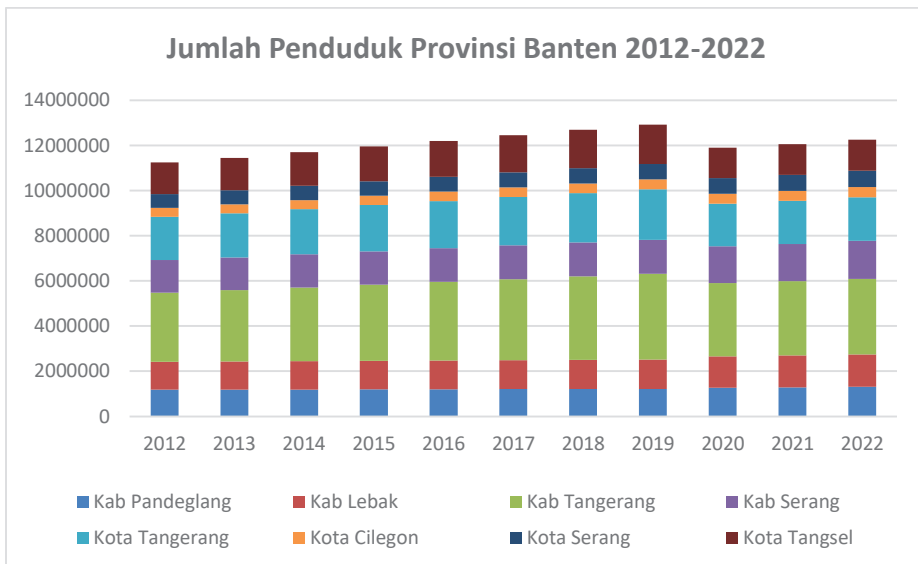
Peta 3.7 Kerawanan Bencana Provinsi Banten

3.2. Profil Demografi

Dinamika kependudukan, karakteristik dari populasi penduduk, dapat diketahui dari demografi suatu daerah, oleh karena itu profil demografi tidak lepas dari dokumen ini karena dapat mendeskripsikan kondisi demografi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisis perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur PUPR. Pembahasan profil demografi di Banten, antara lain kondisi kependudukan, penduduk menurut jenis pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia.

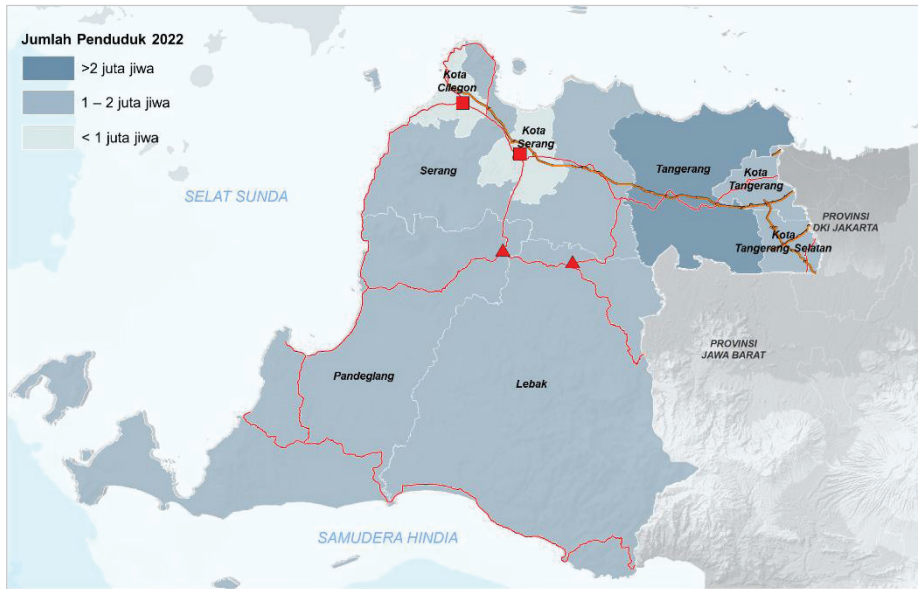
3.2.1. Profil Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2020 sebanyak 11.904.562 jiwa atau 4,14% jumlah penduduk Indonesia dan 8,5% penduduk Pulau Jawa. Jumlah penduduk terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,1%. Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,04, dengan penduduk laki-laki sebanyak 6.070.271 jiwa dan perempuan 5.834.291 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk salah satunya disebabkan oleh angka kelahiran di Provinsi Banten cukup tinggi, yaitu 2% pada tahun 2020.



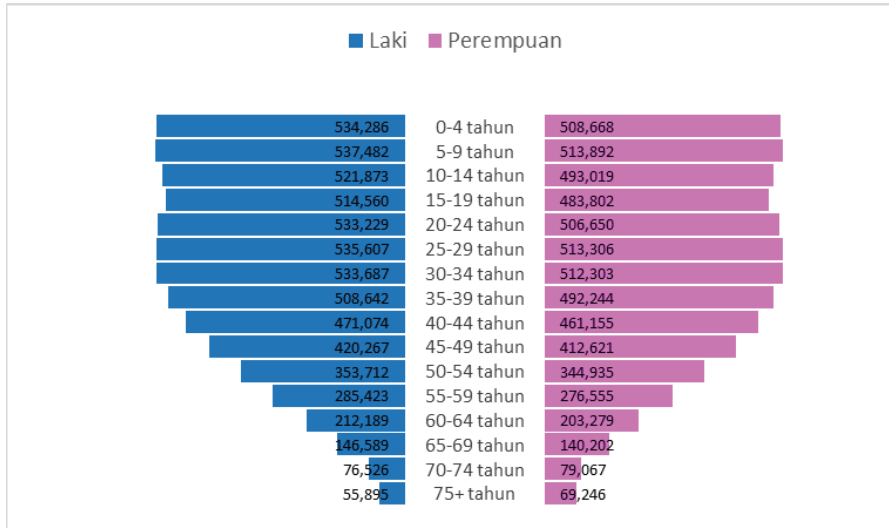
Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Dari segi persebaran, jumlah penduduk terbesar ada di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 3.245.619 jiwa dan terendah di Kota Cilegon sebanyak 434.896 jiwa. Peta persebaran penduduk Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Dari segi kelompok usia, lebih dari setengah penduduk Provinsi Banten adalah generasi millennial dan gen-z yang berumur 8-39 tahun, artinya sebagian besar penduduk Banten ada pada usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non-produktif, sehingga *dependency ratio* atau angka ketergantungan di Provinsi Banten cukup rendah. Jika digambarkan dalam piramida penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia akan membentuk struktur piramida terbalik, yang merupakan tanda adanya bonus demografi. Kelompok umur terbesar adalah kelompok umur 25-29 tahun dan kelompok umur 30-34 tahun. Sedangkan kelompok umur dengan populasi terendah yaitu kelompok umur 75 tahun ke atas. Bonus demografi tentu dapat menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Secara lengkap, piramida penduduk Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.4 Piramida Penduduk Povinsi Banten
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dibedakan menjadi kepadatan penduduk gross dan netto. Kepadatan gross merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Sedangkan kepadatan netto merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas kawasan budidaya. Kepadatan penduduk netto Banten sebesar 442 jiwa/ha dengan kepadatan terbesar di Kota Tangerang (201 jiwa/ha) dan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Lebak (5 jiwa/ha). Kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

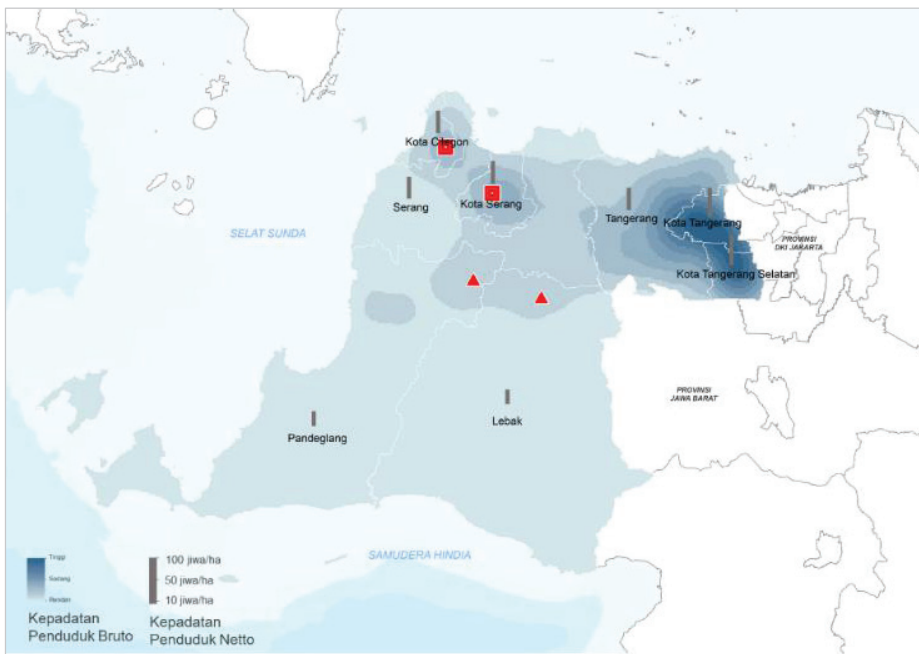
Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Banten 2022

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2022 (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk 2022 (jiwa/km ²)	
			Bruto	Netto
Kab. Pandeglang	1.307.090	2.747	476	691
Kab. Lebak	1.433.853	3.427	418	523
Kab. Tangerang	3.352.472	1.012	3.313	3.523
Kab. Serang	1.678.915	1.734	968	1.358
Kota Tangerang	1.930.556	154	12.542	20.112
Kota Cilegon	450.271	176	2.566	2.946
Kota Serang	720.362	267	2.701	2.841
Kota Tangsel	1.378.466	147	9.365	12.244
Total	12.251.985	9.663	32.349	44.238

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Berdasarkan kepadatan bruto yang dilihat dari total luasan kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Berdasarkan kepadatan netto yang dilihat dari luasan kawasan budi daya terhadap

total jumlah penduduk, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk netto tertinggi.



Gambar 3.5 Kepadatan Penduduk *Bruto* dan *Netto*
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

3.2.2. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Angkatan kerja di Banten sebanyak 6.463.631 jiwa, yang terdiri dari 5.940.618 jiwa penduduk bekerja dan 523.013 jiwa merupakan pengangguran. Angkatan kerja didominasi oleh laki-laki sebesar 81,69% dan perempuan, yaitu 47,17% dengan jumlah angkatan kerja terbanyak ada di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 1.978.358 jiwa dan paling rendah di Kota Cilegon yaitu sebanyak 230.351 jiwa. Banyaknya angkatan kerja di Banten dapat menjadi potensi dalam ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, yang perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain. Secara lengkap, persebaran angkatan kerja di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

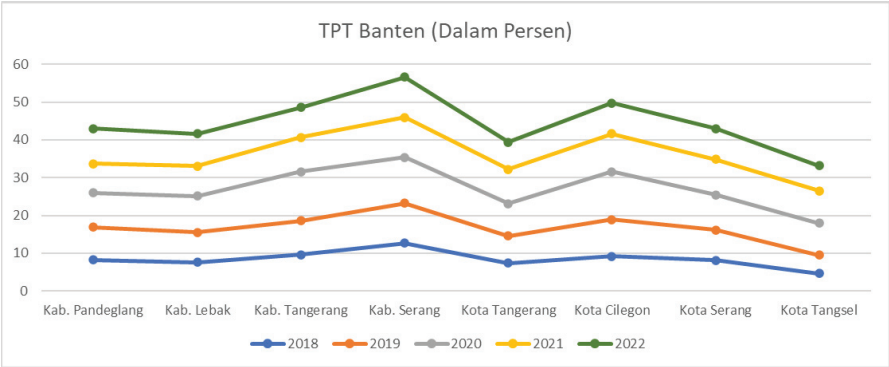


Gambar 3.6 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Banten 2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Lapangan pekerjaan utama di Provinsi Banten berasal dari sektor industri pengolahan sebanyak 1.368.588 jiwa (23,04%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 1.240.325 (20,88%), pertanian dan kehutanan sebanyak 670.880 jiwa (11,29%), penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 461.408 jiwa (7,77%), dan transportasi dan pergudangan sebanyak 410.961 jiwa (6,92%).

3.2.3. Pengangguran

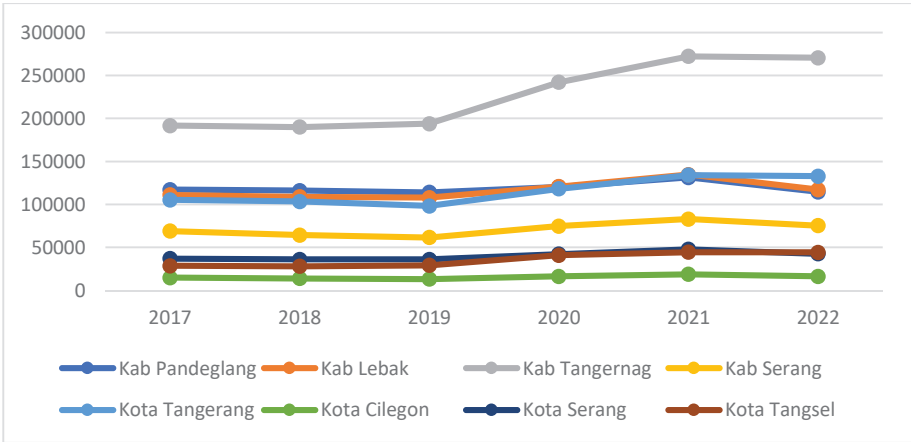
Jumlah pengangguran Banten sebanyak 523,013 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten sebesar 8,09% dimana nilai ini di atas TPT nasional yaitu sebesar 5,86% pada tahun 2022. Tingkat pengangguran menurun dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19. Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat pengangguran terbuka terkecil yaitu 6,59%, sedangkan Kabupaten Serang memiliki tingkat pengangguran terbuka terbesar yaitu sebesar 10,61%.



Gambar 3.7 TPT Banten Tahun 2018-2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

3.2.4. Kemiskinan

Presentase penduduk miskin Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 6,16% (di bawah nasional 9,78%) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 814.020 jiwa. Dengan angka tersebut, Banten menjadi provinsi dengan presentase penduduk miskin terendah kedua di Pulau Jawa (setelah Provinsi DKI Jakarta). Dilihat dari tren per tahun jumlah penduduk miskin semakin turun, akan tetapi naik kembali pada tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid 19. Berdasarkan distribusinya, penduduk miskin terbesar ada di Kab. Tangerang dan terendah di Kota Cilegon. Jumlah penduduk miskin masing-masing wilayah di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Banten 2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau menentukan level pembangunan suatu

wilayah. Pada tahun 2021, IPM rata-rata Banten 72,72 (tertinggi ke-8 nasional dan ke-3 di Pulau Jawa). IPM tertinggi ada di Kota Tangerang Selatan yaitu 81,60, sedangkan IPM terendah di Kab. Lebak yaitu 64,03.

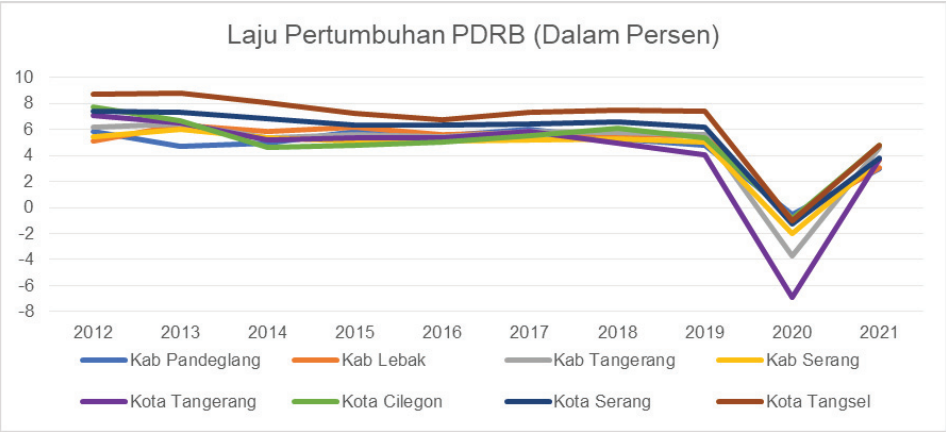
Terdapat 4 sub-indikator IPM, yaitu Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Banten mencapai 70,02 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Banten rata rata 13,02 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,93 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan sebesar Rp.12.030.000.

3.3. Profil Ekonomi

Profil ekonomi menjelaskan terkait profil ekonomi Provinsi Banten, diantaranya PDRB, pendapatan per kapita, sektor unggulan wilayah, perkembangan investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Kondisi ekonomi memperlihatkan potensi ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan dan kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan di Provinsi Banten.

3.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yang digunakan dalam sub bab ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHK). PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 444,26 triliun rupiah, dengan kontribusi sebesar 6,93% terhadap PDRB Pulau Jawa dan 4,11% terhadap PDB nasional. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Banten adalah industri pengolahan (33% PDRB dan 6,68% industri pengolahan nasional), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (14% PDRB dan 4,36% perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor nasional), dan konstruksi (10% PDRB dan 4,17% sektor konstruksi nasional). Secara lengkap, laju pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.9 Pertumbuhan PDRB per Kabupaten 10 tahun terakhir
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Dari distribusi kewilayahannya, wilayah dengan PDRB tertinggi adalah Kota Tangerang sebesar 102,41 triliun rupiah dengan sektor unggulan industri pengolahan, dan Kabupaten Tangerang sebesar 93,48 triliun rupiah dengan sektor unggulan industri pengolahan. Sedangkan PDRB terendah di Banten terdapat di Kabupaten Pandeglang sebesar 19,51 triliun rupiah dengan sektor unggulan pertanian, dan Kabupaten Lebak sebesar 20,62 triliun rupiah dengan sektor unggulan pertanian. Persebaran PDRB wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.10 PDRB ADHK Lapangan Usaha Provinsi Banten
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

3.3.2. Pendapatan Per Kapita

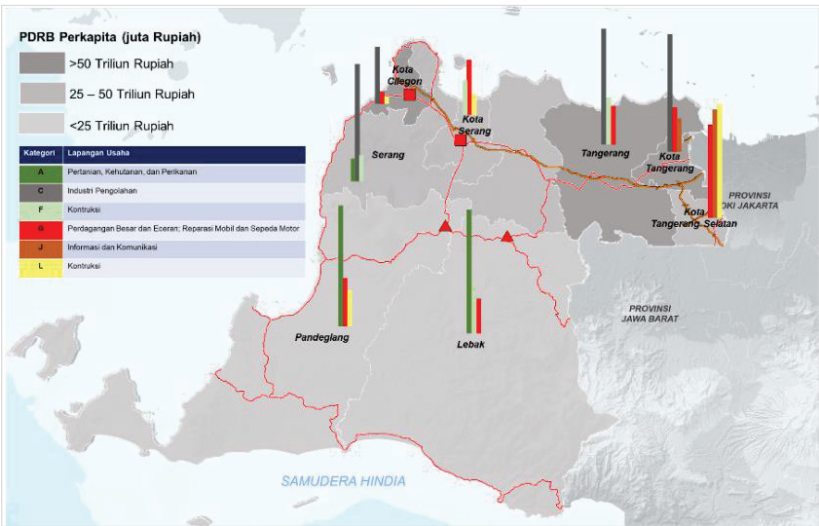
Pendapatan per kapita Provinsi Banten sebesar 37,16 juta rupiah (di bawah pendapatan per kapita nasional 56,9 juta dan tertinggi ke-3 di Pulau Jawa). Wilayah dengan pendapatan per kapita tertinggi adalah Kota Cilegon (169,23 juta rupiah), Kota Tangerang (54,11 juta rupiah), dan Kota Tangerang Selatan (44,01 juta rupiah). Sementara pendapatan per kapita terendah berada di Kabupaten Lebak (14,92 juta rupiah) dan Kabupaten Pandeglang (15,37 juta rupiah). PDRB per kapita masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita (ribu)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	15.371,09	15.614,12	15.915,41
Kabupaten Lebak	14.923,73	15.113,40	15.412,45
Kabupaten Tangerang	28.901,35	29.715,62	30.789,52
Kabupaten Serang	32.701,24	33.283,76	34.312,11
Kota Tangerang	54.106,88	55.658,21	58.418,42
Kota Cilegon	169.229,74	174.670,50	179.083,19
Kota Serang	32.685,57	33.199,19	34.004,18
Kota Tangerang Selatan	44.012,56	45.686,22	47.895,20
Banten	37.165,16	38.217,80	39.515,38

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Secara spasial, persebaran PDRB per kapita beserta sektor unggulan untuk masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.11 Persebaran PDRB per Kapita dan Sektor Unggulan

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

3.3.3. Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor ekonomi unggulan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perkembangan perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB dan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor tersebut, sektor ekonomi unggulan di Provinsi Banten yaitu sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor pertanian.

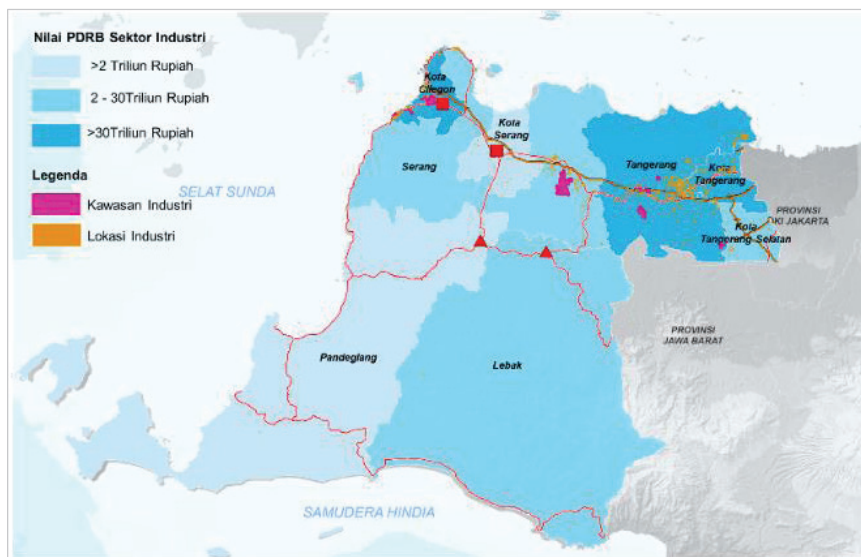
a. Sektor Industri

Sektor industri Banten memberikan kontribusi sebesar 5% terhadap industri nasional serta menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Banten, yaitu sebesar 33%. Industri pengolahan petrokimia dan smelter Banten merupakan yang terbesar di Indonesia dengan kontribusi masing-masing sebesar 78% dan 39% nasional.

Ekspor Banten berada di peringkat 8 nasional dengan nilai sebesar US\$14,09 Miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 4,32% dari tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$13,79 miliar (97,81%), sektor migas US\$158,55 juta (1,12%), sektor pertanian US\$148,97 juta (1,05%), serta sektor pertambangan dan lainnya US\$0,85 juta (0,01%).

Industri Banten didukung oleh hub internasional Tanjung Priok, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading dan Bandara Soekarno Hatta sebagai *outlet* dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura. Kegiatan ekspor sebagian besar dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok (38%), Pelabuhan Merak (29%) dan Pelabuhan Cigading yang melayani KI Cilegon/KrakatauSteel (19%).

Secara distribusi kewilayahan, kegiatan industri lebih terkonsentrasi di Pantura Banten (97%) antara lain di koridor Serang-Cilegon. Share sektor industri di Kawasan Serang – Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten, dengan industri terbesar berada di Kota Cilegon dengan volume *output* sebesar Rp. 47 triliun. Saat ini terdapat 5 (lima) industri petrokimia besar eksisting maupun rencana di Kota Cilegon yang memiliki kapasitas sebesar 7.130 KTA dengan nilai investasi sebesar 8,8 triliun.



Gambar 3.12 Distribusi PDRB Sektor Industri Provinsi Banten
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Meskipun komoditas petrokimia dan smelter menjadi yang terbesar di Indonesia, namun perkembangan industri tersebut di Banten masih belum optimal. Hal itu dikarenakan produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi, sementara untuk bahan baku dan bahan penolong untuk hilirisasi masih bergantung pada impor. Hal itu dapat dilihat pada nilai impor Provinsi Banten tahun 2022 sebesar US\$18,16 miliar, naik 18,49% dibandingkan dengan nilai impor tahun sebelumnya. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan bahan penolong yaitu sebesar US\$17,45 miliar (96,09%).

Komoditas ekspor Banten didominasi oleh komoditas sepatu (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang dari plastik (20%), dan bahan kimia organik (16%). Sementara komoditas impor didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral (52%), bahan kimia organik (24%), besi dan baja (15%), dan gandum (9%).

b. Sektor Pertanian

Pada tahun 2021, Banten menempati posisi ke-9 sebagai provinsi penghasil beras terbesar nasional, dengan produksi padi mencapai 1,60 juta ton GKG dan luas panen sebesar 318 ribu ha. Meskipun menjadi penghasil beras nasional, produktivitas lahan sawah masih di bawah produktivitas nasional, yaitu hanya sebesar 50,38 (nasional 52,26). Sektor pertanian menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ke-6 terhadap PDRB Banten, yaitu sebesar Rp. 25,4 miliar atau 6% dengan distribusi terbesar berada di wilayah selatan.

Wilayah penghasil padi terbesar di Banten yaitu Kabupaten Pandeglang (produksi 434.000 ton; luas panen 85.561 ha); Kabupaten Serang (produksi 383.000 ton; luas panen 78.827 ha); dan Kabupaten Lebak (produksi 379.001 ton; luas panen 75.287 ha). Jika dijumlahkan, produksi padi di wilayah selatan berkontribusi sebesar 74% terhadap produksi padi Banten.

Tabel 3.4 Produksi Padi Provinsi Banten 2021

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi Padi (ton)
Kabupaten Pandeglang	85.561	434.000
Kabupaten Lebak	75.287	379.001
Kabupaten Tangerang	64.615	327.000
Kabupaten Serang	78.827	383.000
Kota Tangerang	583	3.000
Kota Cilegon	1.720	9.000
Kota Serang	11.654	66.001
Kota Tangerang Selatan	1	0
Total	318.248	1.601.002

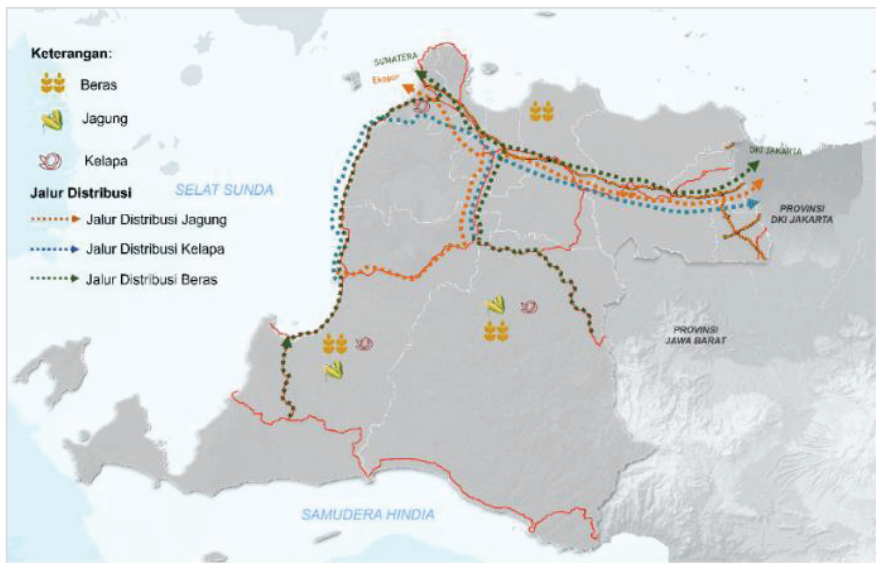
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Dari total lahan pertanian di Banten, 60% nya merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan dalam upaya ketahanan pangan. Luas LP2B Banten adalah 190.973,85 ha dengan 52% atau 100.470,96 ha sudah terairi irigasi teknis. Wilayah dengan luasan panen terbesar adalah Kabupaten Pandeglang (85 ribu ha), Kabupaten Serang (79 ribu ha), dan Kabupaten Lebak (75 ribu ha) yang menyumbang 75% dari total panen Banten dan 1,2 juta ton produksi beras per tahun (74% produksi beras Banten). Secara lengkap terkait LP2B dapat dilihat pada Peta 3.8.

Lahan pertanian Banten menjadi bagian dari daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat (total luasan 52 ribu ha, yaitu DI Cisadane, DI Cibaliung, DI Ciliman, DI Cidurian, dan DI Ciujung), DI provinsi sebesar 18.294 ha dan DI kabupaten/kota dengan luasan sebesar 11.106 ha.

Meskipun sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional, ancaman alih fungsi lahan pertanian Banten cukup tinggi. Terdapat penurunan luasan lahan pertanian padi sebesar 77.463 hektar selama 10 tahun terakhir (2011-2021) atau sebesar 7.746 hektar per tahun. Penurunan ini terutama terjadi di wilayah utara yang memiliki perkembangan kawasan permukiman sangat tinggi akibat adanya aglomerasi kawasan perkotaan Jabodetabek dan perkembangan kawasan industri. Selain padi, Banten juga memiliki komoditas unggulan perkebunan yaitu kelapa (Kabupaten Pandeglang), karet (Kabupaten Lebak), dan aren (Kabupaten Pandeglang) dengan luas 59.358 ha. Masing-masing komoditas memiliki produksi sebesar: kelapa (48,28 ton), karet (6,14 ton) dan aren (4,04 ton). Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan penghasil kelapa dan karet tertinggi Provinsi Banten. Sebaran

komoditas perkebunan Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.13 Pergerakan Komoditas Unggulan Pertanian
Sumber: Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), 2021

Dari segi rantai pasok, hasil pertanian dan perkebunan dari pusat produksi sebagian besar didistribusikan ke pusat industri pengolahan di utara untuk diolah lebih lanjut, serta ke pusat perkotaan untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan. Berdasarkan ATTN, selain untuk konsumsi dalam daerah, produk pertanian dan perkebunan juga didistribusikan ke provinsi lain, diantaranya produksi CPO ke DKI Jakarta (73 ribu ton) dan Jawa Barat (145 ribu ton), produksi karet ke DKI Jakarta (179 ribu ton) dan Jawa Barat (333 ribu ton), serta produksi beras ke DKI Jakarta (167 ribu ton) dan Jawa Barat (459 ribu ton). Pasar terbesar dan terdekat hasil pertanian dan perkebunan Banten adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang didistribusikan umumnya menggunakan jalan tol Jakarta-Merak. Selain itu jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan berada di utara, sedangkan hasil pertanian dan perkebunan di selatan bersifat lokal dan sebagian kecil didistribusikan di Jawa Barat melalui jalan Pansela menuju Sukabumi.

Peta 3.8 Profil LP2B Provinsi Banten

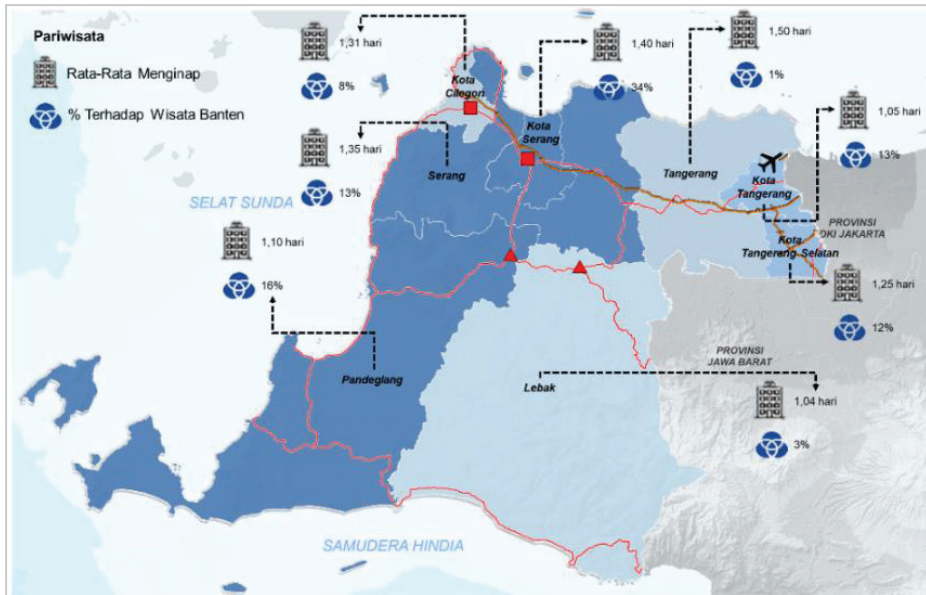
c. Sektor Pariwisata

Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pergerakan wisatawan nusantara tertinggi ke-5 nasional, dengan jumlah perjalanan wisata sebesar 49 juta wisatawan per tahun atau sebesar 6% dari total pergerakan wisatawan nasional. Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) yang terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga.

Tingginya pergerakan wisatawan di Banten juga disebabkan oleh dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara (wisman). Tercatat bahwa sebesar 8% wisman yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten. Selain itu, Banten juga menjadi *hinterland* bagi WM Jabodetabekpunjur sehingga wisata Banten menjadi alternatif tujuan wisatawan nusantara dari Jakarta dan sekitarnya.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Provinsi Banten, yaitu sebesar 16%. Dalam struktur PDRB, sektor pariwisata tidak berdiri sendiri, sehingga kontribusi sektor pariwisata diukur pada sektor lain yang terkait, yaitu sektor akomodasi, transportasi, informasi & komunikasi, jasa kesehatan, dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor pariwisata tertinggi ada di Kota Serang, Kab. Serang, dan Kab. Pandeglang. Kota Serang, Kab. Serang, dan Kab. Pandeglang menjadi kontributor tertinggi karena destinasi-destinasi pariwisata unggulan sebagian besar berlokasi di wilayah ini, seperti Wisata Banten Lama, KEK Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, dan juga pantai-pantai di pesisir barat Banten yang sudah dikenal dengan baik oleh wisatawan.

Meskipun kontribusi sektor pariwisata cukup tinggi, namun lama wisatawan tinggal masih rendah, yaitu masih di bawah 2 hari serta tingkat penghunian kamar (TPK) juga masih rendah, yaitu masih di bawah 50%.

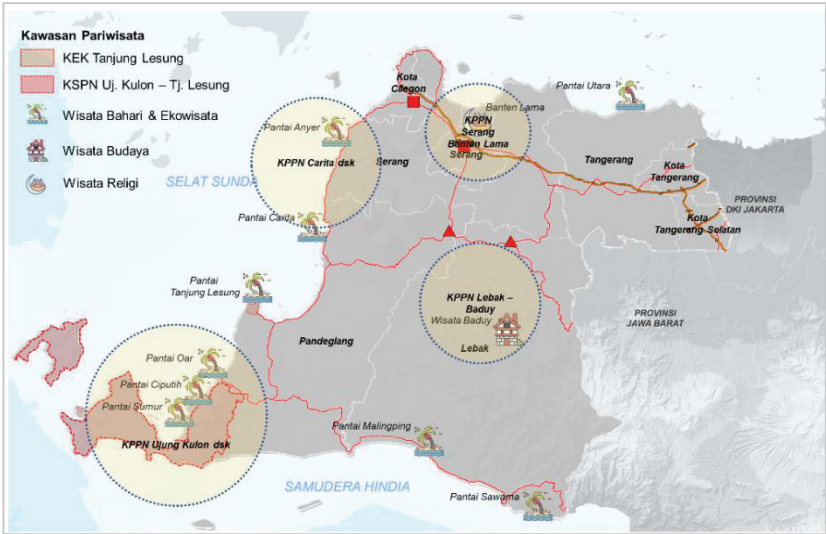


Gambar 3.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Provinsi Banten
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Dari segi atraksi, pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam, diantaranya yang cukup dikenal Ujung Kulon (ekowisata), Cikadu dan Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari). Di Banten terdapat 204 obyek daerah tujuan wisata (ODTW) yang terdiri dari 84 obyek wisata alam, 34 obyek wisata sejarah dan budaya, 24 obyek wisata buatan, 9 obyek wisata *living culture*, dan 48 obyek wisata atraksi kesenian.

Pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten meliputi 18 kawasan diantaranya Kawasan Pantai Barat, Kawasan Wisata Pantai Selatan dan Utara, Kawasan Wisata Ziarah, Kawasan (TNUK) serta Pulau dan Anak Gunung Krakatau dll.

Daerah yang menjadi tujuan utama wisatawan adalah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan kontribusi masing-masing sebesar 46,7% dan 17,31%. Dimana hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama wisata ada pada wisata bahari di pesisir barat Banten. Persebaran DTW eksisting di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.15 Persebaran DTW Provinsi Banten
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Mayoritas wisatawan domestik berasal dari Banten (2,4 juta), Jawa Barat (1,55 juta), dan DKI Jakarta (1,1 juta). Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbesar berada di Kota Tangerang sebesar 298.776 orang yang didukung dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang internasional.

Tabel 3.5 Jarak DTW Provinsi Banten Dari Jakarta

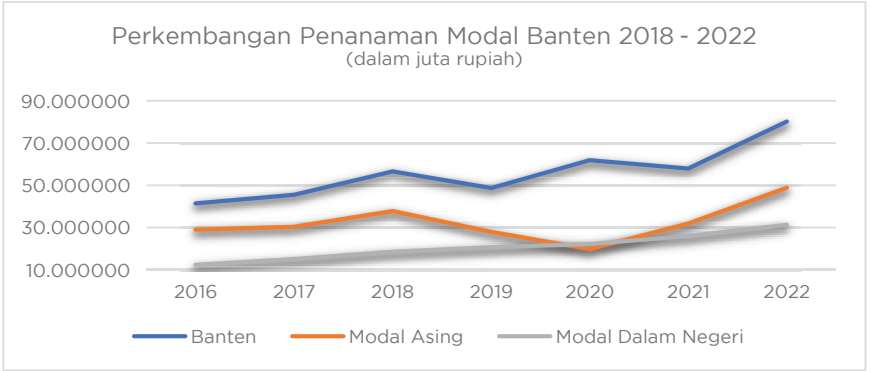
No.	DTW	Jarak (km)	Waktu Tempuh
1.	Pantai Utara Banten	58	1,5 jam
2.	Kawasan Banten Lama	93	2 jam
3.	Desa Baduy	137	3,25 jam
4.	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung	184	4 jam
5.	Pantai Selatan Banten	175	4 jam

Sumber: Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), diolah BPIW, 2023

Salah satu tantangan dalam pengembangan pariwisata Banten adalah posisinya yang berada pada kawasan rawan bencana alam. KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung yang menjadi DTW andalan berada di kawasan rawan bencana alam berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor. Selain itu beberapa DTW juga berstatus sebagai taman nasional, sehingga dalam pengembangannya perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan.

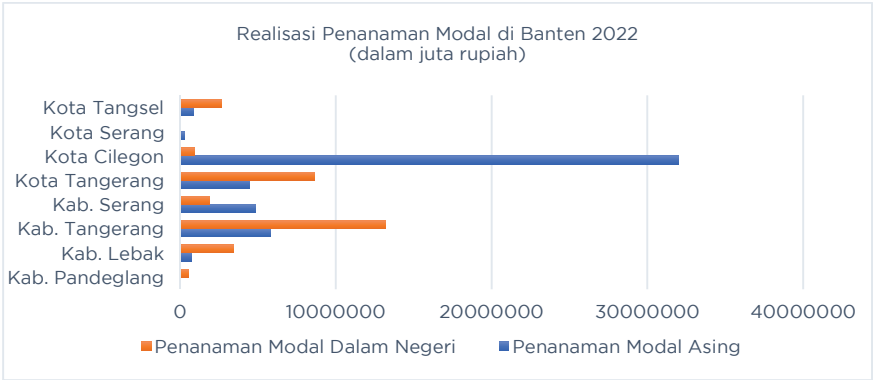
3.3.4. Perkembangan Investasi

Capaian realisasi penanaman modal di Banten menjadi yang tertinggi ke-6 secara nasional dengan nilai mencapai 80,22 triliun rupiah pada tahun 2022. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2021 sebesar 57,96 triliun rupiah atau naik 38,41% dibanding tahun sebelumnya.



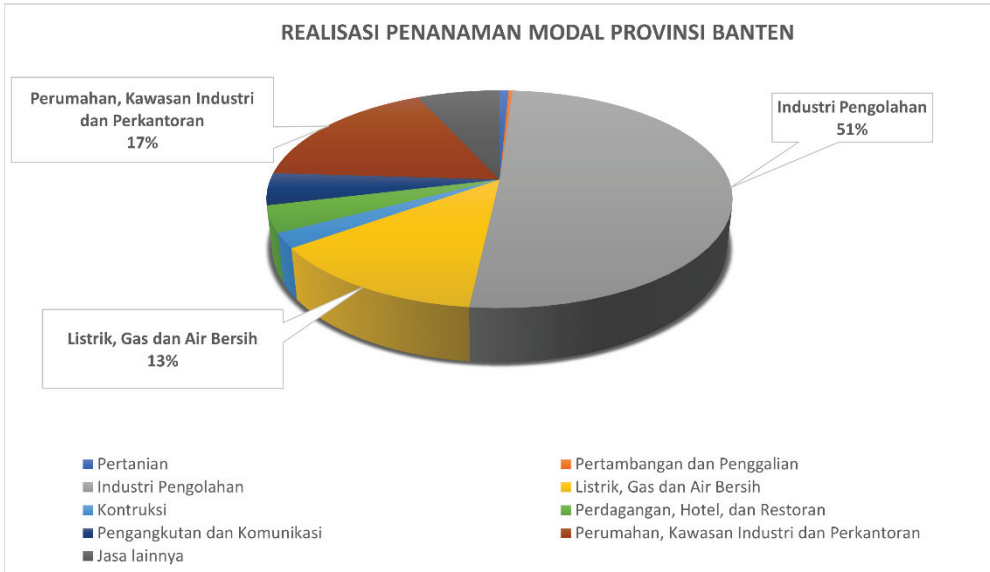
Gambar 3.16 Perkembangan Penanaman Modal Banten 2016-2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Pada tahun 2022 penanaman modal asing dan dalam negeri terbesar berada di Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Sementara jika dilihat dari sektornya, penanaman modal terbesar berada pada sektor kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai 21,65 triliun rupiah yang selanjutnya terdapat sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 13,77 triliun rupiah dan sektor usaha listrik, gas dan air sebesar 10,69 triliun rupiah.



Gambar 3.17 Realisasi Penanaman Modal di Banten 2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Secara sektoral, realisasi penanaman modal didominasi dari sektor industri pengolahan (51%), sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (17%), serta sektor listrik, gas, dan air bersih (13%). Tingginya realisasi penanaman modal sektor industri menandakan perkembangan sektor industri di Banten semakin bergerak ke arah positif.



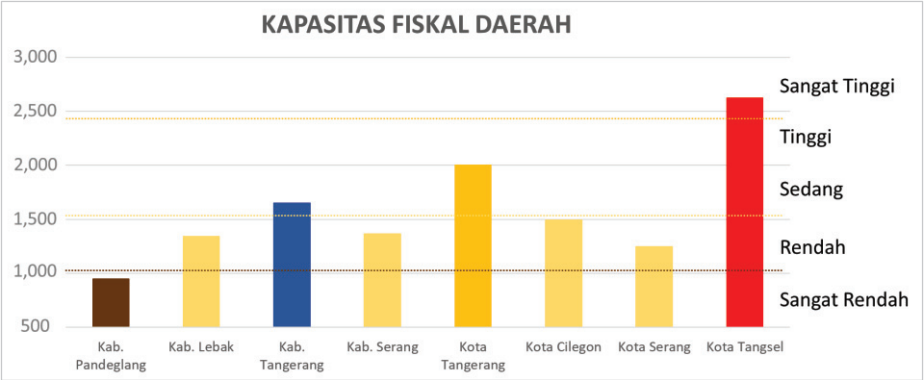
Gambar 3.18 Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Tahun 2022
Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

3.3.5. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Kapasitas tersebut kemudian dipetakan untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Peta kapasitas fiskal daerah dapat digunakan untuk: a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; c. pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah; d. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rasio kapasitas fiskal Provinsi Banten berada di peringkat ke-3 tertinggi nasional dengan nilai 2,934 (kategori sangat tinggi). Sementara untuk skala kabupaten/kota, sebagian besar memiliki kategori rendah, dan hanya ada 1 wilayah dengan kategori sangat tinggi, yaitu Kota Tangerang Selatan (2,625).



Gambar 3.19 Kapasitas Fiskal Banten Tahun 2022
Sumber: Kementerian Keuangan diolah BPIW, 2023

3.4. Profil Sosial Budaya

Di Provinsi Banten terdapat beberapa suku, yaitu suku Sunda, Jawa, dan Baduy. Suku Sunda merupakan penduduk asli Provinsi Banten, yang mendiami wilayah Banten sejak masa kerajaan Tarumanegara. Suku Sunda kebanyakan memeluk agama Islam, dan menggunakan bahasa tradisional bahasa Sunda. Dialek bahasa Sunda di Banten memiliki kekhasan dibanding bahasa Sunda di Jawa Barat. Suku Jawa datang ke Banten, seiring dengan pendirian kesultanan Banten pada sekitar 1527 M. Suku Jawa di Banten menggunakan bahasa Sunda dari dialek Banten, yang mirip dengan bahasa Jawa di wilayah Cirebon dan sekitarnya di Jawa Barat.

Di Provinsi Banten juga terdapat Suku Baduy. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektare di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang, yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik dan tidak boleh dirusak.

Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda Kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern, yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar (informal), yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan (bagian tenggara Provinsi Jawa Barat). Namun demikian, di Banten Selatan Seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan Bahasa Sunda Campuran, Sunda Kuno, Sunda Modern

dan Bahasa Indonesia, di Serang dan Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Di bagian utara Kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari daerah lain di Indonesia.

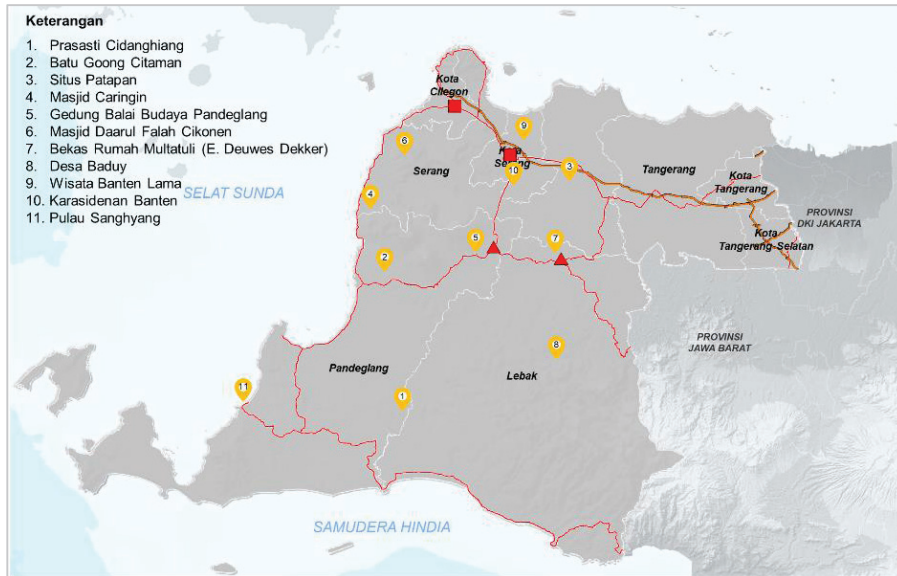
Keberadaan suku dan masyarakat adat menghasilkan berbagai macam produk seni budaya. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten antara lain seni bela diri pencak silat, debus, rudad, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dog-dog, palingtung, dan lojor.

Selain itu, di Provinsi Banten terdapat 19 cagar budaya peringkat nasional yang perlu dilestarikan. Cagar budaya peringkat nasional merupakan cagar budaya yang setidaknya memenuhi salah satu kriteria pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya, salah satunya yaitu merupakan wujud kesatuan dan persatuan bangsa serta karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaran cagar budaya peringkat nasional di Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Cagar Budaya di Provinsi Banten

CAGAR BUDAYA	
1. Prasasti Cidanghiang	11. Menara Air
2. Karesidenan Banten	12. Masjid Caringin
3. Batu Goong Citaman	13. Rumah Benjol
4. Situs Patapan	14. Kantor Yayasan Maulana Hasanuddin Cilegon
5. Gedung BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kab. Serang	15. Gedung Balai Budaya Pandeglang
6. Gedung Juang 45	16. Gedung DPRD Kabupaten Lebak
7. Pulau Sanghyang	17. Masjid Daarul Falah Cikoneng
8. Stasiun Kereta Api Serang	18. Bekas Rumah Multatuli (E. Deuwes Dekker)
9. Pendopo Kabupaten Pandeglang	19. Mapolres Serang
10. Kantor Bupati DATI II Serang	

Sumber: Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, 2022



Gambar 3.20 Desa Adat, Peninggalan Bersejarah dan Warisan Budaya
Sumber: Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, 2022

3.5. Profil Interaksi Kawasan

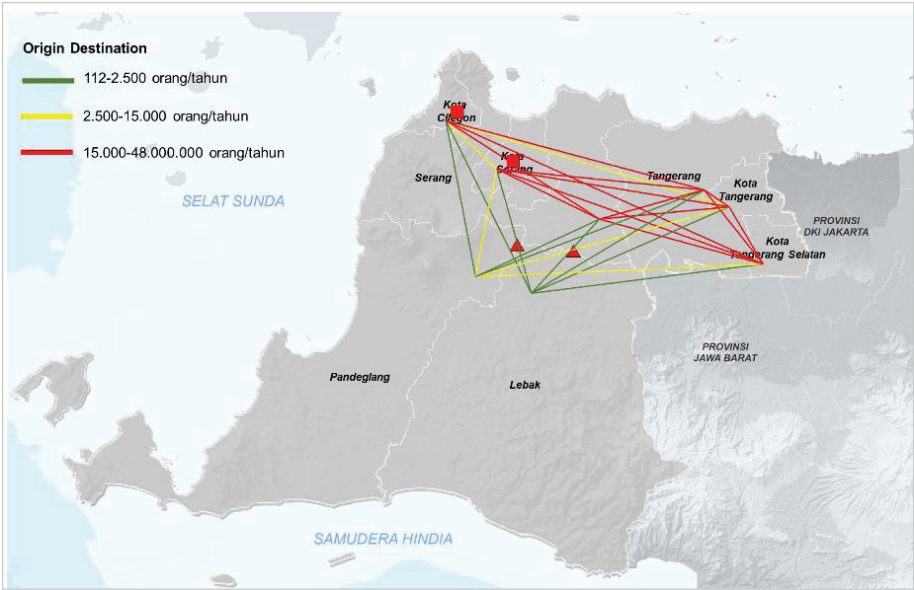
Berdasarkan data Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) dan potensi sektor unggulan, pergerakan terbesar terjadi pada koridor Jakarta-Merak yang merupakan koridor logistik dengan keberadaan pusat kegiatan, kawasan industri, serta *outlet* pelabuhan dan bandara. Pergerakan terbesar di Provinsi Banten terjadi diantara Kota Tangerang – Kota Tangerang Selatan dengan total pergerakan 47.021.598 pergerakan/tahun. Sedangkan pergerakan terkecil berada dari Kabupaten Pandeglang menuju Kota Cilegon dengan total pergerakan 113 pergerakan/tahun. Sedangkan pergerakan antara Provinsi Banten dengan DKI Jakarta sebanyak 571 ribu pergerakan per tahun dengan pergerakan terbesar terjadi diantara Kabupaten Tangerang dengan DKI Jakarta sebanyak 288 ribu pergerakan per tahun. Jalur distribusi utama umumnya menggunakan jalan tol Jakarta-Merak. Selain itu jalur distribusi hasil lainnya berada di utara, sedangkan untuk hasil pertanian dan perkebunan di selatan bersifat lokal dan sebagian kecil didistribusikan di Jawa Barat melalui jalan Pansela menuju Sukabumi. Secara lengkap, pergerakan di Provinsi Banten dapat dilihat pada matriks OD di bawah ini.

Tabel 3.7 Matriks *Origin-Destination* (OD) Provinsi Banten

Menuju Asal	Kota Serang	Kota Cilegon	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Serang	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Lebak	Kabupaten Pandeglang
Kota Serang		5.025	765.202	285.032	121.658	65.291	1.133	13.456
Kota Cilegon	5.287		6.027	115.063	6.479.940	177.352	210	123
Kota Tangerang	790.021	6.141		101.108	640.952	24.926	863	10.158
Kota Tangerang Selatan	299.433	110.460	102.789		7.014.183	47.021.598	1.950	8.019
Kabupaten Serang	125.839	6.389.59	640.711	7.154.437		22.109.979	493	2.370
Kabupaten Tangerang	73.966	174.873	24.994	44.124.404	21.966.208		1.612	1.558
Kabupaten Lebak	1.404	141	914	1.917	557	1.554		n/a
Kabupaten Pandeglang	14.620	113	10.878	8.082	2.483	1.650	n/a	

Sumber: ATTN diolah BPIW, 2023

Interaksi kawasan di Banten didominasi oleh interaksi kegiatan logistik, diantaranya pergerakan dari kawasan industri dan sentra pertanian sebagai pusat ekonomi ke hub (pelabuhan dan bandara) sebagai *outlet* ekspor impor menuju daerah/negara lain. Secara spasial, interaksi kawasan di Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.21 Peta Origin-Destination (OD) Provinsi Banten

Sumber: ATTN diolah BPIW, 2023

BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Profil dan kinerja infrastruktur menjelaskan tentang kondisi infrastruktur Bidang PUPR dan nonPUPR di Provinsi Banten. Pembahasan profil dan kinerja infrastruktur Bidang PUPR terdiri dari infrastruktur sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Sedangkan dalam pembahasan infrastruktur Bidang nonPUPR terdiri dari infrastruktur perhubungan, energi, dan jaringan telekomunikasi. Profil dan kinerja infrastruktur ini nantinya akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis dan analisis kebutuhan infrastruktur.

4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Provinsi Banten memiliki 4 wilayah sungai (WS) dengan total potensi ketersediaan air permukaan sebesar 343 m³/detik atau 10,82 miliar m³/tahun, sedangkan kebutuhan air baku untuk irigasi, permukiman dan industri sebesar 273,10 m³/detik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah dibangun infrastruktur dengan kapasitas tampung sebesar 749 juta m³ yang terdiri dari 3 bendungan operasi, 1 bendungan *on-going*, 1 embung dan 61 situ.

Kebutuhan air baku irigasi digunakan untuk mengairi 1.353 daerah irigasi (DI) permukaan seluas 169.147 ha yang 5 diantaranya merupakan DI permukaan kewenangan nasional dengan luas 62.209 ha.

Bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air di Banten terdiri dari abrasi dan banjir. Abrasi pantai mayoritas terjadi di pesisir barat dan timur Banten, sedangkan banjir terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

4.1.1. Infrastruktur Penyediaan Air Baku

Di Provinsi Banten terdapat 4 wilayah sungai (WS) yang terdiri 2 WS kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan provinsi. WS kewenangan nasional di Banten yaitu WS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki luas 412.518 ha yang masuk ke dalam administrasi Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon (di Provinsi Banten), dan Kab. Bogor (di Provinsi Jawa Barat). Sedangkan WS Ciliwung-Cisadane memiliki luas 528.719 ha yang masuk ke dalam administrasi Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (di Provinsi Banten), seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan WS kewenangan

provinsi yaitu WS Ciliman-Cibungur yang masuk ke dalam administrasi Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, dan Kab. Serang, serta WS Cibaliung-Cisawarna yang masuk ke dalam administrasi Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak.

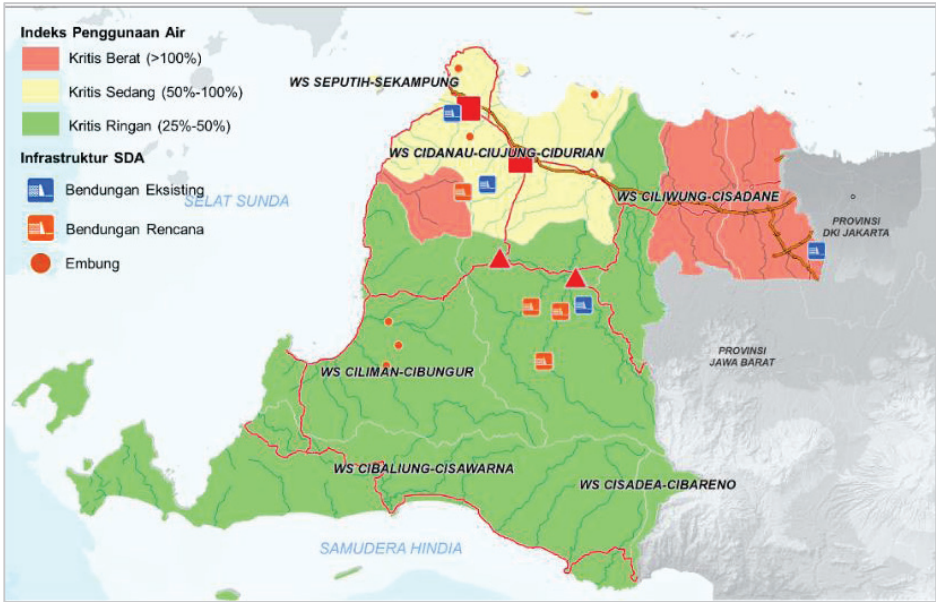
Total potensi ketersediaan air permukaan di semua WS sebesar 343 m³/detik atau 10,82 miliar m³/tahun. Ketersediaan air pada masing-masing wilayah sungai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Profil Wilayah Sungai di Provinsi Banten

No.	Nama Bendungan	Kewenangan	Ketersediaan Air	
			m/detik	miliar m/tahun
1.	Cidanau-Ciujung-Cidurian	Nasional	175	5,5
2.	Ciliwung-Cisadane	Nasional	83	2,62
3.	Ciliman-Cibungur	Provinsi	52	1,64
4.	Cibaliung-Cisawarna	Provinsi	33	1,04

Sumber: SIGI PUPR diolah BPIW, 2023

Kebutuhan air baku di Provinsi Banten mencapai 273,10 m³/detik, dan jika dibandingkan dengan ketersediaan air, neraca air di Provinsi Banten masih surplus sebesar 69,9 m³/detik. Meskipun secara total provinsi mengalami surplus, di beberapa wilayah *water district* (WD) dengan jumlah penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi signifikan, terdapat tingkat penggunaan air kritis. Wilayah dengan penggunaan air kritis terutama berada di Kabupaten Serang dengan tingkat penggunaan air sebanyak 280%, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dengan tingkat penggunaan air sebanyak 171%; dan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel dengan tingkat penggunaan air sebanyak 101%. Secara lengkap, persebaran indeks penggunaan air untuk masing-masing wilayah di Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 WS dan Indeks Penggunaan Air Provinsi Banten
Sumber: SIGI PUPR diolah BPIW, 2023

Untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk irigasi, permukiman dan industri, telah dibangun infrastruktur sumber daya air dengan kapasitas tampung sebesar 749 juta m³. Infrastruktur tersebut terdiri dari 3 bendungan operasi, 1 bendungan *on-going*, 1 embung dan 61 situ.

Tabel 4.2 Profil Bendungan di Provinsi Banten

No.	Nama Bendungan	Kabupaten /Kota	Volume Tampungan (juta m ³)	Volume Efektif (juta m ³)	Irigasi (ha)	RKI (m ³ /detik)	Status
1.	Sindangheula	Serang	9,3	6,98	891	0,8	Operasi
2.	Gintung	Tangerang Selatan	0,72	0,07	700	0	Operasi
3.	Krenceng	Cilegon	3,472		0	0,12	Operasi
4.	Karian	Lebak	314,7	207,50	21.545	9.10*	Konstruksi

Sumber: SISDA PUPR, 2022

**dalam rencana untuk menyuplai air baku Kota Baru Maja, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta*

Selain bendungan, terdapat 1 embung yang sudah beroperasi dan 5 embung rencana. Profil dan kondisi embung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Profil Embung di Provinsi Banten

No.	Nama Embung	Nama DAS	Kabupaten /Kota	Volume (m ³)	Irigasi (ha)	RKI (m ³ /detik)	Status
1.	Lontar	Cibunar	Kab. Serang	180.000	150	-	Operasi

Sumber: SISDA PUPR, 2022

Selain itu juga terdapat 61 situ yang tersebar di seluruh Provinsi Banten dengan volume tampungan total sebesar 7,03 juta m³. Situ yang terbesar adalah Situ Terate (1.944.000 m³), Situ Cikedal (1.200.000 m³), Situ Cicupang Sadang (660.000 m³), Situ Sinar Galih (450.000 m³), dan Situ R. Enang (262.500 m³).

4.1.2. Infrastruktur Penyediaan Irigasi

Penyediaan air baku untuk irigasi didukung oleh daerah irigasi (DI) dan jaringan irigasi. Provinsi Banten terdapat 169.147 ha DI permukaan yang terdiri dari 5 DI kewenangan nasional seluas 61.982 ha, 21 DI kewenangan provinsi seluas 29.221 ha, dan 1.327 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 106.938 ha.

Daerah irigasi kewenangan pusat dengan cakupan layanan terbesar di Banten adalah DI Cisadane dan DI Ciujung, dimana sumber air baku berasal dari Sungai Cisadane dan Sungai Ciujung. DI Cisadane mengairi lahan sawah di Kab. Tangerang (21.007 ha), Kab. Serang (484 ha), dan Kota Tangerang (950 ha), sedangkan DI Ciujung mengairi lahan sawah di Kab. Serang (21.091 ha) dan Kota Cilegon (259 ha). Luas masing – masing DI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Daerah Irigasi di Provinsi Banten

Kabupaten/ Kota	Irigasi Permukaan		Irigasi Pompa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Luas (ha)			DI	Luas (ha)	DI	Luas (ha)
Nasional	5	62.209	-	-	-	-	5	62.209
1. DI Cisadane		22.214						22.214
2. DI Ciujung		21.350						21.350
3. DI Ciliman		5.423						5.423
4. DI Cibaliung		4.288						4.288
5. DI Cidurian		8.707						8.707
Provinsi	21	29.221	-	-	1	1.635	22	30.856
Kabupaten/ Kota	1.327	106.938	11	1.283	54	12.644	1.392	120.865
TOTAL	1.353	169.147	11	1.283	55	12.644	1.419	183.074

Sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2015, 2021

Luas sawah Banten sebesar 197.071 ha atau 20,39% dari luas wilayah, yang mana 190.983 ha diantaranya merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain LP2B, juga terdapat Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang merupakan lahan sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional dan telah ditetapkan dalam Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021.

Tabel 4.5 Luasan LSD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Luas LSD (Ha)
Kab. Pandeglang	49.295,42
Kab. Lebak	49.542,76
Kab. Tangerang	35.997,87
Kab. Serang	41.313,65
Kota Tangerang	270,72
Kota Cilegon	1.367,55
Kota Serang	7.595,56
Kota Tangsel	0
Total LSD: 185.383,53 Ha	

Sumber: Kepmen ATR/BPN no: 1589/SK HK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta LSD yang Dilindungi

Sedangkan sebaran luasan LP2B di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Luasan LP2B per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Luas LP2B (ha)	Luas DI (ha)
Kab. Pandeglang	47.124	18.063
Kab. Lebak	40.147	25.773
Kab. Tangerang	42.520	29.714
Kab. Serang	49.907	38.264
Kota Tangerang	1.310	950
Kota Cilegon	1.965	259
Kota Serang	7.834	3.009
Kota Tangsel	176	0
Total LP2B: 190.983 ha		
Total Daerah Irigasi: 116.032 ha		

Sumber: Pusdatin PUPR diolah BPIW, 2023

Meskipun memiliki LP2B yang cukup luas, namun tidak semua LP2B di Banten dilayani oleh daerah irigasi (DI) teknis. Berdasarkan wilayah administrasi, lahan yang beririgasi teknis hanya sebesar 60,76% (116.032 ha), yang terbagi menjadi daerah irigasi pusat seluas 62.209 ha (53,61%), daerah irigasi provinsi sebesar 25.867 ha (22,29%), dan daerah irigasi kabupaten/kota sebesar 27.956 ha (24,09%).

4.1.3. Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Di Provinsi Banten, bencana yang terjadi akibat daya rusak air adalah tsunami, abrasi, dan banjir.

Provinsi Banten khususnya pesisir barat dan selatan merupakan kawasan rawan bencana tsunami tinggi karena berada pada jalur *Mega Thrust* Patahan Sunda dan Gunung Api Anak Krakatau. Selain rawan terhadap tsunami, kawasan ini juga rawan terjadi abrasi karena lokasi pantai yang langsung berhadapan dengan laut. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dibangun 32 titik pengaman pantai yang lokasi sebagian besar berada di pesisir barat Provinsi Banten.

Tabel 4.7 Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Banten

No	Pengaman Pantai	Lokasi	Panjang (m)	Fungsi
1.	Cigorondong	Pandeglang	1.031	Pelindung jalan raya dan fasilitas umum
2.	KEK Tanjung Lesung	Pandeglang	-	Pelindung KEK Tanjung Lesung
3.	Cangkudu	Pandeglang	375	Pelindung jalan raya dan permukiman
4.	Binuangeun	Lebak	800	Pelindung jalan raya, fasum, dan permukiman
5.	Cidatu	Pandeglang	-	Pelindung jalan raya, fasum, dan tempat wisata
6.	Cilurah	Pandeglang		Pelindung jalan raya, permukiman, dan tempat wisata
7.	Pasauran	Kab. Serang	813	Pelindung jalan raya, permukiman, dan tempat wisata
8.	Cikuya	Kab. Serang	188	Pelindung jalan raya, permukiman, dan tempat wisata
9.	Cinangka	Kab. Serang	480	Pelindung jalan raya, permukiman, dan tempat wisata
10.	Karang Meungpeuk	Kab. Serang	-	Pelindung jalan raya, fasum, dan tempat wisata
11.	Karang Bolong	Kab. Serang	-	Pelindung jalan raya dan permukiman
12.	Lontar	Kab. Serang	1.802	Pelindung jalan raya, fasum, dan tempat wisata

Sumber: SISDA PUPR, 2022

Provinsi Banten juga memiliki risiko banjir dari rendah hingga tinggi. Area banjir dengan kategori tinggi di Provinsi Banten tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Terdapat 1 pengendali sedimen sungai sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi banjir. Selain itu, dalam upaya penanganan banjir juga dilakukan beberapa kegiatan seperti normalisasi sungai dan pembuatan saluran banjir. Kegiatan penanganan banjir di Banten dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

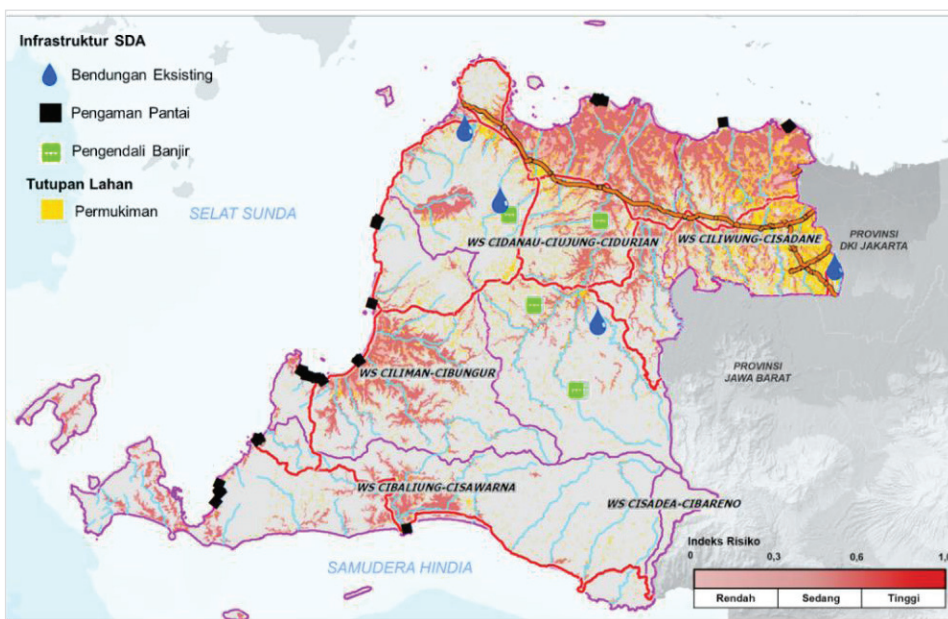
Tabel 4.8 Kegiatan Penanganan Sungai di Provinsi Banten

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	2023	Pengendalian Banjir Sungai Cibanten Hilir	Kota Serang	0,5 km
2		Penanganan Muara Sungai Ciujung	Kab. Serang	
3		Pengendalian Banjir Kali Cibenda	Kota Tangerang	0,1 km
4	2022	Pengendalian Banjir Kali Cisadane Hilir	Kab. Tangerang	0,1 km
5		Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Cidurian Lama	Kab. Serang	0,2 km

No	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Volume
6	2021	Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Sungai Ciberang	Kab. Lebak	0.3 km
7		Pengendalian Banjir Kali Cisadane (Lanjutan)	Kota Tangerang	0.50 km
8	2020	Pengendalian Banjir Kali Pesanggrahan dan Kali Angke	Kota Tangerang	0.5 km
9		Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciberang Kec. Lebak Gedong	Kab. Lebak	0,7 km

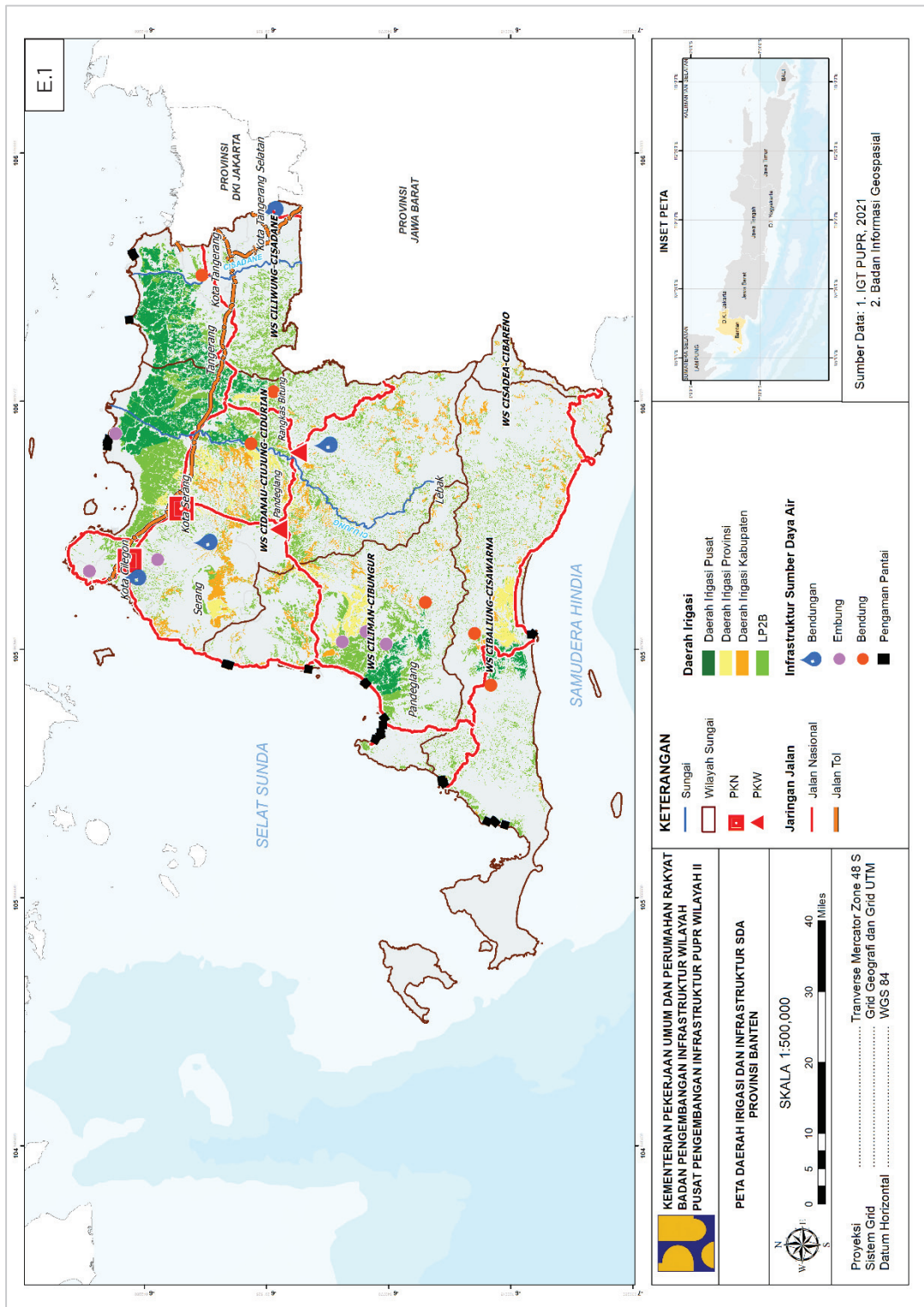
Sumber: Emonitoring PUPR, 2023

Secara spasial, persebaran infrastruktur pengendali daya rusak air dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Infrastruktur Ketahanan Bencana Provinsi Banten

Sumber: BNPB diolah BPIW, 2023



4.1.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

Dalam profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air prioritas di Provinsi Banten terdapat 2 infrastruktur, yaitu Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian. Kedua infrastruktur tersebut sudah terbangun namun pemanfaatan kedua bendungan tersebut belum maksimal. Penjelasan infrastruktur sumber daya air prioritas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 4.9 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Bendungan Sindangheula	Terbangun (2019)	9,2 juta m ³	9,2 juta m ³	DI: 1.280 Ha Air Baku: 0,8 m ³ /detik Banjir: 51,53 m ³ /detik Energi: PL TMH 0,4 MW	DI: 885 Ha Air Baku: - Banjir: 51,53 m ³ /detik Energi: -	- Pelayanan irigasi tidak maksimal dikarenakan luasan DI Cibanten baru sebesar 885 Ha - Pelayanan air baku tidak ada dikarenakan belum terbangunnya jaringan distribusi SPAM Sindang. Saat ini sudah terdapat WTP Sindang Heula 800 lt/detik - Pada saat ini belum dimanfaatkan sebagai sumber energi dikarenakan belum dibangunnya fasilitas generator listrik - Pada saat ini masih terdapat kejadian banjir di Kota Serang dikarenakan belum maksimalnya pengembangan drainase Kota Serang
Bendungan Karian	Terbangun dan Belum Beroperasi (Impounding November 2023)	3,14 juta m ³	3,14 juta m ³	DI: 2.020 Ha Air Baku: 14,6 m ³ /detik Banjir: sebesar 60,8 m ³ /detik Energi: PLMTH 1,8 MW	Belum Berfungsi	

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah BPIW, 2023

4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Keterhubungan suatu daerah tak pernah lepas dengan daerah lainnya, sehingga keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memiliki kondisi prima menjadi hal yang penting dalam pengembangan wilayah. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Sedangkan jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi menghubungkan kedua ruas jalan yang terputus oleh adanya suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah.

Jalan lintas utara Provinsi Banten yang menghubungkan antara PKN Jabodetabekpunjur dengan PKN Serang dan PKN Cilegon merupakan salah satu lintas yang memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan lintas utara menghubungkan pergerakan orang dan barang ke Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Cigading, dan Bandara Soekarno-Hatta serta Kawasan Industri Cikande, Kawasan Industri Cilegon, dan Kawasan Industri Wilmar.

Jalan lintas selatan Provinsi Banten menghubungkan PKN Serang dengan PKW Rangkasbitung dan PKW Pandeglang, KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung dan rencana pengembangan industri Serang-Panimbang (KI Cileles, KI Rangkasbitung, dan KI Cikande). Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan sirip dari jalan nasional mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan pariwisata di kawasan selatan Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) yang dapat mendukung pengembangan kawasan tertinggal di wilayah selatan yang terletak di 4 desa Kabupaten Pandeglang dan 11 desa Kabupaten Lebak.

4.2.1. Infrastruktur Jaringan Jalan

Panjang jalan di Provinsi Banten adalah 6.536,74 km yang terdiri dari 567,90 km jalan nasional, 762,03 km jalan provinsi, dan 5.206,81 km jalan kabupaten/kota. Jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer sepanjang 154,47 km, jalan kolektor primer sepanjang 154,47 km dan jalan strategis nasional sepanjang 321,98 km.

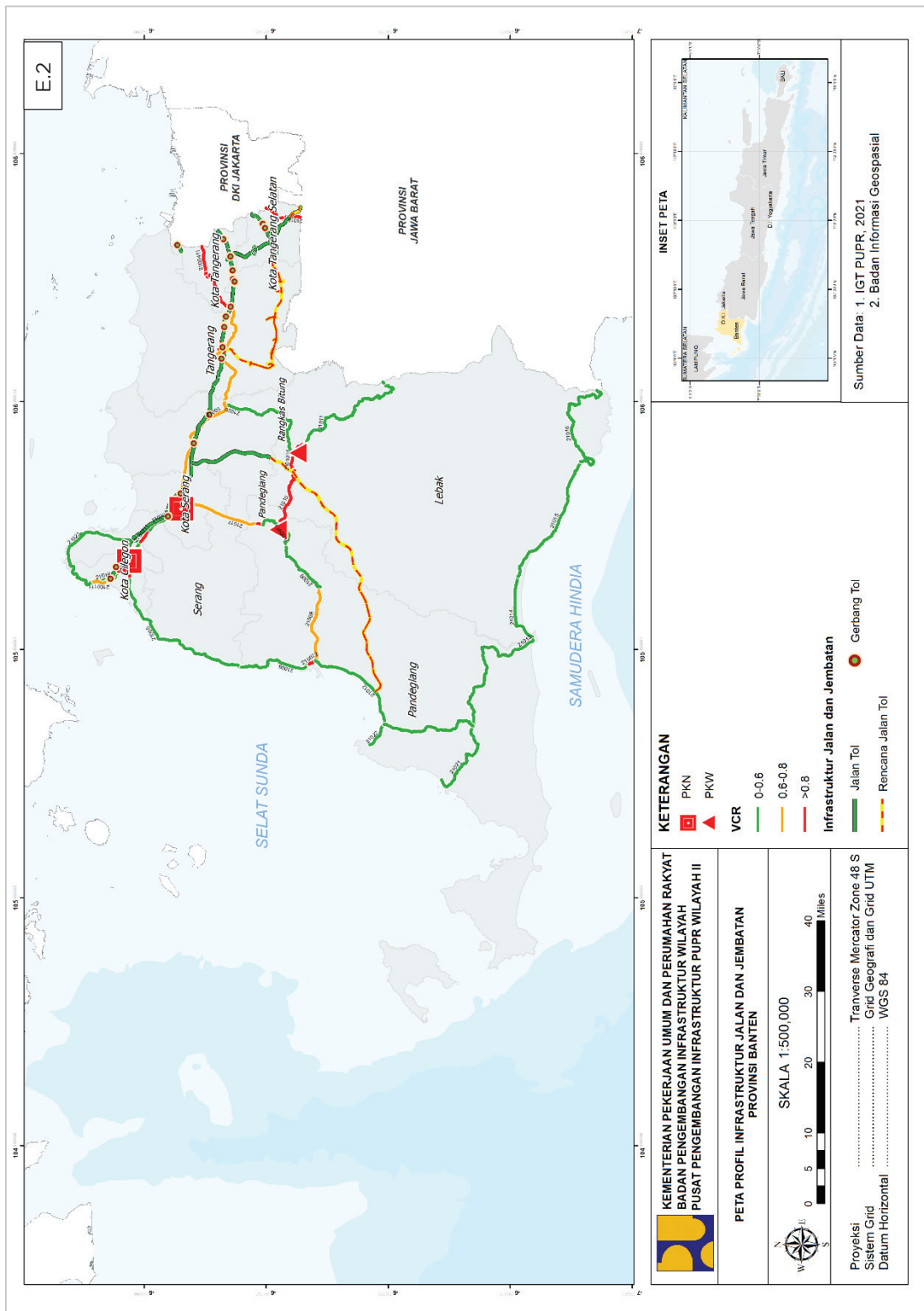
Pada tahun 2022, kemandirian jalan nasional di Provinsi Banten sebesar 92,87%, dan masih terdapat 40,27 km jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. Dari segi kinerja jalan, rata – rata VCR sebesar 0,77 dengan VCR tertinggi berada di ruas Jln. Raya Serang (Tangerang) sebesar 1,67. Jalan Nasional dengan VCR lebih dari 0,85 adalah sepanjang 23,96 km (4,22%), yang tersebar di beberapa ruas terutama

di bagian utara Banten. Ruas dengan VCR > 0,85 yaitu: BTS. Kota Pandeglang - BTS. Kota Rangkasbitung, Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung), Jl. Abdul Hadi (Serang), Jl. KH. Abdul Fatah Hasan (Serang), Jl. Otista (Tangerang), Jl. KS. Tubun (Tangerang), Jl. Raya Serang (Cilegon), Jl. Raya Anyer (Cilegon), Jl. Rambutan (Ciputat), Jl. Otista (Ciputat), Jl. BY Pass Rangkasbitung (Jl. Soekarno), Jl. Raya Serang (Pandeglang), Labuhan - SP. Labuhan, BTS. DKI/Banten - Gandaria/BTS. Depok/Tangerang (Ciputat-Bogor), Jl. Letnan Jidun (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. Daan Mogot (Tangerang-BTS. DKI), Jl. TB. .Suwandi (Serang), Jl. Sudirman (Serang), dan Jl. Raya Serang, Tangerang).

Jalan bebas hambatan di Provinsi Banten yang telah beroperasi sepanjang 162,65 km. Jalan tol di Provinsi Banten adalah Jalan Tol Jakarta - Tangerang yang menjadi penghubung Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan panjang 33,00 km, Jalan Tol Tangerang - Merak dengan panjang jalan 73,00 km yang merupakan pendukung kegiatan logistik dan industri menuju Pelabuhan Merak, dan Jalan Tol Serang-Panimbang untuk membantu konektivitas di wilayah selatan Banten.

4.2.2. Infrastruktur Jembatan

Di Provinsi Banten, terdapat 200 unit jembatan yang membentang di sepanjang jalan nasional dengan panjang total 5.957,2 m dengan lebar rata - rata 9,85 m. Selain jembatan nasional, juga terdapat 50 unit jembatan gantung dan 29 jembatan tol.



Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten

4.2.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas

Dalam profil dan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan prioritas di Provinsi Banten terdapat 5 infrastruktur, yaitu Jalan Pansela, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Jalan Tol Serpong-Cinere, dan Jalan Tol Serpong-Balaraja. Kelima infrastruktur tersebut sudah terbangun dan ada juga yang masih on progres. Penjelasan infrastruktur jalan dan jembatan prioritas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur	Status	Volume		Realisasi	Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Rencana		Rencana	Realisasi	
Jalan Pansela Provinsi Banten (Ruas Simpang Labuhan - Batas Provinsi Jawa Barat)	Terbangun	170,09 dengan lebar standar jalan nasional 7 m		Volume rata-rata jalan nasional 8 meter dengan di beberapa titik terdapat lokasi bottleneck dengan lebar jalan efektif 6 meter	Memberikan akses bagi pusat pertumbuhan wilayah Selatan Banten dengan tingkat pelayanan jalan 1,9 jam /100 kilometer atau 52 km/jam	Mendukung KSPN Uj. Kulon-Tj. Lesung, KPPN Sawarna, Industri Semen Bayah, serta akses logistik hasil produksi pertanian dan perkebunan	- Di beberapa titik yaitu labuan dan panimbang terdapat hambatan samping berupa pasar dimana badan jalan digunakan sebagai parkir dan tempat pedagang. Beberapa titik mengalami genangan banjir ketika hujan sehingga diperkirakan akan terjadi kerusakan secara berkala apabila tidak ditangani.
Jalan Tol Serang - Panimbang	Beroperasi Seksi 1 (2018 - November 2021) Konstruksi (Seksi 2)	Seksi 1 (Serang - Rangkasbitung) sepanjang 26.5 Km, Seksi 2 (Rangkasbitung - Cileles) sepanjang 24.17 Km dan Seksi 3 (Cileles -		26.5 Km (Seksi 1)	Beroperasinya seksi 1-3 dan berfungsi untuk peningkatan kawasan	Jalan tol yang sudah beroperasi masih seksi 1 yang terdiri dari exit tol Cikeusal, exit tol petir dan exit tol Rangkasbitung.	- Sejak terbangun Tol Serang - Panimbang seksi 1 terjadi penambahan harga tanah dan rencana pembangunan perumahan disekitar pintu tol - Volume lalu lintas (LHR) rencana 8.339

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
	Persiapan konstruksi (Seksi 3)	Panimbang) sepanjang 33 Km				kendaraan (2022) dan 9.340 (2023). Realisasi LHR 2022 sekitar 5.600 kendaraan atau baru tercapai 67% dari target rencana dan LHR 2023 menurun menjadi 5.235 kendaraan atau baru tercapai 56% dari target rencana.
Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Beroperasi (2021)	14,19 km	14,19 km	Alternatif pengguna jalan wilayah Jabodetabek khususnya dari Tangerang Raya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta	Alternatif pengguna jalan wilayah Jabodetabek khususnya dari Tangerang Raya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta	- Terjadi bencana banjir akibat dampak dari pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran di wilayah Benda Kota Tangerang
Jalan Tol Serpong - Cinere	Beroperasi Seksi 1 (2021) Telah terbangun 100% dan Persiapan operasi Seksi 2 (2023)	10,14 km (Seksi 1 6,5 km, Seksi 2 3,64 Km)	Seksi 1 6,5 km Seksi 2 3,64 km	Mempercepat perjalanan masyarakat dari dan menuju wilayah Cinere, Pamulang, Serpong dan sekitarnya, termasuk hingga Bandara Soekarno-Hatta	Mempercepat perjalanan masyarakat dari dan menuju wilayah Cinere, Pamulang, Serpong dan sekitarnya, termasuk hingga Bandara	- Masih terhambat adanya pembebasan lahan di luar jalur utama (main road) yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur penghubung tol Serpong - Cinere dan jalan tol Cinere - Jagorawi

Infrastruktur	Status	Volume		Realisasi	Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi		Rencana	Realisasi	
Jalan Tol Serpong - Balaraja	Operasi Seksi 1A (2022), Konstruksi Seksi 1B, Rencana Seksi 2 dan 3	39,9 Km (Seksi 1A: Simpang Susun (SS) Rawa Buntu - SS CBD sepanjang 5,15 Km, Seksi 1B: SS CBD - SS Legok sepanjang 4,70 Km; Seksi 2: SS Legok - SS Pasir Barat sepanjang 11,54 Km; serta Seksi 3: SS Pasir Barat - Junction Balaraja sepanjang 18,57 Km			Merupakan sambungan dari Jalan Tol Ulujiemi-Serpong dan merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 3. Jalan tol ini menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang	Soekarno-Hatta	
			Seksi 1A 5,15 km (2022)		Baru beroperasi seksi 1A		

Sumber: Berbagai Kebijakan diolah BPIW, 2023

4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Pembangunan infrastruktur permukiman dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan dasar dalam mendukung perwujudan permukiman yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Saat ini Provinsi Banten telah terlayani oleh layanan air minum perpipaan, pengolahan sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman juga termasuk diantaranya penuntasan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan-kawasan strategis.

Capaian akses air minum layak di Provinsi Banten mencapai 91,16% tetapi akses perpipaan baru mencapai 12,07%. Tingkat layanan persampahan Provinsi Banten sebesar 44,51% atau tertangani 1.355.707 ton/tahun. Akses sanitasi layak Provinsi Banten mencapai 81,72% sedangkan sanitasi aman baru mencapai 10,73%. Luas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Banten mencapai 3.512,12 ha dimana 1.724,77 ha atau 49,11% merupakan kewenangan pusat.

4.3.1. Infrastruktur Air Minum

Di Provinsi Banten terdapat 67 SPAM baik berupa SPAM IKK ataupun SPAM perdesaan dengan kapasitas total 1.426 liter/detik. Selain SPAM, layanan air minum Banten juga dilayani oleh 6 PDAM dengan kapasitas produksi total 8.798 liter/detik dan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 2.141.471 jiwa atau 21,7% dari total penduduk Banten.

Tabel 4.11 Infrastruktur SPAM di Banten

Kabupaten/Kota	Nama SPAM	Kecamatan	Kapasitas Produksi (lt/dt)
Kab. Pandeglang	IKK Ciwasiat	Ciwasiat	20
	IKK Sumur	Sumur	20
	Kawasan Rawan Air Desa Kaungcaang	Cadasari	2
	Kawasan Rawa Desa Kertamukti	Sumur	20
	KSPN Tanjung Lesung	Panimbang	100
	Desa Cibungur	Sukaresmi	3
	Desa Cikiruh Wetan	Cikeusik	2
	Desa Cimanggu	Cimanggu	2
	Desa Juhut	Karang Tanjung	2
	Desa Koranji	Pulosari	2
	Desa Pari	Mandalawangi	3
	Desa Pasir Awi	Banjar	3
	Desa Taman Jaya	Sumur	2
	Desa Tangkil Sari	Cimanggu	2
	Desa Tunggal Jaya	Sumur	2
Kab. Lebak	IKK Cibadak	Cibadak	40
	IKK Cijaku	Cijaku	20
	IKK Muncang	Muncang	20
	IKK Wanasalam	Wanasalam	50
	IKK Warung Gunung	Warung Gunung	20
	Desa Calungbungur	Sajira	2
	Desa Cibeber	Cibeber	2

Kabupaten/Kota	Nama SPAM	Kecamatan	Kapasitas Produksi (lt/dt)
	Desa Cikaret	Cigemblong	2
	Desa Siketug	Ciomas	2
	Desa Cikotok	Cibeber	2
	Desa Cimayang	Bojongmanik	2
	Desa Darmasari	Bayah	2
	Desa Girilaya	Cipanas	2
	Desa Kadurahayu	Bojongmanik	2
	Desa Kanekes	Leuwi Damar	2
	Desa Lebak Gedong	Lebakgedong	2
	Desa Lebak Keusik	Banjarsari	3
	Desa Lebak Sangka	Lebakgedong	2
	Desa Leuwi Coo	Muncang	2
	Desa Mekarsari	Rangkasbitung	2
	Desa Sobang Cisimeut	Leuwi Damar	2
	Desa Sogong	Panggarangan	3
	Desa Sukamanah	Malingping	2
Kab. Serang	Desa Tanjungwangi	Muncang	2
	IKK Bandung	Bandung	40
	IKK Binuang	Binuang	20
	IKK Carenang Serang	Carenang	50
	IKK Cikeusal	Cikeusal	20
	IKK Cikeusal Petir	Cikeusal	40
	IKK Ciruas	Ciruas	40
	IKK Kopo	Kopo	40
	IKK Kramatwatu	Kramatwatu	20
	IKK Lebak Wangi	Lebak Wangi	40
	IKK Leuwi Damar	Leuwi Damar	50
	IKK Pamarayan	Pamarayan	40
	IKK Tirtayasa	Tirtayasa	10
	IKK Tunjung Teja	Tunjung Teja	20
	IKK Waringin Kurung	Waringin Kurung	20
	Kec. Anyar	Anyar	20
	Desa Barugbug	Padarincang	2
	Desa Cikolelet	Cinangka	3
	Desa Cisit	Ciomas	2
	Desa Kosambi Ronyok	Anyar	2
	Desa Payaungan Jaya	Ciomas	2
	Desa Sukadana	Ciomas	4
	Desa Sukarena	Ciomas	2
	Desa Talaga Warna	Pabuaran	2
Kab. Tangerang	Desa Ciserehan	Tigaraksa	2
	Kawasan Khusus RSUD Balaraja	Balaraja	5
Kota Serang	Banten Lama Kota Serang	Kasemen	25
Kota Tangerang	Kawasan Kumuh Pinang	Pinang	30
	Sitanala	Neglasari	500
Total			1.426

Sumber: Cipta Karya Kementerian PUPR, 2021

Dari segi kinerja, saat ini akses air minum layak di Provinsi Banten sudah mencapai 91,16% tetapi akses perpipaan baru mencapai 12,07%. Wilayah dengan akses air minum layak tertinggi adalah Kota Serang (99,10%) sementara akses terendah adalah di Kab. Lebak (73,49%).

Layanan perpipaan di masing-masing kabupaten/kota belum ada yang mencapai target nasional yaitu 30% terlayani perpipaan. Akses perpipaan tertinggi adalah Kota Cilegon (19,64%) sedangkan terendah

adalah Kota Tangerang Selatan (0,10%). Akses perpipaan di Kota Tangerang Selatan kecil dikarenakan akses perpipaan yang dihitung hanya akses berupa layanan air dari pemerintah (PDAM, SPAM), sedangkan layanan air oleh pengembang swasta belum dihitung. Capaian akses air perpipaan dan akses air minum layak pada tiap kabupaten/kota di Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Akses Air Minum Layak dan Perpipaan di Banten

Kabupaten/Kota	Akses Aman/Persentase Pelayanan Perpipaan (%)	Akses Air Layak (%)
Kota Cilegon	19,64	94,98
Kota Serang	1,86	99,10
Kota Tangerang	19,19	98,37
Kota Tangsel	0,10	99,08
Kabupaten Lebak	9,94	73,49
Kabupaten Pandeglang	15,15	75,83
Kabupaten Tangerang	15,06	98,48
Kabupaten Serang	15,65	89,95
	12,07	91,16

Sumber: Cipta Karya Kementerian PUPR, 2021

Kapasitas terpasang dari semua PDAM/SPAM di Provinsi Banten sebesar 8.798 liter/detik tetapi baru diproduksi sebesar 7.054 liter/detik sehingga masih terdapat idle sebesar 1.744 liter/detik. PDAM yang memiliki idle tertinggi berada di PDAM Tirta Multatuli Kab. Lebak, PDAM Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang, dan Perumdam Tirta Albantani Kab. Serang sehingga wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri seperti Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang perlu menyiapkan air baku guna mendukung kegiatan industri tersebut. Saat ini, pemerintah telah membangun Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan IPA untuk menambah pasokan air baku di pusat – pusat kegiatan ini. Kondisi eksisting Bendungan Karian menghasilkan 14,6 m³/detik air baku untuk melayani Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan serta 9,1 m³/detik air baku untuk Provinsi DKI Jakarta. Bendungan Sindangheula direncanakan akan menghasilkan 0,8 m³/detik air baku untuk melayani Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

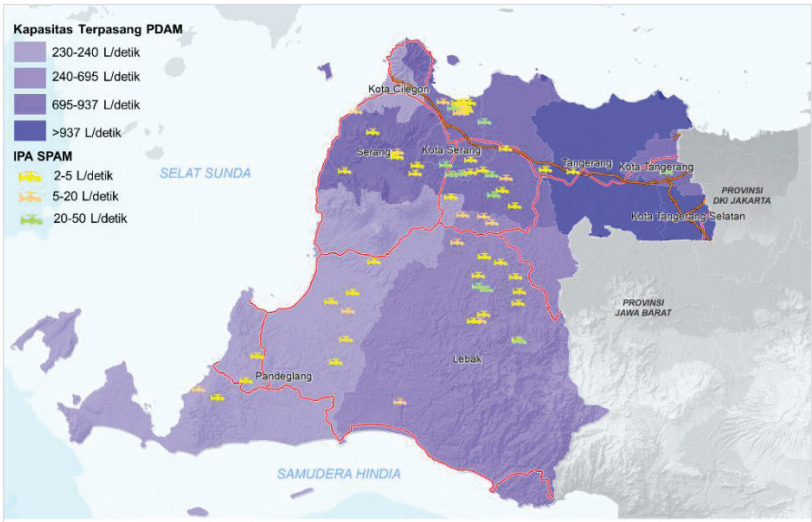
Tabel 4.13 Kinerja PDAM Provinsi Banten

No.	PDAM	Volume Produksi (L/dt)	Kapasitas Terpasang (L/dt)	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)	Tingkat Kebocoran (%)	Idle Capacity (L/dt)
1.	PDAM Tirta Berkah Kab. Pandeglang	220	240	22.357	1.272.687	91.557	21,50	20
2.	PDAM Tirta Multatuli Kab. Lebak	213	695	44.180	1.386.793	132.436	26,14	482
3.	Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang	5.250	5.796	181.179	3.245.619	1.400.512	17,15	546
4.	Perumdam Tirta	273	937	58.206	1.622.630	199.260	25,12	664

No.	PDAM	Volume Produksi (L/dt)	Kapasitas Terpasang (L/dt)	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)	Tingkat Kebocoran (%)	Idle Capacity (L/dt)
	Albantani Kab. Serang							
5.	PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang	876	900	68.196	1.895.486	237.934	28,36	24
6.	PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon	222	230	24.850	434.896	79.772	27,82	8

Sumber: PDAM Provinsi Banten, 2022

Secara spasial, akses air minum aman untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Akses Air Minum Aman Provinsi Banten

Sumber: Kinerja PDAM diolah BPIW, 2023

4.3.2. Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi terdiri dari infrastruktur persampahan dan infrastruktur pengolahan sanitasi.

1) Persampahan

Penanganan sampah di Provinsi Banten dilayani oleh 11 TPA yang terdiri dari 9 TPA aktif dan 2 TPA non aktif. TPA tersebut berlokasi di hampir semua kabupaten/kota di Banten, kecuali Kab. Serang yang dilayani oleh Cilowong di Kota Serang. TPA dengan kapasitas tertinggi di Provinsi Banten adalah TPA Cipeucang di Kota Tangerang Selatan dengan kapasitas 284.700 m³/tahun.

Tabel 4.14 Profil TPA Provinsi Banten

No.	Nama TPA	Kabupaten /Kota	Kapasitas (m3/tahun)	Luas (ha)	Cara Pengelolaan	Kondisi
1.	TPA Bangkonol	Pandeglang	1.266.000	10,00	Sanitary Landfill	AKTIF
2.	TPA Bojong Canar	Pandeglang	202.000	2,00	Sanitary Landfill	AKTIF
3.	TPA Lingsuh	Pandeglang	202.000	2,00	-	NON AKTIF
4.	TPA Dengung	Lebak	123.320	8,00	Sanitary Landfill	AKTIF
5.	TPA Cihara	Lebak	328.000	3,00	Sanitary Landfill	AKTIF
6.	TPA Jatiwaringin	Tangerang	262.800	20	Sanitary Landfill	AKTIF
7.	TPA Cilowong	Kota Serang	155.928	12,00	Control Landfill	AKTIF
8.	TPA Rawa Kucing	Kota Tangerang	145.110	35,00	Sanitary Landfill	AKTIF
9.	TPA Bagendung	Kota Cilegon	91.000	7,8	Sanitary Landfill	AKTIF
10.	TPA Cipeucang	Kota Tangsel	284.700	10,6	Sanitary Landfill	AKTIF
11.	TPA Cigeulis	Pandeglang	n/a	0.00	Open Dumping	NON AKTIF

Sumber: SIPSN, 2020

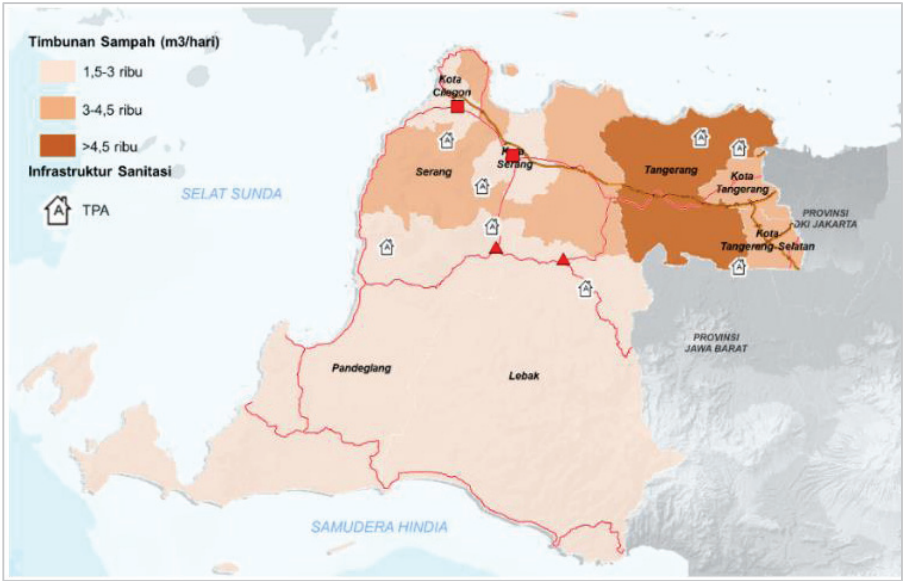
Produksi sampah di Provinsi Banten sebesar 3.045.592 ton/tahun dan tertangani 1.355.707 ton/tahun. Sehingga tingkat layanan persampahan provinsi Banten sebesar 44,51%. Timbulan sampah terbesar dihasilkan Kabupaten Serang (414.581 ton/tahun), Kota Serang (578.038 ton/tahun), dan Kota Tangerang Selatan (971.101 ton/tahun). Kota Serang merupakan kota dengan tingkat layanan persampahan tertinggi sebesar 83,84%, diikuti oleh Kabupaten Tangerang (70,88%) dan Kota Tangerang sebesar (57,48%). Rincian timbulan sampah masing - masing kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15 Timbulan Sampah Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Timbulan (ton/tahun)	Tertangani (ton/tahun)	Persentase Terlayani
1.	Kabupaten Pandeglang	176.515	11.680	6,62%
2.	Kabupaten Lebak	187.706	33.580	17,89%
3.	Kabupaten Serang	414.581	32.780	7,91%
4.	Kabupaten Tangerang	136.458	96.725	70,88%
5.	Kota Cilegon	190.440	106.718	56,04%
6.	Kota Serang	578.038	484.624	83,84%
7.	Kota Tangerang	390.753	224.600	57,48%
8.	Kota Tangerang Selatan	971.101	365.000	37,59%
	Total	3.045.592	1.355.707	44,51%

Sumber: SIPSN, 2020

Secara spasial, timbulan sampah masing - masing kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.4 Timbunan Sampah Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Timbunan sampah tersebut sebagian besar ditangani di TPA dengan jumlah yang cukup besar. Rata-rata TPA sudah memiliki kapasitas di atas 60% dan diperkirakan akan penuh dalam 3-5 tahun lagi.

2) Sanitasi

Akses sanitasi layak Provinsi Banten mencapai 81,72% sedangkan sanitasi aman baru mencapai 10,73%. Sanitasi layak Provinsi Banten masih di bawah target nasional yaitu sanitasi layak 90%. Akses sanitasi layak Kabupaten Pandeglang 49,11% dan Kabupaten Lebak 56,82% perlu mendapat perhatian karena <70%. Sanitasi aman terendah juga diduduki oleh Kabupaten Pandeglang (0,77%) dan Kabupaten Lebak (3,40%). Layanan sanitasi layak dan aman sampah masing - masing kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16 Sanitasi Layak & Aman Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Sanitasi Layak (%)	Sanitasi Aman (%)
1.	Kabupaten Pandeglang	49,11	0,77
2.	Kabupaten Lebak	56,82	3,40
3.	Kabupaten Serang	80,34	4,36
4.	Kabupaten Tangerang	85,89	10,32
5.	Kota Cilegon	97,07	14,40
6.	Kota Serang	90,76	11,06
7.	Kota Tangerang	94,94	19,79
8.	Kota Tangerang Selatan	98,84	21,75
Total		81,72	10,73

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2022

Terdapat dua titik IPLT di Provinsi Banten, yaitu IPLT Kota Cilegon dengan kapasitas 20.167 KK dan IPLT Sindang Mulya dengan kapasitas 15.000 KK. Sedangkan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terdapat 4 buah, yaitu 1) SPALD-T Kota Cilegon dengan kapasitas sebanyak 100 KK; 2) SPALD-T Nelayan Kabupaten Tangerang dengan kapasitas sebanyak 200 KK, 3) SPALD-T Kabupaten Lebak dengan kapasitas sebanyak 150 KK; serta 4) Sanitasi KSPN Tanjung Lesung dengan kapasitas sebanyak 2.000 KK.



Gambar 4.5 Akses Sanitasi Aman Provinsi Banten
Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Kawasan Kumuh

Pada tahun 2020, luas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Banten mencapai 3.512,12 ha dengan kewenangan pusat sebesar 1.724,77 Ha atau 49,11% dari luas kawasan kumuh Provinsi Banten. Dari semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten hanya Kota Cilegon yang tidak memiliki luas kumuh >15 ha (kewenangan pusat).

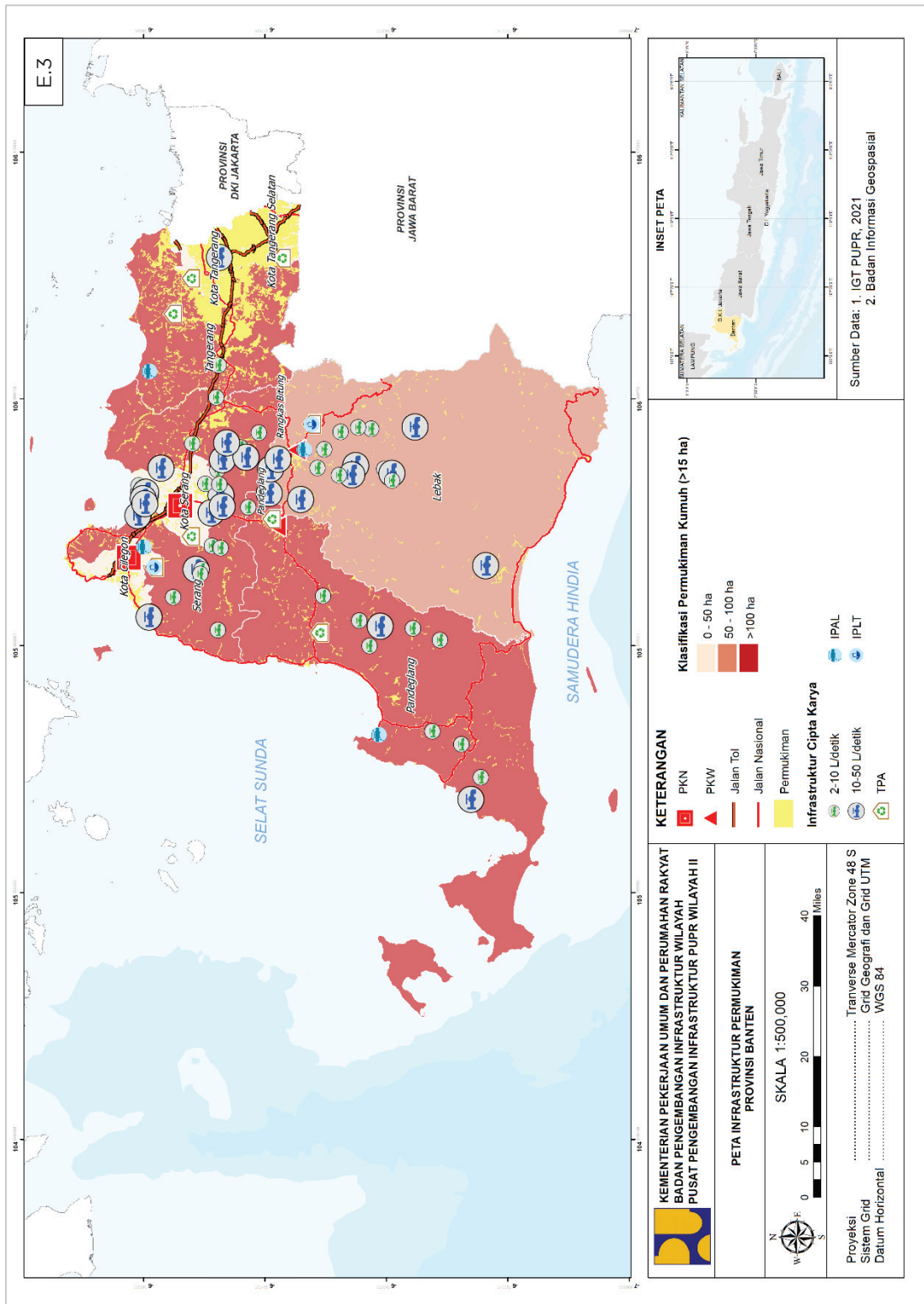
Tabel 4.17 Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kumuh 2020 (ha)			Total
		<10	10-15	>15	
1.	Kota Tangerang	77,11	10,01	18,19	105,31
2.	Kabupaten Tangerang	71,7	84,08	177,19	332,97
3.	Kota Tangerang Selatan	59,54	0	45,69	105,23
4.	Kota Serang	149,81	45,68	19,55	215,04
5.	Kota Cilegon	23,54	14,12	0	37,66
6.	Kabupaten Pandeglang	26,98	34,93	137,45	199,36
7.	Kabupetan Lebak	0	51,15	78,9	130,05

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kumuh 2020 (ha)			Total
		<10	10-15	>15	
8.	Kabupaten Serang	411,8	726.9	1.247,8	2.386,5
	TOTAL	820.48	966.87	1,724.77	3.512,12

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Kawasan kumuh terluas yaitu, Kabupaten Serang 2.386,5 ha, Kabupaten Tangerang 332,97 ha, dan Kota Serang 215,04 ha. Sementara kawasan kumuh dengan luasan terkecil, yaitu Kota Cilegon 37,66 ha, Kota Tangerang 105,31 ha, dan Kabupaten Lebak 130,05 ha.



Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten

4.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Profil dan kinerja perumahan terdiri dari jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan *backlog* perumahan.

4.4.1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Banten sebanyak 177.183 unit atau sekitar 5,92% dari total jumlah keluarga (rumah tangga). Persentase RTLH tertinggi ada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 27,31% (83.900 unit) dan Kabupaten Lebak sebanyak 18,23% (63.714 unit). Sedangkan RTLH terendah: Kota Cilegon sebanyak 0% (1 unit) dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 0,90% (696 unit).

Tabel 4.18 RTLH Provinsi Banten Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	RTLH	RTLH (%)
1.	Kabupaten Lebak	349,537	63.714	18,23
2.	Kabupaten Pandeglang	307,254	83.900	27,31
3.	Kabupaten Serang	385,083	15.413	4,00
4.	Kabupaten Tangerang	824,820	8.950	1,09
5.	Kota Cilegon	108,341	1	0,00
6.	Kota Serang	158,496	1.427	0,90
7.	Kota Tangerang	510,170	3.082	0,60
8.	Kota Tangerang Selatan	351,395	696	0,20
TOTAL		2,995,096	177.183	5,92

Sumber: BPS & datartlh.perumahan.go.id

4.4.2. Backlog Perumahan

Total *backlog* kepemilikan rumah di Provinsi Banten mencapai 374.412 unit (12,50%). Wilayah dengan persentase *backlog* tertinggi adalah Kota Tangerang 23,49% (119.839 unit) dan Kota Cilegon 17,03% (18.450 Unit). Sedangkan *backlog* terendah berada oleh Kabupaten Serang 4,75% (18.288 unit) dan Kabupaten Lebak 6,64% (23.217 unit).

Tabel 4.19 Backlog Perumahan Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	Backlog (unit)	Backlog (%)
1.	Kota Cilegon	108,341	18.450	17,03
2.	Kota Serang	158,496	18.870	11,91
3.	Kota Tangerang	510,170	119.839	23,49
4.	Kota Tangerang Selatan	351,395	56.107	15,97
5.	Kabupaten Lebak	349,537	23.217	6,64
6.	Kabupaten Pandeglang	307,254	32.990	10,74
7.	Kabupaten Tangerang	824,820	86.651	10,51
8.	Kabupaten Serang	385,083	18.288	4,75
TOTAL		2,995,096	374.412	12,50

Sumber: BPS Banten, 2021

4.4.3. Rumah Khusus

Rumah khusus di Banten diperuntukkan bagi pemerintahan, rumah dinas, atlet, mahasiswa dan kelompok masyarakat tertentu (nelayan).

Terdapat 20 rumah khusus yang tersebar di seluruh wilayah Banten. Sebaran rumah khusus di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20 Rumah Khusus Provinsi Banten

No.	Balai	Nama Rumah Khusus	Jumlah Unit
1.	Pemda di Prov. Banten	PELTI - Atlet Deria Nur Haliza	1
2.		PELTI - Atlet Jessy Priskila Rompies	1
3.		Polres Serang	6
4.		Polsek Anyer	4
5.		Polsek Bayah	1
6.		Polsek Bojonegara	1
7.		Polsek Cigeulis	4
8.		Polsek Cikedal	4
9.		Polsek Cikulur	4
10.		Polsek Cipanas	4
11.		Polsek Pandeglang	5
12.		Polsek Pontang	4
13.		Polsek Tirtayasa	1
14.		Rumah Atlet Berprestasi	1
15.		Rumdin Kodiklat Mabes TNI	23
16.		Rumah Khusus Korban Bencana Lebak	54
17.		Rumdin Polda Lebak	5
18.		SPN Polda Banten	9
19.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	Rumah Khusus Korban Tragedi Nduga	1
20.	Wilayah Jawa I	Rusus Nelayan Mauk	50
TOTAL			183

Sumber: sigi.pu.go.id

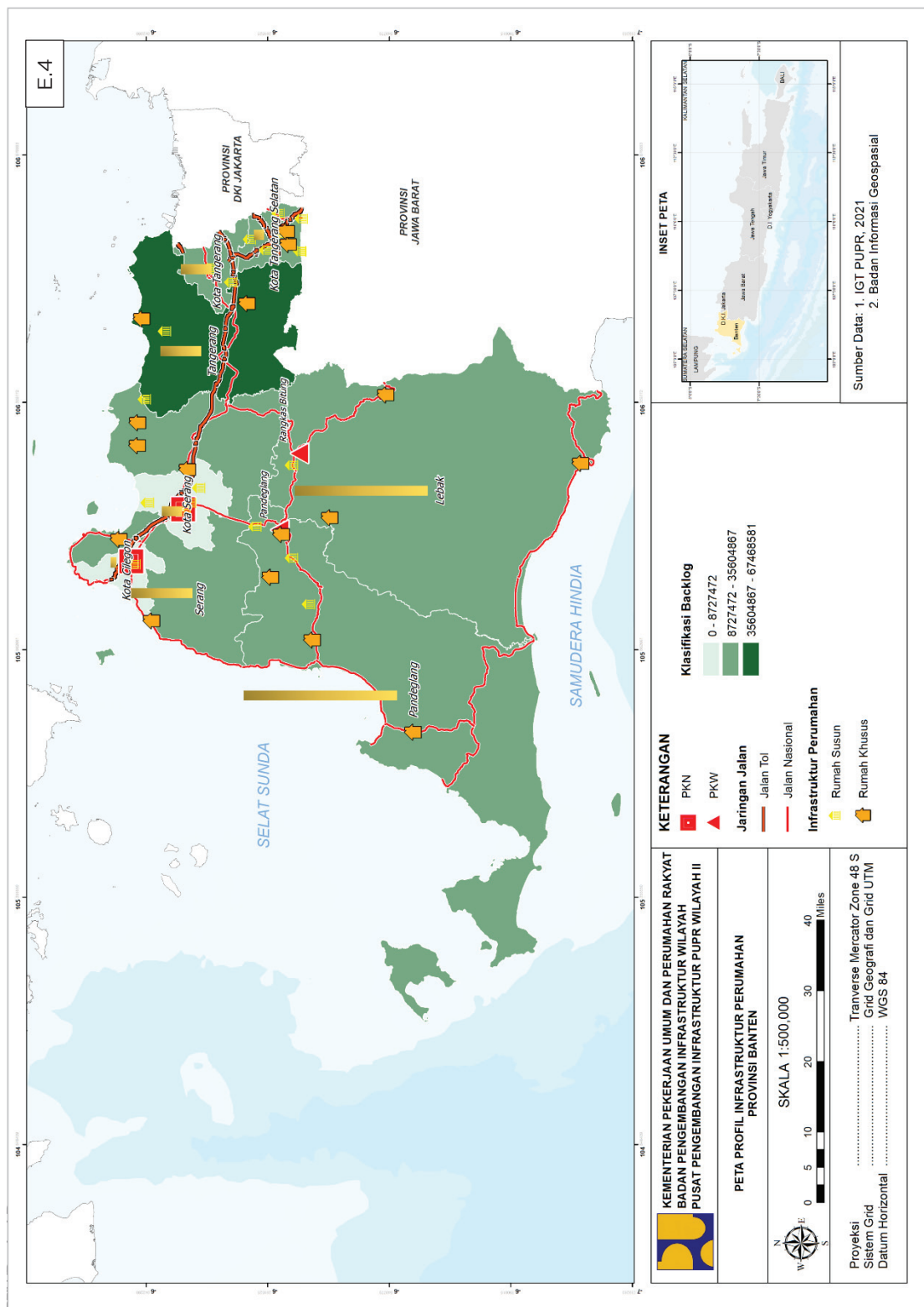
4.4.4. Rumah Susun

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membangun 31 rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Provinsi Banten dengan jumlah total sebanyak 1.420 unit. Rumah susun ini terdiri dari rusun pekerja, rusun instansi pemerintahan, rusun mahawasiwa, dan rusun pondok pesantren. Sebaran rusun di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21 Rumah Susun Provinsi Banten

No.	Balai	Nama Rusun	Jumlah Unit
1.	Pemda di Prov. Banten	BPPT Serpong	50
2.		DCKPRKT Kota Tangerang	50
3.		Dinas Tata Kota Serang	114
4.		DITSBHARA Polda Banten	48
5.		Kodiklat Mabes TNI	70
6.		Pemkab Lebak	58
7.		PP. Lingkungan Hidup Al Ihya	24
8.		Rusun Pondok Pesantren Yayasan Raudatulsallam Mauk	14
9.		Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Prima Graha Serang	50
10.		Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	50
11.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I	DTKBP Tangsel	70
12.		DTRK Serang	70
13.		Politeknik Kemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian	43
14.		PP Al Khairiyah	37
15.		PP An Nawawi Tanara	30
16.		Rusun ASN Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	42
17.		Rusun KEK Tj Lesung	64
18.		Rusun Mahasiswa Yayasan Institut Ilmu Al Quran	107
19.		Rumah Susun Ponpes Al Husainy	37
20.		Rumah Susun Ponpes An Nawawi Tanara	32
21.		Rumah Susun Ponpes Daarul Falah	14
22.		Rumah Susun Ponpes Mambaul Hasan	14
23.		Rumah Susun Universitas Islam Negeri SMH	43
24.		Rusun Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mum	14
25.		Rusun Ponpes Jaiatul Ikhwan	14
26.		Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geologi	50
27.		UIN Syarif Hidayatullah	50
28.		Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	50
29.		Yayasan An Nawawi Tanara	54
30.		Yayasan Yatim Piatu Shahibul Barokah Walfadillah	22
31.		Yonif 320 Badak Putih	35
TOTAL			1.420

Sumber: sigi.pu.go.id



Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi Banten

4.5. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR

Sub bab ini mencakup kondisi infrastruktur perhubungan, infrastruktur jaringan energi, dan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

4.5.1. Infrastruktur Perhubungan

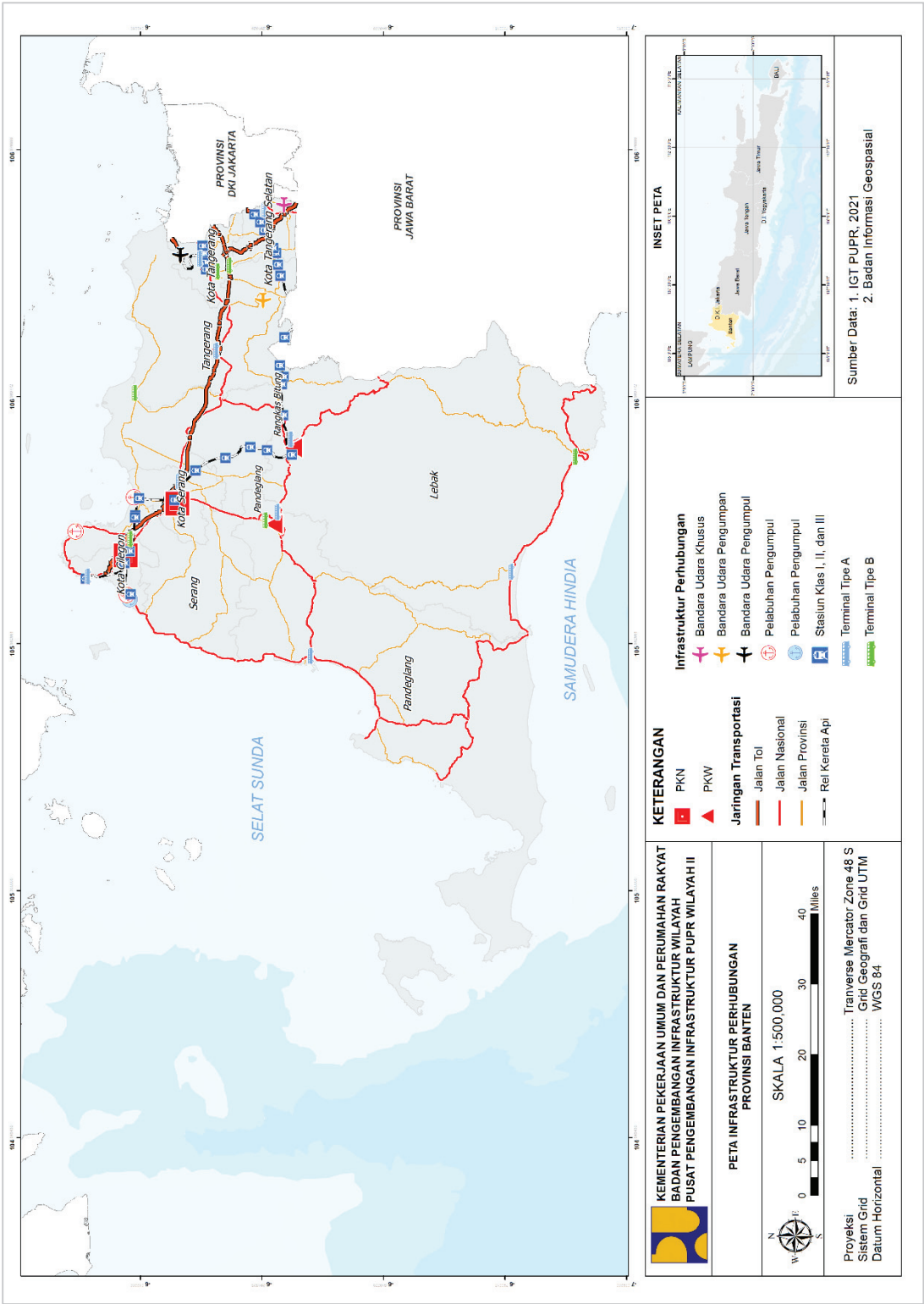
Simpul utama transportasi di Banten, khususnya terkait perpindahan orang berpusat di Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan simpul utama transportasi barang berada di Pelabuhan Cigading dan Merak (Kota Cilegon) yang juga didukung oleh keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta. Adapun sebagian kecil pergerakan barang dilakukan melalui jaringan rel kereta api dan bandar udara. Sementara itu, terdapat simpul transportasi udara Bandara Soekarno-Hatta (Kab. Tangerang) yang menjadi hub internasional. Profil jaringan transportasi nasional dan regional dapat dilihat pada Peta 4.5 .

4.5.2. Infrastruktur Jaringan Energi

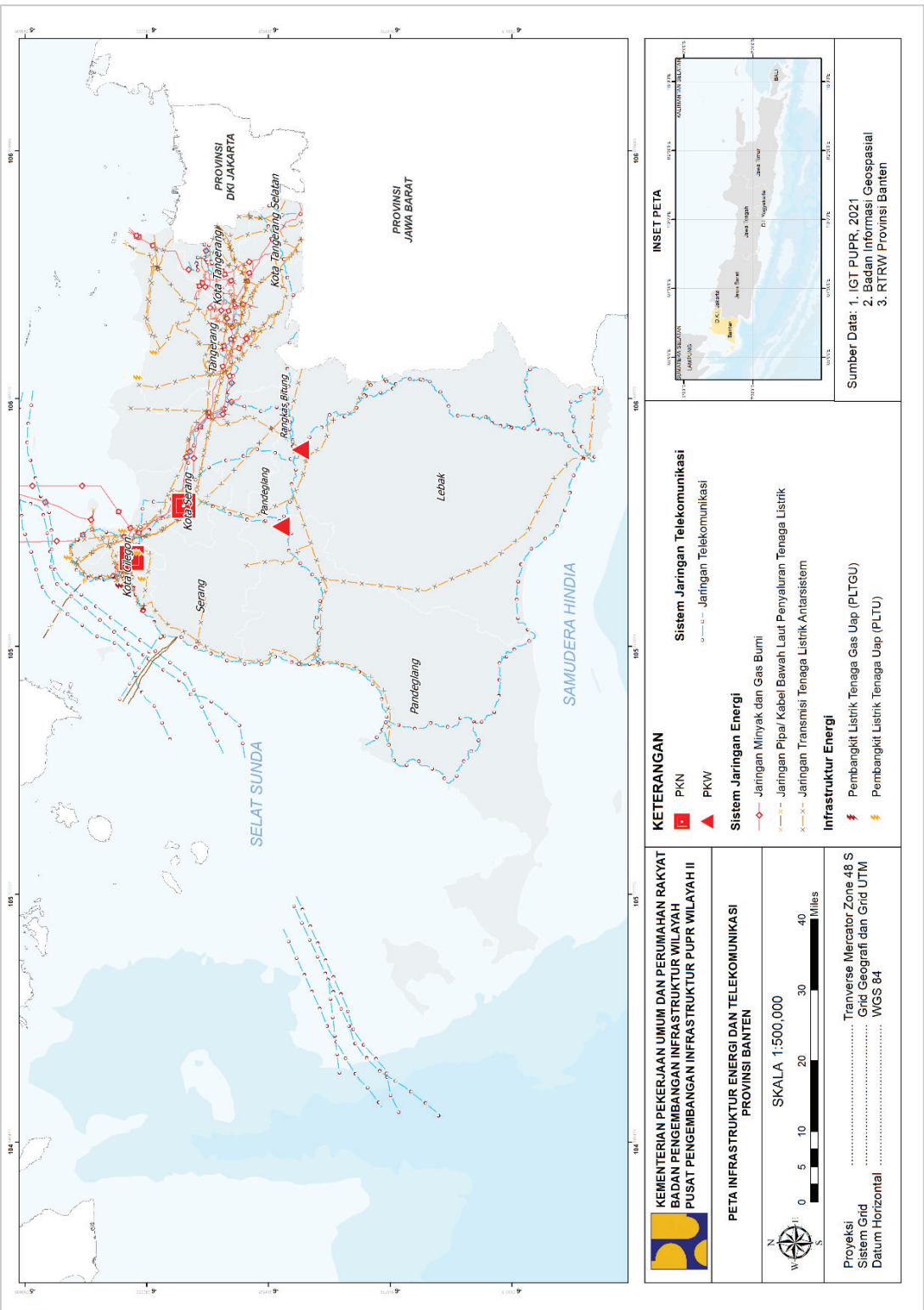
Infrastruktur energi tersebar memanjang mengikuti jalur jalan raya Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Kapasitas terpasang listrik sebesar 7.653,14 MW, tenaga listrik yang dibangkitkan sebesar 47.925,99 GWh, dan listrik yang didistribusikan sebesar 24.646,11 GWh. Sumber energi listrik di Provinsi Banten berasal dari 3 (tiga) pembangkit listrik yang ada di Banten, yaitu PLTU Banten 1 Suralaya di Kota Cilegon dengan kapasitas PLTU total 7 unit dan 3.400 MW (atau menyumbang 12% dari kelistrikan Jawa-Madura-Bali), PLTU Banten 2 Labuhan di Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 2x300 MW, dan PLTU Banten 3 Lontar di Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 3x315 MW. Selain Banten, listrik dari ketiga PLTU tersebut juga didistribusikan ke Provinsi DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat sebagai penyedia energi listrik untuk domestik dan industri.

4.5.3. Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Presentase penduduk di Provinsi Banten yang menggunakan atau memiliki telepon rumah/PSTN di tahun 2020 sebesar 1,83%, dan sebanyak 64,40% telah menggunakan jaringan seluler/handphone. Jumlah menara *Base Transceiver Station (BTS)* di Banten terbanyak nomor 10 di Indonesia, yaitu sebanyak 1.106 unit (nasional 39.062 unit).



Peta 4.5 Profil Infrastruktur Perhubungan Provinsi Banten



Peta 4.6 Profil Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi Banten

BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis menjelaskan tentang potensi dan kendala yang harus ditangani. Terdapat 3 (tiga) isu utama di Provinsi Banten yaitu: masih lemahnya struktur industri hulu - hilir khususnya industri petrokimia dan baja, masih rendahnya daya saing pariwisata karena keterbatasan 3A dan daya dukung lingkungan, dan ketertinggalan wilayah Pansela Banten.

A. Lemahnya Struktur Industri Petrokimia dan Baja

Kontribusi ekonomi Provinsi Banten terhadap PDB nasional sebesar 4,05% atau 665,92 triliun rupiah pada tahun 2021, sedangkan sektor industri Banten berkontribusi sebesar 5% terhadap PDB sektor industri nasional. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi ke 2 di Banten, yaitu sebanyak 1.128.392 jiwa (20,3%). Selain industri pengolahan sebagai sektor unggulan, sektor yang memiliki kontribusi terbesar lainnya adalah sektor perdagangan (13,33%) dan konstruksi (11,43%).

Tingginya kontribusi sektor industri diakibatkan banyaknya kawasan industri (KI) dan kawasan peruntukkan industri (KPI). Terdapat 14 KI yang menyumbang 11% industri nasional dengan luasan 8.500 ha yang tersebar di utara (Kab Tangerang, Kab Serang, dan Kota Cilegon). KI terbesar adalah KI Cilegon (pusat industri pengolahan petrokimia dan baja terbesar di Indonesia), KI Wilmar, dan KI Cikande. Banten juga menjadi provinsi peringkat 8 penghasil ekspor nasional dengan nilai ekspor 14,09 miliar pada tahun 2020 dan meningkat 4,32% dari tahun sebelumnya. Komoditas ekspor terbesar adalah sepatu (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).

Perkembangan sektor industri di Banten juga didukung oleh keuntungan posisi kewilayahannya. Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna-Selat Sunda- Samudera Hindia) sehingga kegiatan ekspor impor di Provinsi Banten dilakukan di pelabuhan dalam dan luar Provinsi Banten. Kegiatan ekspor sebagian besar dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok (38%), Pelabuhan Merak (29%) dan Pelabuhan Cigading (19%). Dalam hal aksesibilitas, kegiatan industri Banten telah didukung oleh keberadaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan daerah sebagai jalur utama logistik.

Meskipun merupakan sektor dengan kontribusi PDRB terbesar, struktur industri hulu - hilir masih lemah dan belum memiliki nilai tambah yang optimal. Industri petrokimia dan pengolahan baja walaupun menjadi pengeksport dengan peringkat 8 terbesar, saat ini hanya berfungsi

sebagai perusahaan hulu dan belum dapat mencukupi kebutuhan perusahaan hilir. Akibatnya, pemenuhan bahan baku untuk perusahaan hilir masih tergantung pada impor. Berdasarkan data BPS, impor bahan baku Indonesia mencapai 5,37 juta ton pada tahun 2021. Untuk mengurangi porsi bahan baku impor, pemerintah telah mengambil kebijakan peningkatkan komponen dalam negeri pada seluruh sektor ekonomi, termasuk industri. Hal ini menjadi peluang bagi Provinsi Banten untuk memperbaiki rantai pasok industri guna mendorong terbentuknya struktur ekonomi berbasis bahan baku dalam negeri. Namun hal ini masih dihadapkan pada kendala kualitas bahan baku dalam negeri yang belum bisa bersaing dengan bahan baku impor.

Dalam hal kewilayahan, sektor industri sebagian besar terkonsentrasi di wilayah utara (97%), dengan kontributor terbesar Kota Cilegon - Serang (60 triliun rupiah), Kota Tangerang (39 triliun rupiah), dan Kabupaten Tangerang (32 triliun rupiah). Hal ini didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai *outlet* dan jalan tol Merak-Tangerang dan jalan Pantura sebagai *backbone* distribusi barang. Tingginya aktivitas industri di wilayah utara yang belum terintegrasi dengan *outlet*, menyebabkan kenaikan bangkitan arus kendaraan logistik. Pada saat ini ruas jalan nasional yang mendukung kawasan industri memiliki tingkat pelayanan rendah ($VCR > 0,8$). Selain itu, sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal.

Perkembangan sektor industri yang pesat perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan serta ketahanan pangan. Saat ini terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi di wilayah utara (Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang) akibat tingginya aktivitas ekonomi, termasuk industri, yaitu sebesar 7.866 ha per tahun. Alih fungsi ini terjadi di lahan dengan tingkat penyediaan jasa ekosistem pangan tinggi dan sangat tinggi sehingga berpotensi mengurangi produktivitas pertanian. Tingginya kebutuhan air di wilayah utara oleh besarnya aktivitas ekonomi baik industri, rumah tangga, dan komersial lainnya menyebabkan DAS di wilayah tersebut menjadi kritis berat.

Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Industri

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN	OPSI MASA DEPAN		MASALAH UTAMA / GAP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Makro	Kontribusi Ekonomi	Kontribusi ekonomi Provinsi Banten terhadap PDB nasional sebesar 4,05% atau 665,92 triliun rupiah pada tahun 2021. Sedangkan sektor industri Banten berkontribusi sebesar 5% terhadap PDB sektor industri nasional	Pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan (RTR Pulau Jawa Bali)	- KI Cilegon - KI Wilmar - KI Cikande	Penguatan peran Banten sebagai pusat kegiatan industri pengolahan skala nasional dengan komoditas unggulan petrokimia dan industri pengolahan logam serta hasil tambang dari hulu ke hilir	Nilai tambah ekonomi sektor industri masih rendah, dimana bahan baku masih bergantung pada impor dan produk ekspor masih berupa produk setengah jadi	Masih lemahnya struktur industri hulu - hilir khususnya industri petrokimia & baja serta industri turunannya guna mendorong nilai tambah & manfaat ekonomi bagi Provinsi Banten	
		Ekspor Banten berada di peringkat 8 nasional dengan nilai sebesar 14,09 miliar rupiah pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 4,32% dari tahun sebelumnya						
		Komoditas ekspor terbesar adalah alas kaki (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).						
		Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia				Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten		
	Proses Produksi Industri	Industri petrokimia dan pengolahan baja Banten masih bergantung pada bahan baku impor Industri baja Banten mendapatkan bahan baku dari dalam negeri dan juga impor	Peningkatan industri nasional melalui kebijakan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada seluruh sektor ekonomi		Perbaikan rantai pasok industri di Banten untuk mendorong terbentuknya struktur ekonomi berbasis bahan baku dalam negeri	Kualitas bahan baku hasil industri dalam negeri belum dapat memenuhi standar kebutuhan industri hilir		
Lokasi Strategis	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI1 (Laut Cina Selatan-	Indonesia sebagai poros maritim dunia		Peningkatan kualitas pelabuhan ekspor impor di Provinsi Banten	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional			

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Natuna- Selat Sunda- Samudera Hindia)			untuk mempercepat proses pemasaran produk industri	belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional	
Meso	Jaringan Transportasi & Outlet Komoditas (Jaringan jalan tol dan jalan nasional, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading)	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura	Pengembangan konektivitas dan jalur logistik Pantura Jawa untuk melayani pengembangan sektor industri		Pengembangan konektivitas dan jalur logistik Pantura Jawa untuk melayani pengembangan sektor industri	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal	
		Kegiatan ekspor sebagian besar dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok (38%), Pelabuhan Merak (29%) dan Pelabuhan Cigading yang melayani KI Cilegon/ Krakatau Steel (19%)					
Mikro	Aktivitas Ekonomi, Komoditas Unggulan & Fisik Kewilayahan (Provinsi Banten memiliki karakteristik yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	Dari total 14 KI di Banten sebanyak 97% berada di wilayah utara	Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Banten yang tersebar di WKP I (Kab. Tangerang – Kota Tangerang – Kota Tangerang Selatan) & WKP II (Kab. Serang – Kota Serang – Kota Cilegon)		Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Banten (WPPI) Industri (WPPI) Banten untuk mendorong integrasi sektor industri terutama di wilayah utara	Disparitas yang semakin tinggi antara wilayah utara yang merupakan pusat industri dengan wilayah selatan yang belum memiliki pusat kegiatan ekonomi strategis	
		Share sektor industri di Kawasan Serang – Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten					
		Produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi					
		Percampuran antara jalur logistik dengan lalu lintas	Percepatan pembangunan		Percepatan pembangunan	Belum terintegrasinya kawasan industri dengan	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		wisata menyebabkan terganggunya transportasi dan kemacetan	infrastruktur pendukung kawasan industri terutama konektivitas dan air baku		infrastruktur pendukung kawasan industri terutama konektivitas dan air baku	pelabuhan yang mengakibatkan tingginya bangkitan lalu lintas logistik di jalan umum	
		Perkembangan industri Banten belum didukung oleh penyediaan air baku yang memadai				Penyediaan air baku tidak dapat mengakomodir peningkatan kebutuhan akibat perkembangan industri karena pemenuhan air baku diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik	
		Terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Wilayah Utara Banten sebesar 7.866 ha per tahun (terutama menjadi industri) yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun		Pengendalian pengembangan kawasan industri yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masih lemahnya pengawasan untuk memastikan kesesuaian peruntukan lahan	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Rendahnya Daya Saing Pariwisata

Provinsi Banten menjadi provinsi dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara terbesar ke-5 se Indonesia (38 juta orang/tahun pada tahun 2021). Tingginya kunjungan tersebut salah satunya dengan adanya hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebanyak 5% dari wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta merupakan wisatawan yang menuju ke Banten. Kedekatan geografis dengan DKI Jakarta juga mengakibatkan destinasi wisata di Banten menjadi salah satu alternatif tujuan wisatawan yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya.

Dari segi atraksi (*attraction*), Banten memiliki daya tarik wisata yang beragam, antara lain wisata alam dan bahari (Ujung Kulon, Tanjung Lesung), budaya (Baduy), sejarah dan religi (Banten Lama), serta minat khusus (Krakatau). Beberapa destinasi wisata juga telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, yaitu KEK Tanjung Lesung (PP No. 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung), KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung dsk, KSPN Krakatau dsk, KPPN Serang- Banten Lama, dan KPPN Lebak- Baduy (PP No. 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010-2025). Namun, konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW masih perlu peningkatan.

Kondisi amenitas (*amenity*) pada tahun 2021 terdapat 453 hotel (berbintang dan nonbintang), yang mayoritas di kawasan perkotaan, yang menyediakan 19.139 kamar dan 27.791 tempat tidur, namun untuk hotel di DTW belum memadai. Sementara itu, sarana dan prasarana pendukung pariwisata antara lain tempat parkir, pusat informasi, masih terbatas, terutama destinasi yang jauh dari kawasan perkotaan.

Kondisi konektivitas (*accessibility*) telah didukung oleh jaringan jalan yang cukup memadai, seperti akses jalan tol, jalan nasional dan daerah, serta pelabuhan. Sedangkan untuk DTW yang berada di selatan, hanya dilayani oleh jalan daerah, sehingga aksesibilitasnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan utara.

Kendala lain dalam pengembangan pariwisata adalah posisi geografisnya yang berada di kawasan rawan bencana alam (gempa bumi, tsunami dan tanah longsor), khususnya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Destinasi wisata di kawasan pesisir memiliki ancaman bencana tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik dari sesar yang berada di Samudera Hindia dan aktivitas vulkanik dari Anak Gunung Krakatau.

Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Pariwisata

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro	Kontribusi Ekonomi	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Banten terbesar ke 4 se Indonesia, yaitu 38 juta orang/ tahun pada tahun 2021	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahar		Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten	Masih rendahnya daya saing pariwisata Banten karena keterbatasan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
		Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga					
Meso	Konstelasi Wilayah dan Jaringan Transportasi & Akses Pariwisata (Jalan Tol, Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak)	Dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan ekonomi lainnya yang didukung oleh jaringan prasarana transportasi yang memadai (RTRWN)		Keterpaduan konektivitas antar moda transportasi & penyelesaian jaringan jalan tol antar hub transportasi dengan destinasi wisata dan antar DTW	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW	
		Banten menjadi <i>hinterland</i> bagi WM Jabodetabekpunjur sehingga wisata Banten menjadi alternatif tujuan wisatawan nusantara dari Jakarta dan sekitarnya					
Mikro	Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Wisata	Pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam seperti Ujung Kulon (ekowisata), Cikadu dan	Pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas pariwisata, serta		Target wisatawan sebesar 32 juta/ tahun di 2029 yang didukung	Wisata unggulan Banten berfungsi sebagai kawasan konservasi dan	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(Provinsi Banten memiliki karakteristik destinasi wisata yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari)	pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi bidang pariwisata		oleh pengembangan atraksi dan amenitas di kawasan pariwisata unggulan	cagar budaya yang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan	
		Nasional masih belum terlayani dengan jaringan jalan yang baik					
		Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih belum memadai, terutama destinasi pariwisata yang jauh dari kawasan perkotaan			Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberadaan kawasan rawan bencana	Pengembangan kawasan wisata berwawasan lingkungan, mitigasi bencana, dan memperhatikan prinsip pelestarian kawasan lindung setempat	
		Beberapa DTW juga berstatus sebagai taman nasional, sehingga dalam pengembangannya perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan					
		KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung berada di kawasan rawan bencana alam berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Ketertinggalan Wilayah Pansela Banten

Ketertinggalan wilayah selatan dapat juga dilihat dari belum memadainya layanan infrastruktur dasar. Akses air aman rata-rata (12%) masih di bawah target RPJMN, akses sanitasi aman hanya 2%, persampahan 13%. Minimnya layanan infrastruktur tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan dan aktivitas ekonomi. Aksesibilitas wilayah selatan Banten juga masih minim karena hanya didukung oleh Pansela Jawa yang menghubungkan Pandeglang dan Lebak, dan beberapa ruas jalan daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah utara yang didukung oleh berbagai infrastruktur seperti pelabuhan penumpang utama, bandara utama, jalan tol, dan jalan nasional sehingga Banten bagian utara berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang Pulau Jawa.

Ketertinggalan suatu wilayah juga dapat dilihat dari banyaknya desa tertinggal. Terdapat 4 Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Pandeglang dan 11 desa di Kabupaten Lebak. Ketertinggalan dilihat dari 5 dimensi: pelayanan dasar di bawah target RPJMN, kondisi infrastruktur di bawah rata-rata nasional, aksesibilitas menuju PKL/PKW, cakupan pelayanan umum rendah, dan kondisi pemerintahan desa di bawah standar nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kontribusi PDRB Banten masih rendah, yaitu hanya sebesar 6,93% PDRB Pulau Jawa dan 4,11% PDB Nasional. Konsentrasi PDRB tertinggi berada pada wilayah utara yaitu Kota Tangerang (102,41 T), Kabupaten Tangerang (93,48 T), dan Kota Cilegon (73,32 T), sedangkan PDRB wilayah selatan (Pandeglang dan Lebak) memiliki kontribusi terendah, yaitu sebesar 4,34% dan 4,58%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara utara dan selatan Provinsi Banten.

Meskipun tertinggal, wilayah selatan Banten memiliki sektor unggulan berupa pertanian. Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, terutama dari Pandeglang dan Lebak (57%). Meskipun penghasil padi terbesar, wilayah Banten Selatan relatif tertinggal karena aksesibilitas masih minim dimana hanya terdapat 1 ruas jalan nasional dan jalan daerah sehingga minat investasi di wilayah selatan Banten rendah. Sementara itu, pengembangan Pansela Jawa, termasuk Pansela Banten, perlu kehati-hatian karena memiliki keterbatasan geografis (wilayah selatan Banten merupakan kawasan rawan bencana gempa dan tsunami). Selain itu wilayah Lebak bagian timur-selatan merupakan bagian dari TN Halimun-Salak (di Provinsi Banten - Jawa Barat) yang memiliki fungsi sebagai konservasi. Hal ini menyebabkan pengembangan wilayah selatan tidak bisa masif seperti wilayah utara.

Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Keteringgalan Pansela

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro	Distribusi Ekonomi Regional	Kontribusi PDRB Provinsi Banten masih rendah, yaitu hanya sebesar 6,93% PDRB Pulau Jawa dan 4,11% PDB Nasional	Strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mendorong pemerataan	Kabupaten Pandeglang: 1. Desa Cikiruh 2. Desa Curug 3. Desa Sudimanik 4. Desa Sukamulya Kabupaten Lebak: 1. Desa Cikaret 2. Desa Cikadongdong 3. Desa Margaluyu 4. Desa Pasirbitung 5. Desa Cikate 6. Desa Ciladaeun 7. Desa Parakabeusi 8. Desa Mekar Rahayu 9. Desa Ciapus 10. Desa Keboncau 11. Desa Kanekes	Strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mendorong pemerataan	Minat investasi di wilayah selatan Banten masih rendah	Keteringgalan wilayah Pansela Banten diakibatkan oleh keterbatasan geografis dan minimnya layanan infrastruktur dasar
		Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berkontribusi sebesar 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten					
Meso	Konstelasi Wilayah dan Resiko Bencana	Wilayah selatan Banten dilayani oleh jalan Pansela Jawa, yang untuk Provinsi Banten menghubungkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Pembangunan Pulau Jawa bagian selatan memperhatikan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana (RTR Pulau Jawa Bali)		Pengembangan wilayah selatan berbasis pertanian dan wisata pantai memanfaatkan koridor Pansela sebagai <i>backbone</i>	Pengembangan Pansela Jawa, termasuk Pansela Banten, perlu kehati-hatian karena memiliki keterbatasan geografis	
		Wilayah selatan Banten merupakan kawasan rawan bencana gempa dan tsunami karena berbatasan dengan Samudera Hindia			Pengurangan resiko bencana pada wilayah selatan Pulau Jawa, termasuk Pansela Banten		
Mikro	Pemenuhan Infrastruktur	Kontribusi PDRB wilayah selatan Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) terhadap PDRB	Kawasan pantai selatan sebagai kawasan strategis		Pengembangan Pansela Banten untuk mengurangi ketimpangan	Keterbatasan kapasitas fiskal Provinsi Banten, terutama	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dasar dan Aksesibilitas	Provinsi Banten paling rendah, yaitu sebesar 4,34% dan 4,58%	provinsi (RTRW Provinsi Banten)		wilayah utara-selatan Banten	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dalam penediaan infrastruktur mendukung kegiatan ekonomi	
		Terdapat 15 desa sangat tertinggal: 4 di Kabupaten Pandeglang dan 11 desa di Kabupaten Lebak					
		Keteringgalan dilihat dari 5 dimensi: pelayanan dasar yang masih di bawah target RP JMN, kondisi infrastruktur di bawah rata-rata nasional, aksesibilitas menuju PKL/PKW, cakupan pelayanan umum rendah, kondisi pemerintahan desa di bawah standar nasional			Peningkatan indeks pembangunan desa (IPD) dari IPD <50 (desa tertinggal) menjadi IPD rata-rata Banten, yaitu 64,80		
		Ke 15 desa sangat tertinggal tersebut belum terlayani Pamsimas, SPAM dan PDAM			Terpenuhinya standar layak di kawasan permukiman yang perdesaan sesuai dengan amanat RP JMN 2020-2024 yaitu: 1) air layak 100%; 2) sanitasi aman 15% sanitasi layak 90%; 3) tingkat pengolahan sampah 80% 4) konektivitas layak melalui peningkatan kemitraan jalan	Pemenuhan infrastruktur dasar Pensela Banten terkendala kondisi geografis dan permukiman yang cenderung tersebar	
		Akses air aman rata-rata 15,15% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 9,94% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Lebak) yang mana masih jauh dari rata-rata target RPJMN					
		Sanitasi aman 0,77% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 3,40% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Lebak) masih jauh dari rata-rata target RPJMN					

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA / GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tingkat pelayanan persampahan 7% (mengacu pada Kabupaten Pandeglang) dan 18% (mengacu pada Kabupaten Lebak)					
		Infrastruktur jalan berupa jalan kabupaten dan jalan desa dengan kondisi kurang mantap					
		Aksesibilitas wilayah selatan Banten masih minim dikarenakan hanya terdapat 1 ruas jalan nasional dan jalan daerah					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Skenario pengembangan wilayah menjelaskan tentang proyeksi pertumbuhan, skenario pengembangan, serta justifikasi kawasan prioritas. Tujuan dari skenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.

6.1. Proyeksi Pertumbuhan

Sub bab ini menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangannya.

6.1.1. Proyeksi Demografi

Metode yang digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan model eksponensial dimana jumlah penduduk akan terus meningkat setiap tahunnya. Alasan penggunaan model eksponensial adalah untuk mendapatkan jumlah proyeksi penduduk yang maksimal, terkait perhitungan optimal kebutuhan infrastruktur.

Perhitungan proyeksi penduduk didasarkan pada kecenderungan 10 tahun terakhir (2010–2020). Dalam 10 tahun terakhir (2010-2020) penduduk Provinsi Banten meningkat 1,3 juta jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 11.904.562 jiwa, dan diperkirakan naik menjadi 14.262.531 jiwa pada 2034 dengan tingkat pertumbuhan per tahun 1,30%. Pada tahun 2034, diprediksi jumlah penduduk tertinggi ada di Kab. Tangerang (4.016.898 jiwa), Kota Tangerang (2.097.716 jiwa), dan Kab. Serang (2.005.686 jiwa). Sedangkan yang paling rendah berada di Kota Cilegon (539.270 jiwa) dan Kota Serang (894.747 jiwa).

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Banten

Wilayah	(CAGR 10-)	Proyeksi Penduduk Banten (juta jiwa)									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Banten	1,30%	12,72	12,88	13,04	13,21	13,38	13,55	13,78	13,90	14,08	14,26
Pandeglang	1,05%	1,34	1,36	1,37	1,39	1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48
Lebak	1,44%	1,49	1,51	1,54	1,56	1,58	1,60	1,63	1,65	1,67	1,70
Tangerang	1,52%	3,50	3,56	3,61	3,66	3,72	3,78	3,83	3,89	3,95	4,01
Serang	1,49%	1,75	1,78	1,80	1,83	1,86	1,89	1,91	1,94	1,97	2,00
Kota Tangerang	0,69%	1,97	1,98	1,99	2,01	2,02	2,04	2,05	2,06	2,08	2,09
Kota Cilegon	1,51%	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53
Kota Serang	1,82%	0,76	0,77	0,78	0,80	0,81	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89
Kota Tangsel	0,84%	1,41	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,51	1,52

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, pada tahun 2023 kepadatan bruto Provinsi Banten berada dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 150 jiwa/ha. Sementara pada tahun 2034 kepadatan tertinggi berada di Kota Tangerang dengan 136,29 jiwa/hektar. Kabupaten dengan kepadatan terendah berada di Lebak yang hanya mencapai 4,97 jiwa/hektar.

Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Banten

Wilayah	Kepadatan Penduduk Bruto (jiwa/km2)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Banten	33,34	33,69	34,03	34,38	34,73	35,09	35,45	35,82	36,19	36,56
Pandeglang	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53
Lebak	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49
Tangerang	3,46	3,51	3,57	3,62	3,68	3,73	3,79	3,85	3,91	3,97
Serang	1,01	1,02	1,04	1,05	1,07	1,09	1,10	1,12	1,13	1,15
Kota Tangerang	12,80	12,89	12,98	13,07	13,16	13,25	13,34	13,44	13,53	13,62
Kota Cilegon	2,68	2,72	2,76	2,80	2,85	2,89	2,93	2,98	3,02	3,07
Kota Serang	2,85	2,90	2,95	3,01	3,06	3,12	3,17	3,23	3,29	3,35
Kota Tangsel	9,60	9,68	9,76	9,84	9,92	10,01	10,09	10,17	10,26	10,35

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Secara spasial, kepadatan penduduk bruto untuk masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.1 Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi Banten
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selain penduduk alami, perkembangan pariwisata di Banten juga berpotensi mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Banten. Dalam periode 2011-2022, terjadi peningkatan wisatawan yang cukup signifikan, yaitu 5,81% per tahun. Pada tahun 2034, jumlah wisatawan Banten diproyeksikan sebesar 45 juta jiwa.

Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Provinsi Banten

Tahun	Proyeksi Wisatawan (juta jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wisatawan Nusantara	26,70	28,25	29,89	31,63	33,46	35,41	37,47	39,64	41,95	44,38
Wisatawan Mancanegara	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80
Total	27,18	28,76	30,43	32,20	34,07	36,05	38,15	40,36	42,71	45,19

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Pertumbuhan sektor industri yang pesat juga mengakibatkan penambahan tenaga kerja industri. Pada tahun 2022, angkatan kerja penduduk Banten dalam sektor industri mencapai 20,3% dari total jumlah penduduk. Jumlah ini terbagi ke dalam dua (2) klasifikasi berdasarkan ukurannya, yaitu industri besar-sedang dan industri mikro-kecil. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang di Banten bergerak ke arah positif. Pada tahun 2034, jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang diproyeksikan sebanyak 700 ribu jiwa, sedangkan tenaga kerja industri mikro dan kecil mencapai 200 ribu jiwa.

Tabel 6.4 Proyeksi Tenaga Kerja Provinsi Banten

Tahun	Proyeksi Tenaga Kerja (ribu jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Industri Besar dan Sedang	716,7	718,0	719,4	720,8	722,2	723,6	725,0	726,4	727,8	729,2
Industri Mikro dan Kecil	204,6	205,0	205,4	205,8	206,2	206,6	207,0	207,3	207,7	208,1
Total	921,3	923,1	924,8	926,6	928,4	930,2	932,0	933,8	935,6	937,4

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

6.1.2. Proyeksi Ekonomi

Pertumbuhan PDRB menggunakan model Compound Annual Growth Rate (CAGR) tahun 2010-2020 dan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun proyeksi sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2010-2020. Pada tahun 2023 nilai PDRB Provinsi Banten sebesar 1.078.492 miliar rupiah dan meningkat sebesar 6,5% per tahun, sehingga pada tahun 2034 nilai PDRB diproyeksikan sebesar 959.929 miliar rupiah.

Tabel 6.5 Proyeksi PDRB Provinsi Banten

Tahun	PDRB (miliar rupiah)
2025	576.378
2026	610.108
2027	646.089
2028	684.486
2029	725.474
2030	767.265
2031	811.463
2032	858.207

Tahun	PDRB (miliar rupiah)
2033	907.644
2034	959.929

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

Sektor yang menjadi sektor unggulan PDRB ADHK tahun 2029 yaitu sektor industri pengolahan (28,29%), perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (14,33%), serta konstruksi (12,86%). Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah pengadaan air; pengelolaan sampah (0,10%) dan pertambangan dan penggalian (0,38%).

Tabel 6.6 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahun 2029

Kode	Lapangan Usaha	Nilai PDRB	Presentase
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,927.68	4.40%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,773.34	0.38%
C	Industri Pengolahan	205,259.19	28.29%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,922.35	0.68%
E	Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah	732.65	0.10%
F	Konstruksi	93,284.60	12.86%
G	Perdagangan Besar dan Eceran	103,993.57	14.33%
H	Transportasi dan Pergudangan	29,136.06	4.02%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,069.88	2.77%
J	Informasi dan Komunikasi	60,619.52	8.36%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,192.31	2.78%
L	Real Estate	80,775.57	11.13%
M,N	Jasa Perusahaan	8,197.61	1.13%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	13,291.83	1.83%
P	Jasa Pendidikan	25,362.24	3.50%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,189.55	1.68%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	12,746.24	1.76%
	Banten	725,474.21	100%

Sumber: BPS diolah BPIW, 2023

6.1.3. Keberlanjutan Lingkungan

Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem. Ketersediaannya secara aktual dan potensial di masa depan harus menjadi bagian dari penilaian jasa ekosistem serta menjadi dasar pendekatan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan manfaatnya, jasa ekosistem dikelompokkan menjadi jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung.

1. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Wilayah dengan kemampuan penyedia pangan sangat tinggi seluas 18% dari total luas Provinsi Banten, terutama di bagian utara dan barat dan harus dipertahankan karena merupakan wilayah yang subur untuk tanaman pangan.

2. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Wilayah dengan kemampuan penyedia air sangat tinggi hanya seluas 11% dimana 50% wilayah memiliki kemampuan menyediakan air rendah. Wilayah kemampuan penyedia air sangat rendah berada di wilayah dengan kepadatan tinggi di perkotaan dan kawasan industri.

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air & Banjir

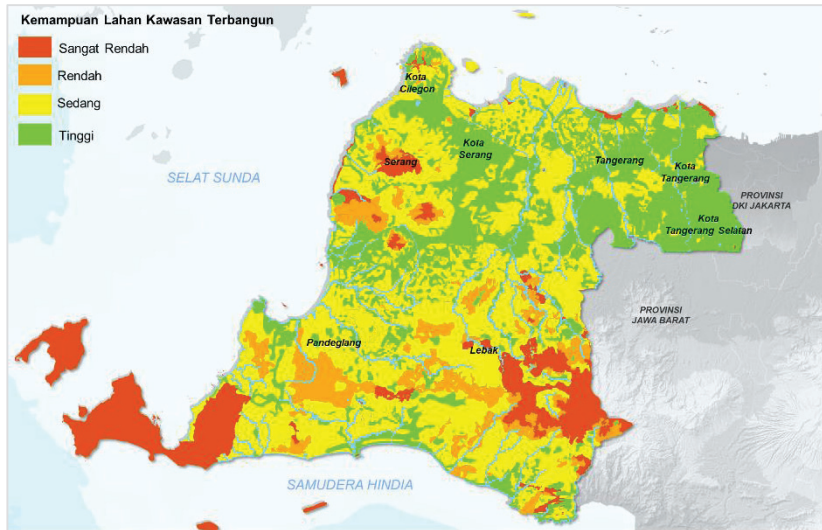
Kemampuan regulasi pengaturan tata air dan banjir cukup baik dengan 45% luasan wilayah Provinsi Banten memiliki kemampuan sangat tinggi dalam mencegah banjir. Akan tetapi di wilayah perkotaan memiliki kemampuan rendah sebesar 13%.

4. Jasa Ekosistem Perlindungan & Pencegahan Bencana

Kemampuan regulasi perlindungan dan pencegahan bencana cukup baik dengan 30% wilayah Provinsi Banten terutama di wilayah dataran rendah memiliki kemampuan sangat tinggi terhadap perlindungan bencana.

5. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal & Ruang Hidup

Kemampuan jasa penyediaan tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi berada di 28% dari wilayah Banten. Daerah yang memiliki daya dukung tinggi untuk permukiman terutama berada di wilayah dataran rendah yang memiliki ketersediaan pangan tinggi dan di luar kawasan lindung dan berfungsi lindung.



Gambar 6.2 Kemampuan Lahan Provinsi Banten
Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.2. Visi dan Strategi

Sub bab visi dan strategi menjelaskan tentang perumusan visi wilayah dan analisis penyusunan strategi pengembangan Provinsi Banten.

6.2.1. Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah dirumuskan dari hasil analisis arah kebijakan di Bab II, dengan meninjau kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur di Bab III dan IV, serta menjawab permasalahan dan isu strategis di Bab V. Fokus pengembangan wilayah di Provinsi Banten meliputi pengembangan sektor industri, pariwisata, dan layanan kawasan tertinggal.

Visi/tujuan dalam pengembangan infrastruktur wilayah Banten yaitu:

”Pemerataan Ekonomi Banten melalui Industri, Pariwisata Nasional, dan Penanganan Kawasan Tertinggal”

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 misi (*grand strategy*) yang akan dilakukan. Keempat misi tersebut sekaligus akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah Provinsi Banten yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya struktur industri hulu - hilir khususnya industri petrokimia & baja serta industri turunannya guna mendorong nilai tambah & manfaat ekonomi bagi Provinsi Banten.

- 2. Masih rendahnya daya saing pariwisata Banten karena keterbatasan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 3. Pengembangan wilayah selatan melalui pembangunan infrastruktur dasar khususnya di kawasan perdesaan untuk mengurangi ketimpangan.

6.2.2. Penyusunan Strategi Fokus Industri

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan Analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan Analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan grand strategy sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.7 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri

Masih Lemahnya Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Kementerian Perindustrian telah menargetkan sektor industri petrokimia & smelter baja di indonesia, termasuk Provinsi Banten, mampu menjadi nomor 1 di ASEAN	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten	26%
ECONOMIC	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	Industri petrokimia dan pengolahan baja Banten masih bergantung pada bahan baku impor	21%
SOCIOLOGICAL	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan	11%

Masih Lemahnya Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
	terampil untuk proses produksi industri	pekerjaan bagi penduduk lokal	
TECHNO-LOGICAL	Era pembangunan 4.0 dengan <i>Smart Infrastructure, Smart Logistic System, Human Capital Infrastructure, Digital Hub & Inovation Park</i>	Sektor industri belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan khususnya industri petrokimia & smelter baja	11%
LEGAL	Sejalan dengan Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) pergerakan pembangunan industri pengolahan yang berada pada WPPI (wilayah pusat pertumbuhan industri) terkonsentrasi pada koridor pertumbuhan utara Banten	Perubahan agenda prioritas nasional mendukung kawasan industri	16%
ENVIRONMENT	Kawasan industri berada di wilayah utara Banten yang memiliki kondisi geografis yang mendukung aktivitas industri	Pencemaran Limbah B3 yang tidak terkendali dapat mencemari lingkungan	16%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis Provinsi Banten yang telah dirumuskan, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *rivalry among existing competitor* (persaingan antar kompetitor eksisting), *bargaining power of customers* (daya tawar pelanggan), *bargaining power of suppliers* (daya tawar pemasok), *threat of new entrants* (ancaman pendatang baru), dan *threat of substitutes* (ancaman produk pengganti).

Tabel 6.8 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri

Masih Lemahnya Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Konversi Threat Menjadi Opportunity	50%	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan-Natuna- Selat Sunda-Samudera Hindia)	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			

Masih Lemahnya Struktur Industri Hulu - Hilir Khususnya Industri Petrokimia & Baja serta Industri Turunannya guna Mendorong Nilai Tambah & Manfaat Ekonomi bagi Provinsi Banten			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
Trend Eksisting	56%	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk proses produksi industri	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	50%	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan Yang Dihadapi	50%	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	Nilai tambah ekonomi sektor industri masih rendah, dimana bahan baku masih bergantung pada impor dan produk ekspor masih berupa produk setengah jadi
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	71%	Kementerian Perindustrian telah menargetkan sektor industri petrokimia & smelter baja di Indonesia, termasuk Provinsi Banten, mampu menjadi nomor 1 di ASEAN	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Analisis SWOT (EFAS IFAS) Fokus Industri

Analisis SWOT sektor industri di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.9 Analisis SWOT Fokus Industri

	Strength		Weakness
1	Share sektor industri di Kawasan Serang – Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten	1	Masih lemahnya industri petrokimia dan pengolahan baja Banten sehingga masih bergantung pada bahan baku impor
2	Komoditas ekspor terbesar Banten adalah alas kaki (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).	2	Produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi
3	Dari total 14 KI di Banten sebanyak 97% berada di wilayah utara	3	Perkembangan industri Banten belum didukung oleh penyediaan air baku yang memadai
4	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	4	Faktor produksi belum siap, baik bahan baku, teknologi, dan SDM

5	Sektor industri Banten memiliki kontribusi sebesar 5% terhadap PDB sektor industri nasional	5	Kualitas bahan baku hasil industri dalam negeri belum dapat memenuhi standar kebutuhan industri hilir
Opportunity		Threat	
1	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk proses produksi industri	1	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal
2	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura	2	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten
3	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna- Selat Sunda- Samudera Hindia)	3	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal
4	Koridor utara Banten menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan jasa, dan pusat pemerintahan	4	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional
5	Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) pergerakan pembangunan industri pengolahan yang berada pada WPPI (wilayah pusat pertumbuhan industri) terkonsentrasi pada koridor pertumbuhan utara Banten	5	Sektor industri belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan khususnya industri petrokimia & smelter baja

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor.

Tabel 6.10 Skoring *Strength* dan *Weakness* Fokus industri

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1	<i>Share</i> sektor industri di Kawasan Serang - Cilegon sebesar 48,23% terhadap industri Provinsi Banten	3	0.21	3	0.64
	2	Komoditas ekspor terbesar Banten adalah alas kaki (43%), besi dan baja (21%), plastik dan barang plastik (20%), serta bahan kimia (16%).	3	0.21	3	0.64
	3	Dari total 14 KI di Banten sebanyak 97% berada di wilayah utara	2	0.14	3	0.43
	4	Industri pengolahan petrokimia (78% nasional) dan smelter baja (39% nasional) merupakan terbesar di Indonesia	3	0.21	3	0.64
	5	Sektor industri Banten memiliki kontribusi sebesar 5% terhadap PDB sektor industri nasional	3	0.21	2	0.43
SUB TOTAL					14	2.79
WEAKNESS	1	Masih lemahnya industri petrokimia dan pengolahan baja Banten sehingga masih bergantung pada bahan baku impor	3	0.26	-2	-0.52
	2	Produk hasil industri sebagian besar hanya berupa produk setengah jadi	2	0.17	-1	-0.17
	3	Perkembangan industri Banten belum didukung oleh penyediaan air baku yang memadai	3	0.26	-2	-0.52

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	4	Faktor produksi belum siap, baik bahan baku, teknologi, dan SDM	2	0.17	-3	-0.52
	5	Kualitas bahan baku hasil industri dalam negeri belum dapat memenuhi standar kebutuhan industri hilir	1.5	0.13	-3	-0.39
SUB TOTAL					11.5	-2.13
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL						0,66

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sedangkan skoring *opportunity* dan *threat* fokus industri di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

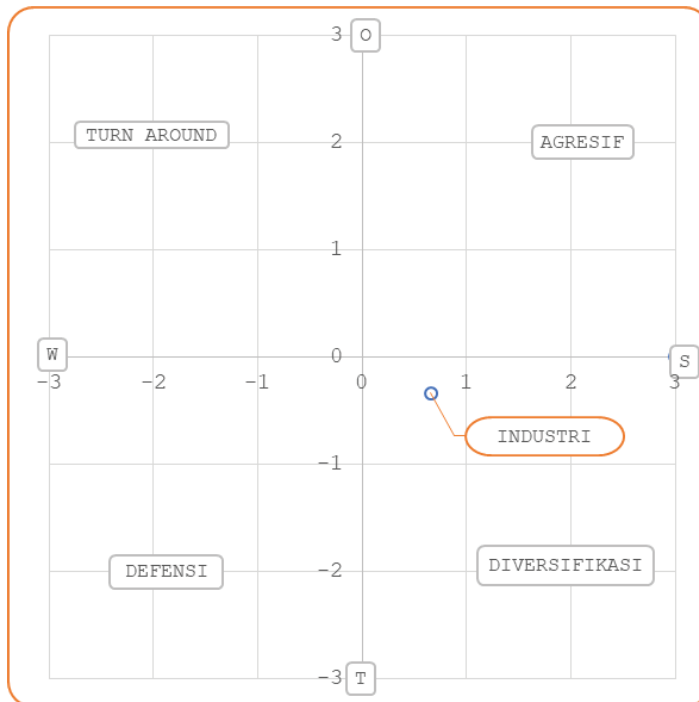
Tabel 6.11 Skoring *Opportunity* dan *Threat* Fokus industri

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITY	1	Kedekatan Provinsi Banten dengan kawasan metropolitan (Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung) berpotensi untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk proses produksi industri	2	0.17	3	0.50
	2	Industri di koridor utara didukung oleh hub internasional Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta sebagai <i>outlet</i> dan jaringan jalan tol antarprovinsi dan jalan Pantura	3	0.25	3	0.75
	3	Secara geografis, Provinsi Banten sangat strategis karena berada dalam jalur ALKI 1 (Laut Cina Selatan- Natuna- Selat Sunda-Samudera Hindia)	2	0.17	2	0.33
	4	Koridor utara Banten menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan jasa, dan pusat pemerintahan	3	0.25	3	0.75
	5	Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) pergerakan pembangunan industri pengolahan yang berada pada WPPI (wilayah pusat pertumbuhan industri) terkonsentrasi pada koridor pertumbuhan utara Banten	2	0.17	2	0.33
SUB TOTAL					12	2.67
THREAT	1	Sistem konektivitas jalur logistik Pantura Jawa belum terintegrasi dengan jalan-jalan radial non nasional sehingga arus logistik belum optimal	3	0.23	-3	-0.69
	2	Perubahan politik perdagangan internasional yang dapat mengancam nilai ekspor produk industri Banten	3	0.23	-3	-0.69
	3	Migrasi tenaga kerja industri dari provinsi sekitar dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal	3	0.23	-3	-0.69
	4	Sistem pengelolaan dan pengendalian arus barang ekspor impor di jalur pelayaran internasional belum dapat dilaksanakan secara ketat yang dapat mengancam stabilitas keamanan proses produksi industri nasional	2	0.15	-3	-0.46
	5	Sektor industri belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan khususnya industri petrokimia & smelter baja	2	0.15	-3	-0.46
SUB TOTAL			13	1.00		-3.00
TOTAL						-0,33

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan.

Pengembangan fokus industri berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) untuk meminimalisir ancaman (*threat*).



Gambar 6.3 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Industri
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Strategi memperkuat daya saing sektor industri di sepanjang koridor utara Banten yaitu:

1. **Penguatan keterkaitan industri hulu ke hilir** melalui kebijakan pembatasan ekspor impor bahan baku industri dan peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia & baja (S4 – T4 – T5)
2. **Peningkatan konektivitas dan jalur logistik** untuk mendukung pengembangan kawasan industri baru (S3 – T1 – T3)
3. **Pemanfaatan teknologi informasi** dalam pengembangan industri khususnya industri petrokimia & smelter baja (S4 – T5)
4. **Penguatan ketenagakerjaan industri** melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) industri (S2 – S4 – T3).

6.2.3. Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan Analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut

dengan Analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan grand strategy sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.12 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata

Masih Rendahnya Daya Saing Pariwisata Banten karena Keterbatasan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Penetapan KEK Tanjung Lesung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Perubahan agenda prioritas pemerintah pada sektor pariwisata	22%
ECONOMIC	Kontribusi PDRB pariwisata semakin naik dari tahun ke tahun, dan ditargetkan naik 40% pada 2025 (<i>baseline</i> 2021)	Terjadi penurunan jumlah wisatawan setelah adanya pandemi dan bencana alam	11%
SOCIOLOGICAL	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya	28%
TECHNO-LOGICAL	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan aktivitas pariwisata Banten	Masyarakat lokal (pelaku pariwisata) belum dapat secara cepat menerima dan memanfaatkan teknologi	11%
LEGAL	PP 50/2011 tentang penetapan 2 KSPN, 4 KPPN, PP 26/2012 tentang penetapan KEK Tanjung Lesung	Usia PP penetapan KSPN dan KEK sudah lebih dari 10 tahun namun jumlah wisatawan belum sesuai target, sehingga status KEK rawan dicabut	6%
ENVIRON-MENT	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan	22%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter.

Tabel 6.13 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata

Masih Rendahnya Daya Saing Pariwisata Banten karena Keterbatasan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Kualitas Yang Diinginkan	50%	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
<i>Trend</i> Eksisting	45%	Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga	Terjadi penurunan jumlah wisatawan setelah adanya pandemi dan bencana alam
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	45%	Dukungan Hub Transportasi Internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	38%	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	42%	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Analisis SWOT (EFAS & IFAS)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan analisis SWOT sektor pariwisata yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.14 Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Strength		Weakness	
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Banten terbesar ke 4 se Indonesia, yaitu 38 juta orang/tahun pada tahun 2021	1	Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang masih belum memadai terutama jauh dari kawasan perkotaan
2	Pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam seperti Ujung Kulon (ekowisata), Cikadu dan Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari)	2	Terdapat beberapa DTW prioritas nasional masih belum terlayani oleh jaringan jalan yang memadai
3	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy) menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	3	Lamanya waktu tempuh menuju kawasan pariwisata bagian barat (KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung) dan pantai bagian selatan dengan waktu tempuh 3- 4 jam dari Jabodetabek
4	Kontribusi PDRB pariwisata semakin naik dari tahun ke tahun, dan ditargetkan naik 40% pada 2025 (baseline 2021)	4	Persebaran DTW dan kunjungan wisatawan yang tidak merata antara wilayah utara-selatan
5	Terdapat wisata religi di Banten Lama yang menjadi daya tarik wisatawan	5	Kurangnya promosi terhadap pariwisata Banten yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisatawan nusantara maupun mancanegara
Opportunity		Threat	
1	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	1	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten
2	Dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	2	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya
3	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	3	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan
4	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	4	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga ada limitasi dalam pengembangan wisata
5	Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga	5	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor.

Tabel 6.15 Skoring Strength dan Weakness Fokus Pariwisata

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Banten terbesar ke 4 se Indonesia, yaitu 38 juta orang/tahun pada tahun 2021	3	0,25	3	0,75
	2	Pariwisata Banten memiliki daya tarik yang beragam seperti Ujung Kulon (ekowisata), Cikadu dan Baduy (budaya), Sumur dan Krakatau (bahari)	2	0,17	2	0,33
	3	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy) menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	3	0,25	3	0,75

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	4	Kontribusi PDRB pariwisata semakin naik dari tahun ke tahun, dan ditargetkan naik 40% pada 2025 (<i>baseline</i> 2021)	2	0,17	3	0,50
	5	Terdapat wisata religi di Banten Lama yang menjadi daya tarik wisatawan	2	0,17	2	0,33
SUB TOTAL			12	1.00		2,67
WEAKNESS	1	Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang masih belum memadai terutama jauh dari kawasan perkotaan	3	0,25	-2	-0,50
	2	Terdapat beberapa DTW prioritas nasional masih belum terlayani oleh jaringan jalan yang memadai	2	0,17	-1	-0,17
	3	Lamanya waktu tempuh menuju kawasan pariwisata bagian barat (KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung) dan pantai bagian selatan dengan waktu tempuh 3 4 jam dari Jabodetabek	2	0,17	-2	-0,33
	4	Persebaran DTW dan kunjungan wisatawan yang tidak merata antara wilayah utara-selatan	3	0,25	-3	-0,75
	5	Kurangnya promosi terhadap pariwisata Banten yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisatawan nusantara maupun mancanegara	2	0,17	-2	-0,33
		SUB TOTAL	12	1.00		-2,08
TOTAL						0,58

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sedangkan analisis EFAS sektor pariwisata di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

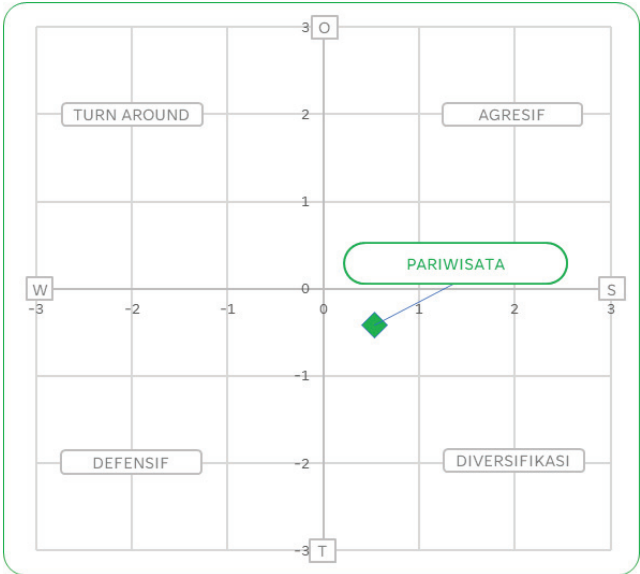
Tabel 6.16 Skoring *Opportunity* dan *Threat* Fokus Pariwisata

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1	Pusat pariwisata berdaya saing berbasis cagar budaya, konservasi, religi, dan bahari	2	0,17	2	0,33
	2	Dukungan hub transportasi internasional di Bandara Soekarno Hatta sebagai gerbang wisatawan mancanegara. Sebesar 8% wisman masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, 5% diantaranya menuju ke Provinsi Banten	3	0,25	3	0,75
	3	Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata berbasis alam dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang didukung oleh pemerintah pusat	2	0,17	2	0,33
	4	Keunikan budaya masyarakat Banten (Lebak-Baduy dan Kawasan Banten Lama) berbasis religi, budaya dan sejarah menjadi daya tarik bagi wisatawan regional	3	0,25	3	0,75
	5	Terdapat 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN) terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banten dengan daya tarik utama wisata alam bentang alam, wisata pantai/bahari, taman nasional laut, dan kawasan olahraga	2	0,17	2	0,33
	SUB TOTAL		12	1.00		2,50

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
THREAT	1	Kedekatan dengan Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung yang memiliki atraksi wisata alam dan buatan dengan kualitas yang baik menjadi ancaman bagi sektor pariwisata Banten	3	0,25	-3	-0,75
	2	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya	3	0,25	-3	-0,75
	3	Rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi yang dapat menurunkan daya tarik wisatawan	3	0,25	-3	-0,75
	4	Merupakan kawasan cagar budaya sehingga ada limitasi dalam pengembangan wisata	1	0,08	-2	-0,17
	5	Masih lemahnya konektivitas dan variasi pemilihan moda antar hub ke DTW dan DTW menuju DTW	2	0,17	-3	-0,50
		SUB TOTAL	12	1.00		-2,92
		TOTAL				-0,42

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran agresif, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*).



Gambar 6.4 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Strategi memperkuat pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Banten yaitu:

- 1. **Penguatan destinasi cagar budaya** dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diversifikasi atraksi pariwisata (S4 – S5 – T1)

2. **Pengembangan infrastruktur pariwisata** mendukung peningkatan kualitas destinasi wisata (S1 – S2 – S3 – T1)
3. **Penguatan konektivitas dan aksesibilitas** menuju destinasi wisata (S2 – S3 – T5)
4. **Integrasi pengembangan destinasi wisata** Banten melalui paket wisata terintegrasi dan penguatan kelembagaan (S1 – S5 – T4)
5. Pengembangan pariwisata berbasis **pengurangan risiko bencana** (S1 – S2 – T3).

6.2.4. Penyusunan Strategi Fokus Perdesaan Tertinggal

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan Analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan Analisis 5 FORCES. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan grand strategy sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis PESTLE (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.17 Analisis Pestle (Makro) Fokus Perdesaan Tertinggal

Ketertinggalan Wilayah Pansela Banten Diakibatkan oleh Keterbatasan Geografis dan Minimnya Layanan Infrastruktur Dasar			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal	Kebijakan bersifat fluktuatif yang bergantung pada kebijakan pemerintah	19%
ECONOMIC	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Pandeglang dan Lebak berkontribusi sebesar 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten	Wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) merupakan lumbung pangan nasional yang merupakan pesaing pasar bagi wilayah selatan Provinsi Banten	15%
SOCIOLOGICAL	Proporsi penduduk dengan usia produktif tinggi, yaitu >60% sehingga SDM untuk bekerja terutama di sektor	Tingkat migrasi penduduk ke daerah sekitar (termasuk wilayah utara Banten, Jabodetabek, dan Jawa	19%

Ketertinggalan Wilayah Pansela Banten Diakibatkan oleh Keterbatasan Geografis dan Minimnya Layanan Infrastruktur Dasar			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
	ekonomi unggulan relatif terpenuhi	Barat) tinggi, yaitu >2% per tahun	
TECHNO-LOGICAL	Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis ekonomi digital yang dapat membentuk ekonomi kreatif baru di kawasan daerah tertinggal	Kemajuan teknologi dan informasi yang dapat mempengaruhi budaya lokal masyarakat sekitar	9%
LEGAL	Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terdapat percepatan pembangunan daerah tertinggal guna pemerataan pembangunan	RPJMN bersifat kebijakan 5 tahunan yang dapat berubah setelah periode selesai	15%
ENVIRON-MENT	Provinsi Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang sesuai dengan peruntukkan kawasan pertanian dan pariwisata	Provinsi Banten memiliki risiko rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi	23%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Banten, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter.

Tabel 6.18 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Perdesaan Tertinggal

Ketertinggalan Wilayah Pansela Banten Diakibatkan Oleh Keterbatasan Geografis Dan Minimnya Layanan Infrastruktur Dasar			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Kualitas Yang Diinginkan	50%	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berkontribusi sebesar 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten	Minimnya atau keterbatasan terkait aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah desa tertinggal
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	45%	Produktivitas padi tertinggi ke-3 di Pulau Jawa sehingga produksi pada Banten menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan	Adanya persaingan pasar komoditas padi dengan wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) yang juga merupakan lumbung pangan nasional
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketertinggalan Saat ini	56%	Kebudayaan Pansela Banten dapat meningkatkan distribusi dan angkutan lalu lintas regional yang dapat berdampak pada sektor ekonomi unggulan	Sistem konektivitas Pansela dengan jalan radial non nasional masih belum terbentuk
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan Yang Dihadapi	42%	Pansela Banten masih banyak peluang untuk pengembangan baik dari ekonomi dan sosial sehingga kesempatan bagi pengembangan masih cukup banyak	Struktur sosial masyarakat Pansela Banten sangat unik sehingga perkembangan harus disesuaikan dengan kondisi setempat
THREAT OF SUBSTITUTES			

Ketertinggalan Wilayah Pansela Banten Diakibatkan Oleh Keterbatasan Geografis Dan Minimnya Layanan Infrastruktur Dasar			
PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
Trend Analisis PESTLE	50%	Provinsi Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang sesuai dengan peruntukkan kawasan pertanian dan pariwisata	Provinsi Banten memiliki risiko rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Analisis SWOT (EFAS IFAS)

Analisis SWOT sektor infrastruktur dasar kawasan perdesaan di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.19 Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perdesaan

	Strength		Weakness
1	Sektor pertanian menjadi sektor utama penggerak perekonomian yaitu sebesar >25% dengan hasil pertanian berupa padi dan buah-buahan	1	Akses air aman rata-rata 15,15% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 9,94% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Lebak) yang mana masih jauh dari rata-rata target RPJMN
2	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki penduduk dengan usia produktif tinggi, yaitu >60%	2	Sanitasi aman 0,77% (mengacu rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 3,40% (mengacu pada rata-rata Lebak) masih jauh dari rata-rata target RPJMN, dimana 15 desa belum terlayani oleh IPLT dan IPAL
3	Kepadatan penduduk pedesaan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih relatif rendah, yaitu 5 jiwa/ha	3	Tingkat pelayanan persampahan 7% (mengacu pada Kabupaten Pandeglang) dan 18% (mengacu pada Kabupaten Lebak), dimana 15 desa belum terlayani TPA
4	Kondisi geograafis di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang berbukit-bukit cocok untuk pertanian, terutama tanaman perkebunan buah	4	Aksesibilitas wilayah selatan Banten masih minim dikarenakan hanya terdapat 1 (satu) ruas jalan nasional dan jalan daerah
5	Jaringan irigasi sudah mencapai 60% dari total luasan LP2B dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi 66% pada tahun 2029	5	Terdapat 15 desa yang belum terlayani Pamsimas, SPAM, dan PDAM
	Opportunity		Threat
1	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berkontribusi sebesar 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten	1	Minimnya atau keterbatasan terkait aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah desa tertinggal
2	Produktivitas padi tertinggi ke-3 di Pulau Jawa sehingga produksi padi Banten menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan	2	Adanya persaingan pasar komoditas padi dengan wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) yang juga merupakan lumbung pangan nasional
3	Keberadaan Pansela Banten dapat meningkatkan distribusi dan angkutan lalu lintas regional yang dapat berdampak pada sektor ekonomi unggulan	3	Sistem konektivitas Pansela dengan jalan radial non nasional masih belum terbentuk
4	Pansela Banten masih banyak peluang untuk pengembangan baik dari ekonomi dan sosial sehingga kesempatan bagi pengembangan masih cukup banyak	4	Struktur sosial masyarakat Pansela Banten sangat unik sehingga perkembangan harus disesuaikan dengan kondisi setempat
5	Provinsi Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang sesuai dengan peruntukkan kawasan pertanian dan pariwisata	5	Provinsi Banten memiliki risiko rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor.

Tabel 6.20 Skoring *Strength* dan *Weakness* Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perdesaan

FAKTOR INTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1	Sektor pertanian menjadi sektor utama penggerak perekonomian yaitu sebesar >25% dengan hasil pertanian berupa padi dan buah-buahan	3	0,23	3	0,69
	2	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki penduduk dengan usia produktif tinggi, yaitu >60%	2	0,15	3	0,46
	3	Kepadatan penduduk pedesaan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih relatif rendah, yaitu 5 jiwa/ha	2	0,15	2	0,31
	4	Kondisi geograafis di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang berbukit-bukit cocok untuk pertanian, terutama tanaman perkebunan buah	3	0,23	3	0,69
	5	Jaringan irigasi sudah mencapai 60% dari total luasan LP2B dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi 66% pada tahun 2029	3	0,23	3	0,69
		SUB TOTAL	13	1.00		2.85
WEAKNESS	1	Akses air aman rata-rata 15,15% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 9,94% (mengacu pada rata-rata Kabupaten Lebak) yang mana masih jauh dari rata-rata target RPJMN	3	0,21	-3	-0,64
	2	Sanitasi aman 0,77% (mengacu rata-rata Kabupaten Pandeglang) dan 3,40% (mengacu pada rata-rata Lebak) masih jauh dari rata-rata target RPJMN, dimana 15 desa belum terlayani oleh IPLT dan IPAL	3	0,21	-3	-0,64
	3	Tingkat pelayanan persampahan 7% (mengacu pada Kabupaten Pandeglang) dan 18% (mengacu pada Kabupaten Lebak), dimana 15 desa belum terlayani TPA	3	0,21	-3	-0,64
	4	Aksesibilitas wilayah selatan Banten masih minim dikarenakan hanya terdapat 1 (satu) ruas jalan nasional dan jalan daerah	3	0,21	-2	-0,43
	5	Terdapat 15 desa yang belum terlayani Pamsimas, SPAM, dan PDAM	2	0,14	-2	-0,29
		SUB TOTAL	14	1.00		-2.64
TOTAL						0.20

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sedangkan skoring *opportunity* dan *threat* infrastruktur dasar kawasan perdesaan di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

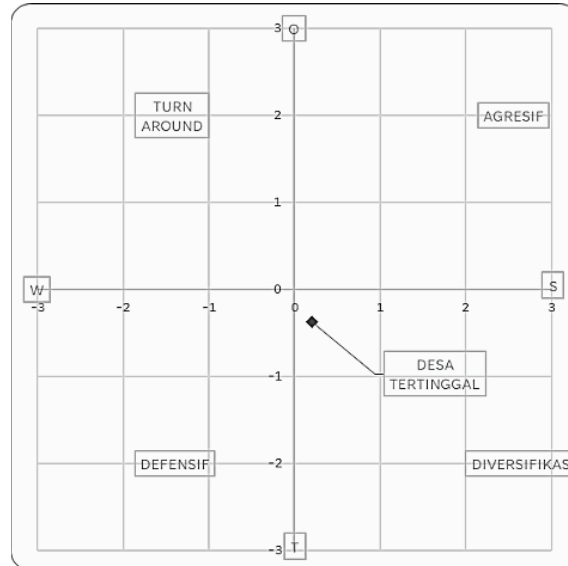
Tabel 6.21 Skoring *Opportunity* dan *Threat* Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perdesaan

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1	Produksi padi Banten masuk ke dalam 9 besar nasional, dimana PDRB sektor pertanian Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berkontribusi sebesar 31,71% dan 25,88% terhadap PDRB sektor pertanian Banten	3	0,23	3	0,69
	2	Produktivitas padi tertinggi ke-3 di Pulau Jawa sehingga produksi padi Banten menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan	3	0,23	2	0,46

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	3	Keberadaan Pansela Banten dapat meningkatkan distribusi dan angkutan lalu lintas regional yang dapat berdampak pada sektor ekonomi unggulan	3	0,23	3	0,69
	4	Pansela Banten masih banyak peluang untuk pengembangan baik dari ekonomi dan sosial sehingga kesempatan bagi pengembangan masih cukup banyak	2	0,15	2	0,31
	5	Provinsi Banten memiliki karakter fisik kewilayahan yang sesuai dengan peruntukkan kawasan pertanian dan pariwisata	2	0,15	2	0,31
		SUB TOTAL	13	1.00		2,46
THREAT	1	Minimnya atau keterbatasan terkait aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah desa tertinggal	3	0,25	-3	-0,75
	2	Adanya persaingan pasar komoditas padi dengan wilayah Jawa Barat Selatan (Sukabumi dan Cianjur) yang juga merupakan lumbung pangan nasional	2	0,17	-3	-0,50
	3	Sistem konektivitas Pansela dengan jalan radial non nasional masih belum terbentuk	2	0,17	-3	-0,50
	4	Struktur sosial masyarakat Pansela Banten sangat unik sehingga perkembangan harus disesuaikan dengan kondisi setempat	2	0,17	-2	-0,33
	5	Provinsi Banten memiliki risiko rawan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api dengan kategori sedang-tinggi	3	0,25	-3	-0,75
		SUB TOTAL	12	1.00		-2,83
		TOTAL				-0,37

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) untuk meminimalisir ancaman (*threat*).



Gambar 6.5 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perdesaan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Strategi memperkuat pengembangan sektor infrastruktur dasar kawasan perdesaan di Provinsi Banten yaitu:

1. **Peningkatan produktivitas komoditas unggulan** pertanian melalui peningkatan sarana & prasarna pertanian dan penguatan kelembagaan (S1 – S5 – T2)
2. **Pengembangan sistem konektivitas dan jalur logistik** untuk memperlancar lalu lintas barang dan orang (S1 – S4 – T1 – T3)
3. **Pengurangan risiko bencana** untuk menjaga ketahanan wilayah Banten Selatan (S4 – T4 – T5)
4. **Peningkatan layanan dasar permukiman** untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (S3 – T1).

6.3. Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)

Skenario perumusan kawasan prioritas meliputi penentuan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya.

6.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas

Dalam menentukan kawasan prioritas disusun penilaian kawasan berdasarkan metode *multicriteria analysis* (MCA). Daftar panjang kawasan prioritas yang telah disusun pada bab 2 diberikan bobot berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai untuk mendapatkan daftar kawasan prioritas yang akan ditangani hingga tahun 2034.

1) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Industri

Parameter penilaian untuk fokus industri adalah sebagai berikut:

Tabel 6.22 Parameter Penilaian Fokus Industri

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Ketersediaan Akses Jalan Tol/ Nasional	Tersedia Kurang dari 10 km	1
B	Kedekatan dengan pelabuhan ekspor impor	Lebih dari 50 km	1
		25-50 km	2
		Kurang dari 25 km	3
C	RIPIN	Termasuk dalam delineasi WPPI	1
D	Proyek Strategis Nasional	Terdapat proyek infrastruktur yang berdampak secara langsung (tersebut)	1
E	Kesiapan Operasional	Siap beroperasi	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Setelah ditentukan parameter yang dipakai, selanjutnya adalah pembobotan dengan memberikan nilai sesuai dengan penilaian parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.23 Penilaian Kawasan Fokus Industri

No	Kawasan Industri	Kawasan Prioritas	Parameter/ Kebijakan Strategis					Total
			A	B	C	D	E	
1	KI Cilegon	Serang - Cilegon	1	3	1	0	1	6
2	KI Wilmar	Serang - Cilegon	1	2	1	1	1	6
3	KI Cikande	Serang - Cilegon	1	2	1	0	1	5
4	KI Pancapuri	Serang - Cilegon	1	1	1	0	0	3
5	KI Nikomas Gemilang	Serang - Cilegon	1	1	1	0	0	3
6	KI Taman Tekno BSD	-	0	1	1	0	0	2
7	KI Sumber Rezeki	-	0	1	1	0	0	2
8	KI Griya Idola Park	-	1	1	1	0	0	3
9	KI Purat Kencana Alam	-	0	1	1	0	0	2
10	KI Cikupamas	-	1	1	1	0	0	3
11	KI Pasar Kemis	-	1	1	1	0	0	3
12	KI Sumber Bina Sukses	Serang - Cilegon	0	1	1	0	0	2
13	Millenium Industrial Estate	-	1	1	1	0	0	3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk fokus industri adalah **Kawasan Industri Cilegon**, **Kawasan Industri Cikande**, dan **Kawasan Industri Wilmar** di PKN Serang - Cilegon.

2) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Pariwisata

Parameter penilaian untuk fokus pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 6.24 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Akses Jalan Nasional	>10 km	1
		5-10 km	2
		<5 km	3
B	Kedekatan dengan hub (bandara, pelabuhan)	>25 km	1
		10-25 km	2
		<10 km	3
C	Termasuk delineasi KEK	Termasuk	1
D	Tercantum dalam RIPPARNAS	Tercantum	1
E	Kunjungan wisatawan	Kurang dari 500rb/tahun	1
		500rb-1 juta/ tahun	2
		Lebih dari 1 juta/tahun	3
F	Keunikan atraksi	Ada	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Setelah ditentukan parameter yang dipakai, selanjutnya adalah pembobotan dengan memberikan nilai sesuai dengan penilaian parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.25 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata

No	Kawasan	Kawasan Prioritas	Parameter						Total
			A	B	C	D	E	F	
1	KEK Tanjung Lesung	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung	2	1	1	1	1	0	6
2	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung	1	1	0	1	2	1	6
3	KSPN Krakatau dsk	-	1	1	0	1	1	0	4
4	KPPN Carita dsk	Serang - Panimbang	1	1	0	1	2	0	5
5	KPPN Ujung Kulon dsk	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung	1	1	0	1	1	1	5
6	KPPN Serang - Banten Lama dsk	Serang - Panimbang	2	1	0	1	2	0	6
7	KPPN Lebak - Badui dsk	Serang - Panimbang	1	1	0	1	2	1	6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk fokus pariwisata adalah **KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung, KPPN Serang-Banten Lama dsk, dan KPPN Lebak - Badui dsk.**

3) Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Perdesaan Tertinggal

Parameter penilaian untuk fokus perdesaan tertinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 6.26 Parameter Penilaian Fokus Perdesaan Tertinggal

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Indeks kapasitas fiskal daerah	Tinggi-sangat tinggi	1
		Sedang	2
		Sangat rendah-rendah	3
B	PDRB per Kapita	>22.600 ribu	1
		17.800-22.600 ribu	2
		< 17.800 ribu	3
C	Persentase penduduk miskin	<20,7%	1

Kode	Parameter	Penilaian	
D	IPM	20,7-26,6%	2
		>26,6%	3
		>65	1
		60-65	2
		<60,7%	3
E	Terdapat Desa Sangat Tertinggal	Ya	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Setelah ditentukan parameter yang dipakai, selanjutnya adalah pembobotan dengan memberikan nilai sesuai dengan penilaian parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.27 Penilaian Kawasan Fokus Perdesaan Tertinggal

No	Kabupaten	Kawasan Prioritas	Parameter					Total
			A	B	C	D	E	
1	Kabupaten Pandeglang	KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung	3	3	1	2	1	10
2	Kabupaten Lebak	-	3	3	1	2	1	10
3	Kabupaten Tangerang	-	2	1	1	1	1	6
4	Kabupaten Serang	Serang – Cilegon	3	1	1	1	1	7
5	Kota Tangerang	-	1	1	1	1	0	4
6	Kota Cilegon	Serang – Cilegon	2	1	1	1	0	5
7	Kota Serang	Serang – Cilegon	3	1	1	1	0	6
8	Kota Tangerang Selatan	-	1	1	1	1	0	4

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, kawasan perdesaan tertinggal di Provinsi Banten terdapat 2 Kabupaten, yaitu **Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak**, yang terdiri **4 desa sangat tertinggal** di Kabupaten Pandeglang dan **11 desa sangat tertinggal** di Kabupaten Lebak. Berikut tabel sebaran desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Tabel 6.28 Lokus Perdesaan Tertinggal

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Sangat Tertinggal	
1	Kabupaten Pandeglang	Cibitung	1	Cikiruh
		Cibaliung	2	Curug
			3	Sudimanik
		Cikeusik	4	Sukamulya
2	Kabupaten Lebak	Bojongmanik	1	Pasirbitung
			2	Parakanbeusi
			3	Mekar Rahayu
			4	Keboncau

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Sangat Tertinggal
		Cigemlong	5 Cikaret
			6 Cikadongdong
			7 Cikate
		Cijaku	8 Ciapus
		Lebakgedong	9 Ciladaeun
		Leuwidamar	10 Kanekes
		Cimarga	11 Margaluyu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4) Kawasan Prioritas di Banten

Berdasarkan hasil *multicriteria analysis* yang telah dilakukan, terdapat 4 kawasan prioritas di Banten antara lain dengan fokus industri, pariwisata, dan pertanian. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.29 Daftar Kawasan Prioritas di Banten

No	Kawasan Prioritas	Fokus
1	PKN Serang – PKN Cilegon	Industri, Pariwisata
2	KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung	Pariwisata
3	Koridor Serang – Panimbang	Industri, Pariwisata
4	Kawasan Desa Tertinggal Kabupaten: Pandeglang dan Lebak	Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2023

PKN Serang – PKN Cilegon yang merupakan pusat ekonomi di Provinsi Banten dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, serta pusat pemerintahan. Provinsi Banten memiliki daya tarik wisatawan yang tinggi di kawasan barat yaitu dengan adanya KEK Tanjung Lesung dan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Selain itu dengan adanya rencana pengembangan industri serta pemerataan utara – selatan adanya pengembangan rencana di koridor Serang – Panimbang serta kawasan selatan Banten memiliki komoditas unggulan berupa pertanian.

6.3.2. Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas

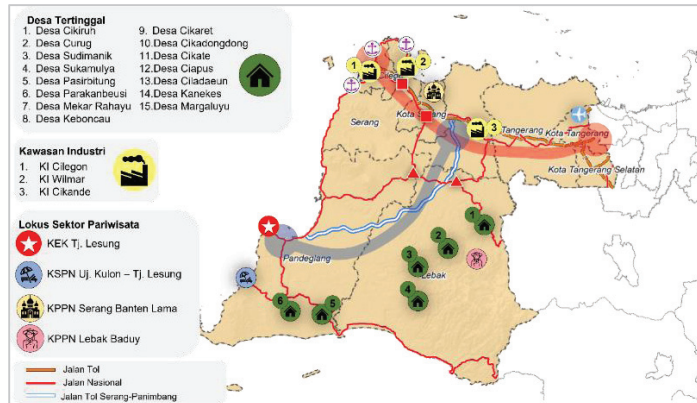
Pengembangan kawasan prioritas dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama tahun 2025-2034 untuk kawasan prioritas terpilih sesuai dengan hasil *multicriteria analysis*. Sedangkan bagi kawasan prioritas lainnya pengembangan dilakukan setelah tahun 2034. Untuk penjelasan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.30 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Banten

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I	Tahap II
			2025-2029	2030-2034
	Industri			
1	KI Cilegon	Serang-Cilegon		
2	KI Wilmar	Serang-Cilegon		
3	KI Cikande	Serang-Cilegon		
4	KI Pancapuri	Serang-Cilegon		
5	KI Nikomas Gemilang	-		
6	KI Taman Tekno BSD	-		
7	KI Sumber Rezeki	-		
8	KI Griya Idola Park	-		
9	KI Purat Kencana Alam	-		
10	KI Cikupamas	-		
11	KI Pasar Kemis	-		
12	KI Sumber Bina Sukses	Serang-Cilegon		
13	Millenium Industrial Estate	-		
	Pariwisata			
1	KEK Tanjung Lesung			
2	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung			
3	KSPN Krakatau dsk			
4	KPPN Carita dsk			
5	KPPN Ujung Kulon dsk			
6	KPPN Serang - Banten Lama dsk			
7	KPPN Lebak - Badui dsk			
	Perdesaan Tertinggal			
1	Kabupaten Pandeglang	KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung		
2	Kabupaten Lebak	-		
3	Kabupaten Tangerang	-		
4	Kabupaten Serang	Serang- Cilegon		
5	Kota Tangerang	-		
6	Kota Cilegon	Serang- Cilegon		
7	Kota Serang	Serang- Cilegon		
8	Kota Tangerang Selatan	-		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kawasan prioritas yang akan dikembangkan pada tahap 1 adalah KI Cilegon, KI Wilmar, KI Cikande, KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung, Kawasan perdesaan tertinggal di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kawasan-kawasan prioritas tersebut selanjutnya dirangkum ke dalam skenario pengembangan wilayah. Skenario pengembangan wilayah Provinsi Banten secara spasial dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.6 Skenario Pengembangan Wilayah Provinsi Banten
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari skenario di atas, kawasan prioritas pada masing-masing lokus utama dipetakan untuk melihat posisinya secara spasial. Untuk lokus industri, kawasan prioritas utama adalah KI Cilegon, KI Wilmar, dan KI Cikande. Untuk lokus pariwisata adalah KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung, KPPN Serang- Banten Lama, dan KPPN Baduy. Sedangkan lokus desa tertinggal terdiri dari 15 desa di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Keseluruhan kawasan tersebut dihubungkan oleh konektivitas jalan tol, jalan nasional, dan jalan daerah, untuk selanjutnya dihubungkan menuju hub-hub utama seperti pelabuhan dan bandara.

BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Analisis kebutuhan infrastruktur berisi sandingan antara kinerja infrastruktur eksisting terhadap kebutuhan infrastruktur, yang meliputi analisis ketersediaan, analisis kebutuhan, sandingan ketersediaan dan kebutuhan untuk menghasilkan gap/ kesenjangan, serta identifikasi penyebab kesenjangan. Analisis ini akan dilakukan pada setiap kawasan prioritas di Provinsi Banten.

Provinsi Banten memiliki 3 kawasan prioritas yang terdiri dari kawasan industri di wilayah utara Banten yaitu **Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang**, kawasan pariwisata yang tersebar di **wilayah utara, barat, dan timur** serta kawasan desa tertinggal di **kawasan selatan Provinsi Banten**.

7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, pengembangan kawasan prioritas akan difokuskan pada industri, pariwisata, dan penanganan kawasan tertinggal di wilayah selatan Banten. Pada masing-masing fokus akan dilakukan analisis kebutuhan infrastruktur untuk dibandingkan dengan ketersediaan infrastruktur eksisting sehingga dihasilkan analisis kesenjangan.

7.1.1. Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Banten

1) Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA Provinsi Banten

Total kapasitas tampung di Provinsi Banten berupa bendungan hingga tahun 2034 adalah sebesar 328.192.000 m3 sedangkan kapasitas tampung embung sebesar 7.365.470 m3, sehingga total kapasitas tampung di Provinsi Banten sebesar 335.404.625 m3. Jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah 12.407.278 jiwa. Dengan begitu kapasitas tampung Provinsi Banten adalah sebesar 27,03 m3/capita/tahun. Angka tersebut masih berada di bawah target capaian tahun 2034 sebesar 115 m3/capita/tahun. Saat ini telah ada beberapa waduk/bendungan di Banten yang direncanakan dibangun, yaitu:

Tabel 7.1 Bendungan Eksisting dan Kontruksi

No.	Bendungan	Kab/Kota	Tahun Selesai	Volume (m3)	Gap 2022-2029	Gap 2022-2034
Bendungan Eksisting					-28,24 m3/capita/	-76,38 m3/capita/
1.	Karian	Kabupaten Lebak	2023	314.700.000		

No.	Bendungan	Kab/Kota	Tahun Selesai	Volume (m ³)	Gap 2022-2029 tahun	Gap 2022-2034 tahun
2.	Sindangheula	Kabupaten Serang	2021	9.300.000		
3.	Gintung	Kota Tangerang Selatan	1932	720.000		
4.	Krenceng	Kota Cilegon	1977	3.472.000		
Total Bendungan Eksisting				328.192.000		
Embung Eksisting						
1.	Embung			7.365.470		
Total Tampungan Eksisting (Bendungan + Embung)				335.404.625		
Bendungan Rencana						
1.	Pasir Kopo	Kab. Serang		166.210.000		
2.	Cidanau	Kab. Lebak		25.010.000		
3.	Cilawang	Kab. Lebak		24.070.000		
Total Tampungan Rencana				215.294.000		
Total Tampungan Eksisting dan Rencana				550.851.470		

Sumber: Kementerian PUPR, 2023

Dengan selesai dibangunnya waduk/bendungan baru, kapasitas tampung di Banten pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 550.851.470 m³/capita/tahun dan pada tahun 2034 diasumsikan tidak terjadi penurunan volume tampungan akibat sedimentasi sehingga volume tampungan tetap 550.851.470 m³ atau 38,62 m³/capita/tahun. Untuk mencapai target 115 m³/capita/tahun pada tahun 2034, diperlukan pembangunan tampungan air baku lagi dengan kapasitas total sebesar 1.046.551.972 m³.

Dari total daerah rawan tsunami tinggi yang berada di kawasan permukiman sepanjang 11,2 km terutama di Kawasan Selat Sunda yang berbatasan langsung dengan Gunung Anak Krakatau dan lempeng Indo-Australia baru terbangun 2 km.

2) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten

Pengukuran konektivitas jalan diukur melalui waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan (dalam jam) untuk menempuh perjalanan sepanjang 100 km. Waktu tempuh terbagi dalam dua kategori yaitu waktu tempuh lintas utama dan waktu tempuh perkotaan. Waktu tempuh lintas utama diukur pada koridor jalan yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra Ditjen Bina Marga, dimana terdapat 1 koridor jalan utama di Provinsi Banten. Koridor dan waktu tempuh tersebut terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama Banten

No.	Ruas Lintas Utama	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (jam/100km)
1.	Jakarta-Merak	99,2	87,5	1,47

Sumber: Google Maps, diolah 2023

Target waktu tempuh lintas utama pada tahun 2025 adalah sebesar 2,2 dan meningkat menjadi 1,6 pada 2034. Dari data di atas telah mencapai target waktu tempuh. Waktu tempuh perkotaan dihitung pada ruas-ruas jalan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota di Banten. Waktu tempuh perkotaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3 Waktu Tempuh Perkotaan Banten

No.	Ruas Jalan Nasional	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (Jam/100 km)
1.	Jalan Sudirman (Serang)	1,85	5,5	4,95
2.	Raya Cilegon (Serang)	4,45	12	4,49
3.	Raya Cilegon (Cilegon)	1,4	4	4,76
4.	Raya Merak (Cilegon)	2,5	8	5,33
5.	Raya Cikande (Jalan Otto Iskandardinata)	0,82	2,5	5,05
6.	Merak - BTS. Kota Cilegon	6,75	16,5	4,07
7.	Raya Pandeglang (Serang)	0,84	2,5	5,05
8.	BTS. Kota Serang - BTS. Kota Pandeglang	20,95	37,5	2,98
9.	TB. Suwandi (Serang)	2,9	15	8,62
10.	Raya Cipanas (Rangkasbitung)	3,8	12	5,26
11.	Abdul Hadi (Serang)	1,2	8,5	11,81
12.	KH. Abdul Fatah Hasan (Serang)	1,55	8,5	9,14
13.	Otista (Tangerang)	1,15	5,5	7,97
14.	KS. Tubun (Tangerang)	1,5	5,5	6,11
15.	Raya Serang (Cilegon)	3,85	14	6,06
16.	Rambutan (Ciputat)	0,8	3,5	7,29
17.	Otista (Ciputat)	0,76	4	8,83
18.	By Pass Rangkasbitung (Jalan Soekarno Hatta)	3,95	13	5,49
19.	Raya Serang (Pandeglang)	1,4	4	4,76
20.	Letnan Jidun (Serang)	0,9	4	7,41
21.	Daan Mogot (Tangerang - BTS. DKI)	8,25	29,5	5,96
22.	Raya Serang (Tangerang)	8,95	42,5	7,91

Sumber: Google Maps, diolah 2023

Target waktu tempuh di perkotaan pada tahun 2025 adalah sebesar 3,3 jam/100 km dan meningkat menjadi 2,5 jam/100 km pada 2034. Ruas yang terpilih adalah ruas pada kabupaten/kota yang memiliki tingkat pelayanan jalan tinggi terutama pada kawasan perkotaan/pusat kota. Dari data di atas, ruas jalan perkotaan di Provinsi Banten memiliki waktu tempuh yang cenderung lama yang disebabkan karena arus yang bertumpuk antara arus lokal dan industri khususnya di wilayah utara Banten.

3) Analisis Kebutuhan infrastruktur Permukiman Provinsi Banten

Kebutuhan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di kawasan permukiman dibutuhkan diantaranya adalah akses air minum perpipaan, akses sanitasi aman, akses pengolahan sampah, dan penataan kawasan kumuh.

A. Air Minum

Air minum yang digunakan dalam perhitungan yaitu akses air minum perpipaan. Presentase akses air minum perpipaan di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar 12,07%, sementara target presentase akses air minum perpipaan dalam draft teknokratik RPJP 2045 pada tahun 2034 sebesar 75%, sehingga gap presentase air minum perpipaan pada tahun 2022 sebesar 62,93%. Untuk mencapai target air minum perpipaan 75% pada tahun 2034, dilakukan proyeksi peningkatan kebutuhan setiap tahunnya hingga mencapai target.

Dari segi ketersediaan, pada tahun 2022 ketersediaan air minum perpipaan yang dikelola PDAM di Banten sebesar 8.798 liter/detik, sedangkan kebutuhan air minum perpipaan sebesar 6.849,57 liter/detik sehingga pada tahun 2022 ketersediaan air masih mencukupi kebutuhan. Namun seiring pertambahan penduduk dan aktivitas industri, diproyeksikan kebutuhan air semakin naik dari tahun ke tahun. Proyeksi kebutuhan air menggunakan asumsi kebutuhan air untuk penggunaan domestik sebesar 120 liter/orang/hari untuk kota sedang dan 100 liter/orang/hari untuk kota kecil (berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU (1996). Skala kota ditentukan dari jumlah penduduk. Untuk Provinsi Banten, wilayah yang termasuk kota sedang adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan, sedangkan Kota Cilegon dikategorikan sebagai kota kecil.

Selain kebutuhan domestik, perhitungan juga mempertimbangkan kebutuhan air non domestik sebesar 30% dari air domestik (berdasarkan Permen PUPR 18/2007) dan kehilangan air (berdasarkan kinerja PDAM).

Kebutuhan air kemudian disesuaikan dengan presentase target pelayanan air minum per tahun yang telah diproyeksikan sebelumnya lalu selanjutnya dikurangi dengan ketersediaan air minum eksisting sehingga didapatkan gap kebutuhan air minum *bussiness as usual*/tanpa adanya intervensi penanganan. Proyeksi air minum per kabupaten/kota di Provinsi Banten secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.4 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Baseline	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (lt/detik)		
			2025	2029	2034
1.	Kabupaten Pandeglang	120	2.841	2.962	3.121
2.	Kabupaten Lebak	120	3.153	3.339	3.797
3.	Kabupaten Tangerang	120	7.388	7.847	8.028
4.	Kabupaten Serang	120	3.697	3.923	4.270
5.	Kota Tangerang	120	4.152	4.268	4.626
6.	Kota Cilegon	100	827	878	1.167
7.	Kota Serang	120	1.602	1.722	1.905
8.	Kota Tangerang Selatan	120	2.977	3.078	3.174
TOTAL			26.635	28.106	30.087

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara keseluruhan kebutuhan air bersih perkotaan di Provinsi Banten hingga tahun 2034 sebesar 30.087 l/detik. Jumlah Kebutuhan air terbesar berada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang masing-masing sebesar 8.028 l/detik dan 4.626 l/detik. Sementara itu kebutuhan air bersih perkotaan terendah berada di Kota Cilegon dan Kota Serang masing-masing sebesar 1.167 l/detik dan 1.905 l/detik.

Tabel 7.5 Proyeksi Penyediaan Air Bersih Perkotaan di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		l/det	%	l/det	%	l/det	%	l/det	l/det
1.	Kabupaten Pandeglang	344	12,51	1,450	49	2.340	75	-1,106	-1.996
2.	Kabupaten Lebak	300	9,94	1,693	48	2.848	75	-1,375	-2.530
3.	Kabupaten Tangerang	3.679	52,11	4,874	65	6.021	75	-1,383	-2.530
4.	Kabupaten Serang	456	12,90	1,948	49	3.202	75	-1,487	-2.741
5.	Kota Tangerang	594	14,62	2,227	50	3.470	75	-1,605	-2.847
6.	Kota Cilegon	163	20,64	472	52	875	75	-305	-707
7.	Kota Serang	196	12,90	855	49	1.429	75	-657	-1.231
8.	Kota Tangerang Selatan	3	0,10	1,333	44	2.380	75	-1,330	-2.378

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Target layanan air minum perpipaan pada tahun 2025 sebesar 39% dan meningkat pada tahun 2034 menjadi 75%. Sementara itu,

secara keseluruhan tingkat layanan air minum perpipaan di Provinsi Banten sebesar 12,07%. Pelayanan perpipaan Provinsi Banten masih berada dibawah target layanan tahun 2034 dengan target pelayanan perpipaan sebesar 75%. Pembangunan beberapa SPAM diarahkan pada masing-masing kabupaten yang masih memiliki layanan air minum perpipaan dibawah target (30%).

B. Air Limbah

Sanitasi yang digunakan dalam perhitungan yaitu akses sanitasi aman. Presentase akses sanitasi aman di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar 10,73%, sementara target presentase akses sanitasi aman dalam draft teknokratik RPJP 2045 sebesar 55%, sehingga gap presentase sanitasi aman pada tahun 2022 sebesar 44,27%. Untuk mencapai target air sanitasi aman 55% pada tahun 2034, dilakukan proyeksi peningkatan kebutuhan setiap tahunnya hingga mencapai target.

Dari segi infrastruktur sanitasi eksisting, pada tahun 2022 kapasitas IPAL di Banten sebesar 1.191,79 liter/detik, sedangkan timbulan air limbah sebesar 13.529,93 liter/detik sehingga gap penanganan air limbah sebesar 12.338,14 liter/detik. Seiring pertambahan penduduk dan aktivitas industri, diproyeksikan timbulan air limbah semakin naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan Buku A Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T Kementerian PUPR (2018), persentase timbulan air limbah domestik adalah 60-80% dari pemakaian air minum. Dalam dokumen ini, digunakan angka 80% dalam perhitungan.

Timbulan air limbah kemudian disesuaikan dengan presentase target pelayanan sanitasi aman per tahun yang telah diproyeksikan sebelumnya, lalu selanjutnya dikurangi dengan kapasitas IPAL eksisting sehingga didapatkan gap timbulan air limbah *bussiness as usual* tanpa adanya intervensi penanganan. Proyeksi timbulan air limbah per kabupaten/kota di Provinsi Banten secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.6 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Baseline	Proyeksi Timbulan Air Limbah (lt/detik)		
			2025	2029	2034
1.	Kabupaten Pandeglang	80%	1.499	1.562	1.646
2.	Kabupaten Lebak		1.663	1.761	1.892
3.	Kabupaten Tangerang		3.897	4.139	4.463
4.	Kabupaten Serang		1.950	2.069	2.229
5.	Kota Tangerang		2.190	2.252	2.331
6.	Kota Cilegon		436	463	599
7.	Kota Serang		845	908	994
8.	Kota Tangerang Selatan		1.570	1.624	1.693
TOTAL			14.051	14.779	15.847

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara keseluruhan timbunan air limbah di Provinsi Banten hingga tahun 2034 sebesar 15.847 l/detik. Jumlah timbunan air limbah terbesar berada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang masing-masing sebesar 4.463 l/detik dan 2.331 l/detik. Sementara itu kebutuhan air bersih perkotaan terendah berada di Kota Cilegon dan Kota Serang masing-masing sebesar 599 l/detik dan 994 l/detik.

Tabel 7.7 Proyeksi Penyediaan Air Limbah di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		l/det	%	l/det	%	l/det	%	l/det	l/det
1.	Kabupaten Pandeglang	11	0,77	506	32	905	55	-483	-882
2.	Kabupaten Lebak	54	3,40	590	34	1.041	55	-475	-926
3.	Kabupaten Tangerang	162	4,36	1.403	34	2.455	55	-1.058	-2.109
4.	Kabupaten Serang	363	10,32	753	36	1.226	55	-344	-816
5.	Kota Tangerang	309	14,40	857	38	1.282	55	-222	-647
6.	Kota Cileogn	82	11,06	170	37	330	55	-72	-231
7.	Kota Serang	158	19,79	366	40	547	55	-25	-205
8.	Kota Tangerang Selatan	333	21,75	668	41	931	55	21	-242

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Target layanan sanitasi aman pada tahun 2029 sebesar 30% dan meningkat pada tahun 2034 menjadi 55%. Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan sanitasi aman di Provinsi Banten sebesar 10,73%. Beberapa wilayah yang sudah melampaui target tahun 2025 layanan cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang (14,40%), Kota Serang (19,79%) dan Kota Tangerang Selatan (21,75%). Untuk wilayah lainnya masih berada dibawah target layanan dengan Kabupaten Pandeglang (0,77%), Kabupaten Lebak (3,40%), dan Kabupaten Tangerang (4,36%) sebagai wilayah dengan tingkat layanan terendah. Pembangunan beberapa fasilitas pengolahan limbah cair diarahkan pada masing-masing kabupaten yang masih memiliki layanan sanitasi aman dibawah target (15%).

C. Persampahan

Kategori persampahan yang digunakan dalam perhitungan yaitu pengelolaan persampahan dan daur ulang. Presentase pengelolaan persampahan di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar 55% dan daur ulang sebesar 4,64%, sementara dalam draft teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2045, target presentase pengelolaan persampahan pada tahun 2034 sebesar 60% dan target daur ulang sebesar 25%, sehingga dalam skala provinsi terdapat gap pengelolaan persampahan sebesar 5%, serta

masih terdapat gap pada skala kabupaten/kota. Untuk mencapai target pengelolaan persampahan 60% dan daur ulang 25% pada tahun 2034, dilakukan proyeksi peningkatan kebutuhan setiap tahunnya hingga mencapai target.

Timbulan sampah kemudian disesuaikan dengan presentase target pengelolaan sampah dan daur ulang per tahun yang telah diproyeksikan sebelumnya, lalu selanjutnya dikurangi dengan kapasitas TPA eksisting sehingga didapatkan gap timbulan persampahan *bussiness as usual* tanpa adanya intervensi penanganan. Proyeksi timbulan persampahan per kabupaten/kota secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.8 Proyeksi Timbulan Persampahan

No.	Kabupaten/Kota	Baseline	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)		
			2025	2029	2034
1.	Kabupaten Pandeglang	0,40	539	562	593
2.	Kabupaten Lebak	0,40	599	634	681
3.	Kabupaten Tangerang	0,43	1.508	1.602	1.727
4.	Kabupaten Serang	0,77	1.352	1.434	1.544
5.	Kota Tangerang	0,59	1.163	1.196	1.238
6.	Kota Cilegon	0,76	358	380	410
7.	Kota Serang	0,85	646	695	761
8.	Kota Tangerang Selatan	0,63	890	921	960
TOTAL		54,6%	7.056	7.424	7.913

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara keseluruhan timbulan sampah di Provinsi Banten hingga tahun 2034 sebesar 7.913 ton/hari. Timbulan sampah terbesar berada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang masing-masing sebesar 1.602 ton/hari dan 1.434 ton/hari. Sementara itu timbulan terendah berada di Kota Pandeglang dan Kabupaten Lebak masing-masing sebesar 562 ton/hari dan 634 ton/hari.

Tabel 7.9 Proyeksi Timbulan Sampah di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	ton/hari
1.	Kabupaten Pandeglang	32	6,15	211	37.56	356	60.00	-179	-323
2.	Kabupaten Lebak	132	23,04	283	44.60	409	60.00	-151	-277
3.	Kabupaten Tangerang	874	60,66	1,014	63.31	1,048	60.66	-140	-173
4.	Kabupaten Serang	96	7,45	1,011	70.48	927	60.00	-914	-830
5.	Kota Tangerang	1.138	99,94	1,527	127.68	1,238	100.00	-388	-99
6.	Kota Cilegon	285	83,25	553	145.52	410	100.00	-268	-125

No.	Kabupaten/Kota	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	ton/hari
7.	Kota Serang	348	56,76	1,026	147.61	761	100.00	-678	-413
8.	Kota Tangerang Selatan	864	99,52	1,228	133.34	960	100.00	-363	-96

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tingkat layanan pengelolaan sampah di Provinsi Banten sudah tergolong baik sebesar 54,60% sampah terkelola dan sudah melampaui target sampah terkelola tahun 2029 sebesar 40%. Kawasan perkotaan sudah memiliki tingkat layanan pengelolaan sampah yang tinggi (lebih dari 80%). Masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tingkat pengelolaan sampah rendah diantaranya Kabupaten Pandeglang (6,15%), Kabupaten Serang (7,45%), dan Kabupaten Lebak (23,04%). Sementara itu, tingkat daur ulang sampah di Provinsi Banten masih tergolong rendah dengan rata-rata 4,64% dari total timbunan sampah terangkut (target tahun 2034 sebesar 25%). Perlu direncanakan beberapa TPST terutama pada permukiman di kabupaten yang tertinggal dan kawasan wisata untuk dapat mengatasi permasalahan pengolahan sampah di Provinsi Banten.

4) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Perumahan Provinsi Banten

Kepemilikan rumah di Provinsi Banten telah memenuhi target infrastruktur (85,15%) di tahun 2034. Kepemilikan rumah pribadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.10 Proyeksi Jumlah KK di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah KK (ribu)									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Kabupaten Pandeglang	315,0	318,3	321,7	325,0	328,5	331,9	335,4	338,9	342,5	346,1
2.	Kabupaten Lebak	359,6	364,8	370,1	375,4	380,9	386,4	391,9	397,6	403,3	409,2
3.	Kabupaten Tangerang	842,8	855,6	868,6	881,8	895,2	908,7	922,5	936,6	950,8	965,2
4.	Kabupaten Serang	392,2	398,0	404,0	410,0	416,1	422,4	428,7	435,1	441,6	448,2
5.	Kota Tangerang	515,8	519,4	523,0	526,6	530,3	534,0	537,7	541,4	545,2	548,9
6.	Kota Cilegon	111,1	112,8	114,5	116,3	118,0	119,8	121,6	123,5	125,3	127,2
7.	Kota Serang	162,7	165,7	168,7	171,8	174,9	178,1	181,4	184,7	188,1	191,5
8.	Kota Tangerang Selatan	356,9	359,9	362,9	365,9	369,0	372,1	375,2	378,4	381,5	384,7

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.11 Proyeksi Kepemilikan Rumah Pribadi di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Rumah Pribadi							GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034	
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	KK	
1.	Kabupaten Pandeglang	285.716	93,57	291.398	88,70	297.661	86	-5.682	-11.945	
2.	Kabupaten Lebak	339.218	98,46	347.353	91,19	351.929	86	-8.135	-12.711	
3.	Kabupaten Tangerang	682.742	84,75	765.215	85,48	830.120	86	-82.474	-147.378	
4.	Kabupaten Serang	359.800	95,90	372.333	89,46	385.457	86	-12.533	-25.656	
5.	Kota Tangerang	311.685	61,69	409.638	77,24	472.133	86	-97.953	-160.448	
6.	Kota Cilegon	88.338	83,11	100.244	84,89	109.477	86	-11.907	-21.139	
7.	Kota Serang	135.067	87,59	151.356	86,49	164.719	86	-16.289	-29.652	
8.	Kota Tangerang Selatan	265.072	76,14	304.119	82,40	330.900	86	-39.048	-65.828	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kepemilikan rumah pribadi di Provinsi Banten telah memenuhi target hingga tahun 2034. Namun masih terdapat membutuhkan penanganan dalam pemenuhan kepemilikan hunian perkotaan di Kota Tangerang (160.448), Kabupaten Tangerang (147.378), dan Kota Tangerang Selatan (65.828). Kepemilikan rumah yang rendah berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Kota Cilegon (109.477 KK) merupakan contohnya perkotaan yang membutuhkan kepemilikan rumah dikarenakan harga tanah yang cenderung tinggi sehingga sulit untuk memiliki rumah pribadi. Sementara untuk, perumahan layak di Provinsi Banten sudah tergolong tinggi dengan persentase mencapai 94,20%, lebih dari target tahun 2036 (86%). Masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki jumlah hunian layak dibawah target pengembangan infrastruktur. Ketersediaan rumah hunian layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.12 Proyeksi Rumah Layak di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	RLH						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022-2029	2022-2034
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	KK
1.	Kabupaten Pandeglang	239.776	78,52	247.573	75,36	297.661	86	-7.797	-57.885
2.	Kabupaten Lebak	280.810	81,51	288.159	75,65	351.929	86	-7.349	-71.119
3.	Kabupaten Tangerang	796.645	98,89	881.241	98,44	830.120	86	-84.596	-33.475
4.	Kabupaten Serang	359.770	95,89	375.064	90,12	385.457	86	-15.294	-25.687
5.	Kota Tangerang	504.273	99,81	587.660	110,81	472.133	86	-83.387	32.140
6.	Kota Cilegon	106.289	100	118.410	100,28	109.477	86	-12.121	-3.188
7.	Kota Serang	152.969	99,20	170.274	97,30	164.719	86	-17.305	-11.750
8.	Kota Tangerang Selatan	347.441	99,80	382.271	103,58	330.900	86	-34.830	16.541

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keberadaan rumah layak di Provinsi Banten hampir merata di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten yang membutuhkan banyak penanganan dalam penyediaan rumah layak huni adalah Kabupaten Pandeglang (57.885 KK) dan Kabupaten Tangerang (33.475 KK). Sementara untuk Kebutuhan infrastruktur perumahan dibutuhkan diantaranya adalah ketersediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Target yang ditentukan hingga tahun 2034 sebesar 86%.

7.1.2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri

Analisis kebutuhan kawasan industri priortas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Banten adalah KI Cilegon, KI Cikande, dan KI Wilmar.

A. Kawasan Industri

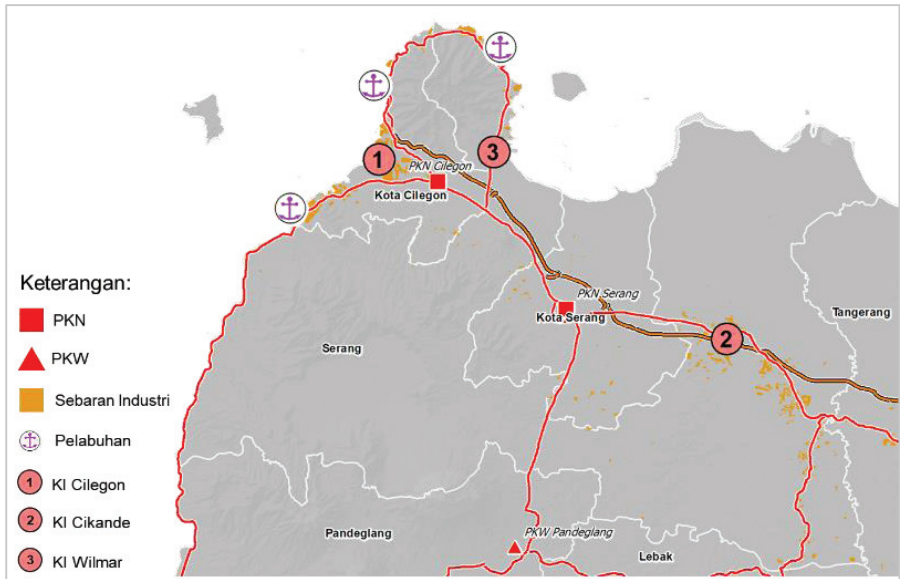
Kawasan industri Serang – Cilegon memiliki luasan kawasan industri sebesar 6.000 Ha atau 71% dari total luasan kawasan industri di Provinsi Banten. Sektor industri kawasan Serang – Cilegon yang terbesar pada sektor industri bahan kimia, alas kaki, dan industri logam dasar besi dan baja. KI Cilegon, KI Cikande, dan KI Wilmar termasuk dalam wilayah kawasan industri Serang – Cilegon di bagian utara Provinsi Banten. Lokasi dan luasan masing-masing kawasan industri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.13 Luas Kawasan Industri di Serang – Cilegon

No	Kawasan Industri	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	KI Cilegon	Kota Cilegon	Citangkil	546
2.	KI Cikande	Kabupaten Serang	Kibin	2.095
3.	KI Wilmar	Kabupaten Serang	Kramatwatu	645
Total				3.286

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari segi persebaran, sebagian besar kawasan industri berada di wilayah utara dengan kecenderungan mendekati jalan tol Jakarta-Merak. Sebaran kawasan industri tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.1 Sebaran Kawasan Industri Prioritas Banten

Sumber: Hasil Analisis, 2022

B. Analisis Kebutuhan Air Baku Kawasan Industri

Kebutuhan air baku di 3 (tiga) kawasan industri tersebut dipenuhi dari DAS Cidanau dan DAS Ciujung dengan total ketersediaan air baku sebesar 0,80 m³/detik yang berasal dari Bendungan Sindangheula. Selain itu, kebutuhan air baku industri juga dipenuhi dari rencana Bendungan Karian yang memiliki volume tampungan total sebesar 314,70 juta m³ dengan tampungan air baku sebesar 9,10 m³/detik.

Perhitungan kebutuhan air baku untuk kawasan industri didasarkan pada luasan kawasan industri yang telah terokupansi serta pertumbuhan industri diikuti dengan laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri sebesar 3,7% dalam 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan luasan kawasan industri pada tahun 2020 - 2034 sebesar 44%. Modern Cikande Industrial Estate memiliki tingkat luasan pertumbuhan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan industri lainnya, yaitu 64% hingga tahun 2034.

Tabel 7.14 Proyeksi Okupansi KI Prioritas

Tahun	Proyeksi Okupansi Kawasan Industri (Ha)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2025	655	2.512	773	1430.512
2026	679	2.605	802	1483.605
2027	704	2.702	832	1538.702
2028	730	2.802	863	1595.802
2029	757	2.905	894	1653.905
2030	785	3.013	927	1715.013

Tahun	Proyeksi Okupansi Kawasan Industri (Ha)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2031	814	3.124	962	1779.124
2032	844	3.24	997	1844.24
2033	875	3.36	1.034	879.394
2034	908	3.484	1.072	912.556

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dasar perhitungan kebutuhan air baku industri adalah Peraturan Menteri Industri (Permenperin) Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, yakni sebesar 0,55 - 0,75 liter/detik/ha. Pada analisis kebutuhan air baku KI Prioritas Provinsi Banten menggunakan konstanta 0,65 liter/detik/ha sebagai acuan dasar untuk melakukan perhitungan kebutuhan air baku dengan mengalikan luas okupansi industri dengan nilai konstanta. Hasil proyeksi kebutuhan air baku industri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.15 Proyeksi Kebutuhan Air Baku di KI Prioritas

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Air Baku (liter/detik)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2025	425,75	1632,80	502,45	2561,00
2026	441,35	1693,25	521,30	2655,90
2027	457,60	1756,30	540,80	2754,70
2028	474,50	1821,30	560,30	2856,10
2029	492,05	1888,25	581,10	2961,40
2030	510,28	1958,32	602,73	3071,34
2031	529,16	2030,78	625,03	3184,98
2032	548,74	2105,92	648,16	3302,83
2033	569,04	2183,84	672,14	3425,03
2034	590,10	2264,64	697,01	3551,76

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Kegiatan industri dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas, terutama akibat pergerakan kendaraan dari kawasan industri menuju *outlet* (pelabuhan). Bangkitan lalu lintas industri dihitung berdasarkan Permenperin 40/2016, dimana diasumsikan bahwa bangkitan lalu lintas sebesar 5,5 smp/hari/hektar dengan luas kawasan yang dihitung adalah luas kawasan yang telah terokupansi. Proyeksi bangkitan lalu lintas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

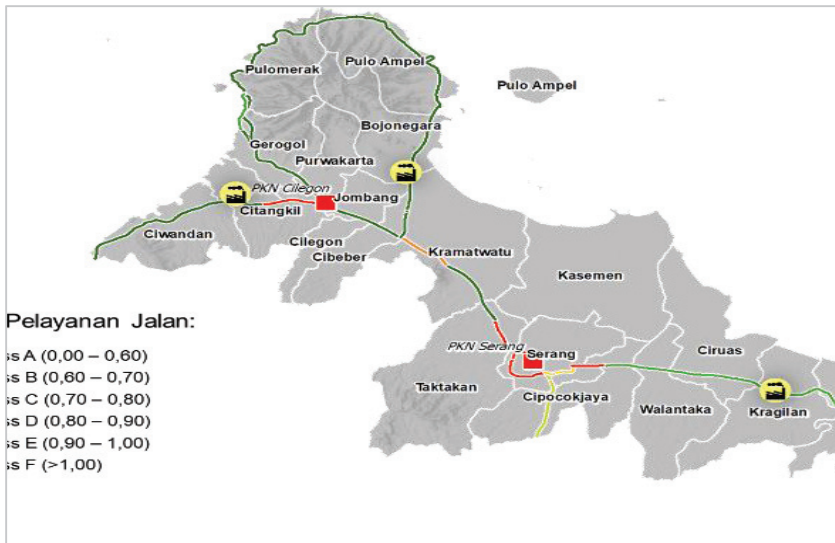
Tabel 7.16 Proyeksi Bangkitan Lalu Lintas

Tahun	Proyeksi Bangkitan Lalu Lintas (smp/jam)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2025	47,11	177,67	55,65	280,43
2026	48,86	184,24	57,71	290,81
2027	50,66	191,06	59,84	301,57
2028	52,54	198,13	62,06	312,73
2029	54,48	205,46	64,35	324,30

Tahun	Proyeksi Bangkitan Lalu Lintas (smp/jam)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2030	56,50	213,06	66,73	336,30
2031	58,59	220,95	69,20	348,74
2032	60,76	229,12	71,76	361,64
2033	63,00	237,60	74,42	375,02
2034	65,34	246,39	77,17	388,90

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Bangkitan kendaraan terbesar di Banten berada di wilayah utara akibat adanya kegiatan industri (97% industri Banten ada di utara). Dari segi jenis pergerakan lalu lintas, saat ini masih didominasi pergerakan campuran antara lalu lintas lokal dan logistik, khususnya di ruas jalan Pantura Banten. Dari segi kinerja jalan, jaringan jalan di wilayah Kabupaten Serang menuju Kota Serang memiliki kinerja yang baik (kondisi mantap, $VCR < 0,8$), sedangkan jalan Kota Serang menuju Kota Cilegon memiliki kinerja rendah rendah (ada beberapa ruas dengan $VCR > 0,8$). Jalan yang memiliki tingkat pelayanan rendah ($VCR > 0,8$) berada di ruas jalan: Jalan Sudirman (Serang); Jalan Abdul Hadi (Serang); Jalan TB. Suwandi (Serang); Jalan Letnan Jidun (Serang); Jalan Raya Cilegon (Serang); Jalan Raya Serang (Cilegon); dan Jalan Raya Anyer (Cilegon). Selain itu, titik kemacetan lalu lintas di jalan nasional berada di pintu masuk dan pintu keluar Gerbang Tol Serang Timur, terutama akibat antrian kendaraan logistik.



Gambar 7.2 Kondisi Layanan Jalan di Kawasan Serang – Cilegon

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Analisis Kebutuhan Perumahan

Perhitungan kebutuhan perumahan bagi pekerja industri dihitung berdasarkan jumlah pekerja. Sesuai dengan Permenperin 40/2016

perhitungan jumlah pekerja dihitung berdasarkan asumsi jumlah pekerja sebesar 100 orang/hektar. Sehingga perhitungan jumlah pekerja di KI prioritas Banten adalah sebagai berikut.

Tabel 7.17 Proyeksi Jumlah Pekerja di KI Prioritas

Tahun	Proyeksi Jumlah Pekerja (orang)			Total
	KI Cilegon	KI Cikande	KI Wilmar	
2025	158.752	609.160	187.513	955.425
2026	164.626	631.713	194.451	990.790
2027	170.717	655.235	201.645	1.027.597
2028	177.033	679.485	209.106	1.065.624
2029	183.583	704.463	216.843	1.104.889
2030	190.376	730.653	224.866	1.145.895
2031	197.395	757.570	233.285	1.188.250
2032	204.670	785.700	241.773	1.232.143
2033	212.188	814.800	250.745	1.277.733
2034	220.190	844.870	259.960	1.325.020

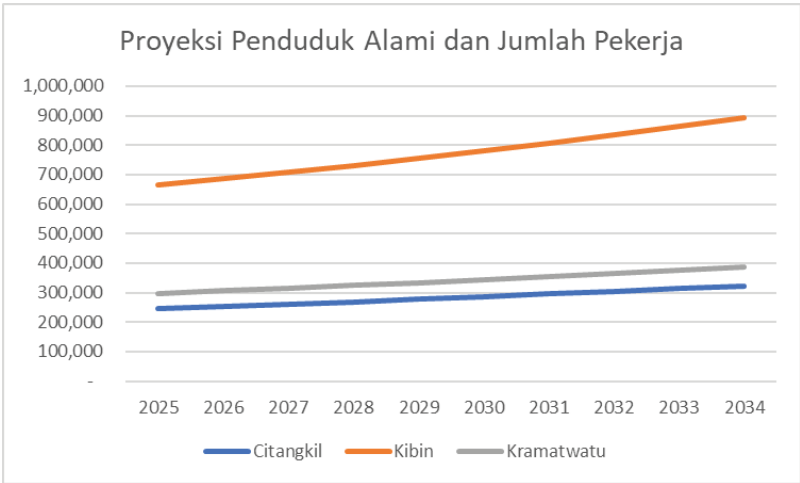
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penyediaan hunian bagi pekerja industri disediakan secara kolaborasi oleh pengelola kawasan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan swasta. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyediakan hunian industri dengan pembangunan rumah susun. Penyediaan rumah susun dilakukan dengan mengasumsikan bahwa hanya 1% dari pekerja industri yang akan dilayani rumah susun. Tipe rumah susun yang dibangun adalah rumah susun tipe barak dimana setiap tower terdiri dari 5 lantai dan 250 bed. Dari hasil proyeksi, pada tahun 2029 terdapat kebutuhan rumah susun pekerja industri sebanyak 44 tower bangunan (TB), dengan rincian 7 TB untuk KI Cilegon, 28 TB untuk KI Cikande, dan 9 TB untuk KI Wilmar.

E. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Kebutuhan infrastruktur permukiman dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk alami dan tenaga kerja industri. Lokus perhitungan adalah 3 (tiga) kecamatan terpilih yang menjadi lokasi ketiga KI prioritas. Pada tahun 2029 dan tahun 2034, diproyeksikan jumlah penduduk alami di sekitar KI prioritas sebanyak 263.429 jiwa (2029) dan 278.891 jiwa (2034) dengan jumlah penduduk alami tertinggi ada di Kecamatan Kramatwatu (KI Wilmar) yaitu 117.601 jiwa (2029) dan 128.600 jiwa (2034). Sedangkan jumlah penduduk alami di Kecamatan Citangkil (KI Cilegon) dan Kecamatan Kibin (KI Cikande) pada tahun 2029 masing-masing sebesar 94.272 jiwa dan 51.556 jiwa sedangkan pada tahun 2034 masing-masing sebesar 103.343 jiwa dan 46.948 jiwa.

Selain penduduk alami, keberadaan pekerja industri juga terus bertumbuh seiring dengan perkembangan kegiatan industri. Pada tahun 2034, jumlah penduduk alami dan pekerja industri diproyeksikan sebanyak 1.603.911 jiwa dengan persebaran terbesar di Kecamatan Kibin.



Gambar 7.3 Proyeksi Penduduk dan Pekerja Industri

Sumber: Hasil Analisis, 2023

1) **Infrastruktur Air Minum**

Dengan proyeksi penduduk ditambah pertambahan tenaga kerja industri maka jumlah kebutuhan air minum domestik dan non domestik pada tahun 2034 sebesar 2.561,80 liter/detik. Sedangkan capaian pelayanan air minum perpipaan di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang masing-masing sebesar 19,64% dan 15,65%.

Tabel 7.18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik dan Non Domestik (liter/detik)			Total
	Citangkil	Kibin	Kramatwatu	
2025	393.5	1061.7	474.4	1929.5
2026	405.4	1096.1	488.6	1990.1
2027	417.8	1132.0	503.3	2053.2
2028	430.6	1169.2	518.5	2118.3
2029	443.8	1207.5	534.2	2185.5
2030	457.4	1247.8	550.4	2255.7
2031	471.5	1289.3	567.3	2328.1
2032	486.0	1332.8	584.4	2403.1
2033	501.0	1377.8	602.3	2481.0
2034	516.8	1424.4	620.6	2561.8

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air minum di Kecamatan Kramatwatu (KI Wilmar) pada tahun 2034 sebesar 620,62 liter/detik, sementara ketersediaan air minum eksisting sebesar 22 liter/detik yang berasal dari PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang. Dengan mempertimbangkan tingkat kebocoran dan peningkatan pelayanan, maka gap kebutuhan air minum pada tahun 2034 defisit sebesar 273,08 liter/detik. Sedangkan jika dilakukan

intervensi berupa penambahan kapasitas WTP Sindangheula dengan kapasitas 400 liter/detik, maka pada tahun 2034 ketersediaan air minum menjadi surplus 126,92 liter/detik.

Kebutuhan air minum di Kecamatan Kibin (KI Cikande) pada tahun 2034 sebesar 1.424,43 liter/detik, sementara ketersediaan air minum eksisting sebesar 40 liter/detik yang berasal dari PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang. Dengan mempertimbangkan tingkat kebocoran dan peningkatan pelayanan, maka gap kebutuhan air minum pada tahun 2034 defisit sebesar 637,25 liter/detik. Meskipun jika dilakukan intervensi berupa penambahan kapasitas WTP Sindangheula dengan kapasitas 400 liter/detik, maka pada tahun 2034 ketersediaan air minum menjadi defisit 237,25 liter/detik.

2) Infrastruktur Persampahan

Dari perhitungan proyeksi penduduk dan tenaga kerja industri, dapat diproyeksikan jumlah timbulan sampah pada tahun 2034 sebesar **1.283,13 ton/hari**. Infrastruktur persampahan eksisting adalah TPA Cilowong (Kabupaten Serang) dan TPA Bagendung (Kota Cilegon) dengan kapasitas masing-masing 210.000 m3/tahun dan 595 m3/tahun. Saat ini TPA Cilowong terpakai 50% dari kapasitasnya dan TPA Bagendung sudah terpakai mencapai 98%.

Tabel 7.19 Timbulan Sampah di Kecamatan KI Prioritas Provinsi Banten

Tahun	Timbulan Sampah Domestik (ton/hari)			Total
	Citangkil	Kibin	Kramatwatu	
2025	197.1	531.8	237.6	966.5
2026	203.1	549.0	244.7	996.8
2027	209.3	567.0	252.1	1028.4
2028	215.7	585.6	259.7	1061.0
2029	222.3	604.8	267.6	1094.7
2030	229.1	625.0	275.7	1129.8
2031	236.2	645.8	284.1	1166.1
2032	243.4	667.6	292.7	1203.7
2033	250.9	690.1	301.7	1242.7
2034	258.8	713.5	310.8	1283.1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Infrastruktur Air Limbah

Kebutuhan penanganan air limbah di kawasan industri prioritas Banten pada tahun 2034 sebesar **2.049,44 liter/detik**, timbulan air limbah dihasilkan dari air domestik dan non domestik yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk alami dan tenaga kerja di kecamatan inti kawasan industri prioritas Provinsi Banten.

Tabel 7.20 Timbunan Air Limbah di Kecamatan KI Prioritas Provinsi Banten

Tahun	Timbunan Air Limbah (liter/detik)			Total
	Citangkil	Kibin	Kramatwatu	
2025	314.77	849.37	379.49	1543.64
2026	324.35	876.87	390.88	1592.11
2027	334.25	905.64	402.65	1642.53
2028	344.47	935.35	414.80	1694.62
2029	355.04	966.02	427.35	1748.41
2030	365.95	998.27	440.31	1804.53
2031	377.19	1031.46	453.83	1862.48
2032	388.81	1066.23	467.48	1922.52
2033	400.77	1102.26	481.81	1984.84
2034	413.40	1139.54	496.49	2049.44

Sumber: Hasil Analisis, 2023

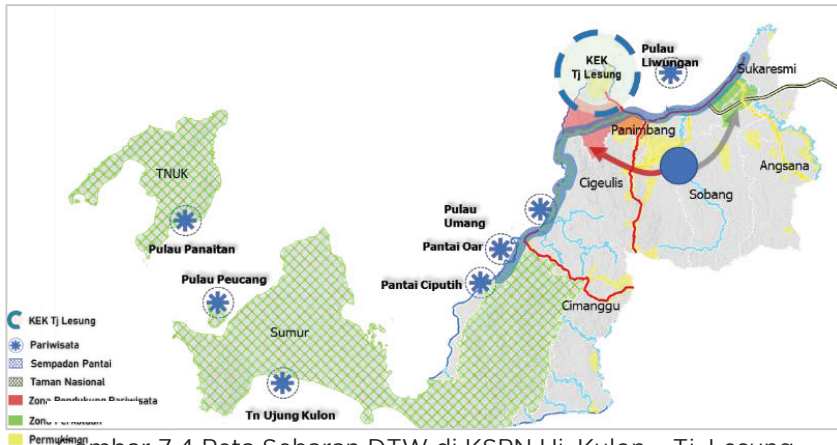
7.1.3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan pariwisata prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Banten adalah KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung, KPPN Serang-Banten Lama, dan KPPN Lebak-Baduy.

A. Kawasan Pariwisata

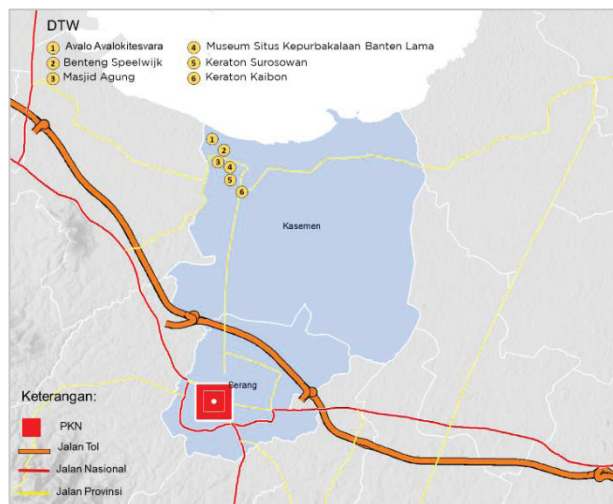
KEK Tanjung Lesung, KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung, KPPN Serang-Banten Lama, dan KPPN Lebak-Baduy merupakan kawasan pariwisata di Provinsi Banten yang telah ditetapkan berdasarkan Ripparnas 2010-2025. KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung merupakan kawasan wisata berbasis wisata pantai dan mempunyai potensi wisata berupa wisata bahari, ekowisata, dan wisata budaya. KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung terletak di Kabupaten Pandeglang dengan kecamatan inti yang meliputi Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cigeulis, Subang, Panimbang, Angsana, dan Sukaresmi. Sektor pariwisata di Kabupaten Pandeglang berkontribusi 17,3% terhadap seluruh kedatangan wisatawan di Banten dan Provinsi Banten menyumbang kontribusi sebesar 5% dari total kedatangan wisata mancanegara melalui gerbang Soekarno Hatta.

Kawasan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung memiliki daya tarik utama di KEK Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Selain itu terdapat wisata pendukung seperti Pulau Umang, Pulau Mangir, Pantai Daplangu – Dadaplangu, Pantai Cemara, Pulau Liwungan, Desa Cikadu, Pantai Ciputih, dan Pulau Oar.



Gambar 7.4 Peta Sebaran DTW di KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

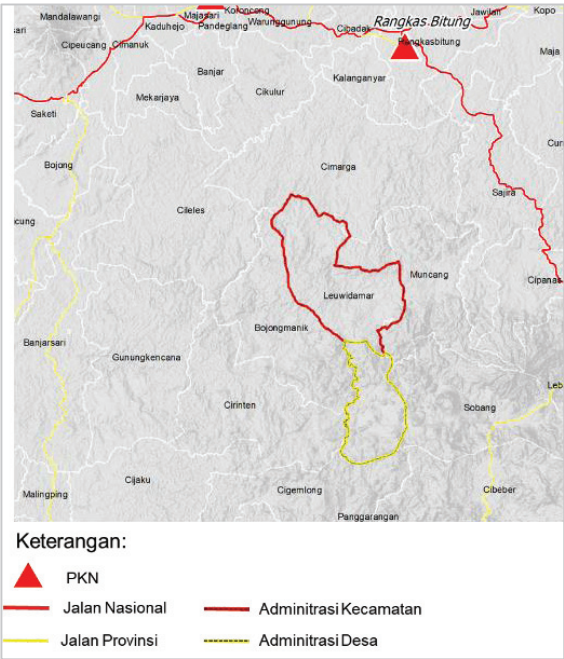
KPPN Serang-Banten Lama merupakan kawasan wisata mempunyai potensi wisata berupa wisata religi, budaya, dan sejarah. KPPN Serang-Banten Lama terletak di Kota Serang dengan kecamatan inti yang meliputi Kecamatan Kasemen dan Serang. Sektor pariwisata di Kota Serang berkontribusi 38% terhadap seluruh kedatangan wisatawan di Banten. Kawasan KPPN Serang-Banten Lama memiliki daya tarik utama berupa Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Speelwijk, Vihara Avalokitesvara, serta Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.



Gambar 7.5 Peta Sebaran DTW di KPPN Serang-Banten Lama
Sumber: Hasil Analisis, 2023

KPPN Lebak-Baduy merupakan kawasan wisata mempunyai potensi wisata berupa wisata budaya. KPPN Lebak-Baduy terletak di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak dengan kecamatan inti yang meliputi

Kecamatan Leuwidamar. Sektor pariwisata di Kabupaten Lebak hanya berkontribusi sebesar 3,8% terhadap seluruh kedatangan wisatawan di Banten. Kawasan KPPN Lebak-Baduy memiliki daya tarik utama berupa Kampung Budaya Baduy yang terletak di Desa Kanekes.



Gambar 7.6 Lokasi KPPN Lebak-Baduy
Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Proyeksi Penduduk dan Wisatawan

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kawasan Ujung Kulon – Tanjung Lesung hingga tahun 2034 sebesar 287.272 jiwa. Kecamatan Panimbang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2034 sebesar 59.271 jiwa di Kawasan Ujung Kulon – Tanjung Lesung.

Tabel 7.21 Proyeksi Jumlah Penduduk KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung

Tahun	Jumlah Penduduk						
	Sumur	Cimanggu	Cigeulis	Sobang	Panimbang	Angsana	Sukaresmi
2025	27.248	38.917	37.148	38.780	54.739	28.925	39.259
2026	27.611	39.130	37.429	39.097	55.225	29.201	39.702
2027	27.979	39.344	37.713	39.416	55.715	29.481	40.150
2028	28.352	39.559	37.998	39.738	56.210	29.763	40.603
2029	28.730	39.775	38.286	40.062	56.709	30.048	41.062
2030	29.113	39.993	38.576	40.389	57.212	30.336	41.525
2031	29.502	40.211	38.869	40.719	57.720	30.626	41.994
2032	29.895	40.431	39.163	41.051	58.233	30.919	42.468
2033	30.293	40.652	39.460	41.387	58.750	31.215	42.948
2034	30.697	40.874	39.759	41.724	59.271	31.514	43.432

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung juga diperkirakan akan bertambah. Pada tahun 2029 jumlah wisatawan mencapai 6 juta jiwa. Laju pertumbuhan wisatawan di KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung sebesar 15%.



Gambar 7.7 Proyeksi Jumlah Wisatawan KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung
Sumber: Hasil Analisis, 2022

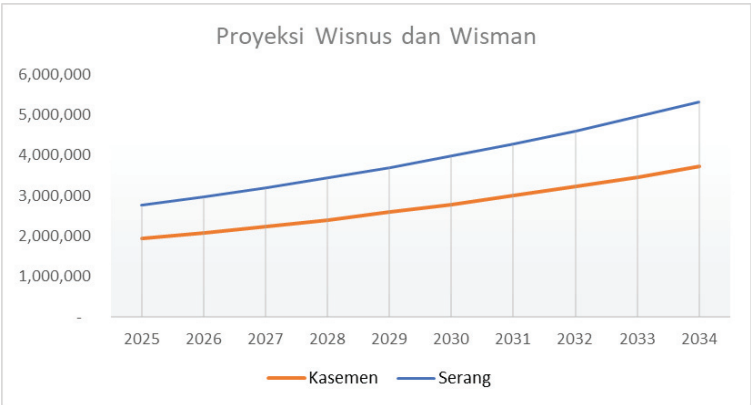
Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk di KPPN Serang-Banten Lama hingga tahun 2034 sebesar 393.678 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Kasemen yaitu sebesar 253.846 jiwa.

Tabel 7.22 Proyeksi Jumlah Penduduk di KPPN Serang-Banten Lama

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Kasemen	Serang	Total
2025	235.707	117.599	353.306
2026	237.657	119.884	357.540
2027	239.623	122.212	361.835
2028	241.605	124.587	366.191
2029	243.603	127.007	370.610
2030	245.618	129.474	375.092
2031	247.650	131.989	379.639
2032	249.698	134.554	384.252
2033	251.764	137.167	388.931
2034	253.846	139.832	393.678

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan KPPN Serang-Banten Lama juga diperkirakan akan bertambah. Pada tahun 2034 jumlah wisatawan mencapai 5,3 juta jiwa. Laju pertumbuhan wisatawan KPPN Serang-Banten Lama sebesar 7,6%.



Gambar 7.8 Proyeksi Jumlah Wisatawan KPPN Serang-Banten Lama
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk di KPPN Lebak-Baduy hingga tahun 2034 sebesar 61.532 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 0,9% setiap tahunnya.

Tabel 7.23 Proyeksi Jumlah Penduduk di KPPN Lebak-Baduy

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Leuwidamar	56,88	57,38	57,88	58,39	58,90	59,44	59,94	60,46	60,99	61,53
TOTAL	56,88	57,38	57,88	58,39	58,90	59,44	59,94	60,46	60,99	61,53

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan KPPN Serang-Banten Lama juga diperkirakan akan bertambah. Namun, dikarenakan KPPN Lebak-Baduy merupakan wilayah hak ulayat/ adat sehingga dilakukan pembatasan jumlah wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan perhitungan daya tampung dengan mempertimbangkan luas area adat yang dapat dikunjungi wisatawan, jumlah hari wisata, faktor pemulihan, serta kebutuhan ruang ideal setiap wisatawan, didapatkan hasil daya tampung wisatawan pada KPPN Lebak-Baduy sebesar 9.986 wisatawan/tahun dengan pertumbuhan 0%.

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air

KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung termasuk ke dalam Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur yang merupakan WS kewenangan provinsi. Potensi air baku di KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung sebanyak 2.430 liter/detik, yang diperoleh dari 9 sungai besar di sekitar kawasan. Potensi air baku terbesar berasal dari Sungai Ciliman, yaitu 1.800 liter/detik.

Tabel 7.24 Potensi Air Baku di KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung

No.	Kecamatan	Sumber Potensi	Debit (liter/detik)
1.	Cimanggu	Sungai Sisih	45
2.	Cibaliung	Sungai Cibaliung	25
3.	Cikeusik	Sungai Cikeusik	225
4.	Cigeulis	Sungai Ciseureuheun	45

No.	Kecamatan	Sumber Potensi	Debit (liter/detik)
5.	Munjul	Sungai Ciliman	1.800
6.	Bojong	Sungai Cilemer	105
7.	Pagelaran	Sungai Cibungur	25
8.	Labuan	Sungai Cibama	100
9.	Cimanuk	Sungai Cilembu	60
Total			2.430

Sumber: Hasil Analisis, 2023

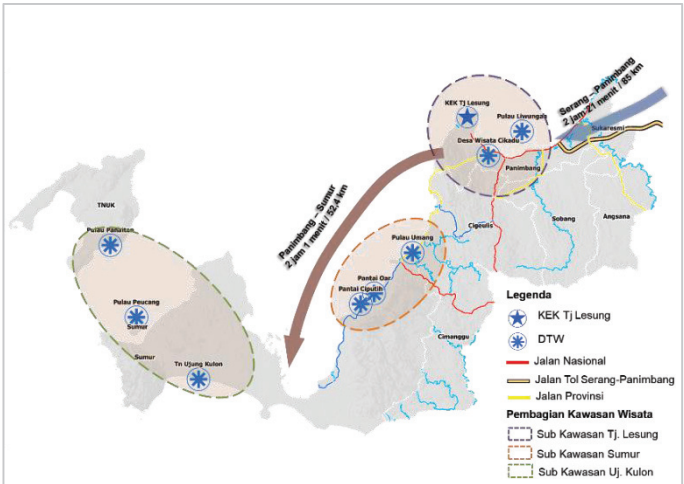
D. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Analisis kebutuhan infrastruktur jalan terdiri dari *relevant road* kawasan pariwisata dan proyeksi bangkitan lalu lintas akibat adanya kegiatan pariwisata di KSPN Uj. Kulon—Tj. Lesung, KPPN Serang—Banten Lama, dan KPPN Lebak—Baduy.

1) Relevant Road Kawasan Pariwisata

Akses menuju KSPN Ujung Kulon-Tanjung Lesung dikategorikan cukup jauh, karena tidak adanya hub transportasi yang dekat dengan Kabupaten Pandeglang. Akses terdekat dari hub transportasi dapat melalui 3 pintu yaitu: Kota Cilegon melalui Pelabuhan Merak, Kota Tangerang melalui Bandara Soekarno- Hatta, dan Kabupaten Lebak melalui stasiun KRL Rangkasbitung.

Dari hub transportasi Kota Cilegon, dilanjutkan melalui jalan nasional ruas Cibaliung – Sumur, Citereup – Tanjung Lesung, dan SP. Labuan – Cibaliung. Kondisi jalan nasional baik dengan VCR masih di bawah 0,8 dan lebar sudah sesuai standar (7 m) dengan kondisi mantap.



Gambar 7.9 Akses Menuju KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Akses menuju KPPN Serang-Banten Lama dikategorikan mudah dijangkau karena posisinya yang berada di tengah Kota Serang. Akses

terdekat dari hub transportasi dapat melalui 2 pintu yaitu: Kota Cilegon melalui Pelabuhan Merak, Kota Tangerang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari hub transportasi Kota Cilegon, dilanjutkan melalui jalan nasional ruas Raya Merak (Cilegon), Raya Cilegon (Cilegon), Merak - Bts. Kota Cilegon, Raya Serang (Cilegon), dan Bts. Kota Cilegon - Bts. Kota Serang, dan Raya Cilegon (Serang). Kondisi jalan nasional menuju KPPN Serang-Banten Lama dari hub transportasi melalui Pelabuhan Merak relatif padat dengan VCR >0,8 berada di ruas jalan Raya Merak (Cilegon), Raya Serang (Cilegon), dan Raya Cilegon (Serang). Sementara itu, terdapat jalan tol Jakarta-Merak yang melayani wisatawan melalui hub transportasi Bandara Soekarno Hatta menuju kawasan KPPN Serang-Banten Lama yang memiliki *exit toll* di Kota Serang.

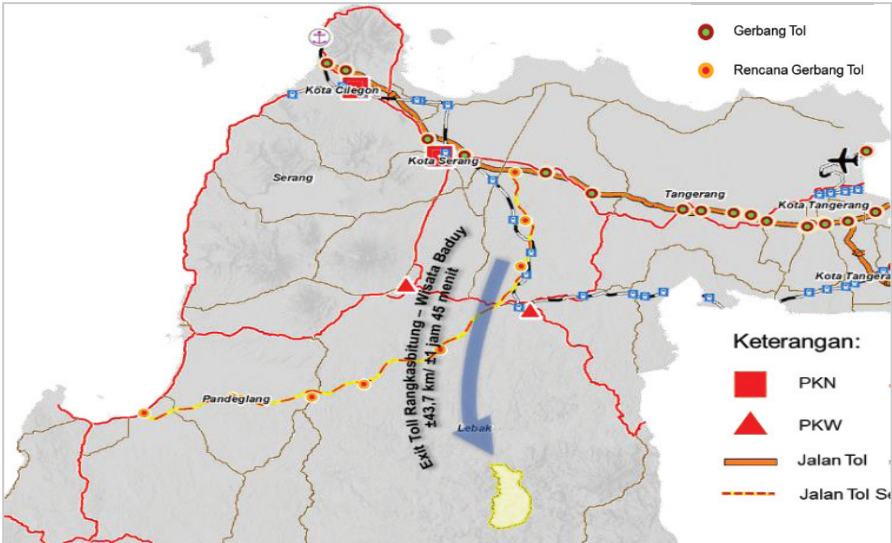


Gambar 7.10 Akses Menuju KPPN Serang-Banten Lama

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Akses menuju KPPN Lebak-Baduy dikategorikan cukup jauh, karena tidak adanya hub transportasi yang dekat dengan Kabupaten Lebak. Akses terdekat dari hub transportasi dapat melalui 3 pintu yaitu: Kota Cilegon melalui Pelabuhan Merak, Kota Tangerang melalui Bandara Soekarno-Hatta, dan Kabupaten Lebak melalui stasiun KRL Rangkasbitung.

Dari hub transportasi tersebut, dilanjutkan melalui daerah karena belum ada jalan nasional untuk menuju kawasan tersebut.



Gambar 7.11 Relevant Road Menuju KPPN Lebak-Baduy

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) **Proyeksi Bangkitan Pergerakan Kawasan Pariwisata**

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Pandeglang akan didukung dengan adanya Jalan Tol Serang – Panimbang menimbulkan bangkitan pergerakan pariwisata sebesar 29.128 smp/minggu dengan proyeksi wisatawan 6 juta pada tahun 2029. Jalan nasional sudah memiliki tingkat pelayanan cukup baik (LOS A-C). Namun, jalan kabupaten belum mampu menampung bangkitan kendaraan dari aktivitas pariwisata sehingga diarahkan adanya peningkatan kapasitas jalan kabupaten guna mendukung pariwisata KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung.

Tabel 7.25 Proyeksi Bangkitan Pergerakan KSPN Ujung Kulon – Tj. Lesung

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan/Tahun	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)	Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)
1	2025	3.473.526	2.379,13	16.654
2	2026	3.994.555	2.736,00	19.152
3	2027	4.593.739	3.146,40	22.025
4	2028	5.282.799	3.618,36	25.328
5	2029	6.075.219	4.161,11	29.128
6	2030	6.986.502	4.785,28	33.497
7	2031	8.034.477	5.503,07	38.521
8	2032	9.239.649	6.328,53	44.300
9	2033	10.625.596	7.277,81	50.945
10	2034	12.219.436	8.369,48	58.586

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dengan adanya pertumbuhan wisatawan di Kawasan Ujung Kulon – Tanjung Lesung total bangkitan pergerakan wisatawan pada tahun 2034 sebesar 8.369,48 smp/hari atau 58.586 smp/minggu. Ruas Jalan SP.

Labuan - Cibaliung memiliki kontribusi bangkitan tertinggi sebesar 57% dan memiliki kontribusi bangkitan pergerakan wisatawan tahun 2034 sebesar 33.609 smp/minggu.

Tabel 7.26 Proyeksi Bangkitan Pergerakan di Jalan Nasional

No	Ruas Jalan	Tahun					
		2025	2029	2034	2025	2029	2034
		Bangkitan Pergerakan (smp/hari)			Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)		
1.	Cibaliung – Sumur	297	520	1.046	2.082	3.641	7.323
2.	Citereup – Tanjung Lesung	717	1.254	2.522	5.018	8.777	17.654
3.	SP. Labuan – Cibaliung	1.365	2.076	4.801	9.554	16.709	33.609

Sumber Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan proyeksi terdapat salah satu jalan nasional di sekitar Kawasan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung berada pada kondisi jenuh yaitu Ruas Jalan Citereup – Tanjung Lesung dan SP. Labuan – Cibaliung pada tahun (2034). Ruas jalan Citereup – Tanjung Lesung tidak menunjukkan tingkat kejenuhan yang signifikan hingga tahun 2034.

Tabel 7.27 Proyeksi LHR dan VCR di Jalan Nasional

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	IRI	LHR (smp/jam)			VCR		
					2025	2029	2034	2025	2029	2034
21021	Cibaliung – Sumur	22,30	4,33	7,57	142	171	216	0,24	0,29	0,36
21022	Citereup- Tanjung Lesung	6,10	3,62	8,76	341	412	520	0,98	1,18	1,50
21012	SP. Labuan – Cibaliung	48,67	6,24	5,81	650	784	991	0,69	0,83	1,05

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sedangkan pada KPPN Serang-Banten Lama, selain jalan nasional, jalan utama menuju DTW merupakan jalan dengan status jalan daerah. Berdasarkan hasil proyeksi, bangkitan akibat aktivitas pariwisata di KPPN Serang-Banten Lama pada tahun 2034 cukup besar, yaitu 3.721 smp/hari, sehingga diarahkan adanya peningkatan kapasitas jalan daerah guna mendukung pariwisata.

Tabel 7.28 Proyeksi Bangkitan Pergerakan KPPN Serang-Banten Lama

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan/Tahun	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)	Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)
1.	2025	2.760.039	1.890	13.233
2.	2026	2.969.257	2.034	14.236
3.	2027	3.194.335	2.188	15.315
4.	2028	3.436.474	2.354	16.476
5.	2029	3.696.968	2.532	17.725
6.	2030	3.992.725	2.735	19.143
7.	2031	4.312.143	2.954	20.675
8.	2032	4.657.115	3.190	22.329

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan/Tahun	Bangkitan Pergerakan (smp/hari)	Bangkitan Pergerakan (smp/minggu)
9.	2033	5.029.684	3.445	24.115
10.	2034	5.432.059	3.721	26.044

Sumber: Hasil Analisis, 2023

E. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Analisis kebutuhan infrastruktur permukiman menguraikan kebutuhan air minum, timbunan sampah, dan timbunan air limbah.

1) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Kebutuhan air minum Kabupaten Pandeglang bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah wisatawan hingga tahun 2034 di Kawasan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung. Kebutuhan air minum domestik hingga tahun 2034 sebesar 398,99 liter/detik serta kebutuhan non domestik sebesar 59,85 liter/detik. Proyeksi total kebutuhan suplai air di Kawasan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung pada tahun 2029 181,21 liter/detik dengan target pelayanan akses air perpipaan hingga tahun 2029 30% (RPJMN 2024) dan faktor kehilangan air 15% sehingga dapat di proyeksikan untuk kebutuhan suplai air + kehilangan air di Kawasan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung pada tahun 2029 sebesar 208,39 liter/detik.

Tabel 7.29 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung

Kecamatan		Sumur	Cimanggu	Cigeulis	Subang	Panimbang	Angsana	Sukaresmi
Baseline Kebutuhan Air (Liter/ orang/ hari)		120	120	120	120	120	120	120
Kebutuhan Air Domestik (Liter/ detik)	2025	37,84	54,05	51,59	53,86	76,03	40,17	54,53
	2029	39,90	55,24	53,18	55,64	78,76	41,73	57,03
Kebutuhan Air Non Domestik (Liter/ detik)	2025	5,68	8,11	7,74	8,08	11,40	6,03	8,18
	2029	5,99	8,29	7,98	8,35	11,81	6,26	8,55
Sambungan Rumah (SR) (Liter/ orang/ hari)	2025	27.248	38.917	37.148	38.78	54.739	28.925	39.259
	2029	28.73	39.775	38.286	40.062	56.709	30.048	41.062
	2034	30.697	40.874	39.759	41.724	59.271	31.514	43.432

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air minum perpipaan saat ini dilayani oleh PDAM Perumdam Tirta Berkah, dengan cakupan pelayanan Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi. Saat ini tingkat pelayanan baru 2% dikarenakan terbatasnya jaringan perpipaan menuju kawasan wisata. Pada tahun 2023 SPAM Tanjung Lesung dengan kapasitas 100 liter/detik akan mulai beroperasi sehingga dapat meningkatkan layanan perpipaan bagi masyarakat dan wisatawan yang berada di KEK Tanjung Lesung.

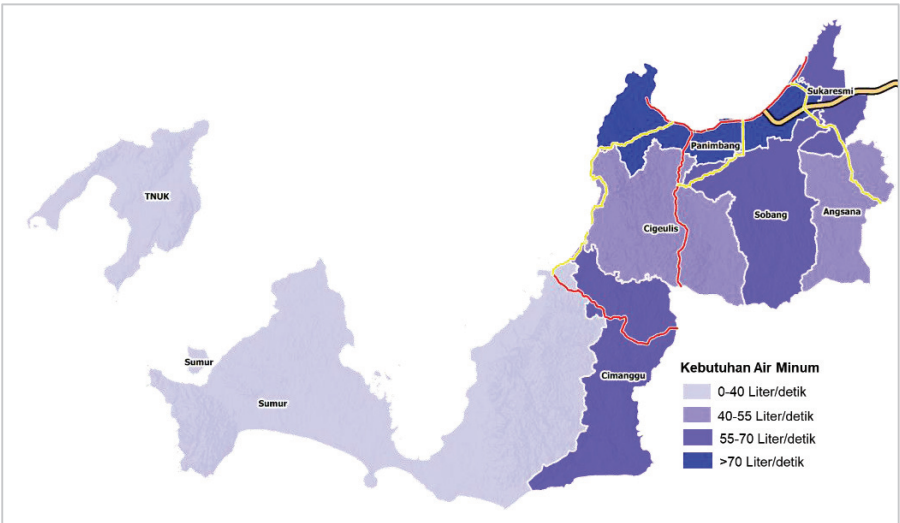
Tabel 7.30 GAP Kebutuhan Air Minum (SPAM Tj Lesung)

Tahun	SPAM Tj Lesung	(%) Layanan	Kebutuhan Layanan (Domestik)	GAP SPAM Tj Lesung	Kebutuhan Layanan (Wisatawan)	GAP Total
2025	100	22%	16,75	83,25	67,01	34,29
2026	100	27%	20,77	79,23	78,56	22,74
2027	100	33%	25,63	74,37	92,09	9,21
2028	100	39%	30,59	69,41	107,02	-5,72
2029	100	45%	35,65	64,35	123,54	-22,24
2030	100	50%	40,00	60,00	141,08	-39,78
2031	100	56%	45,24	54,76	161,48	-60,18
2032	100	62%	50,58	49,42	184,26	-82,96
2033	100	68%	56,03	43,97	209,75	-108,45
2034	100	75%	62,41	37,59	239,19	-137,89

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2034 kebutuhan air di KSPN Uj. Kulon—Tj. Lesung sebesar 35,65 liter/detik untuk kebutuhan domestik dan 87,89 liter/detik untuk kebutuhan wisatawan dan pada tahun 2034 kebutuhan air di KSPN Uj. Kulon-Tj. Lesung sebesar 62,41 liter/detik untuk kebutuhan domestik dan 176,79 liter/detik untuk kebutuhan wisatawan. Sedangkan saat ini, ketersediaan air minum di SPAM Tj. Lesung hanya 100 liter/detik, sehingga terjadi defisit kebutuhan air minum sebesar 22,24 liter/detik (2029) dan 137,89 liter/detik (2034).

Selain itu, persentase layanan diproyeksikan terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 45% pada tahun 2029, dengan rata-rata kenaikan layanan air minum sebesar 5% per tahunnya.



Gambar 7.12 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Ujung Kulon-Tj. Lesung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air minum di kecamatan inti KPPN Serang-Banten Lama bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah

wisatawan hingga tahun 2034. Kebutuhan air minum domestik tahun 2029 sebesar 514,74 liter/detik dan kebutuhan air minum domestik hingga tahun 2034 sebesar 546,78 liter/detik, kebutuhan non domestik tahun 2029 sebesar 77,21 liter/detik dan kebutuhan non domestik tahun 2034 sebesar 82,02 liter/detik, serta kebutuhan wisatawan tahun 2029 sebesar 19,34 liter/detik dan kebutuhan wisatawan tahun 2034 sebesar 27,87 liter/detik. Proyeksi total kebutuhan suplai air di KPPN Serang-Banten Lama pada tahun 2029 sebesar 611,29 liter/detik dengan target pelayanan akses air perpipaan hingga tahun 2029 sebesar 30% (RPJMN 2024) serta total kebutuhan suplai air di KPPN Serang-Banten Lama pada tahun 2034 sebesar 656,66 liter/detik dengan target pelayanan akses perpipaan sebesar 45% dan faktor kehilangan air 15% sehingga dapat di proyeksikan untuk kebutuhan suplai air + kehilangan air pada tahun 2029 sebesar 254,10 liter/detik dan pada tahun 2034 sebesar 409,33 liter/detik.

Tabel 7.31 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama

Kecamatan		Kasemen	Serang	Total
Baseline (Liter/ orang/ hari)		120	120	120
Domestik (Liter/ detik)	2025	327,37	163,33	490,70
	2029	338,34	176,40	514,74
	2034	325,56	194,21	546,78
Non Domestik (Liter/ detik)	2025	49,11	24,50	73,61
	2029	50,75	26,46	77,21
	2034	52,88	29,13	82,02
Sambungan Rumah (SR) (Liter/ orang/ hari)	2025	235.707	117.599	353.306
	2029	243.603	127.007	370.61
	2034	253.846	139.832	393.678

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air minum perpipaan saat ini dilayani oleh SPAM Banten Lama Kota Serang dengan kapasitas 25 liter/detik, dengan cakupan pelayanan Kecamatan Kasemen serta Perumdam Tirta Kabupaten Serang yang juga melayani Kecamatan Serang. Saat ini tingkat pelayanan baru 13% (27 liter/detik) dikarenakan terbatasnya jaringan perpipaan.

Jika tidak dilakukan intervensi berupa penambahan kapasitas SPAM atau pemanfaatan *iddle capacity* PDAM, pada tahun 2029 gap kebutuhan air minum di KPPN Serang-Banten Lama sebesar 559,29 liter/detik dan pada tahun 2034 gap kebutuhan air minum di KPPN Serang-Banten Lama sebesar 604,66 liter/detik.

Tabel 7.32 GAP Kebutuhan Air Minum KPPN Serang-Banten Lama

Tahun	Proyeksi Kebutuhan (Liter/detik)			GAP Total
	SPAM Banten Lama dan PDAM	Kebutuhan Layanan (Domestik dan Non Domestik)	Kebutuhan Layanan (Wisatawan)	
2025	52	564,31	14,44	-526,75
2026	52	571,07	15,54	-534,61
2027	52	577,93	16,71	-542,64
2028	52	584,89	17,98	-550,87
2029	52	591,95	19,34	-559,29
2030	52	599,11	20,81	-567,91
2031	52	606,37	22,39	-576,75
2032	52	613,74	24,08	-585,82
2033	52	621,21	25,91	-595,12
2034	52	628,79	27,87	-604,66

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air minum di kecamatan inti KPPN Lebak-Baduy bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah wisatawan hingga tahun 2034. Kebutuhan air minum domestik hingga tahun 2034 sebesar 85,46 liter/detik, kebutuhan non domestik sebesar 12,82 liter/detik, serta kebutuhan wisatawan sebesar 0,04 liter/detik. Proyeksi total kebutuhan suplai air di KPPN Lebak-Baduy pada tahun 2029 sebesar 94,13 liter/detik dan pada tahun 2034 sebesar 98,28 liter/detik dengan target pelayanan akses air perpipaan hingga tahun 2029 sebesar 30% (RPJMN 2024) dan faktor kehilangan air 15% sehingga dapat di proyeksikan untuk kebutuhan suplai air + kehilangan air pada tahun 2029 sebesar 36,90 liter/detik dan pada tahun 2034 sebesar 58,97 liter/detik.

Tabel 7.33 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Penduduk di KPPN Lebak-Baduy

Kecamatan		Leuwidamar	TOTAL
Kebutuhan Air (Liter/ orang/ hari)		120	120
Kebutuhan Air Domestik (Liter/ detik)	2025	79,01	79,01
	2029	81,81	81,81
	2034	85,46	85,46
Kebutuhan Air Non Domestik (Liter/ detik)	2025	11,85	11,85
	2029	12,27	12,27
	2034	12,82	12,82
Sambungan Rumah (SR) (Liter/ orang/ hari)	2025	56.887	56.887
	2029	58.907	58.907
	2034	61.532	61.532

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air minum perpipaan saat ini dilayani oleh SPAM Desa Kanekes dengan kapasitas 2 liter/detik, dengan cakupan pelayanan Desa Kanekes sedangkan layanan PDAM belum masuk ke Kecamatan Leuwidamar. Jika tidak dilakukan penambahan kapasitas SPAM, pada tahun 2034 gap kebutuhan air minum di KPPN Lebak-Baduy sebesar 96,32 liter/detik.

Tabel 7.34 GAP Kebutuhan Air Minum KPPN Lebak-Baduy

Kebutuhan Air Minum KPPN Lebak-Baduy (liter/detik)				
Tahun	SPAM Desa Kanekes	Kebutuhan Layanan (Domestik+Non)	Wisatawan	GAP
2025	2	90.86	0.04	-88.90
2026	2	91.66	0.04	-89.70
2027	2	92.46	0.04	-90.50
2028	2	93.27	0.04	-91.31
2029	2	94.09	0.04	-92.13
2030	2	94.91	0.04	-92.95
2031	2	95.74	0.04	-93.78
2032	2	96.58	0.04	-94.62
2033	2	97.43	0.04	-95.47
2034	2	98.28	0.04	-96.32

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Timbulan sampah yang dihitung merupakan sampah domestik, dengan rata-rata timbulan 229,82 ton/hari tahun 2034. Kurang memadainya fasilitas persampahan mengakibatkan praktek pembakaran sampah dan pembuangan ke badan air oleh masyarakat. Di setiap DTW juga harus disediakan fasilitas sampah komunal. Hingga tahun 2034 Kecamatan Panimbang memiliki timbulan sampah terbesar di Kawasan KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung sebesar 17.319 ton/tahun.

Tabel 7.35 Proyeksi Timbulan Sampah KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung

Timbulan Sampah (ton/tahun)							
Kecamatan	Sumur	Cimanggu	Cigeulis	Sobang	Panimbang	Angsana	Sukaresmi
2025	7.961,8	11.371,7	10.854,6	11.331,5	15.994,6	8.451,7	11.471,4
2026	8.068,0	11.433,8	10.936,8	11.424,0	16.136,6	8.532,6	11.600,9
2027	8.175,6	11.496,3	11.019,6	11.517,3	16.279,9	8.614,3	11.731,9
2028	8.284,6	11.559,1	11.103,1	11.611,3	16.424,5	8.696,8	11.864,3
2029	8.395,0	11.622,3	11.187,2	11.706,1	16.570,3	8.780,0	11.998,3
2030	8.506,9	11.685,9	11.272,0	11.801,7	16.717,4	8.864,1	12.133,7
2031	8.620,4	11.749,7	11.357,4	11.898,1	16.865,9	8.948,9	12.270,7
2032	8.735,3	11.814,0	11.443,4	11.995,2	17.015,6	9.034,6	12.409,2
2033	8.851,7	11.878,5	11.530,1	12.093,1	17.166,7	9.121,1	12.549,3
2034	8.969,8	11.943,5	11.617,5	12.191,9	17.319,1	9.208,4	12.691,0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Rata-rata timbulan TPA Bangkonol pada tahun 2020 adalah 6.730 m³/bulan atau sama dengan 225 m³/hari, penanganan di TPA Bangkonol pada tahun 2020 hanya 6,62%. Jika sesuai target RPJMN 2020-2024 penanganan sebesar 80% maka diperkirakan timbulan sampah akan menjadi 81.330 m³/bulan atau 2.711 m³/hari serta kapasitas TPA Bangkonol sendiri akan bisa menampung timbulan sampah hingga tahun 2032. Sedangkan TPA Bojongcanar yang mempunyai luas sebesar 3 2

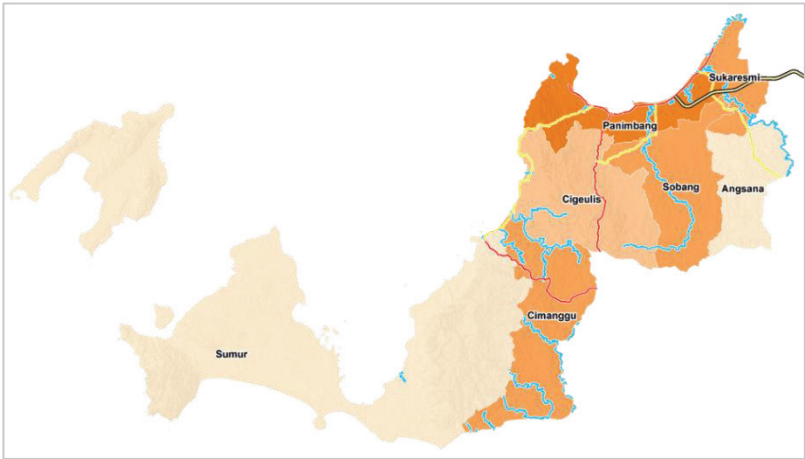
ha dengan sisa kapasitas 91.000 m³ memiliki *idle capacity* -1.907 m³ hingga tahun 2026.

Tabel 7.36 Kapasitas TPA di wilayah Kab. Pandeglang

Nama TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas Terpakai 2022 (Ha)	Sisa Kapasitas (m ³)	Cakupan Pelayanan	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Total Timbulan Sampah (m ³)	Idle Capacity (m ³)
Bangkonol	3 10	3 2	987.000	19 Kecamatan (wilayah utara)	250	7.500	91.250	99.799
Bojongcanar	3 2	3 0,5	91.000	16 Kecamatan (wilayah selatan)	50	1.500	18.250	18.916

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Terdapat 1 TPA yang melayani KPPN Serang-Banten Lama yaitu TPA Cilowong di Kota Serang. TPA Cilowong memiliki luas 12 ha dengan kapasitas 155.928 m³/tahun. Meskipun masih dapat menampung sampah yang masuk, diperkirakan TPA Cilowong akan penuh 2-3 tahun lagi.



Gambar 7.13 Proyeksi Timbulan Sampah KSPN Uj. Kulon - Tj. Lesung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Timbulan sampah yang dihitung berdasarkan hitungan 0,8 kg/orang/hari dan dilakukan perhitungan baik untuk penduduk ataupun wisatawan. Pada tahun 2034 diproyeksikan timbulan sampah mencapai 119.295 ton/tahun dengan timbulan sampah terbesar berada di Kecamatan Kasemen yaitu 77.157 ton/tahun.

Tabel 7.37 Timbulan Sampah di KPPN Serang-Banten Lama

Timbulan Sampah Penduduk dan Wisatawan (ton/tahun)			
Kecamatan	Kasemen	Serang	Total
2025	70.419,22	35.024,84	105.444,06
2026	71.106,08	35.742,59	106.848,67
2027	71.806,53	36.477,12	108.283,65
2028	72.521,28	37.228,96	109.750,24
2029	73.251,11	37.998,69	111.249,79

Timbulan Sampah Penduduk dan Wisatawan (ton/tahun)			
Kecamatan	Kasemen	Serang	Total
2030	73.996,82	38.786,89	112.783,71
2031	74.759,30	39.594,19	114.353,49
2032	75.539,49	40.421,26	115.960,75
2033	76.338,39	41.268,78	117.607,18
2034	77.157,10	42.137,49	119.294,59

Sumber: Hasil Analisis, 2023

KPPN Lebak-Baduy belum terlayani oleh infrastruktur persampahan. TPA terdekat adalah TPA Dengung dan TPA Cihara di Kabupaten Lebak, namun jaraknya lebih dari 40 km dari KPPN Lebak-Baduy. Timbulan sampah yang dihitung berdasarkan hitungan 0,8 kg/orang/hari dan dilakukan perhitungan baik untuk penduduk ataupun wisatawan. Pada tahun 2034 diproyeksikan mencapai 57,21 ton/tahun.

Tabel 7.38 Timbulan Sampah di KPPN Lebak-Baduy

Timbulan Sampah ton/tahun		
Kecamatan	Leuwidamar	Total
2025	53,50	53,50
2026	53,90	53,90
2027	54,30	54,30
2028	54,70	54,70
2029	55,11	55,11
2030	55,53	55,53
2031	55,94	55,94
2032	56,36	56,36
2033	56,79	56,79
2034	57,21	57,21

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Sanitasi

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Induk SPAL, Ditjen Cipta Karya Tahun 2016, potensi produksi air limbah cair (*grey water*) adalah 80% dari konsumsi domestik, potensi produksi lumpur tinja adalah 0,5 liter/orang/hari. Potensi produksi air limbah domestik pada wilayah pengembangan dan sekitarnya (2034) adalah sebesar 319,19 liter/detik. Sehingga dibutuhkan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 7.39 Timbulan Air Limbah Domestik KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung

Timbulan Air Limbah Domestik (Liter/detik)							
Kecamatan	Sumur	Cimanggu	Cigeulis	Sobang	Panimbang	Angsana	Sukaesmi
2025	30,28	43,24	41,28	43,09	60,82	32,14	43,62
2026	30,68	43,48	41,59	43,44	61,36	32,45	44,11
2027	31,09	43,72	41,90	43,80	61,91	32,76	44,61
2028	31,50	43,95	42,22	44,15	62,46	33,07	45,11
2029	31,92	44,19	42,54	44,51	63,01	33,39	45,62
2030	32,35	44,44	42,86	44,88	63,57	33,71	46,14
2031	32,78	44,68	43,19	45,24	64,13	34,03	46,66
2032	33,22	44,92	43,51	45,61	64,70	34,35	47,19
2033	33,66	45,17	43,84	45,99	65,28	34,68	47,72
2034	34,11	45,42	44,18	46,36	65,86	35,02	48,26

Sumber: Hasil Analisis, 2023

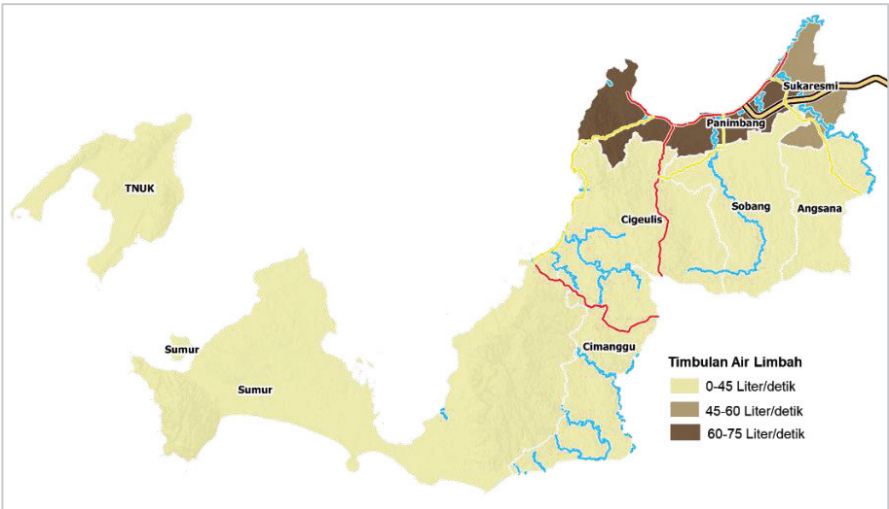
Selain itu, potensi produksi air limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan wisatawan (2034) adalah sebesar 163,19 liter/detik. Potensi produksi lumpur tinja pada wilayah pengembangan dan sekitarnya (2034) adalah sebesar 144 m³/hari. Sehingga dibutuhkan infrastruktur pengolahan air limbah dengan kebutuhan dikarenakan belum ada IPLT terutama untuk kawasan pariwisata serta kecamatan yang masih banyak belum memiliki sistem sanitasi *on site* sesuai.

Tabel 7.40 Timbulan Air Limbah Pariwisata KSPN Ujung Kulon – Tj. Lesung

No.	Tahun	Timbulan Limbah Pariwisata (Liter/hari)	Timbulan Limbah Pariwisata (Liter/detik)
1.	2025	4.007.915	46,39
2.	2026	4.609.102	53,35
3.	2027	5.300.468	61,35
4.	2028	6.095.537	70,55
5.	2029	7.009.868	81,13
6.	2030	8.061.348	93,30
7.	2031	9.270.550	107,30
8.	2032	10.661.133	123,39
9.	2033	12.260.303	141,90
10.	2034	14.099.349	163,19

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2034, timbulan limbah domestik terbesar berada di Kecamatan Panimbang sebesar 65,86 liter/detik dan Kecamatan Sukaresmi sebesar 48,26 liter/detik. Secara spasial dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.14 Proyeksi Timbulan Air Limbah KSPN Uj. Kulon – Tj. Lesung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Saat ini Kota Serang belum mempunyai IPLT sehingga pengelolaan limbah domestik masih menggunakan sistem *onsite*. KPPN Serang-

Banten Lama juga membutuhkan sistem pengelolaan air limbah, karena saat ini beberapa pembuangan air limbah masih dibuang langsung dari rumah warga ke sungai terdekat.

Tabel 7.41 Proyeksi Timbulan Air Limbah KPPN Serang-Banten Lama

Timbulan Air Limbah Domestik (Liter/detik)			
Kecamatan	Kasemen	Serang	Total
2025	269,98	134,13	404,11
2026	272,76	136,93	409,70
2027	275,61	139,80	415,41
2028	278,52	142,74	421,26
2029	281,50	145,76	427,26
2030	284,56	148,85	433,42
2031	287,70	152,03	439,73
2032	290,93	155,28	446,21
2033	294,25	158,63	452,87
2034	297,66	162,06	459,72

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Potensi produksi air limbah pada wilayah pengembangan dan sekitarnya (2034) adalah sebesar 459,72 liter/detik, sehingga dibutuhkan infrastruktur pengolahan air limbah dengan kebutuhan dikarenakan belum ada IPLT terutama untuk kawasan pariwisata serta kecamatan masih banyak yang belum memiliki sistem sanitasi *onsite* yang sesuai.

Saat ini Kabupaten Lebak, termasuk KPPN Lebak-Baduy belum dilayani IPLT sehingga pengelolaan limbah domestik masih menggunakan sistem *onsite*. KSPN Serang-Banten Lama juga membutuhkan sistem pengelolaan air limbah, karena saat ini beberapa pembuangan air limbah masih dibuang langsung dari rumah warga ke sungai terdekat.

Tabel 7.42 Proyeksi Timbulan Air Limbah Domestik KPPN Lebak-Baduy

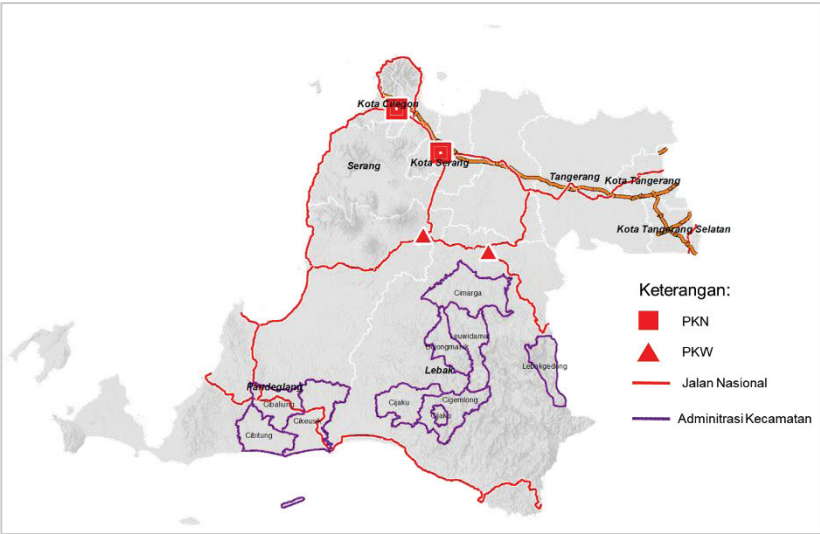
Timbulan Air Limbah Domestik (Liter/detik)		
Kecamatan	Leuwidamar	Total
2025	63,24	63,24
2026	63,79	63,79
2027	64,35	64,35
2028	64,92	64,92
2029	65,49	65,49
2030	66,06	66,06
2031	66,64	66,64
2032	67,22	67,22
2033	67,81	67,81
2034	68,40	68,40

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Potensi produksi air limbah pada wilayah pengembangan dan sekitarnya (2034) adalah sebesar 68,40 liter/detik, sehingga dibutuhkan infrastruktur pengolahan air limbah dengan kebutuhan dikarenakan belum ada IPLT terutama untuk kawasan pariwisata serta kecamatan masih banyak yang belum memiliki sistem sanitasi *onsite* yang sesuai.

7.1.4. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Desa Tertinggal Pandeglang - Lebak

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan desa tertinggal prioritas penanganan hingga tahun 2029 di Provinsi Banten adalah 15 desa tertinggal. Kecamatan ini berada di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cibaliung, dan Kecamatan Cikeusik sedangkan Kabupaten Lebak terdiri dari Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Lebokgedong, Kecamatan Cijaku dan Kecamatan Leuwidamar.



Gambar 7.15 Deliniasi Wilayah Kawasan Desa Tertinggal
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kawasan perdesaan tertinggal memiliki penduduk 338.060 jiwa pada tahun 2022. Berdasarkan proyeksi menggunakan CAGR, laju pertumbuhan rata - rata 0,01% per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, jumlah penduduk kawasan perdesaan tertinggal pada tahun 2034 menjadi 388.498 jiwa.

Tabel 7.43 Jumlah Penduduk Kasawan Perdesaan Tertinggal

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PANDEGLANG	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8
Cibitung	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Cibaliung	31,3	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4
Cikeusik	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1
LEBAK	227,4	227,4	227,4	227,5	227,5	227,5	227,5	227,5	227,6	227,6
Cigemblong	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Cimarga	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
Bojongmanik	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Lebokgedong	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Cijaku	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Leuwidamar	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9
TOTAL	338,2	338,2	338,3	338,3	338,3	338,3	338,4	338,4	338,4	388,4

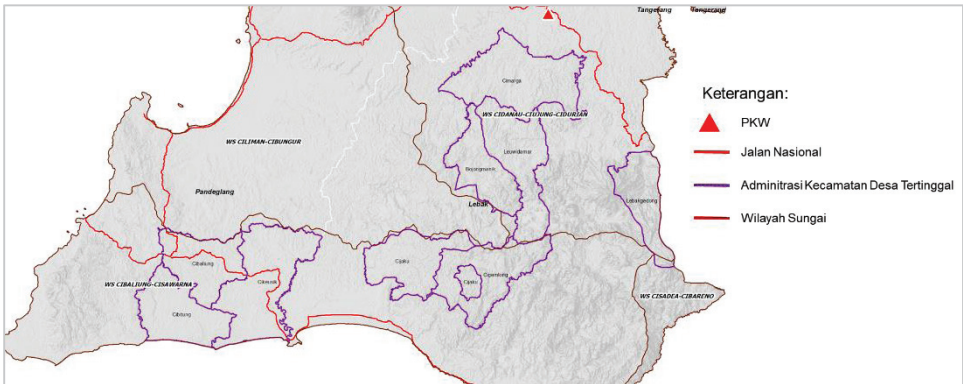
Sumber: Hasil Analisis, 2023

A. Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

Analisis ini mencakup wilayah sungai, sumber air baku, kebutuhan air irigasi serta kebutuhan air baku.

1) Analisis Wilayah Sungai dan Sumber Air Baku

Kawasan desa tertinggal tersebar di 3 wilayah sungai yaitu wilayah sungai Cibaliung – Ciwarna, wilayah sungai Ciliman – Cibungur, dan wilayah sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian. Dari 3 wilayah sungai tersebut, wilayah sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian merupakan wilayah sungai kewenangan nasional. Total potensi ketersediaan air permukaan sebesar 260 m3/detik atau 8,18 miliar m3/tahun.



Gambar 7.16 Wilayah Sungai di Kawasan Desa Tertinggal

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air baku dan irigasi sebesar 6.126,03 liter/detik dengan rincian 5.766 liter/detik untuk irigasi dan 360,35 liter/detik untuk air baku air minum pada tahun 2029 masih dapat dipenuhi dengan suplai air baku dari setiap wilayah sungai tersebut. Yang perlu menjadi perhatian adalah tampungan air untuk air baku dan irigasi.

2) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah penghasil padi terbesar di Provinsi Banten yakni sebesar 434.088 ton dari luasan sebesar 85.561 ha

sedangkan Kabupaten Lebak berada pada posisi 3 penghasil padi di Provinsi Banten dengan produksi 379.568 ton dari luasan sebesar 75.287 ha. Untuk produksi padi di masing – masing kecamatan di kawasan desa tertinggal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.44 Data Pertanian Kawasan Prioritas di Provinsi Banten

Kecamatan	Luas Daerah Irigasi (Ha)			Produksi Padi (Ton/th)	Produktivitas (Ton/Ha)
	Pusat	Prov	Kab		
PANDEGLANG					
Cibitung	-	-	47,59	NA	1,30
Cibaliung	3.694,63	-	32,22	26	1,30
Cikeusik	-	-	184,74	11,7	1,30
LEBAK					
Cigemblong	-	90,90	154,61	20.950	5,3
Cimarga	-	-	144,41	19.562	6,58
Bojongmanik	-	-	156,78	9.510	6,38
Lebokgedong	-	-	165,16	25.340	6,83
Cijaku	-	-	204,18	16.847	6,21
Leuwidamar	-	-	297,33	15.244	6,91

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan air dari luas daerah irigasi sebesar 5.766 liter/detik pada tahun 2022. Sedangkan kebutuhan air irigasi tahun 2034 tidak ada perubahan signifikan karena pemerintah daerah belum mempunyai rencana penambahan luas layanan irigasi. Kecamatan Cibaliung merupakan kecamatan yang mempunyai daerah irigasi kewenangan pusat dengan luas 3.694,63 ha. Kebutuhan air irigasi untuk DI ini sebesar 4.288 liter/detik. Kebutuhan air irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.45 Proyeksi Volume Kebutuhan Air Irigasi

Kecamatan	Luas DI (Hektar)	Kewenangan	Proyeksi Penyediaan Air Irigasi (liter/detik)		
			2025	2029	2034
Cibitung	47,59	Kabupaten	48	48	48
Cibaliung	4.320,22	Nasional	4.288	4.288	4.288
		Kabupaten	32	32	32
Cikeusik	184,74	Kabupaten	91	91	91
		Provinsi	185	185	185
Cigemblong	154,61	Kabupaten	155	155	155
Cimarga	144,41	Kabupaten	144	144	144
Bojongmanik	156,78	Kabupaten	157	157	157
Lebokgedong	165,16	Kabupaten	165	165	165
Cijaku	204,18	Kabupaten	204	204	204
Leuwidamar	297,33	Kabupaten	297	297	297

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Perhitungan Kebutuhan Air Baku Kawasan Desa Tertinggal

Total kebutuhan air perdesaan pada tahun 2022 sebesar 355,71 liter/detik. Kebutuhan tersebut bertambah pada tahun 2034 menjadi sebesar 356,03 liter/detik. Kebutuhan bertambah sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk di kawasan perdesaan dengan laju pertumbuhan rata - rata 0,01% per tahun.

Tabel 7.46 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Desa Tertinggal

Tahun	Kebutuhan Air Baku Kawasan Desa Tertinggal (liter/detik)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PANDEGLANG	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6
Cibitung	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Cibaliung	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Cikeusik	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
LEBAK	242,1	242,2	242,2	242,2	242,2	242,3	242,3	242,3	242,3	242,4
Cigemblong	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Cimarga	77,4	77,4	77,4	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Bojongmanik	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,6	26,6	26,6	26,6
Lebokgedong	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
Cijaku	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Leuwidamar	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
TOTAL	355,7	355,8	355,8	355,8	355,9	355,9	355,9	355,9	356,0	356,0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Pada analisis kebutuhan infrastruktur permukiman, dilakukan analisis untuk sektor air minum perpipaan, persampahan, serta kebutuhan infrastruktur penanganan air limbah.

1) Analisis Layanan Air Minum Perpipaan

Kabupaten Pandeglang dilayani oleh PDAM Berkah Pandeglang dengan kapasitas produksi 220 liter/detik dari kapasitas terpasang 240 liter/detik, sedangkan cakupan layanan baru mencapai 15,15%. Sementara itu, untuk kawasan perdesaan menggunakan SPAM IKK Sumur dengan kapasitas produksi 20 liter/detik.

Sedangkan Kabupaten Lebak dilayani oleh PDAM Tirta Multatuli Lebak dengan kapasitas produksi 213 liter/detik, kapasitas terpasang 695 liter/detik dan cakupan layanan 9,94%. Kapasitas di kawasan perdesaan menggunakan SPAM Kenekes, SPAM IKK Wasalam, dan SPAM IKK Cijaku dengan total produksi 72 liter/detik. Berdasarkan target 30% terlayani, untuk mencapai target, Pandeglang perlu menargetkan 4,29% terlayani dengan kebutuhan air 5,92 liter/detik pada 2023.

Tabel 7.47 Proyeksi Air Minum Perpipaan Desa Tertinggal Pandeglang

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapasitas Eksisting (L/dtk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baseline Kebutuhan Air (L/dtk)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kebutuhan Domestik (L/dtk)	98,79	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80
Kebutuhan Non Domestik (L/dtk)	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82
Kebutuhan Domestik + Non Domestik (L/dtk)	113,61	113,62	113,62	113,62	113,62	113,62	113,63	113,63	113,63	113,63
Tingkat Kebocoran (%)	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Kebutuhan + Kebocoran (L/dtk)	138,04	138,04	138,05	138,05	138,05	138,05	138,06	138,06	138,06	138,07
Peningkatan Pelayanan (%)	12,86	17,14	21,43	25,71	30,00	33,75	37,50	41,25	45,00	45,00
Kebutuhan Total (L/dtk)	17,75	23,66	29,58	35,50	41,42	46,59	51,77	56,95	62,13	62,13
GAP	-17,75	-23,66	-29,58	-35,50	-41,42	-46,59	-51,77	-56,95	-62,13	-62,13

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Untuk Kabupaten Lebak, berdasarkan analisis kebutuhan air minum perdesaan diproyeksikan akan defisit air minum pada tahun 2027.

Tabel 7.48 Proyeksi Air Minum Perpipaan Desa Tertinggal Lebak

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapasitas Eksisting (L/dtk)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Baseline Kebutuhan Air	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kebutuhan Domestik (L/dtk)	210,5	210,5	210,6	210,6	210,6	210,6	210,6	210,7	210,7	210,7
Kebutuhan Non Domestik (L/dtk)	31,5	31,5	31,5	31,5	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Kebutuhan Domestik + Non Domestik (L/dtk)	242,1	242,1	242,2	242,2	242,2	242,2	242,3	242,3	242,3	242,3
Tingkat Kebocoran (%)	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
Kebutuhan + Kebocoran (L/dtk)	305,4	305,4	305,5	305,5	305,5	305,6	305,6	305,6	305,7	305,7
Peningkatan Pelayanan (%)	18,5	21,4	24,2	27,1	30,0	32,8	35,7	38,6	41,4	45,0
Kebutuhan Total	56,6	65,3	74,1	82,9	91,6	100,4	109,2	117,9	126,7	137,5
GAP	15,3	6,62	-2,1	-10,9	-19,6	-100,4	-109,2	-117,9	-126,7	-137,5

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Timbulan sampah kawasan perdesaan pada 2022 mencapai 267,25 ton/hari. Sementara itu, jarak TPA terdekat ke kawasan perdesaan ini lebih dari 30 km sehingga belum terdapat penanganan sampah pada kawasan perdesaan ini. Sedangkan timbulan sampah di setiap

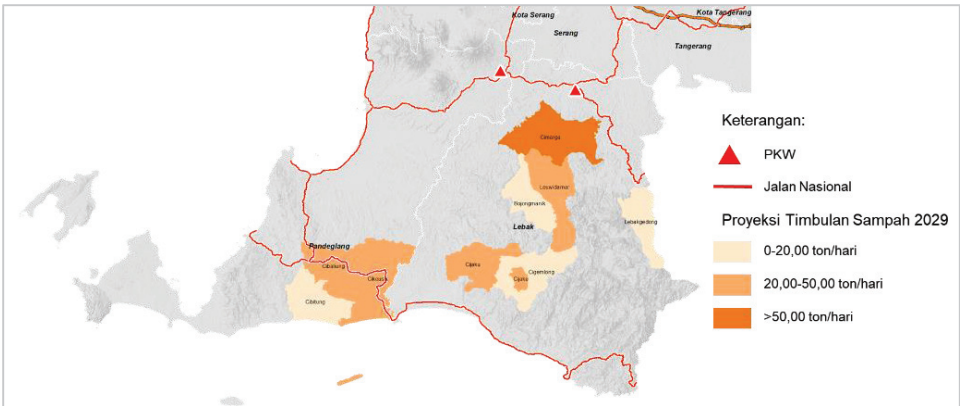
kecamatan akan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Proyeksi penambahan timbulan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.49 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Perdesaan Tertinggal

Tahun	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PANDEGLANG	85,36	85,36	85,36	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37	85,38	85,38
Cibitung	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69
Cibaliung	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,13	25,13	25,13	25,13
Cikeusik	42,55	42,55	42,55	42,55	42,56	42,56	42,56	42,56	42,56	42,56
LEBAK	181,95	181,96	181,98	182,00	182,02	182,04	182,06	182,08	182,09	182,11
Cigemblong	17,47	17,47	17,47	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48
Cimarga	58,20	58,21	58,21	58,22	58,23	58,24	58,25	58,26	58,27	58,28
Bojongmanik	19,97	19,97	19,97	19,97	19,98	19,98	19,98	19,98	19,99	19,99
Lebokgedong	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54
Cijaku	24,82	24,82	24,82	24,83	24,83	24,83	24,84	24,84	24,84	24,84
Leuwidamar	43,96	43,96	43,96	43,96	43,97	43,97	43,97	43,98	43,98	43,98
TOTAL	267,30	267,33	267,35	267,37	267,39	267,41	267,43	267,45	267,47	267,49

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Jika tidak dilakukan penanganan sampah di kawasan ini pada tahun yang akan datang, dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan penanganan sampah skala kawasan seperti TPS/TPS3R. Secara spasial, proyeksi timbulan sampah pada masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.17 Timbulan Sampah di Kawasan Desa Tertinggal

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah

Kebutuhan penanganan air limbah di kawasan perdesaan tertinggal pada tahun 2022 sebesar 62,95 liter/detik. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2034, kebutuhan penanganan air limbah sebesar 63,00 liter/detik. Penanganan air limbah ini masih dilakukan secara setempat

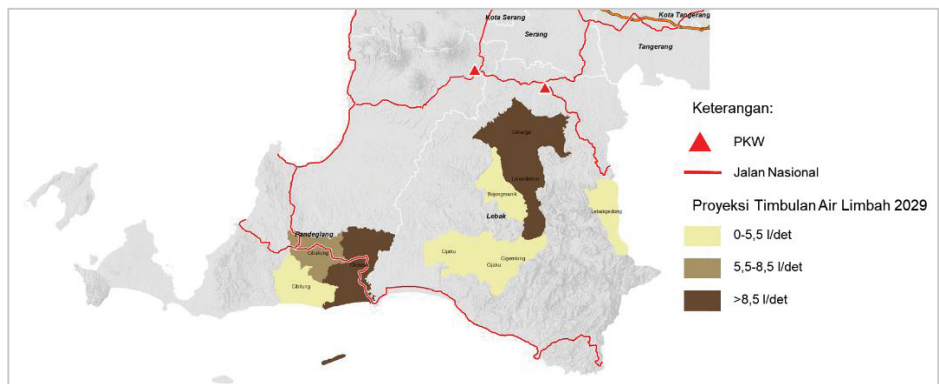
atau *on-site*. Berdasarkan kepadatan penduduk per kecamatan sampai tahun 2034 belum ada yang melebihi 200 jiwa/ha sehingga penanganan air limbah belum memerlukan sistem terpusat. Penanganan air limbah dapat dilakukan secara *on-site* seperti melalui program sanimas.

Tabel 7.50 Proyeksi Air Limbah

Tahun	Proyeksi Timbunan Air Limbah (liter/detik)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PANDEGLANG	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85
Cibitung	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Cibaliung	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
Cikeusik	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89
LEBAK	39,12	39,12	39,13	39,13	39,13	39,14	39,14	39,15	39,15	39,15
Cigemblong	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Cimarga	12,51	12,51	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,53	12,53	12,53
Bojongmanik	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Lebokgedong	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Cijaku	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
Leuwidamar	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,46	9,46
TOTAL	62,96	62,96	62,97	62,97	62,98	62,99	62,99	63,00	63,00	63,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Jika tidak dilakukan penanganan air limbah di kawasan ini pada tahun yang akan datang, dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan penanganan sampah skala kawasan seperti melalui program sanimas. Secara spasial, proyeksi timbunan air limbah pada masing-masing wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.18 Proyeksi Timbunan Air Limbah di Kawasan Desa Tertinggal
Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis Isu Perumahan

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Kabupaten Pandeglang mempunyai RTLH paling tinggi di Provinsi Banten yaitu sebesar 27,31% dan dilanjutkan Kabupaten Lebak sebesar 19,23%. Sedangkan untuk *backlog*, Kabupaten Pandeglang sebesar 10,74% dan Kabupaten Lebak sebesar 6,64%. Tingginya presentase *backlog* menandakan bahwa kebutuhan hunian atau perumahan masih sangat tinggi. Secara spasial, lokasi RTLH dan *backlog* ini tersebar di masing-masing kabupaten. Profil *backlog* dan RTLH untuk masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.51 RTLH dan *Backlog* Kabupaten Lebak dan Pandeglang

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	RTLH	RTLH (%)	<i>Backlog</i> (unit)	<i>Backlog</i> (%)
1	Kabupaten Lebak	349,537	63.714	18,23	23.217	6,64
2	Kabupaten Pandeglang	307,254	83.900	27,31	32.990	10,74

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan jumlah penduduk, kebutuhan rumah sebanyak 83.515 unit pada tahun 2022 dan diproyeksikan bertambah menjadi 83.591 unit pada tahun 2034. Kebutuhan rumah sejalan dengan proyeksi penduduk yang terus bertambah. Wilayah dengan kebutuhan rumah terbanyak pada tahun 2034 adalah Kecamatan Cimarga (18.211 unit) di Kabupaten Lebak, sedangkan kebutuhan rumah terkecil ada di Kecamatan Cigemblong (5.464 unit) di Kabupaten Lebak. Meskipun begitu, penambahan jumlah rumah pada kawasan perdesaan tertinggal perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan, serta agar tidak menyebabkan alih fungsi pada lahan pertanian eksisting.

Tabel 7.52 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kawasan Perdesaan Tertinggal

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Ribuan Unit)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PANDEGLANG	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	16.67	26.67	26.67	26.68	26.68
Cibitung	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
Cibaliung	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85
Cikeusik	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.30	13.30
LEBAK	56.85	56.86	56.86	56.87	56.88	56.88	56.89	56.89	56.90	56.91
Cigemblong	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
Cimarga	18.18	18.18	18.19	18.19	18.19	18.20	18.20	18.20	18.20	18.21
Bojongmanik	6.23	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
Lebokgedong	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48
Cijaku	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76
Leuwidamar	13.73	13.73	13.73	13.73	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74
TOTAL	83.53	83.53	83.54	83.55	83.55	83.56	83.57	83.57	83.58	83.59

Sumber: Hasil Analisis, 2023

7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dengan memperhatikan kaidah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem.

Pada Kawasan Prioritas Serang-Cilegon, keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada pembangunan penyediaan air baku berupa pembangunan bendungan cidanau, normalisasi sungai ciujung, cidurian, cibanten, dan cibeber serta peningkatan jaringan irigasi DI ciujung dan DI Cibanten (sebagai pengoptimalan Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian yang telah selesai). Peningkatan jalan Kota Tangerang – Kota Serang – Kota Cilegon berfungsi sebagai mendukung jalur logistik mendukung Kawasan Industri Cikande, Kawasan Industri Wilmar, dan Kawasan Industri Cilegon. Untuk pemanfaatan air baku dari Bendungan Sindangheula diperlukan pembangunan SPAM Sindangheula. Dalam pemenuhan layanan dasar diperlukan peningkatan kapasitas TPA Cilowong dan TPA Bagendung untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kawasan Serang-Cilegon dan pembangunan IPLT Kota Serang, IPLT Kab. Serang, dan IPAL Kota Serang. Dalam pemenuhan adanya kegiatan industri yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk di Kawasan Serang-Cilegon maka diperlukan pembangunan rumah susun di Kota Cilegon dan Kota Serang.

Pada Kawasan Prioritas Uj. Kulon – Tj. Lesung, keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada pembangunan penyediaan air baku dan dilanjutkan dengan peningkatan SPAM untuk mendukung kegiatan pariwisata dan pengendalian terhadap bencana berupa pembangunan pengaman pantai di sekitar pantai tj.lesung dan pantai sumur. Peningkatan pariwisata harus didukung oleh peningkatan kapasitas Jalan Citereup – Tj. Lesung dan Simpang Labuhan – Citereup. Dalam pelayanan dasar persampahan dan limbah diperlukan peningkatan TPA Bangkonol, TPA Bojongcanar, dan IPAL skala kawasan.

Dalam mendukung Tol Serang – Panimbang diperlukan peningkatan akses exit menuju kawasan industri seperti peningkatan kapasitas Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung, Jalan Provinsi Syekh Nawawi, dan Jalan Provinsi Arief Rahman Kaduagung. Dengan beroperasinya Jalan Tol Serang-Panimbang akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan jumlah penduduk sehingga diperlukan penyediaan air baku berupa pembangunan Bendungan Pasir Kopo dan penyediaan air baku perkotaan serta dalam meningkatkan komoditas unggulan berupa pertanian diperlukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.

7.2.1. Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dengan memperhatikan kaedah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem.

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		Perumahan		Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
Provinsi Banten	Peningkatan Konektivitas			Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran	2017-2021						
				Pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere	2019-2023						
				Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja	2020-2025						
Serang - Cillegon	Penyediaan Air Baku dan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Bendungan Sindangheula	2015-2019			Pembangunan SPAM Banten Lama	2020-2021				Pembangunan jaringan distribusi tersier oleh Pemda
		Pembangunan Intake Air Baku Kec. Tanara Kab. Serang	2021-2022			Pembangunan SPAM IKK Walantaka	2023-2024				
		Pembangunan Long Storage Penyediaan Air Baku Layanan Kec. Pontang, Tirtayasa, dan Tanara Kab. Serang	2021-2022			Pembangunan SPAM Sindangheula	2028-2029				

[illegible]

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		Perumahan		Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
		Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Ciujung	2025-2029								
Serang-Cilegon	Peningkatan Konektivitas			Pembangunan Jalan Serang-Panimbang Tol	2018-2024						
				Peningkatan Kapasitas BTS. Kota Serang - BTS. Kota Tangerang	2025-2029						
Serang-Cilegon	Pemenuhan Pelayanan Dasar					Peningkatan Kapasitas TPA Bagendung	2023-2024				Pemeliharaan dan Operasional oleh Pemda
						Peningkatan Kapasitas TPA Cilowong	2025-2026				
						IPLT Kota Serang	2027-2029				
	Penyediaan Rumah Susun,					IPLT Kab. Serang	2027-2029				
						IPAL Kota Serang	2027-2029				
				Peningkatan Kualitas Permukiman	2020-2022			Pembangunan Rusun Kota Serang	2028-2029		Pemeliharaan dan

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		Perumahan		Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
	Penanganan Kawasan Kumuh			Kumuh Kawasan Banten Lama Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	2025-2029			Pembangunan Rusun Kota Cilegon	2028-2029		Operasional oleh Pemda
KSPN Uj. Kulon - Tj. Lesung		Pembangunan Pengaman Pantai KEK Tj. Lesung	2020-2023			Pembangunan SPAM KSPN Tj. Lesung	2021-2023				Pembangunan jaringan distribusi tersier oleh Pemda
		Pembangunan Bendung D.I. Cimoyan	2023-2025			Peningkatan SPAM di Kawasan Wisata KSPN Uj. Kulon - Tj. Lesung	2025-2026				
	Berketahanan Bencana dan Penyediaan Air Baku	Pembangunan Pengaman Pantai Perkotaan Panimbang Pembangunan Pengaman Pantai Perkotaan Sumur Penyediaan Air Baku Wisata KSPN Uj. Kulon - Tj. Lesung	2026-2028 2027-2029								
	Konektivitas			Pembangunan Jalan Serang-Panimbang Tol	2018-2024						

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		Perumahan		Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
				Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Citireup - Tj. Lesung Peningkatan Kapasitas Jalan Simpang Labuan Citireup -	2027-2028 2027-2028						
KSPN Uj. Kulon - Tj. Lesung	Pemenuhan Pelayanan Dasar					Peningkatan Kapasitas TPA Bangkonol dengan 3R Peningkatan Kapasitas TPA Bojocanar Pembangunan IPAL Komunal di kawasan wisata Uj. Kulon - Tj. Lesung	2023-2024 2025-2026 2026-2027				Pemeliharaan dan Operasional oleh Pemda
KSPN Uj. Kulon - Tj. Lesung	Penyediaan Rumah Susun, Penanganan Kawasan Kumuh					Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Teluk Kec. Labuan Pembangunan Rumah Susun Banten West Java TDC	2020-2021 2021-2022				Pemeliharaan dan Operasional oleh Pemda

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		Perumahan		Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
Kawasan Pemerataan	Penyediaan Air Baku dan Peningkatan Produktivitas Pertanian	Pembangunan Bendungan Karian	2015-2023			Optimalisasi SPAM Rangkasbitung & SPAM Kawaci (NUWSP)	2023-2024				Pembangunan jaringan distribusi tersier oleh Pemda
		Pembangunan KSCS-Pipa Cabang WTP Rangkasbitung	2023-2025			Pembangunan SPAM Maja	2025-2029				
		Rehabilitasi Daerah Irigasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	2024-2029			Pembangunan SPAM IKK di Kawasan Pemerataan	2025-2029				
		Pembangunan Daerah Irigasi	2025-2029								
Kawasan Pemerataan	Konektivitas	Pembangunan Bendungan Pasir Kopo	2027-2029								
				Pembangunan Jalan Serang-Panimbang	2018-2024						
				Peningkatan Kapasitas Jalan Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung	2025-2026						
				Peningkatan Kapasitas	2025-2026						

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		Perumahan		Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
				Jalan Syekh Nawawi							
				Peningkatan Kapasitas Jalan Arief Rahman Kaduagung	2025-2026						
				Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Kaduagung - Cileles	2025-2026						
				Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Cileles - Malingping	2026-2028						
Kawasan Pemerataan	Pemenuhan Pelayanan Dasar					Peningkatan Kapasitas TPA Dengung dengan 3R	2024-2025				Pemeliharaan dan Operasional oleh Pemda
						Pembangunan di IPAL Kawasan Perkotaan Cibadak	2024-2025				
						Pembangunan di IPAL Kawasan Perkotaan Cileles	2024-2025				
						Pembangunan TPA Regional Cileles	2024-2026				

Kawasan dan Tematik	Fungsi	SDA		BM		CK		Perumahan		Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
		Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu	Penanganan	Waktu		
						Pembangunan SPALD-T (IPAL) Cibadak	2025-2029				
						Pembangunan di IPAL Kawasan Perkotaan Walantaka	2027-2029				
						SPALD-S SkalaKota (IPLT) Dengung	2027-2029				
	Penanganan Kawasan Kumuh							Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	2023-2026		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Rencana aksi (*action plan*) disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Pada bab ini memuat rencana aksi pembangunan infrastruktur yang diturunkan dari *grand strategy* dan dijabarkan ke dalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 2025 hingga tahun 2034 mendatang.

8.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Bidang PUPR

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang keempat sektor yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten, yaitu sektor industri, pariwisata, dan kawasan desa tertinggal. Yang mana pembangunannya dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab dari semua pihak terkait, tentunya Kementerian PUPR mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam mewujudkannya. Selanjutnya pada subbab ini dijelaskan rencana aksi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh keempat Unit Organisasi (UNOR) di lingkup Kementerian PUPR yaitu: Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga (BM), Cipta Karya (CK), dan Perumahan (P), yang biasa disebut ABCP.

Dalam tabel rencana aksi infrastruktur bidang PUPR ini dijelaskan tentang program-program (kegiatan) dari masing-masing UNOR, dengan cakupan kerja pada kawasan prioritas dan lokasi spesifik di kabupaten/kota yang dimaksud, dilengkapi dengan justifikasi/tujuan dan deskripsi kegiatan, kesiapan Readiness Criteria (dilihat dari kondisi tahun 2023 ini), asal sumber dana yang dibutuhkan, dan periode rencana tahun pelaksanaan (sejak dimulai sampai dengan selesai) dari masing-masing program di kawasan prioritas.

8.1.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perdesaan tertinggal. Matriks rencana aksi infrastruktur SDA dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	06- SDA	Peningkatan Kapasitas Sungai Cijujung	Kawasan Serang - Cilegon	Kec. Kragilan,	- Terdapat luasan daerah rawan banjir sebesar 37.554 ha - Debit puncak banjir Q50 Sungai Cijujung sebesar 1.700 m³/detik - Terdapat 755.060 jiwa yang tinggal di wilayah dengan risiko banjir tinggi - Debit sungai cijujung 114 m³/detik - Mengurangi risiko banjir di Kabupaten Serang dengan kawasan prioritas, Kawasan Industri Cikande dan PKN Serang - Melaksanakan normalisasi Sungai Cijujung dengan Q25, secara bertahap (60%), kumulatif (100%) - Direncanakan pembangunan polder pengendali banjir pada 7 kawasan	Agar dipersiapkan		2 km	800 Miliar	APBN	2026	2029
2	06- SDA	Peningkatan Kapasitas Sungai Cibanten	Kawasan Serang - Cilegon	Kec. Kasemen, Serang, Cipocok Jaya	- Terdapat luasan daerah rawan banjir sebesar 11.865 ha - Terdapat 312.860 jiwa yang tinggal di wilayah dengan risiko banjir - Debit Sungai Cibanten 1.200 m³/detik - Mengurangi risiko banjir di Kota Serang dan PKN Serang - Melaksanakan revitalisasi Sungai Cibanten, penataan sempadan Sungai Banten Girang Kota - Serang panjang 1,5 km lebar 20 m - Membutuhkan sinkronisasi dengan pembangunan drainase perkotaan Serang	Agar dipersiapkan		2 km	122,5 Miliar	APBN	2025	2027

3	06-SDA	Peningkatan Kapasitas Sungai Cibeber	Kawasan Serang - Cillegon	Kec. Cibeber, Kramatwatu	- Terdapat luasan daerah rawan banjir sebesar 37.554 ha dan 4.258 ha - Debit puncak banjir Q50 Sungai Cibeber sebesar 123.005 m³/detik - Terdapat 755.060 dan 156.167 jiwa yang tinggal di wilayah dengan risiko banjir tinggi - Debit sungai cibeber 29.095 m³/detik - Mengurangi risiko banjir di Kab. Serang dan Kota Cillegon	Agar dipersipkan	2 km	8,4 Miliar	APBN	2026	2029
4	06-SDA	Pembangunan Bendungan Cidanau	Kawasan Serang - Cillegon	Kab. Serang	- Menyediakan air baku RKI Kota Cillegon sebesar 1,18 liter/detik - Memiliki potensi debit rata-rata 2.000 liter/detik - Terdapat Bendungan Krenceng di Kota Cillegon yang memiliki kapasitas 5 juta m³ - Telah terdapat DED	Agar dipersipkan	1 unit	21 Miliar	APBN/KPBU	2027	2029
5	06-SDA	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Ciujung	Kawasan Serang - Cillegon	Kab. Serang	- Menaikkan nilai IP dari 265% (2021) 280% (2030) guna pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi, dan peningkatan penyediaan air irigasi - Menyediakan air baku Daerah Irigasi Ciujung Kiri seluas 7.176,70 ha - Penyediaan air baku Di Ciujung sebesar 6.459 liter/detik (2029)	Agar dipersipkan	4 km	105 Triliun	APBN	2025	2029
6	06-SDA	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Cibanten	Kawasan Serang - Cillegon	Kab. Serang	- Menaikkan nilai IP dari 265% (2021) 280% (2030) guna pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi, dan peningkatan penyediaan air irigasi - Menyediakan air baku Daerah Irigasi Cibanten seluas 890,18 ha - Penyediaan air baku Di Cibanten sebesar 801,16 liter/detik (2029)	Agar dipersipkan	4 km	50 Miliar	APBN	2025	2029

7	06- SDA	Pembangunan Jaringan Transmisi Bendungan Karian	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon	- Diperkirakan Bendungan Karian selesai dan beroperasi pada tahun 2024 - Direncanakan untuk penyediaan air baku Kota Serang, Kab. Serang, dan Kota Cilegon 1500 liter/detik - Tingkat pelayanan air minum perpipaan Kota Serang 18%, Kab. Serang 9% dan Kota Cilegon 11%	Agar dipersiapkan	58 km	2,4 Triliun	APBN	2025	2027
8	06- SDA	Penanganan Sampadan Danau Rawa Dano	Kawasan Serang - Cilegon	Kab. Serang	- Mendukung percepatan penanganan 15 danau prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional - Danau Rawa Dano merupakan pemasok air baku untuk Kota Cilegon dan kawasan industri di Kota Cilegon - Danau Rawa Dano merupakan wilayah kawasan konservasi	Agar dipersiapkan	1 unit	100 Miliar	APBN	2027	2028
9	06- SDA	Penyediaan Air Baku Kawasan Wisata KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung	KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung	Kec. Panimba ng	- DAS Kalicaah merupakan bagian dari WS Cibalung Sawarna - Pertumbuhan wisatawan di Tanjung Lesung di tahun 2022 - 2029 diproyeksikan naik sebesar 38% atau 6 juta wisatawan di tahun 2029 - Jumlah kebutuhan air baku wisatawan tahun 2029 101,42 liter/bed/hari - Debit andalan DAS Kalicaah Q50 sebesar 0.47 liter/detik - Peningkatan tambahan debit air baku di KKK & KSPN Tj Lesung - Potensi ketersediaan air baku di Kecamatan Panimbang berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 15 liter/detik - Membutuhkan sinkronisasi dengan pembangunan drainase di kawasan wisata KSPN Uj Kulon - Tj Lesung	Agar dipersiapkan	1 kegiatan	9,2 Miliar	APBD	2027	2029

10	06-SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Perkotaan Panimbang	KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung	Kec. Panimbang	- Mendukung pariwisata nasional KEK Tj. Lesung - Pengendalian risiko abrasi serta melindungi kawasan permukiman dan pariwisata akibat pasang air laut - Kab. Pandeglang memiliki indeks risiko gelombang ekstrim dan abrasi dengan luasan 3.498 ha - Pembangunan pengaman pantai Tj. Lesung di Kecamatan Panimbang (13,8 km)	Agar dipersipkan	1,5 km	32 Miliar	APBD	2027	2029
11	06-SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Perkotaan Sumur	KSPN Ujung Kulon - Tj. Lesung	Kec. Panimbang	- Mendukung pariwisata nasional KSPN Uj Kulon - Tj. Lesung - Pengendalian banjir risiko abrasi serta melindungi kawasan permukiman dan pariwisata akibat pasang air laut - Kab. Pandeglang memiliki indeks risiko gelombang ekstrim dan abrasi dengan luasan 3.498 ha - Pembangunan Pengaman Pantai Sumur di Desa Cigorondong dan Desa Tunggul Jaya	Agar dipersipkan	1,5 km	32 Miliar	APBD	2028	2029
12	06-SDA	Pembangunan Bendungan Pasir Kopo	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Kopo masuk dalam RP JMN 2020-2024 & Renstra PUPR sebagai <i>major project</i> - Total volume tampungan 165,6 juta m³ dan akan mencapai target kapasitas tampung Indonesia (2020-2024) sebesar 68,11 m³/tahun - Memasok kebutuhan air baku Kota Serang (0,5 m³/detik), Kabupaten Tangerang (2,5 m³/detik) & Daerah Irigasi Ciujung (5,1 m³/detik) - Dapat mereduksi banjir sebesar 288,77 m³/detik - Telah terdapat DED	Agar dipersipkan	1 unit	2,3 Triliun	KPBU	2027	2029
13	06-SDA	Penyediaan Air Baku di Perkotaan Cibadak	Kawasan Pemerataan	Kec. Cibadak	- Jaringan perpipaan sudah terlayani PDAM Lebak dengan kapasitas 695 liter/detik dengan <i>idle capacity</i> 482 liter/detik yang apabila dioptimalkan dapat melayani 55 ribu KK	Agar dipersipkan	1 kegiatan	8 Miliar	APBD	2027	2029

06-SDA	14	Penyediaan Air Baku di Perkotaan Cileles	Kawasan Perumahan	Kec. Cileles	- Penyediaan air baku RKI Kab. Lebak berasal dari Bendungan Karian dengan kapasitas total 314,7 juta m³ - Total alokasi air baku dari Bendungan Karian adalah 14,6 m³/detik dan alokasi air baku untuk Kab. Lebak sebesar 0,6 m³/detik - Kecamatan Cibadak memiliki luasan Daerah Irigasi 689,66 ha yang terdiri dari kewenangan provinsi dan kabupaten - Bertambahnya jumlah penduduk tenaga kerja di sekitar kawasan KPI Rangkasbitung sebesar 314.976 jiwa (2029) - Kebutuhan air minum di Kecamatan Cibadak di tahun 2029 sebesar 567,47 liter/detik	Agar dipersi apkan	1 kegiatan	8 Miliar	APBN	2027	2029
					- Jaringan perpipaan sudah terlayani PDAM Lebak dengan kapasitas 695 liter/detik dengan <i>idle capacity</i> 482 liter/detik yang apabila dioptimalkan dapat melayani 55 ribu KK - Penyediaan air baku RKI Kab. Lebak berasal dari Bendungan Karian dengan kapasitas total 314,7 juta m³ - Total alokasi air baku dari Bendungan Karian adalah 14,6 m³/detik, alokasi air baku untuk Kab. Lebak sebesar 0,6 m³/detik - Direncanakan KPI Cileles akan mulai beroperasi di tahun 2025 sehingga diproyeksikan di tahun 2029 luasan KPI Cileles sebesar 416,66 ha - Kebutuhan air baku KPI Cileles tahun 2029 sebesar 270,83 liter/detik - Kecamatan Cileles memiliki luasan Daerah Irigasi 366,85 ha						

[illegible]

Sumber: BPS, Diolah BPIW (2023) dan Diskusi Antar Unor, 2022

8.1.2. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perdesaan tertinggal. Matriks rencana aksi infrastruktur jalan dan jembatan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	04- DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Merak (Cilegon)	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Cilegon	- Mendukung aksesibilitas Kota Cilegon, KIEC, MIE, dan Pelabuhan Merak - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,23 km/jam - Diproyeksikan memiliki bangkitan kendaraan 2029 sebesar 8.551,29/hari dan LOS D di tahun 2029 - Memiliki lebar jalan 38 m dan memiliki 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kapasitas sebesar 2,7 km	Agar dipersiapk an		2,7 km	50,22 Miliar	APBN	2027	2029
2	04- DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Cilegon (Cilegon)	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Cilegon	- Mendukung aksesibilitas Kota Cilegon, KIEC, dan Pelabuhan Merak - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,12 km/jam - Diproyeksikan memiliki bangkitan kendaraan 2029	Agar dipersiapk an		1,5 km	2,9 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					8.011,11/hari dan LOS C di tahun 2029 - Memiliki lebar jalan 38 m dan memiliki 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kapasitas sebesar 1,5 km							
3	04-DJBM	Peningkatan Kapasitas Merak - BTS, Kota Cilegon	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Cilegon	- Mendukung aksesibilitas Kota Cilegon, KIEC, MIE dan Pelabuhan Merak - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,23 km/jam - Diproyeksikan memiliki bangkitan kendaraan 2029 6.677,77/hari dan LOS F di tahun 2029 - Memiliki lebar jalan 317,50 m dan memiliki 4 lajur 2 arah terbagi (4/2D) - Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kapasitas sebesar 9,4 km	Agar dipersiapkan		9,4 km	174,84 Miliar	APBN	2027	2029
4	04-DJBM	Peningkatan Kapasitas BTS. Kota Serang - BTS. Kota Tangerang	Kawasan Serang - Cilegon	Kab. Serang	- Mendukung aksesibilitas industri MCIE dan Kab. Serang - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18-40,12 km/jam - Diproyeksikan memiliki bangkitan kendaraan 2029 8.804,82/hari dan LOS F di tahun 2029	Agar dipersiapkan		53,7 km	998,82 Miliar	APBN	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Memiliki lebar jalan 317,50 m dan memiliki 4 lajur 2 arah terbagi (4/2D) - Panjang jalan yang memerlukan peningkatan kapasitas jalan sebesar 53,7 km							
					- Akses Industri Petrokimia Cilegon eksisting saat ini melewati Jalan Lingkar Selatan yang terhubung dengan Jalan Nasional BTS. Kota Cilegon – Pasauran - Mendukung aksesibilitas Industri Chandra Asri yang akan beroperasi pada tahun 2027 dan Kota Cilegon - Industri Petrokimia di Koridor Anyer-Cilegon-Merak yang saat ini total produknnya sebesar 6,6 juta ton/tahun (2019), diperkirakan setelah dilakukan ekspansi di tahun 2027 jumlah produk meningkat sebesar 12,1 juta ton/tahun atau 55% dari peningkatan produk - Guna mendukung pengembangan Kawasan Industri Petrokimia Cilegon maka diperlukan pembangunan jalan baru alternatif dari Jalan Lingkar Selatan-Cilegon ke Pasauran-Anyer - Jalan baru alternatif untuk mendukung Industri	Agar dipersiap an	16 km	2,9 Triliun	APBD	2027	2029	
5	04-DJBM	Pembangunan Akses kawasan Industri Petrkomia Cilegon	Kawasan Serang – Cilegon	Kota Cilegon								

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Petrokimia Cilegon memiliki panjang jalan 16 km							
6	04- DUBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Citereup - TJ Lesung	KSPN Uj Kulon - Tj Lesung	Kab. Pandegla ng	- Kondisi jalan eksisting memiliki lebar jalan 7 m dengan panjang 6,1 km - Untuk mendukung pariwisata KSPN Uj Kulon - TJ Lesung - Tol Serang Panimbang akan beroperasi tahun 2024 dengan potensi 6 juta wisatawan tahun 2029 dengan bangkitan kendaraan 1.254 smp/hari atau 8.777 smp/minggu	Agar dipersiapk an		6,1 km	113,46 Miliar	APBN	2027	2028
7	04- DUBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Simpang Labuan - Citereup	KSPN Uj Kulon - Tj Lesung	Kab. Pandegla ng	- Kondisi jalan eksisting memiliki lebar jalan 7m dengan panjang 48,97 km - Untuk mendukung pariwisata KSPN Uj Kulon - TJ Lesung - Tol serang panimbang akan beroperasi tahun 2024 dengan potensi 6 juta wisatawan tahun 2029 dengan bangkitan kendaraan 2.387 smp/hari atau 16.709 smp/minggu	Agar dipersiapk an		20 km	371,9 Miliar	APBN	2027	2029
8	04- DUBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung	Kawasan Pemerata an	Kab. Lebak	- Mendukung aksesibilitas KPI Rangkasbitung - Memiliki tingkat pelayanan LOS C dengan kecepatan rata-rata kendaraan 32,18- 40,23 km/jam	Agar dipersiapk an		11,7 km	217,62 Miliar	APBN	2025	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Lebar jalan eksisting 310 m dan memiliki 4 lajur 2 arah tak terbagi (4/2) - Diproyeksikan KPI Rangkasbitung di tahun 2029 memiliki luasan 656,20 ha dengan bangkitan kendaraan 3.609 smp/hari dan LOS F di tahun 2029							
9	04-DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Syekh Nawawi	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Merupakan jalan akses menuju KPI Rangkasbitung - Panjang Jalan Syekh Nawawi 1,25 km dan memiliki lebar jalan eksisting 4 m dengan 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Peningkatan konektivitas guna mendukung KPI Rangkasbitung dengan penambahan luasan 656,20 ha serta bangkitan kendaraan 3.609 smp/hari	Agar dipersiapkan		1,25 km	13,75 Miliar	APBD	2026	2027
10	04-DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Arief Rahman Hakim Kaduagung	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Merupakan jalan akses menuju KPI Rangkasbitung - Panjang Jalan Arief Rahman Hakim Kaduagung 2,10 km dan memiliki lebar jalan eksisting 5 m dengan 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Peningkatan konektivitas guna mendukung KPI Rangkasbitung dengan penambahan luasan	Agar dipersiapkan		2,1 km	23,1 Miliar	APBD	2026	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					656,20 ha (2029) serta bangkitan kendaraan 3.609 smp/hari							
					- Mendukung Akses Tol Interchange Cileles - Merupakan jalan akses menuju KPI Cileles - Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Kadugagung - Cileles 11,5 km dan memiliki lebar jalan eksisting 5 m dengan 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2) - Peningkatan konektivitas guna mendukung KPI Cileles dengan penambahan luasan 416,66 ha (2029) serta bangkitan kendaraan 2.292 smp/hari	Agar dipersiapkan		11,5 km	126,5 Miliar	APBD	2026	2027
11	04-DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Kadugagung - Cileles	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak								
					- Peningkatan konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Provinsi Banten - Merupakan jalan akses sektor unggulan pertanian	Agar dipersiapkan		45,3 km	498,3 Miliar	APBD	2026	2028
12	04-DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Raya Cileles - Malingping	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak								
					-	Agar dipersiapkan		400 m	128,25 Miliar	APBN	2025	2025
13	04-DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) JI. Raya Cikande - Rangkasbitung	Kawasan Serang Cilegon	Kab. Serang								
					-	Agar dipersiapkan		500 m	312,75 Miliar	APBN	2026	2026
14	04-DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) JI. Jend Sudirman (Tangerang)		Kab. Tangerang								

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	04-DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) JI. Raya Cipanas (Rangkasbitung)	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	-	Agar dipersiapkan		550 m	180 Miliar	APBN	2027	2027
16	04-DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Bts Kota Cilegon - Pasauran	Serang Cilegon	Kota Cilegon	-	Agar dipersiapkan		500 m	162,75 Miliar	APBN	2025	2025
17	04-DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) JI. Raya Anyer	Serang Cilegon	Kabupaten Serang	-	Agar dipersiapkan		550 m	180 Miliar	APBN	2025	2025
18	04-DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) JI. Sudirman (Serang)	Serang Cilegon	Kota Serang	-	Agar dipersiapkan		650 m	312 Miliar	APBN	2026	2026

Sumber: BPS, Diolah BPIW (2023) dan Diskusi Antar Unor, 2022

8.1.3. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perdesaan tertinggal. Matriks rencana aksi infrastruktur permukiman dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05-DJCK	Pembangunan SPAM Sindangheula	Kawasan Serang - Cilegon	Kab. Serang	- WTP Petir direncanakan melayani Kota Serang (150 liter/detik), Kab. Serang (200 liter/detik), dan Kota Cilegon (1.150 liter/detik) sumber air baku WTP Petir diperoleh dari Bendung Pamarayan - Direncanakan melalui Sungai Ciujung kemudian ke Bendung Pamarayan dengan kapasitas 1.500 liter/detik	Agar dipersiapkan		400 I/detik (WTP 1 sebesar 400 I/dt sudah dibang un)	2,42 Triliun	Swasta/ KPBU	2028	2029
2	05-DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Cilowong dengan menerapkan 3R	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Serang	- Cakupan wilayah pelayanan TPA Cilowong yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang - TPA Cilowong memiliki luas 20 ha dan telah terpakai 10 ha sehingga kapasitas sisa TPA Cilowong 1.226.000 m ³ - Timbulan sampah domestik Kawasan Serang - Cilegon mencapai 14.226 m/hariPenanganan sampah Kota Serang 50,99% dan Kab. Serang 8,37%	Agar dipersiapkan		1 Paket 259.600 KK	6,5 Miliar	APBD	2026	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Saat ini timbulan sampah masuk TPA Cilowong melalui <i>landfill</i> sebesar 77%, sehingga timbulan sampah masuk <i>landfill</i> 951.496 m³/tahun (2029) - Diproyeksikan bahwa tahun 2027 kapasitas TPA Cilowong <i>over capacity</i> - Dibutuhkan rencana peningkatan kapasitas TPA Cilowong seluas 10 ha							
3	05-DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Bagendung dengan menerapkan 3R	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Cilegon	- Cakupan wilayah pelayanan TPA Bagendung yaitu Kota Cilegon - TPA Bagendung memiliki luas 10 ha dan saat ini telah terpakai 98% dari total luasan TPA sehingga kapasitas sisa TPA Bagendung 10.000 m³ - Timbulan sampah domestik Kawasan Serang - Cilegon mencapai 14.226 m³/hari - Penanganan sampah Kota Cilegon 70,88% - Saat ini timbulan sampah masuk TPA Bagendung melalui <i>landfill</i> sebesar 98,43% sehingga timbulan sampah masuk <i>landfill</i> 1.357.197 m³/tahun (2029) - Saat ini kapasitas TPA Bagendung sudah <i>over capacity</i> - Dibutuhkan rencana peningkatan kapasitas TPA Bagendung seluas 10 ha	Agar dipersiapkan		1 Paket 290.600 K	6,5 Miliar	APBD	2026	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	05- DJCK	IPLT Kota Serang	Kawasan Serang - Cilegon	Kec. Kasemen, Walantaka, Serang, Kramatwatu	- Pelayanan sanitasi layak 90,76% - Kota Serang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (26 jiwa/ha) - Wilayah perkotaan Serang belum terdapat IPLT namun diproyeksikan bahwa timbulan tinja di Kota Serang 2029 sebesar 366,70 m³/hari	Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBN	2027	2029
5	05- DJCK	IPLT Kab. Serang	Kawasan Serang - Cilegon	Kec. Cikande	- Pelayanan sanitasi layak 80,34% - Kab. Serang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (9,5 jiwa/ha) - Wilayah Kab. Serang belum terdapat IPLT namun diproyeksikan bahwa timbulan tinja di Kab. Serang 2029 sebesar 1.240 m³/hari	Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBN	2027	2029
6	05- DJCK	IPAL Kota Serang	Kawasan Serang - Cilegon	Kec. Kasemen, Walantaka, Serang, Kramatwatu	- Pelayanan sanitasi aman 11,06% - Kota Serang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (26 jiwa/ha) - Wilayah perkotaan Serang belum terdapat IPAL namun diproyeksikan bahwa timbulan limbah domestik di Kota Serang 2029 sebesar 814,90 liter/detik	Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBN	2027	2029
7	05- DJCK	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Serang	- Luasan kawasan kumuh Kota Serang 215 ha	Agar dipersiapkan		215 ha	12,87 Miliar	APBN	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Penanganan kawasan kumuh di Kota Serang berada di kawasan kumuh nelayan yaitu di Kecamatan Karangantu dan sekitar Kawasan Banten Lama - Penanganan kawasan kumuh saat ini baru tercapai 53,3 ha atau 24,66% (2022)							
8	05-DJCK	Peningkatan SPAM di Kawasan Wisata KSPN Uj Kulon - Tj Lesung	KSPN Uj Kulon - Tj Lesung	Kec. Panimbang	- Jaringan perpipaan sudah terlayani PDAM Pandeglang dengan kapasitas 240 liter/detik dengan <i>idle capacity</i> 20 liter/detik yang apabila dioptimalkan dapat melayani 2 ribu KK - Guna mendukung KEK Tj Lesung dan KSPN Uj Kulon - Tj Lesung - Peningkatan jumlah wisata KSPN Uj Kulon - Tj Lesung di tahun 2029 sebesar 6 juta wisatawan dengan kebutuhan air minum 352 liter/detik - Kapasitas SPAM Kecamatan Panimbang saat ini sebesar 15 liter/detik - Tahun 2022 adanya penambahan kapasitas IPA sebesar 100 liter/detik bersumber dari <i>intake</i> air baku Sungai Ciliman - Pembangunan SPAM guna meningkatkan kualitas air dan pelayanan air minum KEK Tj Lesung sebanyak 4.000 SR / 20.000 jiwa	JDU ditargetkan selesai tahun 2023		100 l/detik 4000 SR	17,6 Miliar	APBD	2025	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	05- DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Bojongcanar	KSPN Uj Kulon - Tj Lesung	Kec. Panimbang	- Jebolnya tanggul TPA Bojongcanar di Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang - Timbulan sampah eksisting TPA Bojongcanar sebesar 18.250 m³/tahun - TPA Bojongcanar memiliki kapasitas terpakai 33.000 m³ atau 0,5 ha sehingga sisa volume TPA Bojongcanar sebesar 91.000 m³/tahun - Diproyeksikan bahwa Bojongcanar mengalami <i>overflow</i> dengan timbulan sampah masuk 18.916 m³/tahun - Meningkatkan pelayanan persampahan di kawasan wisata KEK Tj Lesung	Agar dipersiap kan		1 Paket 9.400 KK	6,5 Miliar	APBD	2026	2027
10	05- DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Bangkonol dengan menerapkan 3R	KSPN Uj Kulon - Tj Lesung	Kec. Sukaesmi, Kec. Panimbang, dan Kec. Sumur	- Jebolnya tanggul TPA Bojongcanar sehingga timbulan sampah di Kab. Pandeglang dialihkan ke TPA Bangkonol - Timbulan sampah eksisting masuk TPA Bangkonol 250 m³/hari atau 91.250 m³/tahun - TPA Bangkonol memiliki luasan 10 ha dan volume kapasitas terpakai 202.000 m³ atau 2 ha sehingga sisa volume TPA Bangkonol sebesar 987.000 m³ - Tingkat pelayanan sampah Kabupaten Pandeglang sebesar 9,18% dengan	Agar dipersiap kan		1 Paket 10.500 KK	6,5 Miliar	APBD	2026	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					target peningkatan layanan sebesar 29% atau 58,49 m/hari. Sehingga TPA Bangkonol akan mengalami <i>over capacity</i> tahun 2032							
					- Meningkatkan pelayanan persampahan di kawasan wisata KEK Tj Lesung dan KSPN Uj Kulon – Tj Lesung							
					- Pelayanan sanitasi aman 1% terendah di Prov. Banten							
					- Kab. Pandeglang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (3,94 ha)							
					- Meningkatkan pelayanan sanitasi aman Kab. Pandeglang (RPJMN 2020-2024 (15%)) dan mendukung wisata KEK Tj Lesung							
11	05-DJCK	Pembangunan IPAL Komunal di kawasan wisata Uj Kulon – Tj Lesung	KSPN Uj Kulon – Tj Lesung	Kec. Panimbang dan Kec. Sumur		Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBD	2026	2027
					- Potensi produksi air limbah domestik di wilayah pengembangan dan sekitarnya (2029) adalah sebesar 305,19 liter/detik							
					- Sebagai pemanfaatan Bendungan Karian							
					- Menggunakan skema KPBU unsolicited yang diinisiasi oleh konsorsium PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Adhi Karya, dan PT U Connectivity Services (UCS) dengan PJKP Gubernur Provinsi Banten.	Dokumen Pra-FS (dalam tahap evaluasi)		1 paket (1.500 liter/detik)	1,41 Triliun	KPBU	2025	2027
12	05-DJCK	Pembangunan SPAM Regional Karian Barat	Kawasan Pemerintahan	Kab. Lebak								
					- Kapasitas produksi air curah sebesar 1500 liter/detik akan dialirkan ke Kota Serang (150							

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					liter/detik), Kota Cilegon (1.150 liter/detik), Kabupaten Serang (200 liter/detik). - Perkiraan akan melayani 150.000 SR (asumsi 1 liter/detik untuk 100 SR) - Proyek ini mencakup pembangunan unit air baku dan pembangunan IPA dengan bentuk pengembalian investasi yang digunakan ialah tarif selama masa konsesi 30 Tahun							
13	05-DJCK	Peningkatan Kapasitas TPA Dengung dengan menerapkan 3R	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Timbulan sampah eksisting TPA Dengung sebesar 25.550 ton/tahun - TPA Dengung memiliki luasan 10 ha dengan volume TPA Dengung sebesar 1268.000 m ³ - Diproyeksikan bahwa tahun 2024 TPA Dengung mengalami <i>overflow</i> untuk menampung timbulan sampah dari kawasan Serang - Panimbang di Kabupaten Lebak dengan volume sampah masuk <i>landfill</i> sebesar 82.616 m ³ . Meningkatkan pelayanan persampahan guna mendukung KPI Serang - Panimbang khususnya di Kabupaten Lebak	Agar dipersiapkan		1 Paket 75.900 KK	6,5 Miliar	APBD	2026	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	05-DJCK	SPALD-S Skala Kota (IPLT) Dukung	Kawasan Pemerintahan	Kab. Lebak	- Pelayanan sanitasi layak Kab. Lebak 56,82% - Dengan keberadaan KPI Rangkasbitung diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 656,20 ha dengan penambahan jumlah penduduk sebesar 314.976 jiwa - Proyeksi timbulan tinja di Kab. Lebak 2029 sebesar 458,74 m/hari - Merupakan program optimalisasi IPLT Dukung	Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBD	2027	2029
15	05-DJCK	Pembangunan IPAL di Kawasan Perkotaan Walantaka	Kawasan Pemerintahan	Kec. Walantaka	- Pelayanan sanitasi layak Kota Serang 90,76% - Dengan keberadaan KPI Cikande diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 4.153 ha dengan penambahan jumlah penduduk sebesar 2 juta jiwa - Kota Serang belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (26 jiwa/ha) - Proyeksi timbulan tinja di Perkotaan Walantaka 2029 sebesar 68,99 m/hari	Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBD	2027	2029
16	05-DJCK	Pembangunan IPAL di Kawasan Perkotaan Cibadak	Kawasan Pemerintahan	Kec. Cibadak	- Pelayanan sanitasi layak Kab. Lebak 56,82% - Dengan keberadaan KPI Rangkasbitung diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 656,20 ha dengan penambahan jumlah	Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBD	2027	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					penduduk sebesar 314,976 jiwa - Kab. Lebak belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (4,26 jiwa/ha) - Proyeksi timbunan tinja di Perkotaan Cibadak 2029 sebesar 204,29 m ³ /hr							
17	05-DJCK	Pembangunan IPAL di Kawasan Perkotaan Cileles	Kawasan Pemerataan	Kec. Cileles	- Pelayanan sanitasi layak - Kab. Lebak 56,82% - Dengan keberadaan KPI Cileles diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 416,66 ha dengan penambahan jumlah penduduk sebesar 199,997 jiwa - Kab. Lebak belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (4,26 jiwa/ha) - Proyeksi timbunan tinja di Perkotaan Cibadak 2029 sebesar 137,26 m ³ /hr	Agar dipersiapkan		1 paket	5 Miliar	APBD	2027	2029
18	05-DJCK	Pembangunan SPAM Maja	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak Kota Tangerang	- Diperkirakan Bendungan Karian selesai dan beroperasi pada tahun 2024 - Pembangunan SPAM Maja dan SPAM Kota Rangsasbitung yang dapat melayani sebesar 0,6 m ³ /detik - Pembagian kapasitas sebesar 0,4 m ³ /detik (Kota Satelit Maja) dan 0,2 m ³ /detik (Kota Rangsasbitung)	Agar dipersiapkan		200 l/detik	1,21 Triliun	APBN/Swasta/KPBU	2025	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
19	05-DJCK	Pembangunan TPA Regional Cileles			- TPA Regional Cileles saat ini proses tahap pembangunan dalam tahap Pra FS - Provinsi Banten belum memiliki TPA Regional sehingga wilayah yang dengan kondisi TPA Overcapacity seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak memiliki alternatif pengolahan sampah - Diharapkan TPA Regional Cileles dapat menampung timbunan sampah yang berada di Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang sebesar 6,07 juta m3/tahun di tahun 2029	Agar dipersiap kan		1 Paket 82.600 KK	68,6 Miliar	APBN	2027	2029
20	05-DJCK	SPALD-T Skala Kota (IPAL) Cibadak	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Pelayanan sanitasi layak - Kab. Lebak 56,82% Dengan keberadaan KPI Cileles diproyeksikan tahun 2029 KPI memiliki luas sebesar 416,66 ha dengan penambahan jumlah penduduk sebesar 212.803 jiwa (95.823 Kec. Cileles) (116.980 Kec. Cibadak) - Kab. Lebak belum mencapai kepadatan 150 jiwa/ha (4,26 jiwa/ha)	Agar dipersiap kan		1 paket	5 Miliar	APBD	2026	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	05-DJCK	Pembangunan SPAM IKK Cibitung	Kawasan Pemerataan	Kab. Pandeglang	- Pembangunan SPAM IKK Cibitung guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cibitung melayani Desa Sudimanik dan Desa Curug	Agar dipersiapkan		20 l/detik	23,5 Miliar	APBD	2026	2029
22	05-DJCK	Peningkatan SPAM IKK Cikeusik	Kawasan Pemerataan	Kab. Pandeglang	- Peningkatan SPAM IKK Cikeusik guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cikeusik melayani Desa Sukamulya	Agar dipersiapkan		18 l/detik	39,8 Miliar	APBD	2026	2029
23	05-DJCK	Pembangunan SPAM IKK Cibitung	Kawasan Pemerataan	Kab. Pandeglang	- Pembangunan SPAM IKK Cibitung guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cibitung melayani Desa Cikiruh	Agar dipersiapkan		20 l/detik	16,5 Miliar	APBD	2026	2029
24	05-DJCK	Peningkatan SPAM IKK Cigemlong	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Cigemlong guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cigemlong melayani Desa Cikaret, Desa Cikadongdong, dan Desa Cikate	Agar dipersiapkan		18 l/detik	16,1 Miliar	APBD	2026	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	05-DJCK	Pembangunan SPAM IKK Cimarga	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Pembangunan SPAM IKK Cimarga guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Cimarga melayani Desa Margaluyu	Agar dipersiapkan		20 l/detik	53.6 Miliar	APBD	2026	2029
26	05-DJCK	Peningkatan SPAM IKK Bojongmanik	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Bojongmanik guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Bojongmanik melayani Desa Pasirbitung, Desa Parakanbeusi, Desa Mekar Rahayu, dan Desa Keboncau	Agar dipersiapkan		16 l/detik	18,4 Miliar	APBD	2026	2029
27	05-DJCK	Peningkatan SPAM IKK Lebakgedong	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Lebakgedong guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Lebakgedong melayani Desa Ciladaeun	Agar dipersiapkan		16 l/detik	16,3 Miliar	APBD	2026	2029
28	05-DJCK	Peningkatan SPAM IKK Leuwidamar	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak	- Peningkatan SPAM IKK Leuwidamar guna mendukung infrastruktur dasar sektor desa tertinggal - Wilayah pelayanan SPAM IKK Leuwidamar melayani Desa Kanekes	Agar dipersiapkan		18 l/detik	40,8 Miliar	APBD	2026	2029

Sumber: BPS, Diolah BPIW (2023) dan Diskusi Antar Unor, 2022

8.1.4. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perdesaan tertinggi. Matriks rencana aksi infrastruktur perumahan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan Provinsi Banten

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS Volume	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (ribu)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	07- DJP	Pembangunan Rusun Kota Serang	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Serang	- Mendukung penyediaan perumahan kota industri sekitar KI Wilmar - Proyeksi penduduk jumlah tenaga kerja di KI Wilmar 216 ribu jiwa 2029	Agar dipersiapk an		5 unit	33 Miliar	APBN	2028	2029
2	07- DJP	Pembangunan Rusun Kota Cilegon	Kawasan Serang - Cilegon	Kota Cilegon	- Mendukung penyediaan perumahan kota industri sekitar KI Cilegon - Proyeksi penduduk jumlah tenaga kerja KI Cilegon 340 ribu jiwa 2029	Agar dipersiapk an		20 unit	1,33 Triliun	APBN	2028	2029
3	07- DJP	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Kawasan Pemerataan	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	- RTLH Kabupaten Lebak sebanyak 63.714 - RTLH Kabupaten Pandeglang sebanyak 65.574	Agar dipersiapk an		129.288 unit	2,5 Triliun	APBN	2025	2026

Sumber: BPS, Diolah BPIW (2023) dan Diskusi Antar Unor, 2022

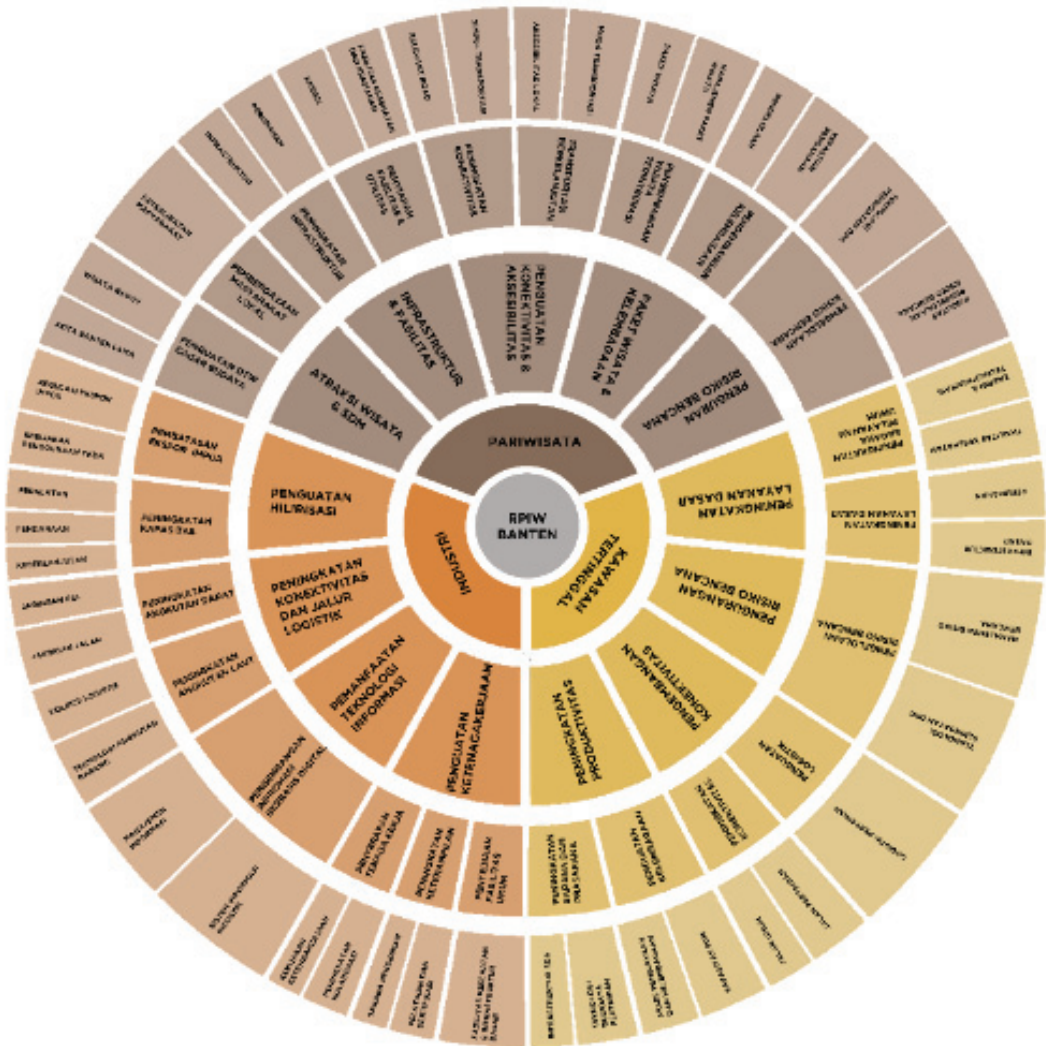
8.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

Rencana aksi pembangunan infrastruktur merupakan turunan dari *grand strategy* yang dijabarkan ke dalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai *stakeholder*, serta dilaksanakan dalam kurun waktu hingga 2034.

Dalam rencana aksi yang telah dirumuskan, terdapat 3 fokus pengembangan yaitu industri, pariwisata, dan penanganan kawasan tertinggal, yang dijabarkan dalam 13 *grand strategy* (fokus industri 4 *grand strategy*, fokus pariwisata 5 *grand strategy*, dan fokus kawasan tertinggal 4 *grand strategy*). Dari 13 *grand strategy* tersebut dirinci menjadi 24 program dan 208 rencana aksi (41 sektor PUPR dan 167 non PUPR). Ringkasan mengenai *grand strategy*, program, dan rencana aksi masing-masing fokus adalah sebagai berikut:

1. Fokus Industri, terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program dan 72 rencana aksi (9 kegiatan sektor PUPR dan 63 non PUPR);
2. Fokus pariwisata, terdiri dari 5 *grand strategy*, 9 program, dan 91 rencana aksi (16 kegiatan sektor PUPR dan 75 non PUPR); dan
3. Fokus kawasan tertinggal, terdiri dari 4 *grand strategy*, 7 program, dan 45 rencana aksi (16 kegiatan sektor PUPR dan 29 non PUPR).

Rencana aksi keterpaduan infrastruktur PUPR dan Non PUPR menunjukkan bahwa dalam pengembangan wilayah Provinsi Banten (industri, pariwisata, dan kawasan tertinggal) diperlukan keterlibatan dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain yaitu sebanyak 14 K/L termasuk Pemda di wilayah Banten. Secara lengkap, ringkasan rencana aksi keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur
Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Fokus Industri

(1) Penguatan keterkaitan industri hulu ke hilir melalui kebijakan pembatasan ekspor impor bahan baku industri dan peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia & baja; (2) Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk mendukung pengembangan kawasan industri baru; (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan industri khususnya industri petrokimia & smelter baja; serta (4) Penguatan ketenagakerjaan industri melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) industri.

Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Industri

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
(S4 - T4 - T5) Penguatan keterkaitan industri hulu ke hilir melalui kebijakan pembatasan ekspor impor bahan baku industri dan peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia & baja	Kebijakan pembatasan ekspor impor bahan baku industri	Regulasi Ekspor Impor	Pembatasan impor bahan aku petrokimia & baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			Pembatasan ekspor barang setengah jadi petrokimia & baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
		Insentif Industri	Peningkatan pajak impor bahan baku industri petrokimia & baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDAG	x	x	x	x	x
			Subsidi harga produk industri hulu petrokimia dan baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDAG	x	x	x	x	x
			Penetapan ambang tarif produk industri hulu petrokimia & baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDAG	x	x	x	x	x
	B to B	Pengetatan Kebijakan Penggunaan TKDN	Kemudahan fiskal produk industri hulu petrokimia & baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDAG	x	x	x	x	x
			Fasilitasi perjanjian kerjasama industri hulu & hilir untuk penggunaan TKDN	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	x	x	x		
			Fasilitasi forum dan koordinasi industri hulu & hilir petrokimia dan baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			Pemberian kemudahan akses pasar bagi produk industri petrokimia & baja yang menggunakan TKDN	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			Kemudahan perijinan bagi ekspansi industri petrokimia & baja yang menggunakan TKDN	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			Pemberian keringanan pajak industri petrokimia & baja yang menggunakan TKDN	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDAG	x	x	x	x	x

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
(S3 - T1 - T3) Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk mendukung pengembangan kawasan industri baru	Peningkatan kapasitas produksi industri petrokimia & baja	Peralatan	Alat dan Mesin	Revitalisasi alat dan mesin produksi	KEMENPERIN	x	x	x	x	
				Pemanfaatan teknologi mutakhir terkait peralatan dan permesinan	KEMENPERIN	x	x	x	x	
		Pendanaan	Pendanaan	Pengembangan alternatif skema pendanaan untuk ekspansi	KEMENDAG	x	x	x	x	
				Efisiensi pendanaan operasional	KEMENDAG	x	x	x	x	
	Keberlanjutan Industri Berkelanjutan			Pendefinisian ulang dan klarifikasi target emisi	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
				Penggunaan teknologi ramah lingkungan	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			Jaringan rel	Percepatan pembangunan jaringan rel	KEMENHUB	x	x	x		
				Rehabilitasi persimpangan rel	KEMENHUB	x	x	x		
	Peningkatan kapasitas jalur angkutan darat	Jaringan Transportasi Rel	Moda	Evaluasi mode share angkutan barang	KEMENHUB	x	x			
				Pembangunan Dry Port yang terhubung dengan jalur kereta api	KEMENHUB	x	x	x		
	Peningkatan kapasitas jalur angkutan darat		Operator	Upaya membuka peluang swasta sebagai operator kereta	KEMENHUB	x	x			
				Penetapan pihak swasta sebagai operator kereta logistik	KEMENHUB	x	x			
			Jalan	Peningkatan kapasitas jaringan jalan	KEMEN PUPR	x	x	x		
		Jaringan Jalan		Pembangunan jalan baru	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
	Peningkatan kapasitas hub & pelabuhan		Rekayasa	Pemisahan jalur logistik dan jalur wisata	PEMDA	x	x			
				Penjadwalan lalu lintas logistik	PEMDA	x	x	x	x	x
			<i>Smallholder Storage</i>	Pembangunan titik koleksi logistik skala lokal	PEMDA	x	x	x		
		Koleksi Logistik		Pembangunan titik koleksi logistik skala kawasan (Spoke)	PEMDA	x	x	x		
			<i>Transshipment</i>	Peningkatan kerjasama optimalisasi pelabuhan	KEMENHUB	x	x	x		
				Peningkatan daya dukung pelabuhan berkala	KEMENHUB	x	x	x	x	
			<i>Inland</i>	Upaya minimalis pergerakan kontainer kosong	PEMDA	x	x	x	x	x

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
						X	X	X	X	X
						X	X	X	X	
						X	X	X		
(S4 - T5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan industri khususnya industri petrokimia & smelter baja	Pengembangan sistem informasi berbasis digital industri petrokimia & baja	Teknologi Angkutan Barang	Distribution Port	Upaya pencapaian Throughput Dryport	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X	X	X
			Online Delivery Order	Realisasi same-day delivery logistik parsel	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X	X	
			E-Procurement	Optimasi sistem fulfillment dan warehouse	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X		
				Efisiensi kegiatan berdasarkan praktik sosial budaya	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X		
				Mendorong kolaborasi antara organisasi dan supplier	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X	X	
		Manajemen Informasi	Vehicle Management System	Pemberlakuan kebijakan zero ODOL	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X	X	X
			Kelembagaan	Penerapan RFID pada angkutan barang	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X	X	X
				Peningkatan kerjasama antar sektor terkait TI	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X		
			Jaminan Keamanan	Sinkronisasi sistem informasi	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X		
				Perlindungan data konsumen	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
		Sistem Informasi Industri	Tracking	Penguatan jaringan keamanan	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
				Penerapan real-time tracking system	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
			Database	Penerapan warehouse management system	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
				Database neraca perdagangan industri petrokimia	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
		Kebijakan Terkait Ketenagakerjaan	Integrasi Informasi	Database neraca perdagangan industri baja	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
				Pengembangan akses informasi skala nasional dan global	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
(S2 - S4 - T3) Penguatan ketenagakerjaan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan	Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal	Peningkatan Ketenagakerjaan	Peraturan Tenaga Kerja	Maintenance dan Updating	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X
				Pemberlakuan kebijakan proporsi tenaga kerja lokal	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X	X	
		Peningkatan Penyerapan tenaga kerja lokal	Perjanjian Kerjasama	Pemberian intensif industri yang menyerap tenaga kerja lokal	PKN Cilegon dan PKN Serang	PMDA	X	X	X	X
				MoU antara sektor industri dengan sektor pendidikan	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X		
		Peningkatan Penyerapan tenaga kerja lokal dan	Program internship	Program internship	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) industri	Sarana Pendidikan Bidang Industri	Pembangunan - Pengembangan	Pembangunan/Rehabilitasi sekolah menengah kejuruan	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x			
			Pembangunan/Pengembangan politeknik industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x	x		
			Pembangunan/Pengembangan lembaga diklat bidang industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x	x		
			Peningkatan tenaga pendidik yang kompeten	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x	x		
	Peningkatan keterampilan tenaga kerja industri		Pembangunan/Pengembangan sertifikasi keahlian tenaga kerja industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x	x	x	
			Pelaksanaan diklat tenaga kerja industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x	x	x	x
			Sertifikasi keahlian tenaga kerja industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x	x	x	x
			Penyediaan ikatan kerja lulusan sekolah kejuruan	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENDIKBUD	x	x	x	x	x
		Diklat dan Sertifikasi	Penyediaan lapangan kerja dari industri terhadap lulusan sekolah kejuruan	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENPERIN	x	x	x	x	x
			Pembangunan rumah sakit di sekitar kawasan industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENKES	x	x	x	x	
			Pembangunan pengolahan limbah B3 rumah sakit	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMENKES	x	x	x		
			Penyediaan air bersih	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
	Peningkatan fasilitas kesehatan dan infrastruktur Dasar	Air Bersih	Pembuatan intake dan reservoir SPAM	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
			Pembangunan/Pengembangan instalasi pengolahan air bersih	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMEN PUPR	x	x	x		
			Penyediaan pengolahan air limbah	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMEN PUPR	x				
			Penyediaan pengolahan persampahan	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMEN PUPR	x	x			
	Rumah Susun		Penanganan limbah B3 industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KLHK	x	x	x	x	
			Pembangunan rumah susun pekerja industri	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMEN PUPR	x	x			
			Pemeliharaan rumah susun eksisting	PKN Cilegon dan PKN Serang	KEMEN PUPR	x	x			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Fokus Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan: (1) Penguatan destinasi cagar budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diversifikasi atraksi pariwisata; (2) Pengembangan infrastruktur pariwisata mendukung peningkatan kualitas destinasi wisat; (3) Penguatan konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi wisata; (4) Integrasi pengembangan destinasi wisata Banten melalui paket wisata terintegrasi dan penguatan kelembagaan; serta (5) Pengembangan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana

Tabel 8.6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Sektor Pariwisata

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S4 - S5 - T1) Penguatan destinasi cagar budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diversifikasi atraksi pariwisata	Penguatan destinasi wisata cagar budaya	Kota Lama Banten	Kota Lama Banten	Revitalisasi Kawasan Banten Lama	Kawasan Banten Lama	KEMENPAREKRAF	X				
				Pengembangan museum sejarah Banten Lama	Kawasan Banten Lama	KEMENPAREKRAF	X	X			
	Wisata Baduy			Pengembangan wisata berbasis religi	Kawasan Banten Lama	KEMENPAREKRAF	X	X			
				Pengembangan destinasi pendukung wisata Kampung Dalam Baduy	Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X			
				Pengembangan pusat informasi dan fasilitas UMKM Suku Baduy	Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X			
				Pelatihan kelompok wisata untuk pendukung wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X			
(S1 - S2 - S3 - T1)	Pemberdayaan masyarakat lokal	Keterlibatan Masyarakat	Masyarakat Lokal	Penyuluhan kepada masyarakat lokal untuk sadar wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X			
				Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kreatif	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X		
	Peningkatan infrastruktur	Infrastruktur	Sanitasi	Pemberian fasilitas penunjang ekonomi kreatif	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X		
				Pembangunan IPAL	Kawasan Banten Lama dan Desa	KEMEN PUPR	X	X			

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
Pembangunan infrastruktur pariwisata mendukung peningkatan kualitas destinasi wisata	pendukung pariwisata				Wisata Kampung Baduy						
				Pembangunan TPA	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR					
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
				Air Minum	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR					
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
				Air Baku	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR					
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
				RTLH	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR					
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
					Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang						
				Perumahan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF					
					Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy						
					Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy						
Penyiapan fasilitas dan utilitas umum	Energi		Listrik	Pembangunan/Pengembangan jaringan listrik di kawasan wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	ESDM					

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
						X	X			
						X	X			
						X				
		Telekomunikasi	Pembangunan kawasan solar panel untuk supply listrik	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	ESDM	X	X			
			Pengembangan fasilitas internet di kawasan wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KOMINFO	X	X			
			Pembatasan penggunaan internet di zona tertentu	Desa Wisata Kampung Baduy	KOMINFO	X				
			Pembangunan Rumah Sakit/Puskesmas	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMENKES	X	X			
			Percepatan program sertifikat CHSE pariwisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X			
			Melibatkan pelaku usaha dan asosiasi dalam sertifikasi	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X	X	X
			Penyediaan fasilitas pengaduan wisatawan real time	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X	X	X
			Fasilitas jaminan keamanan data pribadi wisatawan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X	X	X
			Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR	X				
			Penyediaan rest area guna mendukung pariwisata	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR	X	X	X		
(S2 - S3 - T5) Penguatan konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi wisata	Peningkatan konektivitas dan simpul transportasi	Relevant Road	Peningkatan Jalan Nasional menuju DTW	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR	X	X	X	X	

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Penyediaan perlengkapan jalan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
						x	x	x	x	
						x	x	x	x	
		Jalan Daerah	Peningkatan jalan daerah menuju DTW	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	PEMDA	x	x	x	x	
						x	x	x	x	
						x	x	x	x	
		Simpul Perairan	Pengembangan pelabuhan penyebrangan Merak	Kota Cilegon	KEMENHUB	x	x	x		
						x	x	x		
						x	x	x		
		Simpul Transportasi	Pembangunan Bandara Panimbang	Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	x	x	x	x	
							x	x	x	x
						x	x	x	x	x
		Kereta Api	Integrasi Bandara dengan Jalan Tol Serang - Panimbang	Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	x	x	x	x	
							x	x	x	
							x	x		
	Pilihan transportasi lokal berkelanjutan	Jalan	Pembangunan Jalan & Jembatan untuk akses destinasi wisata	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x		
						x	x	x		
						x	x	x		
		Aksesibilitas Lokal	Pembangunan pagar pengaman jalan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x		
						x	x	x		
						x	x	x		
		Wayfinding	Penyediaan fasilitas informasi & perlengkapan jalan	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	x	x	x		
						x	x	x		
			Penyediaan signage destinasi tetap dan/atau temporer	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	KEMENHUB	x	x	x		

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
						X	X	X		
						X	X	X	X	X
						X	X	X		
		Rest Area	Pembangunan Rest Area di jalan non tol	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	PEMDA	X	X	X		
			Pengembangan keberagaman produk makanan/minuman	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X	X	X
		Moda	Penentuan moda transportasi umum berbasis ramah lingkungan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENHUB	X	X	X	X	
			Penentuan tarif moda transportasi	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENHUB	X	X	X	X	
			Penentuan jalur pejalan kaki	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
		Moda transportasi	Pembangunan jalur pejalan kaki dan penyediaan rest point	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X	X	
			Integrasi antar moda pendukung pariwisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X	X	
			Pembangunan fasilitas alih moda pendukung pariwisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X	X	
		Paket wisata	Pengembangan paket wisata tematik	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X	X	
			Pengembangan transfer wisatawan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	KEMENPAREKRAF	X	X	X	X	
		Manajemen Paket Wisata	Harmonisasi informasi agenda pariwisata di seluruh wilayah	Provinsi Banten	PEMDA	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
						x	x	x	x	x
						x	x	x	x	x
						x	x	x	x	x
(S1 - S5 - T4) Integrasi pengembangan destinasi wisata Banten melalui paket wisata terintegrasi dan penguatan kelembagaan	Pengembangan paket wisata terintegrasi	Atraksi	Sinkronisasi pelaksanaan event pariwisata	Provinsi Banten	PEMDA	x	x	x	x	x
			Inovasi atraksi wisata masing - masing DTW	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Penataan kawasan sebagai tempat pertunjukan atraksi wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Penyediaan produk unggulan masing - masing DTW	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Penjaminan mutu produk unggulan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Build Up Brand Filter pemasaran atraksi wisata dan product unggulan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Sharing konten media sosial yang relevan dengan Brand	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Pembangunan <i>tourism online resource centre</i>	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Sistem informasi pemasaran berbasis data <i>real time</i>	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
			Integrasi layanan, jadwal, dan tarif atraksi masing - masing DTW	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x
	Integrasi Layanan		Integrasi informasi Tour Operator dan Travel Agency	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	x	x	x	x	x

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
						X	X	X		
						X	X	X		
						X	X	X		
Pengembangan kelembagaan wisata terintegrasi	Pengelolaan	Pengelolaan	MoU antar agen wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Pembentukan wadah komunikasi antar pelaku wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Pembentukan lembaga pengelolaan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Pengembangan alternatif skema pendanaan wisata terintegrasi	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
	Kepastian Pendanaan	Skema Pendanaan	Skema sponsor event pariwisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Pemberian intensif dan disinsentif pada agen wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Mekanisme investasi perusahaan pariwisata pada lahan lokal	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Dorongan investasi Pemerintah dalam dana pemasaran	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
	Integrasi Sistem Biaya	Visitor Experience	Scaling-Up sanggar budaya eksisting	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Hibah inovasi visit experience berbasis bisnis berkelanjutan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X		
			Standarisasi dan optimalisasi proses keuangan sektor wisata	Kawasan Banten Lama dan Desa	PEMDA	X	X	X		
						X	X	X		

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
							X	X		
							X			
(S1 - S2 - T3) Pengembangan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana	Peringatan dini dan pengelolaan risiko bencana	Teknologi Peringatan Dini	Peringatan dini	Wisata Kampung Baduy						
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X			
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X			
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X			
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X			
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BMKG	X	X	X		
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BMKG	X	X			
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BMKG	X	X	X		
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BMKG	X	X	X	X	
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BMKG	X	X	X		
	Peringatan dini dan pengelolaan risiko bencana	Remote Sensing	Pengenalan peta elektronik risiko bencana pada masyarakat	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BMKG	X	X	X		
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BMKG	X	X			
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BNPB	X	X	X		
				Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	BNPB	X	X	X	X	

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Pembangunan bangunan pemecah ombak	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung	KEMEN PUPR	X	X	X	X		
		Kerentanan Lokasi	Refocusing pelarangan bangunan di sempadan pantai	KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung	ATR/BPN	X	X	X	X		
			Pembangunan pos pengaduan wisatawan	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X	X		
		Keamanan	Penguatan kesadaran publik	Kawasan Banten Lama dan Desa Wisata Kampung Baduy	PEMDA	X	X	X	X		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.3. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kawasan Perdesaan Tertinggal

Pengembangan kawasan perdesaan tertinggal dilakukan dengan: (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian melalui peningkatan sarana & prasarana pertanian dan penguatan kelembagaan; (2) Pengembangan sistem konektivitas dan jalur logistik untuk memperlancar lalu lintas barang dan orang; (3) Pengurangan risiko bencana untuk menjaga ketahanan wilayah Banten Selatan; serta (4) Peningkatan layanan dasar permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Mendukung Kawasan Perdesaan Tertinggal

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I					
							2025	2026	2027	2028	2029	
(S1 - S5 - T2) Peningkatan produktivitas komoditas pertanian melalui peningkatan sarana & prasarana pertanian dan penguatan kelembagaan	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Infrastruktur Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi	Pembangunan Daerah Irigasi	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	X	X	X	X	X	
			Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Daerah Irigasi	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	X	X	X	X	X	
		Tampungan Air	Jaringan Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	X	X	X	X	X	
				Pembangunan Bendungan	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	X	X	X	X	X	
			Alat dan mesin pertanian	Teknologi Budidaya Pertanian	Pengembangan alat dan mesin untuk pembenihan, penanaman, pemupukan, pemanenan, dan penggilingan	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	X
					Penerapan teknologi SDA untuk teknik penyiraman tanaman	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	X
	Penguatan kelembagaan	Pembenihan dan Pemupukan		Optimalisasi penggunaan perangkat teknologi informasi	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	X	X	X	X	X	
				Peningkatan produksi benih unggul bersertifikat	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	X	X	X	X	X	
				Pemberdayaan penangkar benih	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	X	X	X	X	X	
		Akses Pembiayaan dan Kelembagaan Pertanian		Penerapan inovasi pestisida secara efektif dan efisien	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	X	X	X	X	X	
				Pemberian kredit mikro	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	X	X	X	X	X	
				Peningkatan akses perlindungan usaha pertanian	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	X	X	X	X	X	
				Kelembagaan dan Kelembagaan Pertanian	Pembentukan lembaga berbasis masyarakat petani	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
(S1 - S4 - T1 - T3) Pengembang an sistem konektivitas dan jalur logistik untuk memperlanc ar lalu lintas barang dan orang		Kapasitas SDM	Edukasi	Bimbingan dan penyuluhan SDM Pertanian	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	x	x	x	x	x
				Percepatan penyelesaian Jalan Tol Serang - Panimbang	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x			
		Jalan Umum	Jalan Tol	Integrasi Jalan Tol dengan Jalan Nasional / Jalan Kabupaten	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
				Pembangunan jalan radial menuju Pansela Banten	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
	Peningkatan konektivitas	Jalan Pertanian	Jalan Non Tol	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Provinsi/Kabupaten	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
				Peningkatan jalur logistik dan orang	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
				Peningkatan jalan dari pusat produksi menuju tempat pengumpulan	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	x	x	x	x	
				Peningkatan jalur distribusi hasil pertanian menuju pasar	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	x	x			
	Penguatan logistik pertanian	Logistik Pertanian	Jalan Usaha Tani	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	x	x	x		
				Pembangunan area kumpul angkutan barang	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMNHUB	x	x	x		
(S4 - T4 - T5) Pengurangan risiko bencana untuk menjaga ketahanan wilayah Banten Selatan	Penguatan logistik pertanian	Logistik Pertanian	Distribusi Hasil Pertanian	Pembangunan pergudangan hasil pertanian	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	x	x	x		
				Penyediaan angkutan hasil pertanian	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMANTAN	x	x	x		
				Pengembangan platform penyebaran informasi peringatan bencana	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x		
				Penentuan assembly point	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x		
	Peringatan dini dan pengelolaan risiko bencana	Teknologi Peringatan Dini	Early Warning Mechanism	Kolaborasi dengan BMKG	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x		
				Pengembangan sistem informasi manajemen risiko bencana	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x	x	x
				Pengenalan peta elektronik risiko bencana pada masyarakat	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BMKG	x	x	x		
				Pembangunan bangunan penahan longsor tanah	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BNPB	x	x	x	x	
	Manajemen Risiko Bencana	Manajemen Risiko Bencana	Kerentanan Lokasi	Refokusing pelarangan bangunan di zona rawan bencana	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	BNPB	x	x	x	x	x
				Penanaman pohon di lokasi rawan longsor	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	x	x	x		

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	TAHAP I				
						2025	2026	2027	2028	2029
(S3 - T1) Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat			Penguatan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	PEMDA	x	x	x	x	x
		Sanitasi	Pembangunan IPAL	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
			Pembangunan TPA	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	x
	Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman	Air Minum	Pembangunan Pamsimas	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
			Pembangunan SPAM dan Jaringan Perpipaan	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
		Air Baku	Pembangunan Intake	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x		
			Pembangunan Jaringan Transmisi	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x	x	x	
	Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman	Perumahan	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMEN PUPR	x	x			
			Pembangunan Rumah Sakit/Puskesmas	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KEMENKES	x	x			
	Peningkatan sarana pelayanan umum	Listrik	Pembangunan/Pengembangan Jaringan Listrik di wilayah desa sangat tertinggal	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	ESDM	x	x	x		
			Pengembangan fasilitas internet di kawasan desa sangat tertinggal	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KOMINFO	x	x	x		
		Telekomunikasi	Pembangunan/Pengembangan jaringan BTS	Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	KOMINFO	x	x	x		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Bab ini berisikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW, antara lain dengan melakukan pengamatan terkait perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW selanjutnya.

9.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam menyiapkan dokumen RPIW, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2. Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/ implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan *output* (infrastruktur terbangun), *outcome* (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), *benefit* (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), *impact* (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW
 - a. Pemantauan tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per tahun).
 - b. Pemantauan lima (5) tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW
 - a. Evaluasi tahunan (*output dan outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
 - b. Evaluasi lima (5) tahunan (*benefit, impact, dan keberlanjutan*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.



www.pu.go.id